

Politik Identitas Etnik

Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik



Gustiana Kambo

Politik Identitas Etnik:
Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik

Politik Identitas Etnik
Sebuah Kajian Konstruktivis
dalam Tradisi Interaksi Simbolik

Gustiana Kambo

Penerbit



Politik Identitas Etnik

Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik

Penulis

Gustiana Kambo

Tata Letak dan Desain Sampul

Muhammad Ihlusul Amal

ISBN 978-979-530-377-0

Cetakan I 2021

Penerbit

Unhas Press

Keanggotaan

IKAPI Nomor: 002/SSL/01 dan APPTI Nomor: 005.026.1.03.2018

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan
HP/WA: +62 8229 9555 591 — Email: unhaspress@gmail.com
Laman: unhaspress.unhas.ac.id

Hak Cipta ©Gustiana Kambo. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dukungan yang sangat besar dari segenap kolega menginspirasi penulis untuk membukukan Disertasi (Tahun 2007) dari Program Doktor Ilmu Sosial dalam Peminatan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Disertasi yang dihasilkan merupakan gagasan pemikiran yang didasarkan atas hadirnya fenomena politik identitas etnik dalam ruang otonomi daerah yang tidak bisa dibendung pada saat itu.

Otonomi daerah telah memberi tempat yang baik bagi sebagian etnik untuk menunjukkan identitas politiknya. Identitas politik etnik teridentifikasi dikonstruksi oleh segelintir elite yang melakukan tindakan pada pengupayaan kepentingan wilayah etnik. Sebagian elite memandang etnisitas sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, persaingan untuk memperoleh sumber daya, menciptakan solidaritas dan kebersamaan, mengukuhkan dan memperkuat identitas, serta membedakan dengan kelompok etnik yang lain.

Buku yang berjudul “Politik Identitas Etnik” (Sebuah Kajian Konstruktivis dalam tradisi Interaksi Simbolik) menyajikan kajian ilmiah yang dalam pada terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengatasnamakan masyarakat Mandar untuk mendapatkan kembali (*re-invented*) hak-hak kepemilikan etnik dan hak kepemilikan sejarah. Bertitik tolak dari hal tersebut, bahwa pemikiran, perilaku dan tindakan komunitas etnik Mandar, khususnya yang dibangun elite bertujuan untuk memproduksi kesadaran aktif politik etnik sebagai bentuk *project identity*.

Project identity pada komunitas etnik Mandar menghasilkan dua kesimpulan umum, yaitu: pertama, identitas yang dikonstruksi oleh elite sangat jelas bertujuan untuk menjaga dan mengamankan kehormatan etnik, dalam hal ini etnik dijadikan sebagai sumber identitas masyarakat Mandar. Identitas Mandar menjadi sangat penting sebagai pemersatu ketika diperhadapkan pada kondisi marginalisasi etnik dalam memperoleh akses politik dan ekonomi. Identitas Mandar dibangun dengan merespons kembali elemen kecintaan dan simbol utama seperti pada masa kejayaan Mandar pada ke-16 yang lalu. Kedua, konstruksi yang dilakukan oleh elite merupakan indikasi politik identitas yang menempatkan Mandar sejajar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan. Artinya, terbentuknya propinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Mandar sama dengan etnik lain yang memiliki komunitas sendiri yang patut untuk diperhitungkan. Dengan demikian konstruksi identitas Mandar merupakan pengakuan etnik dan politik sekaligus.

Secara teoritis, perspektif yang penulis gunakan dalam memahami realitas politik etnik Mandar adalah perspektif konstruktivis, bahwa segala tindakan komunitas etnik Mandar dalam hubungannya dengan etnik lain dapat diterjemahkan melalui perspektif interaksi simbolik. Teori ini berusaha memahami perilaku manusia

sebagai proses keterlibatan individu dengan mempertimbangkan ekspektasi orang yang berinteraksi dengan mereka, sekaligus memahami makna dibalik perilaku interaksi tersebut. Sementara itu dalam rangka pengupayaan identitas, dalam penelitian ini dimotori oleh elite (baik elite intelektual maupun tradisional) dapat ditelusuri melalui pemikiran Bradley, Hale dan Castell, bahwa tindakan elite tersebut sebagai bentuk keinginan kaum minoritas dan termarginal untuk memperoleh hak-haknya.

Kajian ini menghasilkan pemahaman teoretik tentang perilaku elite yang mengatasnamakan etnik untuk mendapatkan kembali (*re-invented*) identitas yang dianggap terkubur. Etnisitas kenyataannya meleburkan saling silang kepentingan politik dan etnik, karena keduanya merupakan legitimasi untuk memperoleh identitas. Pemahaman seperti ini dalam studi identitas etnik dikategorikan dalam perspektif konstruktivis-interpretivis (*instrumentalis*) (Bradley, 1997; Hale, 2004; Castell, 2004). Inti dari perspektif ini menyebutkan bahwa identitas etnik adalah sesuatu yang muncul tidak secara alamiah, karena keberadaannya merupakan sumber politik sekaligus sebagai instrumen artikulasi politik demi kepentingan individu dan kelompoknya.

Rujukan kajian ini juga mengadopsi *literature review* beraliran konstruktivis. Disimpulkan, bahwa sumber identitas dapat diperoleh dari berbagai latar belakang antara lain: agama, ras, kultur, profesi ataupun etnik. Kecenderungan identitas dari sumber etnik merupakan salah satu pemicu timbulnya konflik, bahkan dapat dimanfaatkan dalam mengejar kekuasaan rezim tertentu untuk kebebasan etniknya. Sementara dalam kajian ini, identitas yang dimunculkan oleh etnik Mandar diupayakan dengan damai dan tidak menimbulkan konflik, walaupun pada akhirnya juga mengejar kekuasaan etnik, akan tetapi lebih mengedepankan pada pengakuan wilayah etnik dan

politik yang tidak disertai dengan rezim kekuatan Mandar. Kajian ini jelas sangat memperlihatkan peneguhan yang kuat pada pemikiran teritorialisasi identitas sebagai pembentukan daerah administratif dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan melalui perspektif konstruktivis.

Terselesainya karya ilmiah ini menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis. Dalam penyelesaiannya semua berkat ke-Ridho-an dari Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyang. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam menyempurnakan karya ilmiah ini, baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran. Sulit membayangkan, karya ini dapat selesai jika tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Sehingga melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan buku ini yang bersumber dari disertasi, terutama pada Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D., ucapan terima kasih yang mendalam selaku Promotor, yang di tengah-tengah tugas beratnya sebagai wakil ketua KPU dan di sela-sela waktu mengajarnya sebagai dosen Unair, beliau selalu intens membimbing dan mengarahkan pikiran penulis, walaupun mungkin beliau terkadang harus sabar menghadapi penulis yang selalu mengejanya.

Tak terhingga terima kasih penulis ucapan sepenuhnya kepada Ko-promotor (1) Daniel T. Sparringa, Ph.D, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dan kritikan serta memberi literatur-literatur pada penulis. Beliau begitu berarti, karena berkat beliaulah sehingga penulis memberanikan diri untuk mendaftar kembali melanjutkan studi ke jenjang S3. Segala motivasi, dukungan dan rekomendasi telah diberikan kepada penulis, adalah sangat bahagia penulis menjadi murid beliau. Ada nasihat beliau yang selalu penulis ingat, “Gusti, ada saatnya cobaan itu begitu berat.

Kalau kau bisa mengatasinya, kau akan bertambah kuat. *You'd better take it easy for a while. All the best for you*”.

Demikian pula secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Ko-promotor (2) Dr. Armin Arsyad, M.Si, (yang saat itu belum bergelar Profesor), yang demikian tenang menghadapi penulis yang terkadang lemah dan putus asa. Terkadang beliau sangat keras saat membimbing dan mengarahkan pikiran penulis, selalu mengingatkan untuk segera memperbaiki penulisan jika telah mendapat bimbingan dari Promotor maupun Ko-promotor.

Terima kasih kepada para dosen pengajar Ilmu Sosial Pascasarjana Airlangga, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (almarhum), M.P.A, Prof .Dr. Hotman Siahaan, Dede Oetomo., M.A, Ph.D, Dr. Edi Suhardono, M.A., Dr. H.J. Glinka, Dr. FX. Eko Armada Riyanto yang telah memberikan pijakan teori dalam ilmu sosial, juga kepada dan Prof. Dr. L. Dyson (almarhum), yang tidak henti-hentinya mengingatkan penulis agar tetap sabar dan selalu menjaga kesehatan selama menyelesaikan studi, penulis terkesan dengan segala kebaikannya.

Rasa terima kasih dan penghargaan penulis haturkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Idrus Paturusi (pada saat itu) dan Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Prof. Dedy Tikson, Ph.D. (pada saat itu) yang mengizinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Hanya dengan izin dan bantuan beliau sehingga penulis dibebaskan dari segala tugas-tugas akademik. Terkhusus pula ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA (almarhum) dan Prof. Dr. Kausar Bailusy, (almarhum) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi staf pengajar pada FISIP Unhas. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada banyak tokoh Komite Aksi Pembentukan Propinsi Sulawesi Ba-

rat (KAPP-Sulbar) dari ketua sampai anggota, dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Secara khusus karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua Ayahanda Muhammad Anwar Kambo (Almarhum) dan Ibunda Rosidah Sardi (almarhumah) yang selama hidupnya tiada henti-hentinya selalu mendoakan kesuksesan dan kebahagiaan pada anaknya. Walaupun beliau berdua tidak sempat menemani dan menyaksikan keberhasilan penulis, akan tetapi segala petuah, cinta dan kasih sayangnya, selama ini telah menemani penulis. Demikian juga terima kasih yang tulus kepada kakak-kakakku dan adikku yang telah memberikan semangat dan dorongan.

Makassar, 13 Agustus 2021

Penulis

Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si

Politik Identitas: Sebuah Karya dalam Kajian Mikro

Terucap syukur menyambut terbitnya buku yang berjudul “Politik Identitas Etnik” (Sebuah Kajian Konstruktivis dalam tradisi Interaksi Simbolik) sebuah karya yang terlahir dari realitas politik identitas etnik Mandar dalam membentuk Provinsi Sulawesi Barat. Karya Disertasi Gustiana A. Kambo yang diterbitkan dalam sebuah buku mengulas lebih spesifik kehidupan berpolitik masyarakat etnik Mandar di tengah polarisasi etnisitas yang dihadirkan oleh sistem politik (Provinsi Sulawesi Selatan), buku ini merupakan hasil penelitian dari Disertasi untuk memperoleh gelar doktor (Dr) Ilmu Politik pada Universitas Airlangga tahun 2007.

Sebagai salah satu pembimbing (ko-promotor 2), dapat disampaikan bahwa gagasan dan pemikiran yang disajikan dalam buku ini merupakan telaah ilmiah yang kompleks, baik dalam latar/settingnya, informasi dan data nya serta kedalaman perdebatan teorinya. Buku ini menuturkan beberapa fenomena politik dalam praktik political historis melalui persepektif konstruktif. Etnik Mandar secara historis pernah berjaya pada masa kerajaan Balanipa, membentuk konfederasi dengan 14 kerajaan lain di wilayah Mandar dengan se-

butan *Pitu Ba'bana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*. Pada masyarakat Mandar, kejayaan etnik di hadirkan kembali (*re-invented*), yang sebelumnya bergabung dalam wilayah Sulawesi Selatan, dan berusaha mengukuhkan kehormatan etnik dan sejarah dengan melepaskan diri dari provinsi induknya (Sulawesi Selatan) dan membentuk provinsi baru, yaitu provinsi Sulawesi Barat.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menyimak sejumlah ulasan dan pemahaman atas data/fakta yang menarik dan unik, penekanan pada kajian yang bersifat mikro menghadirkan perdebatan teori beberapa konsep dan teori, terkhusus pada teori interaksi simbolik dari Mead dan Blumer, menunjukkan bahwa karya ini mengkolaborasi hubungan ilmu politik dengan berbagai ilmu yang lain, baik itu sosiologi dan antropologi.

Kepada saudari Gustiana A. Kambo, disampaikan terima kasih, dan apresiasi atas gagasan dalam menerbitkan buku ini, apa yang dihadirkan dalam karya ini yang merupakan hasil dari disertasinya merupakan ekspose posisi pemikiran filosofis baik teoretik-ontologiknya, metodologik-epistimologi dan/atau etik-aksiologik ilmuwan di bidang tema permasalahan tertentu.

Semoga buku ini, dapat memperkaya wawasan pengetahuan bagi para pembacanya atas dinamika kehidupan politik, dalam kajian politik identitas di Indonesia. Penguatan wawasan, yang semoga mendorong sebagian ilmuwan juga bersemangat menulis dan menerbitkan buku dengan menghadirkan berbagai fenomena politik yang lain yang akan memperkaya khazanah ilmu politik baik dalam kajian makro dan mikro.

Makassar, 18 Agustus 2021

Prof. Dr, Armin Arsyad, S,IP, M.Si.

“Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Politik Identitas: Sebuah Karya dalam Kajian Mikro	xi
Daftar Isi	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1. Menuju Pemahaman Pemikiran Identitas Etnik	1
1.2. Alasan Kontekstual Etnisitas Orang Mandar	6
1.3. Studi Pendahuluan Tentang Politik Identitas	13
1.4. Kontribusi Permasalahan	18
Catatan	19
2 Mengenal Konsep Teoritik dari Kajian	23
2.1. Melalui Perspektif Konstruktivitas	23
2.2. Konstruktivitas dalam tradisi Interaksi Simbolik	28
2.3. Pemikiran Tentang Etnisitas, Identitas dan Elite	38
Catatan	81

3	Penggunaan Metodologi dalam Perspektif Konstruktivis Interaksi Simbolik	85
3.1.	Rancangan Penelitian	86
3.2.	Subjek dan Proses Penetapannya	88
3.3.	Pengumpulan Data	92
3.4.	Analisis data	96
4	Etnik Mandar di Pulau Sulawesi	101
4.1.	Asal Usul Etnik di Sulawesi Selatan	101
4.2.	Etnik Mandar dalam Bingkai Sejarah	105
4.3.	Lita' Mandar di Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Uluuna Salu	110
4.4.	Konstruksi Afdeling Mandar ke Provinsi Sulawesi Barat	118
4.5.	Sekilas Wilayah Daerah Mandar	130
4.6.	Nilai-nilai Budaya ke-Mandaran	137
	Catatan	144
5	Proses Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat Sebagai <i>Project Identity</i> dari Konstruksi Sosial	147
5.1.	Tahapan Sejarah Konstruksi Identitas Etnik Mandar	148
5.2.	Proses Konstruksi Identitas Etnik Mandar dan Aktor yang Berperan	162
5.3.	Pemahaman Etnik Mandar terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite Penerus Konstruksi	194
5.4.	Pemahaman Etnik Lain Terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite Penerus Konstruksi	199
	Catatan	206

6	Politik Identitas dan Provinsi Sulawesi Barat	207
6.1.	Pemahaman Hasil Penelitian	208
6.2.	Politik Identitas Etnik Mandar	214
6.3.	Interaksi Simbolik Memahami Konstruksi Identitas Etnik Mandar	239
6.4.	Interaksi simbolik Blumer dalam Memahami Konstruksi Identitas Etnik Mandar	246
	Catatan	253
7	Simpulan dan Implikasi Teoretik	255
7.1.	Simpulan	255
7.2.	Implikasi Teoretik	261
7.3.	Implikasi Temuan bagi Politik Lokal di Indonesia	269
	Daftar Pustaka	273

1

Pendahuluan

1.1. Menuju Pemahaman Pemikiran Identitas Etnik

*W*alaupun bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru, studi tentang politik identitas menarik perhatian para ahli ilmu sosial belakangan ini (Jenkins, 1996; Castell 2004), terutama setelah terjadinya konflik yang melibatkan kekerasan di antara berbagai kelompok etnik dan agama yang berbeda menghasilkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Konflik di antara kelompok etnik Tutsi dan Hulu di Afrika, Bosnia dan Serbia di Balkan, adalah dua contoh fenomenal yang memperlihatkan dengan jelas keterlibatan praktik politik identitas dalam wajah yang paling jelas, brutal, dan destruktif.

Sparringa (2007) menyebutkan bahwa kecenderungan akan berkembangnya politik identitas sama sekali tidak terkait dengan sistem politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam sistem demokrasi sekalipun. Di Indonesia kecenderungan itu terlihat lebih jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Dalam pandangannya (2007:14), praktik politik

identitas di negeri ini dapat dikenali melalui berbagai bentuk, dari yang samar-samar hingga agak jelas. Pembentukan partai dan organisasi yang berbasis Islam yang memperjuangkan formalisasi Syariah Islam dan pembentukan daerah administratif setingkat provinsi dan kabupaten atas dasar ikatan etnik di beberapa wilayah di luar Jawa merupakan indikasi akan terjadinya kecenderungan itu.

Dalam kasus yang terakhir, pembentukan daerah-daerah administratif di beberapa wilayah memperlihatkan sekaligus terjadinya teritorialisasi identitas—sebuah konsep yang dipakai untuk merujuk berkembangnya fenomena politisasi identitas etnik —(kadang bercampur dengan agama atau denominasi kultural lainnya)— untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru. Teritorialisasi identitas sering merupakan awal dari *re-grouping* kultural berbasis wilayah yang dalam praktiknya dapat mengambil wajah terbentuknya daerah otonom, bahkan negara baru. Dalam kasus terakhir, terbentuknya Pakistan dari India (1947) dan Bangladesh dari Pakistan (1972) adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan.

Sebagai sebuah definisi umum, politik identitas merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok—sering atas dasar etnik, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya—yang merupakan kontras terhadap praktik yang berbasiskan kepentingan (Sparringa, 2007: 12).¹ Politik identitas (dalam buku teks sering disebut dengan dua terminologi yang saling dipertukarkan: “*identity politics*” atau “*politics of identity*”) merujuk pada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering kali disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan

yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif (Halls and Gay, 1996; Calhoun: 1994).

Dalam perkembangannya, studi politik identitas mengundang minat yang mendalam di kalangan para ahli teori sosial dari perspektif yang beragam. Kaum *post-structuralist*, semisal Foucault (1976, 1979, 1981, 1982), menfokuskan analisisnya pada politik tubuh serta relasi kekuasaan sebagai basis awal dalam memahami politik identitas. Sementara itu, para ahli ilmu sosial berperspektif konstruktivis-interpretivis percaya bahwa identitas adalah hasil sebuah konstruksi sosial. Walaupun cukup banyak varian dari perspektif ini, pada umumnya mereka percaya bahwa identitas adalah sumber dan sekaligus bentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjektif dan inter-subjektif. Oleh karena itu, identitas adalah hasil sebuah proses dan praktik sosial. Dua perspektif lainnya, yakni primordialis dan instrumentalis memiliki pandangan yang berbeda tentang identitas. Perspektif primordialis percaya bahwa identitas adalah sebuah “penanda” yang diperoleh melalui asal usul keturunan dan karena itu bersifat “*given*”. Sedang perspektif instrumentalis percaya bahwa identitas adalah hasil mobilisasi dan manipulasi (Bradley, 1997; Brown, 2000: 5; Sparringa, 2007: 3).

Politik identitas, oleh sebagian ilmuwan sosial lainnya diistilahkan dengan biopolitik dan politik perbedaan sebagai nama lain dalam menerjemahkan permainan dan pergulatan perbedaan identitas (Foucault, 1988; Heller, 1995:ix; Beyme, 1996:122).² Menurut Alcoff dan Mendieta (2003) politik identitas berfokus pada kajian tentang perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematik gender, feminisme dan maskulinisme. Selain itu juga karena pertentangan yang muncul dalam masyarakat karena perbedaan agama, kepercayaan dan bahasa atau pada persoalan politik etnik yang berbeda fisik dan karakter fisiologis.

Sementara itu, persoalan identitas etnik dalam kajian politik mengacu pada kelompok etnik atau minoritas etnik. Penafsiran kelompok etnik sendiri dapat mencakup bangsa etnik (*ethnic nation*), sedangkan pada wacana kontemporer dipakai dalam nuansa yang lebih sempit. Dalam konteks ini, kelompok etnik (diwakili oleh kaum minoritas) biasanya tidak memiliki teritori sendiri dan tujuan mereka tidak menginginkan determinasi kebangsaan. Akan tetapi, tujuan difokuskan pada pencarian proteksi dan kemajuan kelompok, khususnya bagi individu dalam kelompok pada suatu wilayah negara (Kellas, 1998:119). Nuansa seperti itu merupakan bentuk gerakan “kembali ke” dunianya, kearifan tradisional, lokalitas, dan sebagainya. Hak-hak politik yang dituntut tidak sampai pada taraf “independen” (separatisme) akan tetapi lebih banyak pada kebebasan berekspresi dan bersosialisasi.

Politik identitas menurut Bradley (1997: 137), merujuk pada suatu pemikiran bahwa identitas terkonstruksi akibat ketidaksetaraan (*inequalities*), divisi sosial (*social divisions*) dan perbedaan (*difference*).³ Ilmuwan ini menitikberatkan identitas pada empat aspek, yaitu; kelas, gender, usia dan ras (termasuk etnisitas). Ketidaksetaraan atas sumber identitas menurutnya dapat memicu timbulnya separatisme dan secara praktis memudahkan konflik, sering kali konflik yang terjadi menyebabkan identitas mengabur. Dalam situasi identitas yang demikian, politik perbedaan menjadi persoalan yang mendasar. Fenomena tersebut dapat di temukan dalam situasi masyarakat yang multikultur dan multietnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antar etnik yang berbeda biasanya menjadi penting terutama menjalin hubungan etis, kerangka hubungan ini salah satunya dapat dilakukan melalui sikap toleran politik (*political tolerance*).

Fenomena konstruksi identitas etnik di beberapa negara mulai terasa. Pada umumnya, fenomena tersebut didasarkan atas disinte-

grasi dari kelompok etnik atau kelompok identitas untuk memisahkan diri. Contohnya Pakistan yang awalnya merupakan bagian dari India memisahkan diri karena alasan etnik dan agama. Di samping itu pula, kelompok etnik separatisme Moro di Filipina mengklaim Mindanao sebagai wilayah etnik mereka yang saat ini berjuang melepaskan diri dari Filipina, dan yang terakhir etnik Kasmir di India, dan Kurdi di Irak.

Politik *ethno-national* juga terjadi, sebagai contoh, gerakan Bougainville untuk lepas dari Papua New Guena, merupakan fenomena umum terjadi di negara berkembang yang baru merdeka, seperti juga terjadi di Myanmar dan India. Pada tahun 1972 diperkirakan 19 negara di dunia memiliki masalah *ethno-national*. Dasar dari gerakan untuk pemisahan tersebut karena perbedaan daerah, bahasa dan nilai-nilai budaya daerah dan biasanya merupakan gerakan menentukan nasib sendiri (*self determination*).

Fenomena lain yang juga dipicu oleh spirit yang sama, dapat dilihat dari keruntuhan Uni Soviet yang terpecah menjadi beberapa negara, dan memperoleh kemerdekaan. Demikian juga terjadi di Fiji, pertentangan yang berlatar belakang etnik, agama, dan budaya memicu berbagai tindak kekerasan di mana perlawanan etnik terhadap dominasi etnik menggunakan kekuatan militer. Selain itu kekuatan primordial yang dibarengi nuansa politik dan kepentingan ekonomi, contohnya gerakan Basques di Spanyol dengan memosisikan bahasa dan simbol-simbol budaya layaknya seperti bendera. Gerakan politik kelompok Basques ini memiliki tujuan lepas dari Spanyol dan berusaha untuk memperoleh kemerdekaan.

Di Indonesia fenomena seperti di atas, walaupun bukan fenomena baru, lebih menguat dalam tataran *self determination* dari berbagai kelompok etnik. Contohnya, gerakan pemberontakan di Sulawesi Selatan Permesta 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) 1950,

pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1962 dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976. Sementara itu, fenomena yang berlatar belakang demikian saat ini semakin lama semakin memudahkan lahirnya konflik antar etnik khususnya dalam konteks kultural dan struktural, Contohnya di Kabupaten Sambas antar etnik Melayu dan Madura, Sampit antar etnik Dayak dan Madura, di Ambon antar etnik Bugis, Buton, Makassar dengan penduduk asli, di Poso, dan terakhir di Mamasa Sulawesi Barat.⁴

1.2. Alasan Kontekstual Etnisitas Orang Mandar

Secara umum, buku ini melihat kecenderungan politik identitas etnik. Diarahkan pada munculnya etnik tertentu untuk membentuk provinsi dan/atau kabupaten/kota. Keinginan pemekaran ini, didasarkan oleh tuntutan untuk mendapat pengakuan etnik dan pengakuan politik. Salah satu etnik di Sulawesi Selatan yang telah membentuk provinsi Sulawesi Barat adalah etnik Mandar. Keinginan etnik Mandar membentuk provinsi baru yang lepas dari provinsi induknya didasarkan atas 3 pertimbangan. Pertama, etnik Mandar ingin mendapat pengakuan politik dengan pemberian kesempatan kepadanya untuk membentuk provinsi tersendiri. Kedua, etnik Mandar ingin mendapat pelayanan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, etnik Mandar dalam sejarah pemerintahan Belanda adalah salah satu afdeling yang dikenal dengan afdeling Mandar. Pembentukan afdeling itu dilakukan karena pada masa itu etnik Mandar merupakan persekutuan *amardiang* (kerajaan) yang berdiri sendiri.⁵

Dalam pandangan orang Bugis-Makassar,⁶ wilayah Mandar adalah wilayah yang merupakan bagian Tana Luwu' dan Ware' sebagai negara Bugis yang tertua dan meliputi semua negeri Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar (Latoa, 1985: 400). Dengan demikian

Mandar dianggap sebagai wilayah negara Bugis besar yang tercipta dari negeri ButtaGowa. I Manyumbangi (Todilaling) —anak raja Napo— menghabiskan masa remajanya dan bekerja sebagai panglima perang di Kerajaan Gowa. Dalam perkembangannya Todilaling membentuk kerajaan Mandar yang disebut kerajaan Balanipa (Rahman, 1984:48). Ada sesuatu nilai yang tetap menjadi landasan terpilihnya seorang pemimpin di Balanipa, yaitu nilai kepribadian seseorang dalam memimpin kaumnya. Todilaling diangkat sebagai petugas ada' (aturan adat), yang menjalankan suatu penugasan untuk menyelenggarakan kekuasaan di bidang politik pemerintahan sebagai *mar'adia* (raja) yang bergelar *arajang* (yang dibesarkan).

Kerajaan besar Mandar disebut sebagai *Pitu Ba'bana Binanga*, *Pitu Ulunna Salu*, yang berarti suatu wilayah yang terdiri dari tujuh kerajan di hilir sungai dan tujuh kerajaan di hulu sungai (Rahman, 1984: 46).⁷ Keempat belas kerajaan ini masing-masing diperintah oleh seorang raja dan hidup berdampingan secara harmonis dan saling bersinergi (*Sipamandar*). Kerja sama dan saling bersinergi itu dikukuhkan dalam beberapa kali ikrar yang disebut Ikrar Tammajarra dan terakhir bersumpah satu untuk bersatu di suatu desa yang bernama Luyo (Kecamatan Campalagian kabupaten Polmas).

Afdeling Mandar dalam perkembangannya terbagi menjadi tiga kabupaten, yaitu kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju. Tokoh-tokoh dari kabupaten tersebut mengusulkan agar wilayahnya menjadi satu provinsi. Tetapi realitas politik dan pemerintahan negara yang baru merdeka serta kemampuan sumber daya manusia telah menyadarkan para pejuang, bahwa untuk menjadi provinsi, diperlukan kesiapan dan lingkungan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang otonom. Hal ini merupakan resistensi terhadap hubungan kekuasaan yang bermasalah antara masyarakat dengan negara. Gambaran resistensi

internal ini diwujudkan dalam keinginan mengupayakan kembalinya Mandar sebagai etnik yang diakui secara politik.

Walaupun bukan fenomena baru, pengakuan secara politik adalah usaha memerangi marginalisasi etnik yang selama ini banyak dilihat di tataran birokrasi. Kekuasaan birokrasi provinsi lebih mengedepankan etnik Bugis yang berasal dari elit-elit politik dari keturunan bangsawan. Contoh kasus di saat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dua calon dari etnik Mandar yang dianggap mampu bersaing ternyata harus dikalahkan oleh satu calon dari etnik Bugis yang akhirnya menduduki dua kali periode kekuasaannya. Marginalisasi birokrasi ini memosisikan etnik Mandar sebagai etnik yang tertinggal dari etnik lain di Sulawesi Selatan. Padahal etnik Mandar sangat toleran terhadap etnik lain.⁸

Dominannya suku lain baik Bugis, Makassar dan Jawa dalam bidang ekonomi tidak dianggap oleh Mandar sebagai sebuah bentuk persaingan. Bagi Mandar, mereka adalah komunitas yang dapat memajukan daerah Mandar, sekaligus sebagai satu bangsa. Hal itu berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Smith (1970) bahwa masyarakat yang ditandai oleh pluralisme etnik cenderung akan terjadi kuatnya dominasi salah satu kelompok. Kematangan institusi dan sistem nilai antar kelompok merangsang timbulnya dominasi, terlepas dari sistem politik yang dianut dan kepercayaan akan kesadaran politik masyarakat yang sedang berkembang cenderung merupakan perangsang dan pengamanan kepentingan dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi perasaan primordial tetap kuat maka kepentingan pemerintah di atas muncul dalam bentuk kesukuan yang bercorak primordial.⁹ Dalam hal ini, jika realitas tersebut berlangsung lama dalam masyarakat multikultur, maka biasanya memicu reformasi, di mana terkadang menginginkan perubahan kondisi yang lebih kondusif.

Era reformasi menggulirkan keterbukaan kehidupan politik masyarakat, Mandar tergugah mengukuhkan wacana pembentukan provinsi sesuai UU No. 22 tahun 1999 (sebelum direvisi) tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan provinsi baru pada tataran lokal dianggap sangat realistis, hal ini berarti memberikan peluang dan kran baru kepada daerah untuk mandiri, selain itu diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat mengurangi eksploitasi, marginalisasi serta sentralisasi pemerintahan provinsi. Oleh karena itu, buku ini akan menggambarkan fenomena etnisitas terutama pada interaksi antaretnik yang dikonstruksi untuk menemukan (baca: menghadirkan) kembali identitas, dengan fokus pada etnik Mandar.

Ruang lingkup bahasan dalam buku ini adalah politik lokal dengan latar komunitas etnik Mandar yang menginginkan pembentukan provinsi. Kecenderungan komunitas ini mendorong masyarakat Mandar melakukan gerakan ke arah perubahan dan berusaha mendapatkan hak kesejarahan etnik, di mana hak tersebut menjadi bagian penting konstruksi identitas. Dalam hal ini, identitas etnik sangat penting untuk dikembalikan pada posisi sebenarnya, dengan tetap memegang nilai budaya ke-Mandar-an. Fenomena etnisitas ini semakin menguat ketika reaksi itu dimobilisasi oleh kelompok elite dan sebagai satu kekuatan grup tertentu. Kekuatan tersebut tergabung dalam paguyuban forum *Sipamandar*, yang anggotanya merupakan gabungan antara elit intelektual dan elit tradisional.

Gabungan elit tersebut, memelopori pembentukan Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-SULBAR) pada tanggal 9 september 1988 di Makassar. Komite ini terlahir dari hasil formatur lima yang dibentuk oleh forum Sipamandar, yaitu Husni Jamaluddin, Ma'mun Hasanuddin, H. Maksun Dai (Mamuju), H. Borahima (Polmas), dan Rahmat Hasanuddin (Majene). Hasil for-

matur ini kemudian menunjuk Rahmat Hasanuddin sebagai ketua Umum KAPP-Sulbar dan Drs. Naharuddin sebagai sekjen. Keduanya kemudian disertai tugas untuk membentuk kelompok kerja di masing-masing kabupaten, di mana ketuanya juga merupakan anggota forum *Sipamandar*.

Pengupayaan identitas Mandar yang dilakukan oleh KAPP-Sulbar, merupakan rangkaian dari tahap yang kelima, sebelumnya, fenomena seperti ini telah melewati perjalanan panjang dari tahap ke tahap. Tahap awal terjadi bulan agustus 1945 yang dipelopori oleh pejuang gerakan di daerah Mandar. Tahap kedua, agustus 1948 pada masa pemerintahan Negara Indonesia Timur. Tahap ketiga tahun 1950 saat itu terjadi pemberontakan Kahar Muzakkar dan wilayah Mandar juga terimbas, terisolasi dari pemerintahan provinsi dan pusat. Tahap keempat tahun 1966 dimulai sejak runtuhnya Orde lama di mana gerakan sosial ini telah melibatkan para mahasiswa, terakhir tahap kelima tahun 1998, zaman reformasi yang ditandai dengan terbukanya aspirasi yang menuntut perubahan politik dan pemerintahan, salah satunya adalah pemekaran wilayah.

Dalam perkembangannya, konstruksi identitas Mandar, diilhami dari elemen-elemen budaya,¹⁰ yaitu sistem nilai budaya yang terlahir dan berlaku dalam kerajaan Mandar Balanipa I. Sistem nilai tersebut mencakup dua hal penting, yaitu: (1) *maasayanni pa'banua* (kecintaan pada orang Mandar), bahwa segala sesuatu diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat, dan (2) *maasayanni lita'* (kecintaan pada tanah/negeri), yaitu menyelamatkan lita' (negeri) dari ancaman luar. Kedua kecintaan tersebut merupakan simbol sebagai *Mandar malab'bi*, sebuah stigmatisasi yang harus dimiliki sebagai sosok seorang Mandar dalam kehidupannya.

Pengangkatan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal ini dapat bersifat propaganda jika tidak memedulikan hak-hak masyarakat

lain, tegasnya, walaupun peningkatan kepercayaan diri di daerah sangat penting sebagai sarana membangun partisipasi masyarakat, kemungkinan pemahaman etnosentrisme menjadi perhatian. Dalam wacana provinsi baru keinginan untuk mandiri menjadi alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara pribadi, tokoh dan rakyat Mandar mengakui adanya alasan etnik, akan tetapi hal itu tidak dikumandangkan dan dibungkus rapi dengan alasan otonomi.

Etnik Mandar merasa tertimbun di bawah etnik Bugis dan Makassar, sehingga sejarah, kebudayaan serta sifat Mandar sudah agak memudar. Etnik Bugis, Makassar, dan Toraja sudah terkenal di Sulawesi Selatan, tetapi etnik Mandar sering dianggap hanya sebagai sebuah sub-grup dari kelompok orang Bugis. Walaupun kebudayaan etnik dan identitas lokal sempat diperkuat oleh pembentukan provinsi yang baru, kemunculan ketegangan etnik yang terencana di dalam wilayah Sulawesi Selatan sengaja dihindari. Karena itu, nama Mandar tidak terpilih sebagai nama provinsi baru, dan Sulawesi Barat dianggap lebih layak di wilayah yang sudah didiami oleh berbagai etnik, baik dari Sulawesi Selatan maupun di luar pulau itu (Danial, 2001), dan Mandar sendiri akan menjadi nama ibu kota provinsi Sulawesi Barat.

Upaya untuk menjelaskan fenomena di atas, secara teoretik menarik untuk dikaji. Dalam ilmu politik, fenomena seperti ini dikategorikan dalam studi politik identitas khususnya pada identitas etnik (Bradley, 1997; Haralambos, 2001: 929). Studi politik identitas etnik mengedepankan perilaku dan tindakan bermakna etnisitas mulai dari struktur tubuh, nama, bahasa, sejarah, asal-usul, kepercayaan, dan kebangsaan. Elemen tersebut yang memegang peranan dalam proses interaksi sosial dan politik. Dalam proses identifikasi etnik yang dicermati adalah kepentingan kelompok untuk menjaga,

mengamankan (*securitisation*) identitas mereka agar tetap eksis. Artinya etnisitas menjadi sumber kebertahanan suatu identitas.

Perdebatan teori etnisitas dikelompokkan dalam tiga perspektif (Hale, 2004: 459; Kuper dan Kuper, 2000: 309; Mathias Koenig, 1999), yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Pertama, perspektif primordialisme memandang bahwa kelompok etnik berakar pada kesadaran kultural yang diperoleh dari bekerjanya institusi paling dasar seperti keluarga, agama, bahasa, kewilayahan, kebudayaan dan organisasi sosial yang disadari secara objek sebagai hal yang “*given*” yang diwariskan secara turun temurun. Dalam hal ini, etnisitas berkembang sebagai lanjutan dari suatu kelompok etnik melalui *self contained process*.

Kedua, perspektif konstruktivis, dalam perspektif ini suatu identitas etnik dikonstruksi, diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok untuk memperoleh akses sosial dan politik. Mereka terlibat dalam politik dengan membangun simbol-simbol etnik yang didasarkan atas alasan praktis sebagai sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional dari segenap pihak.

Ketiga, perspektif instrumentalis lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok sosial disusun atas dasar etnisitas. Perspektif ini memandang etnisitas sebagai sesuatu yang membantu individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini terjadi pada kelompok minoritas yang berada pada posisi *extremely poor* dan/atau *powerless* sehingga membutuhkan kekuatan untuk promosi yang lebih tinggi. Dalam arti bahwa etnisitas merupakan respons atas perlakuan yang pilih kasih.

Mengikuti penjelasan perdebatan teori etnisitas, buku ini menjelaskan peneguhan dari perspektif konstruktivis, terutama dalam

memandang etnisitas sebagai ekspresi perasaan yang dibangkitkan untuk mempertahankan kedirian etniknya, sehingga dalam hal ini, etnik berfungsi sebagai pemisah dan pembeda dengan yang lain atau sebagai pengikat dalam satu komunitas etnik, dengan maksud agar identitasnya dapat dikenali dan dihargai.

1.3. Studi Pendahuluan Tentang Politik Identitas

Beberapa studi tentang identitas dan politik etnik menjadi bahan perbandingan untuk memperkaya perspektif ini, antara lain karya dari Elizabeth Morrel yang berjudul *Ethnicity, Art and Politics Away from the Indonesia Centre* (2000).¹¹ Kajiannya memaparkan iklim instabilitas pada konflik sosial dan ketidakadilan yang diekspresikan. Morrel melihat seniman sebagai satu komunitas yang terkemuka dalam mengartikulasikan kepedulian pemerintah pada masyarakat. Saat masyarakat mempertanyakan kedudukan ideologi, banyak di antara seniman menempatkan dirinya di garis depan untuk mewujudkan rekonsiliasi etnik dan agama. Didasarkan atas kekecewaan dan ketidakadilan yang berkepanjangan, serta frustrasi dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan situasi tersebut. Para pekerja seni mengadopsi sebuah pendekatan kultural untuk memunculkan tanggung jawab sosial.

Konstruksi identitas berdasarkan organisasi,¹² Benjamin Marquez menelorkan karyanya berjudul; *Choosing Sides: Constructing identities in Mexican-American social movement organizations* (2001) Marquez menawarkan bingkai konseptual dalam memahami proses formasi dalam suatu organisasi gerakan sosial minoritas. Ia mencoba mengembangkan suatu model formasi identitas yang diciptakan oleh *Mexican-American* organisasi yang menitikberatkan pada pemusatan atas penafsiran untuk menggabung tiga wacana yang berbeda yaitu: diskriminasi rasial, kultur dan kerugian ekonomi hegemoni.

Penelitian yang menyoroti permasalahan lokal tentang identitas etnik yang menimbulkan konflik antara lain dilakukan oleh Cathy A. Hoshour yang berjudul *Resettlement and Politicization of Ethnicity in Indonesia* (2001). Penelitian ini memusatkan perhatian pada persoalan implikasi pemukiman skala besar mengenai negosiasi identitas, perbedaan dan lokalitas politik. Secara khusus persoalan yang dikaji adalah peran alokasi nilai dalam negara yang dipolitisasi melalui kategori identitas etnis. Akibatnya setiap perhatian pada proses yang terletak antara perubahan yang terencana dan hasil-hasil nyata berdasarkan studi lokal yang mendalam terhadap satu daerah transmigrasi. Konflik etnis merupakan salah satu implikasi yang ditimbulkan atas pelaksanaan pembangunan ekonomi. Integrasi nasional yang dilaksanakan pemerintah, dilakukan melalui transmigrasi yang didasarkan atas kategori identitas etnis.

Hasil penelitian yang diangkat oleh Riwanto Tirtosudarmo mengulas persoalan etnisitas dari Kalimantan dengan fokus pada Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (2002).¹³ Penelitian ini melihat pada hubungan antara demografi, khususnya mobilitas penduduk atau migrasi dengan konflik. Hal itu merupakan sebuah persoalan yang masih harus dikaji secara sistematis. Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan indikasi kuatnya hubungan diantara keduanya. Apa yang disaksikan dalam lima tahun terakhir seolah-olah menegaskan bahwa akumulasi konfrontasi antara migran dan nonmigran yang di daerah-daerah meletus menjadi konflik etnis yang bersifat terbuka, sejalan dengan *euphoria* desentralisasi dan otonomi daerah. Fenomena itu menguatkan solidaritas etnis yang mendapatkan saluran baru dan di masa depan akan semakin memperkuat politik etnik.

Dalam memperkuat politik etnik, penelitian yang dilakukan Snyder (2000) dan Stockwell (2000) menggunakan simbol-simbol etnik. Simbol tersebut digunakan menjadi alasan praktis sebagai sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional. Kedua pakar itu menekankan peran elite dalam mengonstruksi identitas etnik melalui mobilisasi politik dan sumber daya ekonomi, Artinya dalam kompetisi untuk memperebutkan posisi, etnisitas itu direalisasikan oleh elite-elite politik untuk mengklaim suatu posisi dan keuntungan tertentu (Bell dalam Glazer dan Moynihan, 197: 168-169).

Mengikuti pandangan Bradley (1997, 137), menyebutkan bahwa konstruksi identitas dapat diakibatkan oleh empat aspek, yaitu; kelas, gender, usia dan ras (etnik). Menururnya keempat aspek tersebut terkadang mengakibatkan separatisme dan bahkan konflik yang muncul secara inheren pada suatu komunitas tertentu. Hal itu diasumsikan demikian, karena ke empat aspek tersebut menjadi alat pembeda dari setiap identitas, etnik merupakan sumber penting identitas dalam masyarakat dari pada dalam kelas. Dalam hal ini, identitas dapat memproduksi kesadaran aktif politik dari kelompok etnik. Etnik sebagai sumber identitas bergantung pada bagaimana pemanfaatannya secara politis untuk mengerahkan kelompok dan menyediakan ruang kesadaran atas kepemilikan etnik dan sejarah. Dengan demikian, Bradley mendukung bahwa untuk mendapatkan kepemilikan etnik dapat digunakan berbagai cara baik dengan menggunakan simbol-simbol etnik tertentu atau dengan memperkenalkan petanda etnik baru sebagai identitas.

Hasil penelitian di atas memperkaya khazanah konstruksi identitas, pada kenyataannya terdapat aspek lain sebagai sumber identitas, misalnya seni dan musik ataupun organisasi yang akhirnya juga mengasumsikan bahwa identitas menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pela-

ku konstruksi, baik secara damai dengan melibatkan negosiasi atau bahkan lebih keras dengan melibatkan pertentangan dan pertikaian, semuanya adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan mempertahankan identitasnya. Berikut disertakan risalah singkat yang memuat beberapa hasil penelitian terdahulu.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu Tentang Identitas

Peneliti/ Penulis, Tahun	Judul	Temuan
Elizabeth Morrel, 2000	<i>Ethnicity, Art and Politics Away from the Indone- sia Centre</i>	Seniman sebagai satu komunitas menempatkan dirinya digaris depan untuk mewujudkan rekonsialisasi etnik dan agama. Pekerja seni ini mengdopsi pendekatan kultural yang diekspresikan secara kreatif untuk memunculkan identitas dirinya sebagai tanggung jawab sosial.
Peter Wade, 2002	<i>Music and Formation Black Identity in Co- lumbia</i>	Memanfaatkan musik dan tarian sebagai penegasan akan pembentukan identitas hitam. Di Kolumbia masih ada tekanan dan pengerahan politik terhadap kelompok masyarakat sehingga musik dan tarian merupakan patokan dasar pemahaman rasisme dan formasi identitas rasial.
Benyamin Mar- quez, 2001	<i>Choosing Sides: Constructing Identities in Mex- ican-American Social Movement Organizations</i>	Pemahaman proses formasi di dalam suatu organisasi gerakan sosial minoritas. Organisasi ini mengembangkan suatu model formasi identitas yang diciptakan oleh <i>Mexican-American</i> organisasi yang menitikberatkan pada pemusatan atas penafsiran untuk menggabungkan tiga wacana yang berbeda yaitu: diskriminasi rasial, kultur dan kerugian ekonomi hegemoni.

Peneliti/ Penulis, Tahun	Judul	Temuan
Cathy A Hoshour, 2001	<i>Resettlement and Politicization of Ethnicity in Indonesia</i>	Fokusnya pada implikasi pemukiman terkait masalah negosiasi identitas dan lokalitas tradisional. Usaha untuk meningkatkan kesatuan nasional dan identitas nasional dapat hancur jika alokasi nilai didasarkan atas kategori etnik.
Riwanto Tirtosudarmo, 2002	Konflik Etnik: Belajar dari konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	Fokusnya melihat pada hubungan antar demografi, khususnya mobilitas penduduk migrasi dan konflik. Akumulasi konfrontasi antara migran dan nonmigran yang menimbulkan konflik etnik. Fenomena ini menguatkan solidaritas etnik yang akhirnya akan memperkuat politik etnik.
Parsudi Suparlan, 2000	<i>Ethnicity and Nationality among The Sakai: The Transformation of an Isolated Group Into a Part of Indonesian Society.</i>	Kesukubangsaan Orang Sakai merupakan resistensi struktur kekuasaan dengan menunjukkan potensinya dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnik untuk identitas diri, perolehan posisi dan perolehan sumber daya dalam hubungan sosial antaretnis. Program pemukiman di Muara Basung dan Sialang Rimbun menunjukkan orang Sakai mendefinisikan ulang kesukubangsaan sebagai identitas baru.
Robert Stockwell, 2000	<i>Democracy and Ethnic Conflict: A comparative Analysis of Fiji, Guyana, Mauritias and Trinidad</i>	Dalam proses demokratisasi di Guyana, Elite memainkan kartu etnik dengan ditandai mengakomodasi penonjolan atas simbol-simbol etnik, yang kemudian mengakomodasi dan mengkonstruksi rezim.

Dalam kajian ini, penulis menyoroti bagaimana identitas sebagai sebuah konstruksi sosial itu dipahami secara teoretik sebagai sebuah proses sosial dan politik yang mempertemukan penafsiran subjektif dan intersubjektif dalam kerangka yang tidak terpisah de-

ngan beroperasinya seluruh kompleksitas ideologi yang berbasiskan identitas, ras, agama, klas, gender, lokalitas, nasionalitas dan globalitas (Cohen and Kennedy, 2000; Alcoff and Mendieta, 2003).

1.4. Kontribusi Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas digambarkan bahwa identitas adalah sebuah konstruksi sosial yang di dalamnya melibatkan proses formasi dan transformasi yang tidak terpisah dari praktik sosial yang sangat erat dengan struktur dan relasi kekuasaan yang beroperasi melalui politik perbedaan, divisi sosial, dan ketidaksetaraan. Berpijak dari argumentasi itu, kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan pokok: Pertama, Bagaimanakah kelompok etnik Mandar mengkonstruksi identitas mereka? Apa sajakah yang menjadi elemen penting dari identitas etnik Mandar, dan bagaimanakah identitas itu penting bagi mereka secara politik dan sosial? Dan Kedua, Betulkah formasi identitas etnik Mandar merupakan sebuah *project identity* yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan provinsi Sulawesi Barat?

Catatan

- 1 Penting untuk dicatat di sini bahwa tidak semua politik identitas mengambil bentuk sebuah perjuangan pemisahan diri. Gerakan *gay* dan *lesbian*, kaum perempuan, kelompok “manula” (manusia usia lanjut), atau perjuangan yang dilakukan oleh kelompok “orang cacat” (*diffable persons*) adalah beberapa contoh lain dari politik identitas yang terutama ditujukan untuk memperoleh pengakuan politik yang mendasar untuk memungkinkan diterimanya perlakuan yang lebih adil atas dasar perbedaan yang bersifat khusus (*peculiar*) yang dimiliki dan atau melekat pada individu atau kelompok (Lihat Alcoff and Mendieta, 2003; Castell, 2004, Sparringa, 2007).
- 2 Politik Identitas oleh Foucault (1988), memandang politik identitas sebagai perbedaan yang memasukkannya dalam domain “mikropolitik” dalam pengertian “politik wacana” (*politic of discourse*) dan biopolitik. Sebuah gerakan yang ingin menggugah wacana yang tertindas dan pinggiran dari relasi kuasa, dominasi dan resistensi. Dalam politik wacana, kelompok-kelompok marginal berusaha menghadapi wacana hegemonik yang kemudian dapat memosisikan individu dalam identitas-identitas normal untuk melepaskan kebebasan bermainnya perbedaan-perbedaan. Heller (1995) dipandang sebagai konsep dan gerakan politik yang fokusnya pada perbedaan (*difference*) sebagai kategori politik yang utama. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme, biofeminisme dan perselisihan etnik yang terkadang dibarengi dengan intoleransi, dan praktik-praktik kekerasan. Beyme (1996), memperkenalkan politik identitas sebagai perbedaan, yang timbul karena gerakan politik dari tahap pra-modern sampai *post-modern*.
- 3 Konsep identitas juga sangat terkait dengan gagasan budaya (Ellias dan Moore, 2003:356; Haralambos, 2000:886). Kedua pemikir ini memandang bahwa salah satu jalan untuk dapat mempelajari atau memahami budaya yang kompleks, maka kita harus peka terhadap penyaluran budaya dan melaksanakannya sesuai dengan keinginan bersama. Budaya menjadi sebuah kekuatan penyelesaian masalah praktis. Artinya, budaya merupakan andalan bagi suatu kelompok dalam menciptakan identitasnya.
- 4 Mamasa dan Polmas (Polewali-Mamasa) merupakan wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan Undang-Undang Otonomi UU No. 11 tahun 2002 Mamasa menjadi wilayah sendiri. Akan tetapi hal itu melahirkan konflik. Mamasa-Polmas tidak lagi harmonis. Konflik bersumber karena ada warga yang ingin tetap berada di wilayah Polmas, tak ingin bergabung dengan Mamasa. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain: kesejarahan, etnik, budaya, ekonomi, dan agama. Di wilayah yang sama, ada juga warga yang tetap ingin bergabung dengan kabupaten baru itu. Ada tiga kecamatan yang tidak ingin bergabung dengan Mamasa, yakni Kecamatan Aralle, Tabulah-

an, dan Mambi (ATM). Implikasinya terjadi dua kepemimpinan di tiga kecamatan tersebut, ada dua camat, dua lurah, dua desa, bahkan dua kepala sekolah (satu sekolah), dan dua kepala puskesmas. Karena kekuatan kelompok tersebut hampir sama banyak, maka masyarakatnya hanya mengakui pemimpinnya masing-masing.

- 5 *Amaradiang* (kerajaan) Mandar terbentuk pada pertengahan abad ke-16. Kerajaan Mandar terdiri dari 14 kerajaan kecil, salah satu kerajaan Mandar adalah Balanipa. Sebelum Balanipa (salah satu kerajaan) berdiri, kawasan Mandar diperintah oleh *Tomakaka* (dituakan/ditokohkan) yang terdiri dari 41 *tomakaka* yang tersebar di seluruh kawasan Mandar. Dalam Amaradiang Mandar terdapat dua kerajaan besar yang menonjol yaitu kerajaan Passokkorang (di Mapilli Polmas) dan kerajaan Baras (di Pasangkayu, Mamuju). Balanipa adalah salah satu kerajaan di dalam kerajaan Passokkorang. Kerajaan Balanipa sangat relevan dalam perspektif Sulawesi Barat karena kerajaan inilah yang dianggap sebagai pelopor dari sejumlah fakta kesejarahan yang bernilai budaya tinggi dan dianggap sebagai “ayah” atau pemandu moral bagi kerajaan-kerajaan lainnya. Hal itu menjadi rujukan di bidang hukum adat (*ada*), pemerintahan dan kepemimpinan bagi orang-orang Mandar
- 6 Di negara besar ini segala kekuasaan pimpinan dalam persekutuan hidup datang langsung dari *PatotoE* (Yang menentukan nasib atas segala sesuatunya) menjadi keyakinan yang hidup. Pemimpin itu adalah dewa atau sebagai wakil dewa, melakukan pimpinan, mengatur tata tertib umat manusia, dan orang taat kepada kekuasaan suci. Tokoh pemimpin dalam periode Galigo, seperti Batara Guru, Batara Lettu dan Sawerigading di mana tokoh-tokoh ini digambarkan memiliki kekuatan kharismatik yang lahir dari kepercayaan keagamaan. Pola ini bertahan hingga muncul konsepsi kekuasaan To-Manurung yang datang di Tana Bone, Tana Wajo dan Butta Gowa
- 7 Akar sejarah ini yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem wilayah pemerintahan yang berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan politik pemerintahan. Hal itu terlihat setelah wilayah Mandar dijadikan menjadi satu afdeling di wilayah Sulawesi. Aspek kesejarahan pemerintahan afdeling Mandar mulai diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1916 berdasarkan *staatsblad* No.325/1916. Pada waktu itu Celebes (Sulawesi) di bagi sebelas *afdeling*, empat afdeling pada Kresidenan Utara dan tujuh di Kresidenan Selatan. Mandar salah satu afdeling di Kresidenan Selatan. Saat itu pembagian wilayah lebih mempertimbangkan aspek historis dengan melihat latar belakang kerajaan besar yang ada (Rahman, 1984:63).
- 8 Di wilayah Mandar sendiri, terdapat semua suku yang ada di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar dan Toraja, suku pendatang pun juga terutama Jawa, Madura dan Bali. Unikny heterogenitas suku-suku kurang menimbulkan

konflik etnik, mereka hidup berdampingan dengan langgeng tanpa ada penyerobotan wilayah atau kekuasaan atas suku yang dominan.

- 9 Mengacu pada konsep Smith ini, Mandar sebagai suatu kelompok dominan tidak memiliki kemampuan penguasaan terhadap wilayah dan kelompoknya sendiri, identitasnya seolah terlebur dengan adanya heterogenitas etnik di wilayahnya. Kondisi ini mengurangi kedirian etniknya ditambah dominasi etnik Bugis dalam wilayah Sulawesi Selatan. Posisi terpinggirkan dikukuhkan dengan menggulirkan wacana kejayaan kerajaan Mandar sebagai wujud etnik yang memiliki pengaruh besar melalui tahap-tahap perjuangan yang hingga era reformasi tetap diteruskan.
- 10 Elemen tersebut seakan hilang bersamaan dengan pemecahan kerajaan Mandar oleh Belanda dalam tiga kabupaten. Sehingga menurut Sejarawan Darmawan Mas'ud (Wawancara, 5 November 2004), identitas Mandar dapat dikatakan sebagai identitas baru. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan rakyat tidak terakomodasi, tertinggal (ada rentang kendali) antara kepentingan pemerintah dan rakyat, terbukti bahwa semakin ke Mamuju rentang kendali itu makin tinggi. Kondisi ini kemudian dicoba untuk dikembalikan dalam gabungan Mandar, dengan dikukuhkannya kembali identitas Mandar seperti pada abad 16.
- 11 Berbeda dengan Morell yang melihat aktivitas seniman secara keseluruhan. Peter Wade meneliti lain, dalam karyanya yang berjudul *Music and Formation Black Identity in Columbia* (2002) menyoroti penegasan akan pembentukan identitas hitam dengan jalan musik. Di Amerika masih terdapat tekanan dan pengerahan politik terhadap kelompok masyarakat, sehingga untuk mengungkapkan hal ini maka Wade menguraikan musik dan tariannya merupakan patokan dasar dalam pemahaman rasisme dan formasi identitas rasial. Ia membantah bahwa orang-orang hitam menggambarkan bakatnya terhadap musik untuk mereka sendiri secara eksklusif maupun unik. Mereka mendukung baik jaringan lokal maupun jaringan musik global, akan tetapi tetap menyatakan sebagai suatu identitas hitam dalam konteks waktu tertentu.
- 12 Penelitian bertema konstruksi identitas dari organisasi oleh Syamsuddin Harris (Peneliti Puslitbang dan Kewilayahan LIPI), Analisis CSIS 1993-3 yang berjudul: Politik Islam PPP dan Pemilu 1992 Perjuangan Mencari atau Mempertahankan Identitas. Ditemukan bahwa kebutuhan akan perlunya identitas yang lebih jelas bagi PPP di masa depan, tampaknya merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hasil Pemilu memperlihatkan makin kompleksnya persoalan yang dihadapi PPP, jika masalah identitas tidak kunjung bisa dirumuskan oleh elit partai. Di samping itu, PPP tampaknya tidak mungkin lagi mengandalkan dukungan para pemilih tradisional, bukan hanya karena populasi mereka makin berkurang, tetapi juga “menggoda” partai ini untuk memanfaatkan kembali ikatan-ikatan yang bersifat sektarian dan

primordial. Akibatnya, identitas baru tidak kunjung “ditemukan”. Apabila proses “pencarian” identitas baru belum berakhir, maka selama itu pula PPP akan tampil konservatif dan akomodatif terhadap pemerintah. Mengapa? Karena pilihan sikap dan tingkah laku semacam itu cukup “aman” bagi partai yang tengah mengalami perubahan cukup mendasar.

- 13 Masalah seperti ini juga disoroti oleh Parsudi Suparlan dalam jurnal *Antropologi Indonesia*; 62,2000 dengan judul *Etnicity and Nationality among The Sakai: The Transformation of an Isolated Group into a Part of Indonesian Society*. Kesukubangsaan dari Orang Sakai diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnik untuk identitas diri, perolehan posisi dan perolehan sumber daya dalam hubungan sosial dan antaretnis. Dua kasus program pemukiman orang Sakai di Muara Basung dan Sialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi orang Sakai. Kedua program mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman di kedua pemukiman tersebut, orang Sakai mendefinisikan ulang kesukubangsaan sebagai identitas baru.

2

Mengenal Konseptual Teoritik dari Kajian

2.1. Melalui Perspektif Konstruktivitas

Buku ini akan menjawab pertanyaan mendasar dalam kajian identitas yaitu: Mengapa identitas sangat penting bagi individu? Dalam hal ini, pertanyaan tersebut akan mempergunakan bantuan dari konseptualisasi beberapa pemikiran. Konseptualisasi diawali dengan penentuan perspektif teori kemudian memaparkan teori-teori yang dianggap relevan mewakili kajian ini.

Perspektif konstruktivis dalam penjelasan ontologi menyebutkan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Akan tetapi kebenaran realitas sosial bersifat nisbi (tidak tetap), yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial (Hidayat, 1999;39). Dalam perspektif ini, individu bukanlah entitas yang ditentukan oleh realitas sosial di luar dirinya, tetapi agen kreatif yang memproduksi sekaligus mereproduksi serta mengkonstruksi dunia sosialnya. Sebagai agen kreatif, manusia dalam menghadapi fakta tidak hanya melakukan konstruksi tetapi juga

dekonstruksi dan rekonstruksi. Selain itu melakukan *recognition* dan refleksi berdasarkan pengalaman, *prerequisite*, serta konteks sewaktu menghadapi realitas tertentu.

Realitas sosial dinyatakan sebagai konstruksi manusia, dan sebaliknya manusia, kebiasaannya, tindakan dan perilaku serta pemikirannya dibentuk oleh faktor-faktor sosial (Collin, 1997:65). Berger dan Luckman menyatakan bahwa masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah realitas objektif. Manusia adalah produk masyarakat (Berger dan Luckman, 1990:80). Dengan demikian, realitas sosial adalah ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Realitas sosial itu “ada” dilihat dari subjektivitas “ada” itu sendiri dan dunia objektif di sekeliling realitas sosial. Individu tidak hanya dilihat sebagai “kedirian”-nya (dirinya sendiri), tetapi juga dilihat dari mana “kedirian” itu berada, bagaimana ia menerima dan mengaktualisasi dirinya serta bagaimana pula lingkungan menerimanya. Artinya bahwa manusia dapat mereproduksi aktivitas yang diniatkan dalam segala prilakunya termasuk dalam pembentukan identitasnya

Untuk mengkaji identitas etnik, Henry Hale (2004: 459-463) menawarkan dua perspektif yaitu primordialis dan konstruktivis (dalam hal ini instrumentalis digabung menjadi satu bagian dengan konstruktivis). Perspektif primordialisme menurut Hale merupakan gambaran tentang kelompok etnik. Dalam hal ini ia menyamakan dengan “dinding” (pembatas) dari suatu masyarakat. Melalui pemahaman itu, Hale melihat ada batasan-batasan tertentu dari suatu kelompok etnik dan dapat diidentifikasi melalui ciri tertentu yaitu kultur, tradisi, sejarah, ciri fisik, daftar lagu-lagu, bahasa, agama dan lain-lain.

Hale berpandangan bahwa suatu kelompok etnik adalah suatu kekerabatan yang diperluas dari beberapa ciri tertentu tersebut. Ciri

itu tidak berubah dan cenderung konsisten di dalam kelompok. Hubungan di dalamnya menjadi sesuatu yang penting guna menjaga kesatuan dan kebertahanan kelompok etnik secara bersama-sama dan menembusnya lewat motif kekuasaan.

Pandangan primordialisme ini setidaknya memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena primordialisme mengandung dua unsur yang memudahkan terjadinya konflik identitas etnik, yaitu (1) adanya pandangan kerterikatan yang kuat terhadap kelompoknya yang menimbulkan sentimen etnik yang tinggi sehingga sulit untuk berinteraksi dengan kelompok lain (Triyono, 2003:27; Rothschild, 1981:29). (2) kompetisi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya mendorong menguatnya identitas dan *emotional appeal* dari suatu kelompok etnik

Perspektif konstruktivis yang dijelaskan Hale memandang bahwa suatu kelompok etnik tatanannya tidak terstruktur dengan baik. Dia menyamakan kelompok etnik dengan “dinding batu”. Hal ini berangkat dari ide pemikiran dari Barth yang dikutip oleh Hale, (2004; 461) yang membantah adanya corak khas dari suatu kelompok etnik. Disebutkannya, corak dari suatu kelompok etnik bukanlah elemen budaya tertentu atau kekerabatan yang membedakannya dari kelompok yang lain, tetapi semata-mata merupakan batasan yang dirasakan dan yang berlaku. Kriteria anggota kelompok bertujuan pada pengupayaan perubahan setiap waktu dari anggota yang datang dan pergi serta pembangunan tradisi baru dan jalan hidupnya, namun anggota kelompok tersebut, tetap bertahan dalam struktur kehidupan sosial.

Mengikuti penjelasan perspektif konstruktivis Hale, maka etnisitas dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak tetap, pragmatis, oportunistik, dan dibentuk oleh orang-orang tertentu. Akibatnya aktor-aktor yang aktif dalam suatu hubungan dan kebudayaan tidak

hanya diterima begitu saja tetapi juga mengkonstruksinya ke dalam dunia sosial mereka sesuai dengan alam pikiran, norma, estetika, dan simbol-simbol kebudayaan (Delanty dalam Ritzer dan Smart, 2001:472).

Perspektif konstruktivis, kontras dengan primordialisme. Dalam penerapan, terutama yang terkait dengan identitas dapat dilakukan dengan cara mengobservasi keanggotaan dalam kelompok sosial, kemudian membandingkan dengan kultur luar. Hal itu diperlukan sebagai upaya untuk agregasi kesadaran kelompok sehingga mempunyai relevansi dengan ideologi dan politik. Dalam hal ini konstruksi identitas etnik dapat dijelaskan sebagai upaya respons dari tekanan situasi kelompok dominan, respons terhadap perlakuan pilih kasih, dan juga upaya defensif dari suatu kelompok. Berdasarkan pandangan ini, maka proses konstruksi sosial selalu dikaitkan dengan keterlibatan anggota komunitas kelompok dan elite (Ashley, 1998,259). Persepsi "kami" menjadi pembeda dengan kelompok lain tetapi menjadi pengikat dengan kelompoknya sendiri.

Dalam pandangan konstruktivis, etnisitas merupakan upaya dari kelompok elite untuk merespons, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan lingkungan. Etnisitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak alamiah. Etnisitas dijadikan sebagai sumber politik dan sebagai sarana untuk kohesi seseorang agar dipromosikan untuk memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan individu dan kelompok. Hasilnya adalah suatu arena politik tawar-menawar dalam situasi plural, atau bisa jadi bahwa politik suatu arena konflik bagi elite politik (Brown, 1998: xvii). Dengan demikian, etnisitas adalah sesuatu yang *manipulated* dan *construction*. Alasannya, karena etnisitas bukan sesuatu yang diakibatkan oleh pembawaan turun temurun dan fisik saja, melainkan karena adanya konstruksi yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain secara intersubjektif (Fe-

agen & Feagen, 1996:2). Dengan demikian, pemahaman elite terhadap etnik adalah sesuatu yang sengaja diciptakan atau dibangkitkan (baca: konstruksi). Hal ini menjadi sesuatu yang mudah karena dalam masyarakat plural, isu etnik menjadi penting.

Terkait dengan perspektif konstruktivis, dalam pemikiran politik identitas, kajian ini merujuk dalam pemikiran Bradley (1997), Castell (2004) dan Porta (2004). Pemikiran ketiga teoritis sosial ini pada dasarnya mengedepankan asumsi bahwa identitas mengikutsertakan berbagai pemahaman individu (subjektif dan inter-subjektif) dan kelompok terhadap konteks yang melingkupinya sebagai proses dan praktik sosial. Pada satu sisi, identitas terkonstruksi atas pemahaman ketertindasan dan marginalisasi yang dilakukan oleh kelompok dominan (biasanya mayoritas) terhadap kelompok minoritas. Dalam pemahaman demikian menunjukkan adanya makna "pembeda" antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pada sisi lain, identitas memproduksi kesadaran aktif politik dari kelompok etnik yang biasanya melibatkan mobilisasi dan manipulasi kolektif. Tindakan kolektif tersebut mencerminkan identitas tandingan kelompok marginal untuk membangun transformasi identitas demi perubahan kelompoknya. Dalam pemahaman tersebut, tindakan kolektif menerjemahkan makna integrasi dan "pengikat" sesama komunitas (baca: kelompok yang ingin lepas dari ketertindasan)

Untuk menganalisis konstruksi identitas etnik Mandar, kajian ini juga akan mengaitkannya dengan perspektif interaksi simbolik, dengan alasan perspektif ini pun juga berada dalam tataran konstruksionisme. Berangkat dari pemikiran Weber dan Simmel (dalam Walter, 2000:7) sebagai kaum konstruksionis menyatakan dengan tegas bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dari perilaku objek yang alaminya. Manusia selalu menjadi agen dalam konstruksi realitas sosial yang aktif -cara mereka bertindak tergantung

pada bagaimana mereka memahami atau memberi makna kepada perilaku mereka- manusia harus mampu menginterpretasi. Dalam menginterpretasi, yang terpenting dilakukan oleh manusia sebagai subjektif atau individualistik.

Interaksi simbolik dibangun dari premis bahwa individu menentukan lingkungan mereka sendiri, dalam pengambilan peran (*taking the role of the order*) tindakan yang dilakukan mendapat respons dari orang lain. Dalam hal ini tindakannya bertujuan untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan sebagainya (Mead, 1934, Rose, 1962, Blumer, 1969, Felson, 1981). Pemenuhan tuntutan tertentu dapat dikonstruksi oleh individu dan kelompok melalui penciptaan secara aktif, dipelihara dalam lingkungannya sendiri atau dalam lingkungan dengan orang lain atau bahkan mungkin melalui proses manipulasi dan mobilisasi.

Alasan yang mendasari tindakan untuk mengkonstruksi identitas etnik dapat ditelusuri oleh perspektif pemikiran di atas. Dalam kajian ini, penulis mencermati ranah kesadaran etnik Mandar yang dikonstruksi sebagai ekspresi perasaan yang dibangkitkan untuk mempertahankan kedirian etniknya sebagai kesadaran identitas.

2.2. Konstruktivis dalam tradisi Interaksi Simbolik

Dari sekian banyak teori yang mengupas tentang konstruksi sosial, dalam kajian ini, penulis memakai teori interaksi simbolik, yaitu teori yang berangkat dari pemikiran dasar George Mead dan kemudian dikembangkan oleh Blumer dan Goffman. Uraian awal pemahaman interaksi simbolik dapat dilihat dari pemikiran Mead, selanjutnya diuraikan pada pemikiran Goffman dan Blumer. Teori interaksi simbolik yang digunakan sebagai alat analisis permasalahan etnik Mandar, merujuk pada pemikiran Blumer. Dengan demi-

kian, apa yang dikonstruksi etnik Mandar, dicoba dipahami melalui perspektif konstruktivis, di mana interaksi simbolik menjadi salah satu bagian dalam tataran konstruksionisme.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek yang diteliti.¹ Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan individu-individu untuk membentuk perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka (Becker, 1961:19). Definisi yang penempatannya kepada orang lain, situasi, objek, bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka.

Interaksi simbolik berangkat dari berbagai perspektif. Maurice Natanson (1963), melihat dari perspektif fenomenologis atau interpretatif. Sedang Malcom Waters (1994) bertolak dari perspektif teori agensi. Natanson meminjam istilah generik untuk merujuk bahwa kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.

Sementara Waters memahami interaksi simbolik dari agensi Gidden. Ia mendefinisikan bahwa agensi sebagai arus intervensi kausal yang aktual atau yang dimaksud dari makhluk badaniah dalam proses peristiwa di dunia yang sedang berlangsung. Agensi ini melibatkan penekanan pada aktivitas praktis manusia dalam membangun dengan sengaja dunia sosial mereka. Namun agensi juga melibatkan pandangan bahwa individu membuat pilihan tentang intervensi yang di dalamnya mereka terlibat dan karena itu masa depan dunia sosial adalah faktor yang tidak menentukan, ia menekankan bahwa bila seseorang akan berkeinginan mengacu tujuan dan maksud, tujuan tersebut tidak perlu direalisasikan dan sesungguhnya bahwa intervensi memiliki banyak konsekuensi yang tidak diharapkan.

Baik Natanson maupun Waters memandang interaksi simbolik sebagai mikrokosmis dalam diri individu organisme sosial untuk memahami diri dan lingkungannya. Hal ini karena mereka melihat interaksional dari konsepsi George H. Mead, dalam tataran *self*, *mind* dan *society* sebagai aktivitas kreatif dari individu sebagai organisme dinamis.

Pemikiran dasar Mead tentang interaksionalisme bertumpu pada anggapan dasar untuk melihat tindakan manusia. Asumsinya dilihat Turner pada dua titik pokok yaitu;

1. Kelemahan biologis organisme manusia memaksa mereka untuk saling bekerja sama dalam konteks kelompok agar bisa bertahan hidup; dan
2. Tindakan-tindakan di dalam dan di antara organisme manusia yang memfasilitasi kerjasamanya dan dari sini kelangsungan hidup atau penyesuaiannya akan dipertahankan. (Turner, 1978: 318)

Mead mengembangkan ciri unik pikiran manusia pada kemampuannya untuk (1) menggunakan simbol untuk menunjukkan objek-objek dalam lingkungan, (2) untuk melatih kembali secara tersembunyi berbagai tindakan alternatif terhadap objek ini, dan (3) untuk menghambat jenis tindakan yang tidak sesuai dan memilih tindakan yang jelas sesuai. Mead mengistilahkan dengan proses menggunakan simbol atau bahasa secara tersembunyi “latihan imajinatif” yang mengungkapkan konsepsi *mind*-nya, sebagai sebuah proses, bukan struktur. Eksistensi dan persistensi masyarakat, atau kerja sama dalam kelompok yang terorganisasi, dipandang Mead sebagai hal yang bergantung pada kemampuan masing-masing dan memilih perilaku yang dapat memfasilitasi kerja sama, penyesuaian, dan kelangsungan hidup.

Konsep utama dalam interaksi simbolik Mead adalah diri (*self*). Sebagaimana yang ditunjukkan Rock (1979: 102), bahwa diri sesungguhnya merupakan satu-satunya objek sosiologis yang nyata, sedangkan yang lain bersifat epifenomenal. Diri disusun oleh bahasa. Manusia menggunakan istilah “*I*” dan “*me*” untuk menjabarkan diri dan ini mewakili dua fase atau momennya. “*I*” adalah subjek yang berpikir dan bertindak, ego yang mencipta memberi inisiatif. “*Me*” adalah diri objektif dan yang menjadi refleksi dari *I*, adalah diri yang dipikirkan dalam situasi lain dan dalam waktu dan tempat yang lain, yang nyata maupun rekaan. Yang terpenting, adalah aspek diri yang merupakan suatu ekspresi tatapan orang lain terhadapnya — dalam istilah Cooley disebut dengan “*looking-glass self*”.

Konsep *self* dengan meminjam James dan Cooley, Mead menekankan pada tiga tahap menandai perubahan jenis gambaran diri sementara (*transitory self-images*) yang diperoleh individu dari pengambilan peran (*role-taking*), tetapi peningkatan kristalisasi konsepsi diri yang lebih stabil. Tahap awal dianggap Mead sebagai “*play*”, di mana mampu menerima perspektif orang lain yang terbatas jumlahnya. Kemudian, berdasarkan kematangan biologis dan praktik pada pengambilan peran, orang dapat menjadi dewasa dan mampu mengambil peran beberapa orang lain yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Mead mengistilahkan tahap ini sebagai “*game*”, Karena menandai kemampuan individu untuk memperoleh gambaran tentang diri dari, dan kerja sama dengan sekelompok individu yang terlibat dalam aktivitas tertentu yang terkoordinir. Tahap terakhir terjadi ketika individu dapat mengambil peran “komunitas sikap” yang terdapat dalam masyarakat. Tahap ini individu mampu menerima keseluruhan perspektif komunitas, atau kepercayaan umum, nilai, dan norma berbagai ruang interaksi individu. Artinya bahwa manusia dapat meningkatkan kesesuaian responsnya dengan orang

lain yang berinteraksi dengannya dan memperluas gambaran dirinya yang evaluatif dari ekspektasi orang lain tertentu ke ekspektasi komunitas yang lebih luas.

Bagi Mead, setiap tindakan merupakan mekanisme utama interaksi manusia. Melalui penggunaan bahasa atau isyarat simbolik oleh manusia dalam interaksi sosial mereka pada gilirannya memunculkan pikiran (*mind*) dan diri (*self*). Hanya melalui penggunaan simbol yang signifikan, khususnya bahasa, pikiran itu muncul. Mead mendefinisikan berpikir (*thinking*) sebagai suatu percakapan terinternalisasikan atau implisit antara individu dengan dirinya sendiri dengan menggunakan isyarat-isyarat demikian. Intinya melalui isyarat-isyarat dan simbol-simbol inilah terjadinya “*mind*” (Zeitlin, 1995:340). Mead menyatakan bahwa esensi pemikiran merupakan perbincangan pengalaman isyarat makna yang terinternalisir di mana seseorang dapat melakukan atas dasar eksternal, yakni pengaruh orang lain.

Pikiran adalah mekanisme penunjukan diri (*self indication*) untuk menunjukkan makna pada diri-sendiri dan kepada orang lain. Pikiran mengisyaratkan kapasitas dan sejauh mana manusia sadar akan diri mereka sendiri, siapa dan apa mereka, objek disekitar mereka dan makna objek tersebut bagi mereka. Yang terpenting adalah pikiran mensyaratkan adanya masyarakat, masyarakat ada lebih dahulu daripada pikiran. Dengan demikian, pikiran adalah bagian integral dari proses sosial (Ritzer, 1996: 202).

Pada level umum, Mead menggunakan istilah masyarakat yang berarti proses sosial yang sedang berlangsung yang mendahului *mind* dan *self*. Karena penting untuk membentuk *mind* dan *self*, masyarakat sangat penting bagi Mead. Masyarakat mewakili seperangkat respons terorganisir yang digantikan oleh individu dalam bentuk “*me*” (Ritzer, 2000:355). Dengan demikian, dalam pengertian

ini individu mengelilingi masyarakat, sambil memberi kemampuan melalui kritik diri, untuk mengontrol diri.

Dalam *society*, Mead memandang masyarakat mempresentasikan interaksi terorganisir dan terpola di antara beragam individu. Organisasi interaksi bergantung pada *mind*, artinya tanpa kemampuan *mind* untuk mengambil peran dan secara imajinatif melatih kembali sejumlah aktivitas alternatif, individu tidak dapat mengkoordinasikan aktivitasnya, Mead menekankan bahwa pengaruh langsung pengambilan peran terletak pada kontrol yang mampu dilakukan individu terhadap responsnya sendiri. Kontrol tindakan individu dalam suatu proses kooperatif dapat terjadi dalam perilaku individu itu sendiri jika dia dapat mengambil peran orang lain, adalah kontrol respon individu sendiri melalui pengambilan peran orang lain yang menuju ke nilai tipe komunikasi ini dari sudut pandang organisasi perilaku dalam kelompok tersebut.

Walaupun sintesis Mead telah memberikan terobosan penting dalam konseptual tentang interaksi simbolik, akan tetapi sintesisnya tersebut belum secara memuaskan menyelesaikan masalah tentang partisipasi struktur masyarakat membentuk perilaku individu dan sebaliknya. Dalam usaha mengatasi ketidakjelasan tersebut, usaha-usaha untuk lebih memahami struktur sosial dan bagaimana individu terlibat secara aktif di dalamnya menjadi intensif dikembangkan selama tahun 1930-an oleh Herbert Blumer.

2.2.1. Interaksi Simbolik Herbert Blumer

Herbert Blumer adalah murid Mead dan dikenal dengan interaksi simbolik “aliran Chicago”.² Pemikirannya mengedepankan tentang interaksi. Menurutnya, interaksi adalah proses dimana kemampuan berpikir dikembangkan dan diungkapkan. Semua jenis interaksi, bukan hanya interaksi selama sosialisasi, tetapi juga

berfungsi memperhalus kemampuan kita untuk berpikir. Berpikir membentuk proses interaksi. Pada sebagian besar interaksi, para aktor harus mempertimbangkan orang lain dan memutuskan apakah dan bagaimana harus mencocokkan aktivitas mereka dengan orang lain. Dua dasar interaksi sosial Blumer, yaitu: Pertama, interaksi non simbolik-*conversation of gestures* dari Mead —tidak melibatkan berpikir. Kedua, interaksi simbolik memerlukan proses mental (Ritzer, 2000: 358). Teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Blumer (1969: 2) dirangkum dalam tiga premis, yaitu:

1. Manusia melakukan tindakan terhadap sesuatu (*thing*) berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut untuk mereka (*'thing'* yang dimaksudkan adalah objek fisik, orang lain, lembaga sosial, dan gagasan abstrak atau nilai);
2. Makna dari sesuatu tersebut berasal dari atau muncul dalam interaksi sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya;
3. Makna-makna tersebut dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif dalam berhubungan dengan sesamanya, artinya bahwa makna disempurnakan di saat proses interaksi.

Dalam hal ini, interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak hanya bereaksi terhadap tindakan orang lain, tetapi juga menafsirkan/mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respons aktor baik langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada penilaian makna tersebut. Dalam konteks ini, Blumer memandang bahwa aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan menransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke arah mana tindakannya, sehingga individu menurut Blumer, bukan dikelilingi oleh lingkungan objek-objek potensial yang membentuk perilakunya, tetapi individu yang membentuk, merancang dan memberi arti pada objek-objek tersebut. Dengan demikian individu dapat menilai

kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol dan makna yang berkembang.

Dengan pandangan tersebut, maka manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui situasi yang disebut dengan *self-indication* (pemikiran ini juga dipahami oleh Mead). Sebuah proses komunikasi yang dijalankan individu untuk mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskannya untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba "mengantisipasi" tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan tersebut.³

Selain itu, Blumer juga memandang bahwa tindakan manusia dilihat sebagai respons terhadap rangsangan yang terjadi di dunia luar. Dan dimaknai atas model stimulus-respons yang menekankan pada keutamaan peristiwa eksternal. Blumer menunjukkan fakta bahwa manusia dapat berinisiatif melakukan tindakan, tanpa harus menunggu datangnya rangsangan luar yang mendorong mereka bertindak. Ia menegaskan bahwa tindakan manusia adalah bertujuan, untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi hubungan stimulus-respons mengabaikan gagasan mengenai tujuan manusia dan mengasumsikan perilaku manusia yang otomatis, sebagai refleksi yang dipicu rangsangan dari luar. Padahal tindakan manusia dapat sekaligus disengaja dan kreatif; sang aktor memperhitungkan apa yang sedang dilakukan, mengenal, menilai dan memutuskan pilihan dari berbagai alternatif tindakan. Aktor merencanakan sebelum bertindak dan merevisi ketika memasuki situasi yang berubah atau sebelumnya tidak terlihat. Dalam hal ini Blumer melihat bahwa keadaan tidak eksis dalam diri sendiri sebagai rangsangan yang

mengharuskan bereaksi sebagai organisme yang tidak berpikir dan didominasi naluri. Apa yang disebut keadaan bergantung pada tujuan, rencana, dan pengetahuan yang ada dalam pikiran. Rangsangan yang sama punya makna yang berbeda bergantung pada tujuan dan keprihatinan kita.

Akhirnya, interaksi simbolik dapat dibangun dari premis-premis berikut (lihat juga Mead, 1934; Rose, 1962; Blumer, 1969; Felson, 1981). Pertama, individu merespons situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan berdasarkan makna yang dimiliki komponen-komponen lingkungan bagi mereka sebagai individu. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respons mereka tidak mekanis, atau ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, melainkan bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang mereka masuki dalam interaksi sosial. Jadi individu sangat menentukan lingkungan mereka sendiri.

Kedua, individu membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Mereka membayangkan bagaimana orang lain akan merespons tindakan mereka sebelum mereka sendiri bertindak. Proses pengambilan peran (*taking the role of the other*) tersembunyi ini penting, meskipun tidak dapat diamati. Jadi interaksi simbolik mengakui tindakan dalam dan tindakan luar, menganggap tindakan luar sebagai lanjutan tindakan dalam. Namun, tindakan luar tidak otomatis menunjukkan tidak menunjukkan dalam, karena tindakan luar mungkin hanya merupakan pengelolaan kesan (*impression management*) (lihat Goffman, 1959) untuk menyenangkan khalayak tertentu, atau untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.

Ketiga, karena makna adalah produk interaksi sosial, makna ini mungkin berubah lewat interpretasi individu ketika situasi yang ditemui dalam interaksi sosial juga berubah. Konsekuensinya, peri-

laku mungkin berubah, karena makna, sebagai basis perilaku, juga berubah.

Jika perspektif interaksi simbolik dikaitkan dengan konstruksi identitas Mandar, maka konstruksi tersebut dimaknai sebagai proses pengukuhan kedirian etnik. Aktor yang bermain menjadi lebih diperhitungkan karena penciptaan identitas etnik mengisyaratkan penilaian orang lain terhadap diri dan kelompoknya, peristiwa-peristiwa dan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan teori interaksi simbolik sebagai teori konstruksi sosial mempunyai kekuatan dalam menjelaskan fenomena identitas dan etnisitas. Konstruksi sosial telah menghubungkan antara struktur dan individu (aktor/elite), walaupun dalam hal ini struktur dan aktor sebagai hal yang terpisah, namun demikian struktur masih dapat "dibangun" oleh aktor, dan apabila telah terbentuk, terkadang struktur tersebut menjadi penentu ketika aktor bertindak. Makna sosial, termasuk nilai budaya dan simbol-simbol etnik, selain berada dalam struktur, juga berada dalam diri individu dan selalu menjadi bagian perhatian ketika berhubungan dengan objek lain di luar dirinya.

Sehubungan dengan itu, konstruksi sosial elite tentang identitas etnik akan ditelusuri lewat penuturan lisan dari subjek penelitian sekaligus dari beberapa informan termasuk *key informant*. Untuk memahami penuturan lisan tersebut, sekurang-kurangnya ada tiga hal mendasar yang dilakukan oleh penulis, pertama, pemahaman masa lampau (secara historis) yang dilihat dari subjek penelitian dan informan; kedua, pemahaman proses konstruksi yang juga dilihat dari hasil interpretasi subjek penelitian dan informan; dan ketiga, interpretasi penulis dalam memahami fenomena konstruksi. Terlepas dari cara penulis mengumpulkan data, pada dasarnya kajian ini bertujuan untuk meneguhkan konsep Blumer tentang tindakan interpretatif dengan memahami tindakan dan perilaku elite saat kon-

struksi, atas dasar persepektif interaksi simbolik ini, maka metodologi penelitian juga diarahkan pada pendekatan yang sama.

2.3. Pemikiran Tentang Etnisitas, Identitas dan Elite

2.3.1. Konseptualisasi Etnisitas

Kajian etnik dan etnisitas awalnya mengupas tentang sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan sama, lalu berkembang seiring perubahan menuju ke ranah politik. Menurut Eriksen (1993: 10), etnisitas berasal dari bahasa Yunani *ethnos* (*ethnikos*), yang berarti tidak beragama. Etnik digunakan oleh orang-orang Eropa untuk menyebut orang suku aborigin barat sebagai masyarakat yang belum beradab dan beragama (Haralambos, 2000: 222). Sedangkan di Inggris sampai pada pertengahan abad 19, etnik digunakan sebagai alternatif dari ras.

Bagaimanapun pernyataan ilmuwan sosiologi dan antropologi, kelompok etnik biasanya dilihat sebagai perbedaan budaya daripada fisik. Selanjutnya, dengan menarik konsepsi dasarnya, maka ilmuwan sosial mempunyai sudut pandang berbeda tentang etnisitas. Perbedaan terlihat dalam pengkategorian fungsi, ciri, dan syarat kemunculan etnisitas. Kajian aspek sosial politik tentang etnik disebut dengan etnisitas (Bahar, 1995: 139).

Ilmuwan sosial menyetujui bahwa etnisitas merupakan fenomena yang penting dalam kajian politik. Awalnya melakukan pemahaman terhadap keberadaan suatu etnik. Etnik memiliki kajian yang mendalam dalam perkembangannya. Misalnya, etnik dikembangkan atas dasar perasaan memiliki dalam suatu ikatan kelompok (Connor, 1993; Horowitz, 1985; Shill, 1957), etnik sebagai sebuah jaringan simbol-simbol signifikan (Geertz, 1967, 1973; Smith, 2000), etnik terbuat atas pilihan kehidupan kelompok yang disebut sebagai konstruksi sosial (Anderson, 1991; Bart, 1996; Royce, 1982).

Dalam kajian psikologi, seseorang dikategorikan sebagai suatu etnik jika (a) secara mental seseorang bersiap untuk berkorban demi kepentingan etniknya, atau (b) seseorang rela bergabung dalam suatu kelompok etnik yang dianggap cocok dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok etnik yang lain (Hogg & Mullin dalam E. Hale, 2004: 473).

Kategori ini memunculkan pertanyaan, apa saja yang dapat digolongkan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai etnik tertentu. Horowitz (1985: 52-53) melihat pada faktor darah dan kelahiran, di mana berdasarkan faktor tersebut seseorang dapat dibedakan atas dasar warna kulit, bahasa dan kepercayaan. Berbeda dengan Horowitz, Rudolf (1986: 2) mengacu pada pengertian teritorial, yaitu melihat faktor batas-batas wilayah dalam sistem politik sebagai pertimbangan utama sebagai dasar geografis. Etnik menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok. Sehingga, walaupun seseorang berbeda warna kulit dan bahasa, tetapi jika berdiam dalam suatu wilayah tertentu pasti satu etnik. Seseorang menjadi Jawa, Batak, Afrika atau Negro predikat awalnya tidak disadari. Predikat menjadi *taken for granted* yang merupakan kategori kelompok dalam kebersamaan (kolektifitas) pada suatu wilayah.

Ciri khas yang melekat pada suatu kelompok etnik adalah tumbuhnya perasaan dalam suatu komunitas (*sense of community*) di antara para anggotanya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan hubungan kuat. Selain itu, tumbuh pula perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya maka terselenggarakan rasa kekerabatan. Kita dalam identitas kelompok etnik mempunyai dua pandangan yaitu (1) sebagai sebuah unit yang objektif yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang, atau (2) hanya sekadar produk pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya sebagai suatu kelompok etnik (Manger, 1994:13).

Sejalan dengan pandangan di atas Rex (1994:8) menilai bahwa kategori suatu etnik diterapkan pada kelompok dalam kebersamaan dan kolektivitas. Lazimnya, berdasarkan kategori dan ciri-ciri umum, manusia dikelompokkan ke dalam berbagai ras. Bila ras tersebut dikaitkan dengan kebudayaan mereka, maka terbentuk kelompok etnik. Setiap manusia menjadi salah satu ras dan kelompok etnik.

Sementara itu, Yinger (1981) mengasumsikan perbedaan pengertian antara fisik dan sosial (ras) dalam etnisitas. Disebutkan bahwa perbedaan fisik “*race*” secara mendetail dijelaskan dalam teori, namun dalam kenyataannya batas antara fisik “*race*” menjadi kabur. Kelompok manusia secara fenotif sulit dibedakan. Ilmu sosial mendefinisikan *race* sebagai kelompok etnik yang dilihat oleh dirinya sendiri atau oleh kelompok lain yang memiliki perbedaan karakteristik secara biologis dengan atau tanpa kenyataan bentuk yang berbeda kelompok biologis.

Kelompok etnik 14 oleh Yinger dibedakan dalam tiga tipe dasar, yaitu:

1. Keberadaan populasi imigran yang memiliki warga keturunan digolongkan dalam satu kelompok etnik, contohnya di Amerika, Filipina, dan Korea;
2. Sebuah sub kelompok sosial yang memiliki nenek moyang, keturunan dan latar belakang budaya bersama dapat dikatakan sebagai kelompok etnik. Contohnya, kelompok Indian di Amerika;
3. Sebuah kelompok etnik⁴ dapat berasal kelompok *pan-cultural* seseorang dari perluasan perbedaan budaya dan latar belakang masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi “mirip” atas dasar bahasa, *race*, agama dan persamaan status.

Lebih jauh dalam kajian antropologi, Naroll (dalam Barth, 1988: 11) menyebutkan bahwa umumnya kelompok etnik sebagai

suatu komunitas memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok komunitas yang lain.

Dalam pandangan Barth tersebut, dipahami bahwa suatu kelompok etnik sebagai suku bangsa yang memiliki budaya dengan bahasa tersendiri dapat sebagai suatu komunitas yang berbeda satu unit dengan unit yang lain. Dalam hal ini, etnisitas dipandang sebagai suatu keluarga besar yang dikategorikan sebagai sebuah komunitas atau identitas yang *establish* yang memiliki elemen penting.

Terkait dengan identitas, maka pengaktifan etnisitas menyangkut atas pembedaan dan pengakuan, menimbulkan dikotomi “aku”, “kamu”; “kami”; “mereka”; “orang dalam” dan “orang luar” sehingga jika dikotomi itu tidak ada etnisitas hilang (Dweyer, 1963:3). Dikotomi ini memungkinkan munculnya pembatas antara satu etnik dengan etnik lain atau sekaligus sebagai suatu ikatan perekat terjadinya interaksi antar etnik karena secara kultural ada perbedaan gagasan dan kepentingannya.

Perbedaan gagasan dan kepentingan etnik yang memungkinkan interaksi mengarah pada pengaktifan simbol-simbol etnisitas, hal ini memudahkan timbulnya persaingan atau konflik antar etnik. Konflik terkadang timbul karena memperebutkan sumber daya atau bahkan kehormatan, dengan berusaha mempertahankan kedirian etniknya, mereka merasa terhormat dan dihargai. Kondisi ini memunculkan siapa yang berpihak pada gagasan dan kepentingannya menjadi kawan untuk tetap mempertahankan identitas etniknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat memberi makna atas etnisitas. Makna tersebut dapat ditelusuri dari dua hal. Pertama, etnisitas adalah sebuah rangkaian petanda dalam hubungan sosial. Kedua, etnisitas merupakan sumber politik identitas. Dalam hal yang pertama, etnisitas merupakan petanda dasar (asal-usul) yang dimiliki oleh sebuah kelompok etnik, petanda etnik ini berfungsi sebagai pembeda dalam relasi sosial. Dalam hal yang kedua, etnisitas berfungsi sebagai penegas perbedaan antara “kita” (*we*) dan “mereka” (*they*), membedakan orang Bugis bukan Makassar atau Mandar bukan Toraja dan lainnya, terutama terkait pada sumber-sumber politik.

2.3.2. Pendekatan dalam Memahami Etnisitas

Perselisihan etnik dalam warna identitas sering dikaitkan dengan aspek kesejarahan. Kaitan ini oleh Appadurai (dalam Baso, 2002: 41) disebut sebagai *production of natives*, yaitu produksi “pribumi”. Istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu keaslian. *Native* diasumsikan sebagai istilah orang atau kelompok yang mengatasnamakan keberadaannya sebagai penduduk asli dalam suatu daerah dan wilayah tertentu (*indigeaus people*). Keberadaan kelompok ini dengan membawa atribut bahwa dirinya atau kelompoknya memiliki keterikatan atas kepemilikan terhadap wilayah yang mereka tempati.

Keterikatan wilayah ini kemudian merembes pada pandangan bahwa di tanah itulah mereka dilahirkan, di wilayahnya nenek moyang mereka terlahir dan ada, sehingga dengan demikian kelompok atau orang ini mengidentifikasikan dirinya dengan wilayah tersebut dan bahkan mempertahankannya. Dalam hal ini, kelompok tersebut berusaha tetap mempertahankan nilai budaya pendahulunya, agar terjaga eksistensinya.

Terkait dengan keberadaan etnik, fungsi etnik ditinjau pada dua hal pokok, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal etnik menjaga integrasi, memperkokoh, dan menjaga kesinambungan budaya suatu kelompok. Hal itu dapat terjadi karena di dalam kelompok etnik terdapat jaringan hubungan persoalan yang padat yang sebagian besar didasarkan pada kekerabatan dan pada kontak langsung, tatapan muka yang terjadi pada sebuah komunitas. Nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok etnik itu sebagai bagian tidak tertulis, dan individu diikat satu dengan yang lain dalam jaringan ketergantungan.

Secara eksternal etnik dipandang secara intrinsik merupakan sumber potensi yang sangat efektif dalam menggerakkan massa (mobilisasi) untuk mengalkan integrasi sosial. Dalam hal ini etnik menjadi penegas identitas kelompok “kita” (*we*) dan “mereka” (*they*). Kelompok “kita” dibenarkan dan kelompok “mereka” diperkaburkan. Identitas “kita”, “mereka” yang membutuhkan legitimasi, dan dikembangkan dalam narasi besar dan diperkukuhkan dalam bentuk-bentuk ekspresi etnik seperti kekhasan nama, bahasa dan dialek mereka. Fungsi etnik seperti itu, dan ekspresi yang menopangnya berlangsung dengan cara, misalnya dengan menghadirkan (*invented*) atau menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan etnik dibenarkan.

Berdasarkan fungsi etnik tersebut James McKay (1982) mengidentifikasi dua pendekatan bentuk kelompok etnik, yaitu mobilisasi dan primordial; Pertama; dalam pendekatan mobilisasi melihat secara alamiah, bahwa tidak dapat dihindarkan keberadaan etnisitas. Identitas etnik diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok agar mendapatkan akses sosial, politik dan sumber daya mental. Orang menggunakan simbol identitas untuk mencapai tujuannya, dan kelompok etnik cenderung dibentuk

ketika orang percaya mereka dapat keuntungan oleh pembentukan identitas etniknya. Contoh, di Asian Selatan atau *Afro-Caribbeans* di Inggris yang mengembangkan identitas etnik dengan menawarkan dukungan emosional dan praktis para anggota kelompok etnik dalam kemakmuran agar terjadi perubahan dalam hukum dan politik yang dapat memperkuat kekuasaan etniknya.

Menurut McKay pendekatan ini memiliki keterbatasan, yakni cenderung memandang rendah kekuatan emosional ikatan etnik dan diasumsikan bahwa etnisitas selalu berkaitan dengan perasaan bersama yang ingin dikejar kelompok etnik. Dia menyatakan bahwa beberapa fakta kelompok etnik mengejar ketertarikan politik dan ekonomi, dan bukan berarti semua kelompok etnik memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya McKay mengasumsikan bahwa pendekatan ini terkadang sulit dibedakan dengan arti kelas dan stratifikasi etnik, kedua pandangan ini menurutnya agak berbeda. Etnisitas masuk pada bagian kepentingan kelas dan memiliki lintas batas kelas, seperti di Irlandia Utara, Afrika Selatan dan Libanon, konflik etnik sering terjadi daripada konflik kelas dan orang sering mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok etnik daripada kelompok kelas.

Kedua, pendekatan primordial digunakan pertama kali oleh Shils seorang sosilog Amerika tahun 1957. Shils menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki atribut primordial dalam wilayahnya atau berdasarkan asal mereka, agama dan keluarganya. Atribut ini memasuki perasaan yang kuat pada loyalitas, intensitas dan solidaritas kelompok. Atribut etnik primordial dapat saja berakar pada kelompoknya dan menjadi basis konflik antara kelompok etnik dalam waktu lama. McKay, melihat bahwa kekuatan primordial dapat menilai kekuatan emosional ikatan etnik, tetapi juga kritis. Dia menyatakan pendekatan ini cenderung deterministik dan statik dengan pertimbangan: (a) anggota kelompok etnik memiliki sedikit pilihan tentang

rasa cinta kasih; sehingga dalam realitas perlengkapan etnik mampu mengubah kekuatan dari individu ke individu, (b) setiap anggota kelompok etnik secara individu akan memiliki identitas etnik (c) pendekatan ini tidak mudah dihubungkan dengan perubahan identitas etnik antar anggota kelompok etnik, dan (d) pendekatan ini menumbuhkan banyak kepentingan emosi dasar manusia cenderung dikatakan sebagai etnik dan identitas kelompok agar eksis dalam kekosongan politik dan ekonomi.

Dalam kombinasi dari dua pendekatan ini, McKay percaya bahwa perilaku, ikatan emosi primordial dan ikatan instrumental mobilisasi dapat dihubungkan. Keduanya merupakan “manifestasi” dari etnisitas. Selain itu, pertentangan atas kedua pendekatan itu dapat dikombinasikan, karena etnisitas dapat didasarkan atas mobilisasi dan primordial. Berangkat dari pemahaman itu, McKay mengklasifikasi lima tipe etnisitas, yaitu: pertama, etnik tradisional; kedua, etnik militan; ketiga, etnik simbolik; keempat, etnik manipulator dan kelima, etnik semu (*pseudo-ethnics*). Kelima klasifikasi tersebut dijelaskan lebih lanjut.

Etnik Tradisional, pada kelompok etnik tradisional memiliki ikatan kebersamaan, terutama ikatan emosional. Kelompok ini memiliki sejarah panjang yang disosialisasikan pada keturunannya untuk menginternalisasi budayanya, tidak memperhatikan secara partikular kepentingan ekonomi dan sosial, lebih menekankan pemeliharaan budaya. Kelompok ini sangat kuat mengidentifikasi kelompoknya di mana mereka berada dan mungkin tertarik terhadap material tetapi tidak memobilisasi untuk mengejar kolektivitasnya. Contohnya, Hutterite di Amerika Utara, dan minoritas suku di Timur Tengah, seperti Armenia, Asiria, Kurdi dan Kristen Lebanon

Etnik Militan, pada kelompok etnik diperkuat oleh kedudukan primordial dan politik serta kepentingan ekonominya. Contohnya,

Basques di Spanyol yang memiliki bahasa sendiri dan simbol budaya sendiri seperti bendera. Namun demikian kelompok ini memiliki gerakan politik yang mencoba mencapai keuntungan otonomi yang lebih besar atau memerdekakan diri dari Spanyol.

Etnik Simbolik, kelompok etnik memiliki peluang atribut etnik dalam pengertian primordial dari faktor politik dan ekonomi. Kelompok ini memiliki keterlibatan dalam kelompoknya, atau identifikasi dengan kelompok etniknya. Contohnya, di USA, keturunan Skotlandia yang sering mengadakan festival kelompok, dan Irlandia yang bekerja sama dengan *St. Patrick's Day* mengadakan parade, hal ini semua merupakan bagian simbol-simbol etniknya.

Etnik Manipulator, kelompok ini berusaha untuk mencoba mempromosikan aktivitas politiknya dan minat ekonominya, tetapi dalam memanipulasi etnik tidak seperti kelompok solidaritas dan ikatan emosional yang kuat seperti etnik tradisional dan etnik militan. Contohnya, ikatan Nasionalisme di Skotlandia tahun 1970-an merupakan kelompok organisasi partai politik, tetapi tidak memiliki putusan kebebasan ekonominya.

Pseudo-Ethnics (etnik-semu), merupakan kelompok etnik yang memiliki potensi menjadi sebuah kelompok yang kuat tetapi tidak terealisasi secara potensial. Pemimpin berjuang memobilisasi perasaan identitas etnik. Anggota kelompok lebih setia kepada negara daripada kelompok etniknya atau kelompok etnik potensial. Contohnya, di Pulau Selatan New Zealand menginginkan daerahnya menjadi merdeka tetapi kesulitan karena tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap pulau.

Gagasan yang dikemukakan oleh Shils dan McKay mengisyaratkan bahwa etnisitas digunakan sebagai atribut budayanya, di mana kelompok etnik tertentu dapat dibedakan dengan kelompok

etnik lainnya dan diberi label yang spesifik. Seiring dengan hal itu Fiscer (1986: 195-196) menegaskan bahwa etnisitas pada dasarnya merupakan sesuatu dalam setiap generasi harus dicari kembali (*re-invented*) dan ditafsirkan kembali (*reinterpreted*) oleh setiap individu dan bukan sesuatu yang sederhana diwariskan dari generasi ke generasi. Etnisitas dalam pandangan ini merupakan sebuah proses yang dinamis dan dapat berkembang sepenuhnya melalui perjuangan panjang.

Merujuk pada pendekatan fungsi etnik di atas, terdapat tiga pendekatan teoretis utama dalam melihat fenomena etnisitas yang tidak jauh berubah dengan pendekatan fungsinya, yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme (Mathias Koenig, 1999; Kuper dan Kuper, 2000:309; Hale, 2004: 459). Pertama, pendekatan primordialisme dikembangkan oleh Even Shill (1957), Clifford Geertz (1967) dan Van de Berghe (1981). Pendekatan ini melihat fenomena etnis dalam kategori-kategori sosio-biologis, yang pada umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objektif sebagai hal yang “*given*”, dari sananya, dan tidak dapat dibantah. Pendekatan ini terbukti mempunyai pengaruh terhadap gambaran sosial masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena memberi status ontologis dan esensial terhadap entitas-entitas kelompok, sedangkan ilmu-ilmu sosial butuh tafsiran dan penerangan akan kemunculan, stabilisasi, dan perubahannya dari waktu ke waktu dengan merekonstruksi secara objektif dari para pelakunya. Seperti analisis yang dilakukan oleh Max Weber, etnisitas didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan pengalaman satu koloni dan migrasi.

Kedua, pendekatan konstruktivis lebih menarik perhatian. Pendekatan ini dikembangkan oleh Frederik Barth (1969), Deutsch (1966), Gellner (1983), dan Hassa (1986) yang memandang identitas etnik sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus membangun dan dibangun oleh manfaat mitologi, suatu himpunan sejarah dari bahasa dan pengalaman masa lampau.

Pendekatan instrumentalisme, lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan etnisitas sebagai petanda identitas merupakan proses yang memperhitungkan fakta bahwa etnisitas bukanlah satu-satunya bagian dalam menciptakan petanda etnik. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa yang harus juga diperhitungkan adalah pergulatan dalam menemukan petanda etnik merupakan proses yang mengacu pada visi dan misi masa depan, dengan berpijak pada sejarah masa lalu. Oleh karena itu, proses pencarian petanda etnik merupakan dinamika yang terus bergulir, diperbaharui, diperjuangkan dan tidak pernah berakhir.

2.3.3. Identitas dan Politik Identitas

a. Konseptualisasi Identitas dan Politik Identitas

Studi identitas merupakan kajian yang salah satunya terlahir dari pemikiran Friedrich Hegel seorang filsuf Jerman, pemikirannya mendukung gerakan revolusioner di Prancis, terkait dalam mempersatukan Eropa. Salah satu karyanya yang mendukung studi ini adalah *The Phenomenology of Mind* (1807). Karya tersebut telah memenga-

ruhi pikiran Marx terutama pada pertentangan kelas (perjuangan kelas). Hal itu berkembang dan melahirkan pemahaman interdependensi identitas, yang belakangan ini disebut dengan pengakuan politik (*politics of confession*)⁵. Pengaruh Marx tersebut setidaknya telah memperkuat studi identitas, sehingga identitas merupakan salah satu bagian dari teori sosial yang cukup berkembang (Alcoff dan Mendieta, 2003: viii).

Dalam perkembangan selanjutnya, identitas menjadi bagian dalam melakukan interaksi-interaksi sosial, baik dalam masyarakat heterogen maupun yang homogen. Dalam masyarakat yang heterogen jarang ditemukan adanya identitas tunggal. Akan tetapi, biasanya orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai dari pelbagai kelompok yang berbeda. Hal itu mengilhami beberapa pemikir yang mendalami kajian identitas. Studi identitas menampakkan perkembangannya, misalnya: makna identitas dari psikoanalisis (Freud, 1921: 24), formasi identitas sebagai siklus hidup manusia (Erikson, 1989; Hall, 1996: 160; Bauman, 1996), tipe penciptaan identitas (Shill, 1957; Bradley, 1997).

Studi identitas pada kenyataannya tidak didefinisikan sebagai suatu yang tunggal, homogen dan permanen. Identitas merupakan pemahaman yang melibatkan individu dan kelompok dalam suatu situasional atas keberadaannya. Dalam hal ini, Giddens mengonstruksi sebagai *multiple identity* yang melibatkan pemahaman dasar atas tingginya etos “kepemenuhan/pemenuhan diri” (*self fulfillment*) serta “aktualisasi diri” (*self actualisation*). Apa yang disebutkannya bertitik tolak pada proses strukturasi modernitas yang menerobos ke ranah hidup pribadi. Bagi Giddens, diri (*self*) tidak hanya menjadi penentuan tradisi komunitas lokal, lebih dari itu, identitas diri menjadi proyek yang refleksif (1990: 114; 1991:5). Artinya, keseluruhan cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba

pilihan yang disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan yang global. Dengan demikian proses ganda ‘meng-global dan melokal (mempersonal)’ dalam konstruksi identitas diri sebagai proyek refleksif merupakan elementer refleksif modernitas. Individu harus menemukan identitasnya dalam strategi-strategi dan pilihan-pilihan yang disediakan oleh sistem-sistem abstrak. Sedangkan aktualisasi diri yang dibangun dari kepercayaan dasar dalam konteks personal hanya dapat dibangun oleh pengeluaran diri pada yang lain (Giddens, 1990: 176).

Sementara itu studi identitas pada dasarnya, melihat karakter individu yang tercermin sejak lahir sebagai suatu anugerah dari sang pencipta. Hal ini merupakan identitas dasar dan kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Terkait dengan pemikiran tersebut, Jary (Harambos, 2000: 885) mengasumsikan bahwa identitas adalah jati diri yang terkait dengan perasaan diri, yaitu rasa diri yang berkembang selama masa pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, yang dapat membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan masyarakat di mana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya.

Selanjutnya, Jary mengembangkan pemikirannya bahwa identitas tidak hanya dapat dilihat dari impresi kedirian kita sendiri tetapi juga berasal dari impresi diri dari orang lain, serta impresi orang lain tentang kita. Menurutnya, ada dua hal penting dalam menilai identitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal yang disebut pertama, sebagai faktor internal identitas terlahir dari apa yang terpikirkan tentang identitas kita, sedang dalam hal kedua, yakni identitas eksternal dapat diidentifikasi bagaimana orang lain

melihat dan beraksi terhadap diri kita. Hal itu dapat menjadi sebuah pertentangan atau dapat mendukung dan memperkuat pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa, munculnya identitas berasal dari hubungan antara diri kita dengan orang lain. Dengan demikian identitas dibentuk dan ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri.

Keterkaitan antara identitas internal dan eksternal melahirkan pengukuhan atau “penciptaan”. Hal ini menjadi spirit atas proses kelahiran yaitu mengacu pada penciptaan suatu identitas bersama berkaitan dengan nilai-nilai dan simbol-simbol yang mendasari landasan suatu sistem dalam masyarakat. Masalah penciptaan identitas bersama selalu berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat memberi masyarakat di wilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian diri mereka atas yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain, dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka. Seringkali gagasan (ide), nilai, norma, dan simbol ekspresif yang dianut bersama definisi, kesadaran dan penghargaan kehormatan diri. Gagasan tersebut merupakan konsep yang sangat umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil (Andrain, 1995:98)

Terkait atas ketidaksetaraan,⁶ jika menfokuskan pada konteks identitas etnik, pemahaman interaksi simbolik, khususnya dari Mead menilai bahwa konsepsi-diri seseorang bersumber dari partisipasinya dalam budaya di mana ia dilahirkan atau yang ia terima. Budaya diperoleh individu melalui simbol-simbol dan simbol-simbol ini bermakna baginya lewat eksperimentasi dan akhirnya *familiarity*

dengan berbagai situasi (dalam Palakshappa, 1971:41). Dalam kaitan ini, identitas etnik juga suatu proses, terbentuk lewat interpretasi realitas fisik dan sosial yang memiliki atribut-atribut etnik. Identitas etnik berkembang melalui internalisasi pengkhasan-diri (*self-typication*) oleh orang lain yang dianggap penting (*significant others*), tentang siapa aku dan siapa orang lain berdasarkan latar belakang etnik mereka. Semuanya dianggap keniscayaan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Proses itu juga melibatkan internalisasi aspek-aspek orang yang dianggap penting ke dalam diri sendiri.

Dari uraian di atas, secara singkat penulis dapat menegaskan bahwa identitas diartikan sebagai suatu penilaian yang kemudian membentuk pengikatan dan pembedaan atas diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini individu ataupun kelompok tercermin dan terbentuk dari unsur yang melekat atau sengaja dilekatkan, baik dalam tubuh (fisik) dan lingkungan sosialnya. Dalam kaitannya dengan identitas Mandar, unsur-unsur yang sengaja dibangun tersebut adalah identitas etnik, hal ini merupakan instrumen penegas pembeda dengan orang lain. Identitas tersebut antara lain dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia lingkungannya, di sinilah awal pemikiran atas objek dan subjek politik seseorang atau kelompok.

b. Politik Identitas sebagai Politik Perbedaan

Akar-akar politik identitas salah satu asalnya dapat ditemukan dari pemikiran filsafat Foucauldian (*Michel Foucault*) tentang politik tubuh, dari sejarah seksualitas dan relasi-relasi kekuasaan yang mengelilinginya. Pemikiran tersebut mengedepankan tentang sejarah tubuh, memandang tubuh (badaniah) bukan hanya sebagai entitas genetik dan bersifat evolutif, tetapi lebih merupakan produk sejarah dalam konsep yang lebih umum. Menyebarnya politik identitas dalam pandangan Foucault merupakan akibat dari runtuhnya masya-

rakat karena adanya gerakan yang mengontrol demografis objektif. Foucault merasa diasingkan, disendirikan, dengan cara dibaptis kemudian memaksanya menyanggah identitas baru sebagai seorang nasrani.

Atas apa yang dialaminya, kemudian Foucault melakukan penyelidikan bahwa politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi pada negara dan masyarakat modern (liberal dan demokrasi). Dalam hal ini, Foucault menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses politik melalui kekuasaan negara. Dengan demikian, tolak ukurnya adalah standar negara, dan mengabaikan individu dan masyarakat. Bagi Foucault, hasilnya ternyata mencengangkan karena sikap ilmiah dan cakupannya ke segala aspek menjadi bentuk kontrol dan tirani yang absolut (Feher, 1996:61). Dalam kata-kata Foucault di *Governmentality*, disebutkan karena kemampuan negara untuk menstransformasikan dirinya sebagai yang memerintah, maka masalah pemerintahan dan teknik pemerintahan menjadi isu politik, satu-satunya lingkup yang nyata bagi perjuangan dan persaingan politik (Mulgan, 1995:13).

Politik identitas merupakan nama lain dari bio-politik (Foucault, 1988) dan politik perbedaan (Heller, 1995). Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, akan tetapi penerapannya mengemuka setelah kajian ini masuk dalam disiplin ilmu politik yang bersifat empiris dan mulai dibicarakan pada tahun 1960-an. Term biopolitik dapat ditarik pada tataran filosofis dan teori politik, terutama analisis politik terhadap fenomena yang sekarang muncul sebagai akibat pertumbuhan masyarakat modern.

Politik identitas yang fokusnya pada perbedaan (*difference*) adalah bentuk pertahanan terhadap berbagai perbedaan, yang hakikatnya merupakan integritas pada konteks sosial dan politik, bahkan mempunyai persamaan tujuan yaitu peneguhan identitas atas

pilihan-pilihan politik baik itu gender, ras, agama, ataupun etnik. Proses ini mengakibatkan adanya desakan-desakan perbedaan dalam hak asasi, kebebasan dan persamaan. Politik identitas sebagai *politic of difference*, setidaknya memerlukan *political tolerance*, terutama untuk menampilkan dan menghargai setiap perbedaan dalam konteks interaksi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi peta politik masa depan, yang berkembang ke arah politik yang beragam, sehingga dalam hal ini diperlukan moralitas berpolitik yang baik.

Pada mikropolitik, Foucault (1988:101) memandang politik identitas pada dua komponen, yaitu politik wacana dan bio-politik. Dalam hal yang disebut pertama, politik wacana menitik beratkan pada kajian kelompok-kelompok marginal yang berusaha untuk menghadapi wacana hegemonik yang memosisikan individu atau kelompok ke dalam “*straitjacket*” identitas-identitasnya untuk merasakan kebebasan atas perbedaan. Dalam hal yang disebut kedua, yaitu bio-politik (*bio-struggle*), entitas-entitas individu dan kelompok berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan dan berusaha memperoleh kembali hak-hak yang melekat dalam diri atau kelompok mereka, agar dapat dihargai dan dikenal.

Sementara itu, Klaus Von Beyme (1996; 122) mengembangkan karakter gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan, yaitu, pertama, tahap pramodern; kedua, tahap modern dan ketiga, tahap *postmodern*. Dalam tahap politik pramodern, perpecahan fundamentalis kelompok-kelompok etnik, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin (*elite*). Tujuannya adalah perampasan dan perebutan kekuasaan dari satu kekuasaan dominan.

Pada tahap modern, gerakan politik identitas muncul karena adanya pendekatan kondisional, keterpecahan suatu komunitas

dan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Dalam hal ini terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas (pemimpin) dan partisipasi dari bawah (rakyat), peran pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhir adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Kemudian, pada perkembangan postmodern, politik identitas muncul sebagai suatu gerakan yang berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan yang diberikan kepada individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan pada kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya.

Dalam pandangan akhir tentang politik identitas, khususnya yang membidik tentang etnik, penampilannya selalu dibarengi dengan relasi-relasi kekuasaan dalam pola-pola integrasi, separatisme, atau dalam posisi politik pribumi dan non pribumi. Politik integrasi terjadi ketika kelompok-kelompok etnik berusaha dan berinteraksi dengan menjaga dan menyatukan diri dalam suatu kelompok yang mengatasnamakan bangsa atau wilayah tertentu. Dalam integrasi, perbedaan-perbedaan etnik berusaha diintegrasikan pada kesamaan atas bangsa atau isme-isme kenegaraan seperti persatuan atau keutuhan wilayah atau bangsa.

Sebaliknya, separatisme muncul dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diintegrasikan ke dalam kelompok atau kesatuan bangsa. Separatisme dapat juga muncul dari relasi kuasa negara dengan kelompok etnik yang tidak mau mengintegrasikan diri dengan negara atau sengaja memisahkan diri karena berbagai faktor, seperti memisahkan diri membentuk negara, bangsa atau wilayah sendiri. Contoh kasus, lepasnya Bangladesh dari Pakistan, dan Pakistan lepas dari India.

Sementara itu, politik pribumi-non pribumi lebih disebabkan sebagai wacana relasi antar orang dalam dan orang luar suatu wilayah yang erat kaitannya dengan faktor-faktor migrasi dan penguasaan wilayah, sumber-sumber ekonomi dan penghidupan. Dalam konteks ini, politik pribumi merupakan upaya proteksi dan penjaan diri terutama konteks asli (*native*), yang kebanyakan kasus menerima kekalahan dari kaum pendatang. Asal usul pribumi dapat ditelusuri melalui kacamata sejarah etnik, seperti yang dilakukan oleh Arnold Krupat yang menyelidiki relasi orang Indian sebagai pribumi Amerika dengan orang kulit putih yang merupakan pendatang. Dengan *ethnohistory* dapat diselidiki apakah etnik tertentu mempunyai nilai-nilai yang *fair* bagi daerahnya pada masa pendudukan mereka (Krupat, 1992:4)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa identitas merupakan hal penting dalam menilai diri kita sendiri, diri orang lain, bahkan impresi orang pada kita. Dengan demikian identitas diartikan sebagai suatu proses kesadaran diri akan keberadaannya di lingkungan manapun, sehingga apa yang berarti dan baik buatnya akan dipertahankan untuk dapat dikenali oleh pihak lain agar tetap eksis dan diakui. Oleh karena itu, fungsi terpenting identitas adalah sebagai pembeda dan sekaligus pengada. Selain itu, identitas juga membantu terciptanya solidaritas dan integrasi sosial.

Usaha untuk dapat eksis dan dikenali dalam politik identitas, terlebih dahulu mengenal perbedaan baik individu maupun kelompok. Hal ini biasanya dilakukan jika ada kesenjangan (*distorsi*) yang sangat tajam dalam perbedaan tersebut, seperti relasi kuasa yang dibarengi dengan dominasi ataupun dengan resisten, sehingga untuk menguranginya, terkadang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang biasanya dapat melahirkan konflik, dan bahkan sampai tahap kekerasan. Kasus politik identitas seperti ini dapat terjadi baik itu

pada tema agama, gender, ras ataupun etnik, sedang kasus etnik Mandar, merupakan salah satu kenyataan dari politik identitas dalam upaya melepaskan diri dari dominasi kekuasaan etnik mayoritas.

c. Pemikiran Formasi Identitas

Pada dasarnya, identitas secara objektif didefinisikan sebagai lokasi (tempat keberadaan) di dalam suatu lingkungan tertentu dan dapat diperoleh secara subjektif bersama-sama dengan lingkungan tersebut. Identitas, dengan sendirinya, merupakan satu unsur kunci dari kenyataan subjektif, sebagaimana kenyataan subjektif, selalu berhubungan secara dialektis dengan masyarakat.⁷ Identitas dibentuk dalam proses-proses sosial, sehingga jika identitas sudah diperoleh wujudnya, maka biasanya akan dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Sementara itu, identitas dapat juga dihasilkan dari interaksi antar organisme, kesadaran individu, dan atau struktur sosial yang bereaksi, dari struktur sosial yang telah diberikan, diusahakan untuk memeliharanya, memodifikasinya atau bahkan membentuknya kembali (Berger dan Luckmann, 1990: 248).

Terkait dengan kenyataan sosial, identitas dapat dianggap sebagai bentuk konstruksi sosial. Identitas menjadi bagian dari pemikiran dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah produk manusia. Berger (1994:4), memandang proses dialektik dari masyarakat terdiri dari tiga momentum, eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Pemahaman eksternalisasi adalah penyesuaian diri baik dalam aktivitas fisik maupun mental dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivitas adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi di mana individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya melalui kesadaran subjektif. Melalui eksterna-

lisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivitas, masyarakat menjadi suatu realitas sui generis, unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.⁸

Sementara itu, Coolin (1997:5) memandang agak berbeda. Disebutkan bahwa realitas sosial dimaknai sebagai konstruksi sosial dari fakta manusia, fakta tersebut tidak hanya menyoroti tentang individu, tetapi juga pada kelompok atau *group* yang diistilahkan dengan kolektif sosial, fakta tersebut melihat fakta sosial pada tataran fisik. Topik yang mendalam dari konstruksi sosial terkait dengan “sosial”, yang dimaknai lebih sederhana bahwa kolektivitas menjadi bagian pemahaman spesifik. Esensialnya, bahwa konstruksi biasanya bekerja dalam agen-agen sosial pluralis, tidak pada individual. Selanjutnya, konstruksi kemungkinan terbuka pada agen generasi kolektif dan aktivitasnya dapat digunakan untuk menganalisis term individual.

Bertolak dari pemahaman di atas, identitas etnik Mandar, adalah identitas etnik yang terinternalisasi dalam tindakan, memiliki makna yang sangat penting karena dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok etniknya untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi problem dalam dirinya. Tindakan penciptaan identitas etnik Mandar tersebut, merupakan tindakan luar yang mengikutsertakan tindakan dalam dirinya yang tersembunyi. Dengan kata lain, identitas kelompok etnik dipandang sebagai tindakan yang bermakna pada konstruksi peran yang dibangun untuk menentukan ranah kekuasaan etniknya.

Dalam pandangan Bradley, konstruksi identitas karena ketidaksetaraan, divisi sosial dan perbedaaan. Varian itu menjangkau dari wilayah ke wilayah, waktu ke waktu dan individu ke individu. Menurutnya, identitas dapat dilihat dari keterlibatan individu yang mewujudkannya. Tiga tataran dalam perwujudannya meliputi :

1. Identitas Pasif, disebut juga identitas potensial. Identitas potensial menjadi sangat penting, di saat individu-individu mampu melihat diri mereka sendiri dan orang lain akan keberadaannya, namun identitas ini terkadang tidak nampak dengan jelas. Pandangan ini melihat pada identitas kelas seseorang.
2. Identitas Aktif, melihat kesadaran individu dan menetapkan dasar untuk melakukan tindakan. Elemen positif yang penting adalah identifikasi diri sendiri walaupun terkadang tidak bersifat kontinu dalam batasan membentuk identitas tunggalnya. Artinya bahwa identitas dapat muncul bersamaan ketika individu sadar akan keberadaannya.
3. Identitas Politik, identitas ini eksis ketika mereka sadar dan menyediakan waktu dan ruang yang lebih konstan untuk bertindak serta berpikir secara konstan demi identitas mereka. Identitas dibentuk dalam aksi-aksi politik. (Haralambos, 2000:929).

Sehubungan dengan pandangan di atas, Igram (1993) membenarkan bahwa konstruksi identitas secara politik terkait dengan aksi dan keputusan politik dari masyarakat atau elite yang akhirnya menentukan sikap politiknya. Artinya, sikap tersebut diambil berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan perasaannya akan resisten terhadap perubahan yang minimal secara psikologi tidak mengubah budaya politiknya (Lihat, Fiske and Taylor 1991; Kinder 1983; Hurwitz Peffey 1987).

Peran yang dijalankan oleh aktor dalam memformulasi situasi selalu mencoba mengupayakan identitasnya. Sehubungan dengan hal itu, Jenkins (Haralambos, 2000:927) memandang bahwa formasi identitas bukanlah hubungan yang sederhana dalam interaksi individu. Identitas terkait dengan kelompok sosial yang lebih luas. Interaksi membimbing untuk mengonstruksi batas, atau garis pemisah, antara perbedaan kelompok sosial yang membawa identitas berbeda.

Kekuatan dalam menunjukkan suatu identitas diri sendiri atau kelompok, atribut identitas kepada orang lain pada kenyataannya selalu terkait dengan aspek kekuasaan. Suatu kelompok mempunyai kekuasaan lebih daripada kelompok lain, menunjukkan identitas diri dan atribut identitas kepada yang lain. Lebih jauh, identitas secara cermat dihubungkan dengan posisi sosial, bagian dalam organisasi. Klasifikasi organisasi masyarakat atas dasar pekerjaan dan kedudukan, tidaklah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih posisi mereka dalam organisasi.

Bagi Jenkins, eksistensi identitas diasosiasikan oleh kelompok dan posisi sosial dalam organisasi, artinya bahwa identitas tidak bisa sepenuhnya terpenuhi dengan cara dan alasan yang sederhana. Menurutnya, bahwa identitas sosial, baik kelas, gender, *race*, atau etnisitas dan sebagainya dapat eksis, dibangun, diperoleh dan dialokasikan melalui relasi kekuasaan. Identitas terkadang dikonstruksi atau diperjuangkan untuk memperoleh posisi melalui tipu daya yang hebat. Identitas terbangun melalui interaksi antar anggota kelompok, yaitu produk sosial yang melibatkan mereka yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan.

Dalam menjalankan formasi identitas, Castell (2004:6-12) membidik studi tentang identitas melalui tiga sudut yang berbeda: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*.⁹ *Legitimizing identity* menawarkan pembahasan bahwa identitas yang dipaksakan oleh suatu lembaga dominan, misalnya, negara. Dengan kata lain, bahwa kajian identitas dari perspektif kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain.

Resistance identity, adalah salah satu identitas tandingan yang muncul menentang penyeragaman identitas oleh lembaga dominan. *Resistance identity*, membuka cara melihat identitas dari sudut pan-

dang kelompok yang tertindas, dimarginalisasi, dan atau didevaluasi oleh kelompok dominan. Dapat diartikan bahwa perspektif ini dapat mudah ditemukan dikalangan kelompok minoritas serta mereka yang termarginalkan, biasanya diberikan kepada kelompok suku bangsa, ras, etnik, atau bahkan agama tertentu.

Memang, ada pandangan bahwa masalah mayoritas dan minoritas tidak tergantung pada jumlah, tetapi terletak pada siapa yang terbanyak menguasai atau mendominasi dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, meskipun mayoritas penduduk di Afrika Selatan berkulit hitam, mayoritas penguasa politik adalah kulit putih.

Project Identity, sebagai identitas tandingan, dibangun dengan antusias oleh kelompok-kelompok yang menjunjung otonomi dan ingin lepas dari jeratan masa lampau. Dengan kata lain, bahwa perspektif ini menyoroti isu yang berhubungan dengan transformasi identitas sebagai sebuah proyek yang dibangun untuk sebuah perubahan. Sebagai suatu kajian, *resistance identity* dan *project identity* sangat erat bersentuhan dengan tema politik identitas (Sparringa, 2007).¹⁰

Dalam proses perubahan identitas, Reminick (1983, 27), menelusuri empat model proses perubahan identitas etnik berdasarkan fenomena terjadinya, yaitu: (1) Awal 1937, seorang sejarawan Marcus Lee Hansen menyoroti adanya perubahan etnik identitas di Amerika dengan melihat dua generasi pada pengalaman mereka dalam krisis identitas. (2) Daniel Glaser (1958) dengan model yang disebut dinamisasi identitas etnik yang menitikberatkan proses intermediasi psikologi, meliputi empat tingkat yakni; tingkat segregasi, marginalisasi, tingkat desegregasi dan asimilasi. (3) Andrew Greeley (1971) melihat pada perubahan identitas etnik dan asimilasi, meliputi: goncangan budaya, organisasi dan kesadaran diri, asimilasi dalam elite, militansi, kebencian diri dan antimilitansi, dan munculnya aturan

atau tradisi. (4) Stein dan Hill (1971) menyoroiti model identitas etnik dengan melihat pada tujuan penguasaan terhadap normalisasi, asimilasi atau resolusi integratif.

Model perubahan identitas yang diteliti oleh Reminick, menunjukkan betapa banyaknya fenomena yang dapat mengakibatkan sebuah identitas dikonstruksi kembali. Pada dasarnya, model-model yang telah diklasifikasikan oleh Reminick ditelusuri berdasarkan tahun-tahun bergejolaknya identitasnya, secara umum, semua dilatarbelakangi oleh aspek sosial terutama adanya perbedaan perlakuan dalam masyarakat, yang akhirnya berpindah ke ranah perolehan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa identitas dapat diposisikan pada tempat yang diinginkan sebagai sesuatu yang penting melalui formasi-formasi tertentu. Formasi dalam pengupayakan identitas oleh individu dapat dilakukan melalui mekanisme interaksi antar subjek atau antar kelompok dalam tataran relasi kekuasaan. Formasi identitas yang dibarengi dengan pencarian kekuasaan selalu berupaya menciptakan dan memperjuangkan elemen-elemen identitas. Elemen yang diperjuangkan biasanya merupakan instrumen simbol-simbol yang sangat dihormati dan dihargai. Penempatan simbol-simbol tersebut menjadi alasan untuk mengintergrasikan anggota kelompok dalam memperoleh keuntungan-keuntungan politik.

Akhirnya, secara singkat dapat ditegaskan bahwa formasi identitas adalah sebuah proses sosial yang sangat kompleks, dinamis, dan selalu berimplikasi pada terbentuknya relasi sosial dan struktur kekuasaan atas dasar ketidaksetaraan (*inequalities*), divisi sosial (*social division*), dan perbedaan (*difference*). Oleh karena itu, walaupun merupakan sebuah konstruksi sosial, identitas selalu bernuansa pada aspek politik baik sebagaimana ditemukan dalam praktik dan wacana.

d. Collective Action sebagai Formasi Identitas

Dalam studi identitas salah satu bagian yang tidak dipisahkan dari formasi identitas adalah *Collective Action*. Kajian ini mendukung pemikiran tentang konstruksi identitas sebagai suatu komponen penting dalam melihat tindakan kolektif. Tindakan kolektif memungkinkan para aktor (elite) terlibat dalam konflik yang melibatkan diri mereka dengan orang lain yang terkait dengan kepentingan, nilai-nilai, dan *common histories*. Identitas dikembangkan dan direnegosiasikan kembali melalui berbagai proses. Hal ini melibatkan konflik dan ketegangan ketika identitas itu ditemukan kembali (*re-invented*) sebagai karakteristik dari pengalaman aktor dengan identitas yang dimaknai sebagai sesuatu simbolis dari ciptaan (*creation*) yang dibarengi dengan ritual-ritual tertentu. Keterlibatan aktor dalam mengkonstruksi ketegangan tersebut biasanya menghadirkan wacana perbedaan identitas. Terkadang wacana tersebut menjadi instrumen terjadinya gerakan dan menurut para ilmuwan sosial hal ini merupakan titik sentral dari analisa tindakan kolektif (Porta, 2004:109).

Dalam melihat hubungan formasi identitas, secara khusus melibatkan hubungan antara identitas dan *collective action* (Pizzorno 1978; Cohen 1985; Melucci, 1989; Calhoun 1991; Mach 1993). Identitas bukan merupakan obyek yang otonom bagi aktor, melainkan sebagai suatu proses yang melibatkan aktor untuk dapat mengenal diri mereka sendiri serta untuk dapat dikenali oleh aktor lain sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Atas dasar itu, pengalaman aktor menjadi hal utama dalam pengembangan pemikirannya dari waktu ke waktu. Hal yang dapat dicatat, bahwa pada satu sisi identitas merupakan kompleksitas yang mewakili dimensi individu dan dimensi kolektif, pada sisi lain melalui pemeliharaan dan revitalisasi identitas, individu dapat mendefinisikan dan me-redefinisikan pro-

yek dan berbagai kemungkinan melakukan tindakan kolektif secara terbuka dan tertutup. Dengan demikian, identitas adalah proyek politik dan pribadi yang sering kali melibatkan aktor dalam berpartisipasi (Calhoun 1994a: 28). Selain itu, konstruksi identitas juga tidak hanya berfokus pada kajian psikologis dari proses sosial, tetapi *re-invented* sebagai hasil dari proses kolektif.

Terdapat karakteristik dalam melihat hubungan antara identitas dan *collective action*, yaitu: apa yang dihasilkan dalam identitas adalah komponen esensial dari tindakan kolektif, melalui identifikasi dari aktor yang terlibat dalam konflik, mempercayai aktivitas yang menghubungkan antara aktor dan menegakkan hubungan antara peristiwa dari waktu yang berbeda.

Selain itu, terdapat tiga paradoks yang memperdebatkan tentang konstruksi identitas; yaitu, pertama, dihubungkan sebagai hal yang alami, dinamis, dan statis dari identifikasi sosial. Pada satu sisi, acuan tentang identitas menempatkan kontinuitas dan kesinambungan solidaritas dari waktu ke waktu, pada sisi lain, tidak dapat mengabaikan fakta bahwa identitas terbuka pada redefinisi yang tetap. Mata rantai yang menghubungkan antara aktor dengan pengalaman historis dan dengan kelompok tertentu, nampaknya menjadi sesuatu yang tidak jelas. Keterlibatan hal tersebut, merupakan reinterpretasi simbolik dari dunia di mana tidak dapat diabaikan secara selektif dan parsial.

Kedua, paradoks yang mewakili dalam memperkenalkan *multiple identity*, atau disebut pula dengan rasa keterlibatan individu pada beberapa kolektif yang berbeda. Dalam hal ini, identitas bergerak pada prinsip-prinsip organisasi dalam hubungan antara individu dan pengalaman kolektif. Pada saat yang sama, bagaimanapun, definisi yang menghubungkan solidaritas dan oposisi seringkali menjadi sesuatu yang kurang jelas, dibandingkan dengan menghilangkan

identitas yang lama, identitas baru lebih eksis dengan membangkitkan ketegangan antara aktor yang berbeda *self-representations*, atau aktivitas antara identitas siapa dengan beberapa gerakan yang terjadi dari generasi berbeda (Whittier, 1995: 97).

Ketiga, paradoks yang mendiskusikan hubungan antara peran identitas dalam kerangka penafsiran tindakan kolektif. Ketika definisi identitas terkait dengan komponen yang berkenaan dengan emosi, atau untuk menilai model dari tindakan kolektif, melibatkan pada biaya dan manfaat, sebagai elemen yang lemah. Bagaimanapun, banyak para ilmuwan telah merujuk bahwa identitas yang tepat adalah menjelaskan tindakan kolektif dalam terminologi yang rasional (Pizzorno, 1978). Dengan demikian, konsep ini dapat terus dikembangkan sebagai salah satu bagian dari teori sosial.

Sementara itu, mekanisme tindakan kolektif yang mendasari identitas menurut Porta (2004, 87-91) dibagi tiga, yaitu: pertama, tindakan kolektif tidak akan ada tanpa kehadiran “*we*” yang menandai “*common traits*” dan solidaritas spesifik. Selain itu tindakan kolektif juga membutuhkan identifikasi dari “*other*” yang digunakan sebagai atribut responsibilitas dari para aktor untuk melakukan mobilisasi (Gamson, 1992b). Konstruksi identitas mengimplikasikan pada dua definisi penting, yaitu definisi positif dan negatif. Pada hal yang disebut sebagai definisi positif, konstruksi identitas mengarah pada partisipasi seseorang dalam kelompok tertentu, sedangkan dalam definisi negatif konstruksi identitas diartikan pada seseorang yang tidak terlibat dalam kelompok dan cenderung menentang kelompok tersebut. Hal ini terkait pula pada mereka yang masuk posisi netral, sejauh konflik nantinya akan melibatkan mereka. Referensi ini menekankan bahwa komponen gerakan identitas merupakan sesuatu yang terbentuk dan dibentuk untuk kelangsungan hidup.

Kedua, identitas yang diproduksi (baca: dikonstruksi), kemunculannya berasal dari hubungan jaringan-jaringan baru antar gerakan aktor, yang beroperasi dalam lingkungan sosial yang kompleks. Eksistensi dari hubungan tersebut sebagai jaminan kepercayaan sebuah gerakan mendapat peluang. Hal ini merupakan dasar untuk mengembangkan jaringan komunikasi informasi, untuk terjalannya interaksi, diperlukan juga sebagai instrumen pendukung. Nampaknya, informasi merupakan sumber daya organisasi, lagi pula informasi dapat mempercepat jaringan interaksi pribadi. Selain itu, pengembangan hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada akses media, kepercayaan antar aktor dalam membangun identitasnya dengan budaya politik yang sama memungkinkan menghadapi besarnya *cost* dan risiko yang dihubungkan dengan diskriminasi. Akhirnya dapat diidentifikasi bahwa ke-identitasan para aktor diartikan sebagai gerakan yang juga mengharapkan bantuan dan solidaritas kaum militan (Gerlach and Hine, 1970; Gerlach, 1971).

Para aktor secara aktif kini telah berminat pada identitas dari pada masa lalu, identitas mereka merupakan tema dasar yang dikaitkan dengan kekuatan teritori. Identitas kolektif sedikitnya bergantung secara langsung pada interaksi *face-to-face* yang membangun komunitas lokal dan wilayah dari waktu ke waktu. Fenomena seperti ini merupakan syarat bergantinya *pre-modernity* ke *modernity*, dan kemunculan opini publik diintegrasikan melalui wacana yang tertulis (Anderson, 1983; Tarrow, 1992).

Konstruksi identitas melalui gerakan dapat diartikan memiliki keterikatan dengan solidaritas ke arah orang lain, dalam banyak kasus, hal ini merujuk pada kontak personal secara langsung, difokuskan dengan siapa mereka satu tujuan, hal ini terkait pada aspirasi dan nilai-nilai. Aktivitas dan simpatisan gerakan menyadari partisipasi dalam realitas lebih rumit dibandingkan mereka yang memi-

liki pengalaman langsung. Dalam komunitas yang luas, para aktor menggambarkan motivasi dan dorongan ke arah tindakan, bahkan ketika lahan peluang dibatasi dan adanya isolasi yang kuat.

Ketiga, identitas kolektif menjamin pengalaman tindakan kolektif dari waktu ke waktu. Karakteristik gerakan bergantian antara tahap '*visible*' (kelihatan) dan '*latent*' (tertutup) (Melucci, 1984a). Masyarakat sebagai dimensi berlakunya tindakan, mewujudkannya melalui demonstrasi, prakarsa publik, intervensi media dan seterusnya, pada level tingkat tinggi berlangsung dengan kooperasi dan interaksi di antara berbagai mobilisasi aktor. Selanjutnya, pada tindakan antara organisasi dan dominasi produk-produk kultural. Kontak antara organisasi kelompok militan, atas keseluruhan, dibatasi pada interpersonal, hubungan informal, atau untuk hubungan *interorganizational* yang mana tidak menghasilkan kapasitas untuk mobilisasi massa. Dalam kasus ini, solidaritas kolektif dan rasa memiliki bukanlah suatu hal yang nyata para aktor masuk untuk melakukan mobilisasi. Identitas dipelihara melalui tindakan sembunyi dengan jumlah aktor yang terbatas. Tepatnya bahwa, kemampuan kelompok ini secara nyata menghasilkan kembali representasi dan model solidaritas setiap waktu, hal ini menciptakan kondisi bagi peningkatan tindakan kolektif dan mengizinkan untuk melacak gejala dari tindakan masyarakat ke arah mobilisasi dahulu (Melucci, 1984a; Rupp and Taylor, 1987; Johnon, 1991b; Muller, 1994).

Terkait dengan uraian di atas, fungsi identitas tidak hanya beroperasi atas wahana dan penyajian kolektif dan persepsi yang tersebar luas dari fenomena sosial tertentu. Akhir-akhir ini lebih menghubungkan pada pengalaman individu dalam membangun identitas mereka sendiri, atribut individu dilekatkan dan diartikan sebagai tahap dari pribadi dan publik sejarah mereka sendiri. Hal ini sering mencerminkan cerita hidup mereka. Adalah sesuatu yang benar

bahwa mobilisasi berfungsi untuk menarik ke orang-orang terlibat dalam gerakan sosial yang tidak memiliki pengalaman tindakan kolektif sebelumnya.

Memperbincangkan kesinambungan dari waktu ke waktu tidak mengartikan bahwa identitas tetap berlaku, akan tetapi selalu diperbaharui. Acuannya selalu pada masa lalu, tetapi kenyataannya selalu selektif. “Kontinuitas” dalam hal ini diartikan untuk mengelaborasi elemen-elemen identitas yang aktif tentang riwayat hidup diri sendiri dan reorganisasi mereka di dalam suatu konteks baru. Dengan cara ini, dapat dimungkinkan untuk bersatu pada pengalaman kolektif dan pribadi, yang tidak tampak sebagai sesuatu yang bertentangan.

Pada satu sisi, elemen identitas adalah cita-cita untuk membangun hubungan sosial melampaui perbedaan dan distorsi antar komunitas. Hal ini diperuntukkan pula pada suatu konsepsi tindakan kolektif yang terkait pada pengumuman atas kebenaran absolut dan dengan kesaksian diri sendiri secara ideal (dan ideologi) terhadap prinsip, yang tidak memedulikan distorsi antar individu pula.

Pada sisi lain, elemen identitas berisikan pengalaman tindakan kolektif yang baru, di mana tidak bisa diartikan sebagai pemutusan hubungan dengan masa lalu, sampai taraf tertentu. Dalam beberapa hal, keputusan untuk melakukan tindakan kolektif dalam suatu organisasi atau sebuah proyek karakteristik yang berbeda pengalaman atau yang terkait identitas, hasilnya merupakan suatu perubahan bentuk yang radikal bagi individu. Dalam kasus ini, orang-orang mengalami konversi asli, yang sering berarti memutuskan hubungan secara sosial yang sebelumnya mengikat mereka. Transformasi identitas dapat ditemukan lebih banyak dari kasus ini. Hal ini tidak hanya dapat dilihat pada kecenderungan yang politis individu dan tingkat keterlibatannya dalam tindakan kolektif, tetapi juga sebagai pilih-

an hidup yang global dan bahkan terorganisasi dari kehidupan sehari-hari. Gejala yang sama juga dapat ditemukan pada mereka yang bergabung dalam gerakan keagamaan (Robbins, 1988: 3; Snow, 1980; Wilson, 1982; Wallis and Bruce, 1986).

Pada dasarnya tindakan kolektif merupakan kajian khusus yang terjadi dalam kelompok sosial dengan dua alasan, yaitu: pertama, mudah diidentifikasi dan berhubungan dengan berbagai perbedaan dalam kelompok sosial; kedua, memberi kontribusi pada jaringan sosial dari anggota masyarakat, dengan level yang tinggi dari kohesi internal dan dapat pula melalui identitas spesifik. Tindakan kolektif akan bergantung pada situasi tertentu sehingga kehadirannya simultan dalam kategori perilaku yang spesifik dan jaringannya terkait pada perilaku aktor (Oberschall, 1973; Tilly, 1987). Dari perspektif ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menganalisis relasi antara struktur dan tindakan aktor terkait pada perubahan yang dibuat, khususnya dibangun dengan relasi sosial, rasa solidaritas, dan kepemilikan kolektif yang dapat memungkinkan terwujudnya kepentingan identitas spesifik dan yang dihubungkan dengan mobilisasi.

2.3.4. Politik Elite sebagai Formasi Identitas

Formasi yang ditunjukkan untuk memperoleh kekuasaan, dalam kajian-kajian sosial biasanya dimobilisasi oleh kekuatan tertentu. Dalam kajian ini, formasi diupayakan sebagai langkah mendapatkan kembali identitas etnik. *Re-invented* etnik Mandar diciptakan dari kekuatan sosial ada, diidentifikasi atas peran yang dijalankan elite. Dalam hal ini, elite berada di garis depan, menjalankan tugas untuk memobilisir massa atas nama kepentingan etnik.

Apa sebetulnya elite? Literatur tentang hal ini telah banyak diperbincangkan oleh para ilmuwan sosial. Kehadirannya menjadi

diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (1951), Laswell (1952) dan Wright Mills (1957) yang melacak karya-karya dari pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Goestano Mosca (Italia), Robert Michels (Jerman) dan Jose Ortega Y.Gasset (Spanyol).

Karya-karya dari pemikir Eropa ini digolongkan sebagai generasi teoritis elitis yang diawali oleh pemikiran Pareto (1848-1923). Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik. Mereka itulah yang dikenal dengan elite. Dia mengklasifikasi masyarakat dalam dua kelompok kelas, yakni: pertama, lapisan atas, yaitu elite; yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan yang tidak memerintah (*non-governing elite*); kedua, lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite (S.P Varma, 1992:202; Usman, 1990: 6; Haralambos, 2000:601).

Pareto sendiri lebih memusatkan perhatian pada elite yang memerintah. Menurutnya, elite itu berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang penting. Dalam hal ini, menurut Pareto cara yang dilakukan *the governing elite* dalam mengontrol massa dengan kecerdikan dan kelicikan. Dia menegaskan bahwa sumber kekuatan besar berasal dari aktivitas manusia berupa perasaan sentimen dan perhatian. Dalam usaha untuk mengabsahkan kekuasaannya atau merasionalkan penggunaan kekuasaannya, elite melakukan dengan cara penuh kekerasan (*the applications of violence*) dan dengan penuh tipu daya (*by fraud*). Untuk mencapai tujuannya, elite melakukan dengan dua cara. Pertama para elite mengerahkan segala macam kekuatan fisik yang dimiliki sekaligus melakukan persuasi moral dan intelektual. Kedua, para elite menggunakan kecerdikan yang sedemikian rupa sehingga massa rela menuruti kehendaknya.¹¹

Generasi kedua teoretis elitis adalah Mosca (1858-1941), layaknya Pareto, dia mengembangkan konsep pergantian elite, dengan mengkaji bahwa pada masyarakat yang paling maju dan kuat-selalu muncul dua kelas yaitu, kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama, biasanya jumlahnya lebih sedikit memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang didapat dari kekuasaan. Sementara kelas kedua, jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas pertama (Mosca, 1976: 2)

Mosca berbeda dengan Pareto, selain lebih menekankan analisisnya pada aspek psikologis juga aspek sosiologis. Dia menunjukkan kaitan perubahan di dalam lingkungan masyarakat dengan sifat-sifat individu. Rumusan kepentingan dan cita-cita menimbulkan permasalahan dalam mempercepat pergantian elite. Mosca tidak setajam Pareto dalam membahas masalah idealisme dan humanisme, dia lebih menyukai masyarakat yang dinamis dan berubah melalui persuasi dan menyarankan elite memerintah secara bertahap mengadakan perubahan dalam sistem politik agar sistem tersebut menyesuaikan dengan perubahan yang dikehendaki masyarakat.

Pandangan Mosca ini tampaknya memiliki pemikiran yang spesifik akan kebertahanan elite. Alasan elite dapat bertahan disebabkan oleh tiga komponen, yaitu: organisasi (struktur politik), kekuatan individu (personal) dan kekuatan sosial (masyarakat/lingkungan). Ketiga komponen ini terakumulasi dalam sistem politik sehingga kekuasaan elite mampu meredam jalur pergantian elite, dalam hal ini elite harus memiliki tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas yang positif. Satu komponen penting menurut Mosca adalah “formula politik” yang tidak lain berupa ideologi kelas. Ideologi ini sebagai konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima oleh kelompok elite (Mosca, 1939:70). Tujuannya untuk melestarikan do-

minasi elite serta eksistensinya atau bahkan merupakan kebutuhan nyata yang diyakini memberikan kontribusi positif dalam struktur dan sirkulasi elite.

Perspektif kedua elite adalah pluralis, dimotori oleh Lasswell (1951), Robert Dahl (1961), dan Giovanni Sartori (1965). Kaum pluralis menentang perspektif elitis yang memandang kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elite. Kaum ini berpandangan bahwa politik pada hakekatnya melibatkan kompetisi antara bermacam-macam kelompok kepentingan. Oleh karena setiap kelompok kepentingan memiliki kelemahan sekaligus keunggulan, maka dalam perjalanan politik sebenarnya tidak ada satupun kelompok kepentingan yang dominan (Usman, 1990: 25). Kaum ini percaya bahwa kekuasaan tersebar merata ke berbagai kelompok kepentingan.

Dalh mengkaji elite dalam perspektif pluralis dengan satu pertanyaan “*who governs?*” Dia mengidentifikasi politik lokal di New Haven secara berkesinambungan yang menekankan pada pembagian dalam tiga areal utama, (1) pembaharuan dari kota, meliputi pembangunan ulang pada pusat kota; (2) nominasi politik, dengan mengutamakan titik berat pada jabatan yang terbesar; (3) pendidikan, yang mengkonsentrasikan pada isue seperti penempatan sekolah dan gaji guru. Setelah melakukan seleksi terhadap perbedaan isue tersebut, dia menyatakan bahwa sangatlah mungkin ketika suatu kelompok memonopoli pengambilan keputusan terkait dengan masalah komunitas kelompok.

Kajiannya menemukan tidak ada bukti suatu kelompok mendominasi pengambilan keputusan, namun menyimpulkan bahwa kekuasaan dapat berasal dari bermacam-macam kelompok kepentingan, dikembangkannya pendapatnya bahwa kelompok kepentingan menentukan politik lokal ketika isu menunjukkan kaitan utama mengenai ke-eksistensinya. Dalh menegaskan bukti tentang po-

litik lokal adalah sebuah bisnis tawar menawar dan kompromi dengan tidak ada satu kelompokpun yang mendominasi pengambilan keputusan. Pemimpin dan wakilnya dalam membuat keputusan harus berkonsultasi dahulu dengan berbagai kelompok kepentingan, hasilnya dapat diterima dari komponen masyarakat termasuk partai.

Teoretis lain yang melihat perspektif ini adalah David Marsh (1983), mendiskripsikan sejumlah usaha untuk menjelaskan distribusi kekuasaan dan operasi dalam negara terhadap teori elite pluralis. Teori ini memiliki persamaan dengan pluralis klasik, yakni; (1) melihat masyarakat barat sebagai peletak dasar demokrasi, (2) memahami pemerintahan sebagai proses kompromi, (3) menyetujui kekuasaan tersebar ke semua komponen masyarakat. Di lain pihak, Marsh berpendapat; (1) tidak menerima semua masyarakat memiliki banyak kekuasaan sama, (2) tidak mengonsentrasikan lebih istimewa pada kekuasaan satu pihak, (3) melihat elite, kepemimpinan kelompok sebagai partisipasi utama dalam pengambilan keputusan.

Elite pluralis juga akhirnya dikritik kemungkinan bersifat sementara, beberapa kepentingan tidak representatif dan kelompok memiliki lebih kekuasaan dibandingkan dengan yang lain. Membenarkan bahwa semua individu tidak diperbolehkan terlalu aktif dalam politik, tidak ada ukuran kekuasaan satu pihak dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya analisis elite pluralis tidak memuaskan sedikitnya dilihat dari tiga jalur. Pertama, menunjukkan bahwa demokrasi bukan kerja yang terbaik, ini dibuktikan dengan tegaknya ketidakteraturan pandangan dasar pluralis di mana kekuasaan tersebar dalam masyarakat industri barat. Kedua, mencatat eksistensi kepemimpinan elite, mereka gagal mendiskusikan bahwa elite monopoli kekuasaan dan digunakan untuk kepentingannya. Ketiga, elite pluralis hanya menghitung dua pihak kekuasaan, melupakan

yang lain. Mereka tidak mendiskusikan kekuasaan anggota masyarakat dan pengaruhnya atas keinginannya.

Dalam usaha memahami cara elite untuk mendapat legitimasi dari masyarakat, tidak hanya dapat diasumsikan dari pendekatan elitis dan pluralis semata. Hal itu disebabkan dalam praktiknya kepatuhan yang diberikan masyarakat kepada elite biasanya karena dibarengi unsur keterpaksaan, artinya ada sebagian masyarakat mengikuti kata-kata elite karena mereka mendapat penghargaan sosial jika mendekati elite, hal ini setidaknya mengangkat status sosialnya pula.

Sementara itu Surbakti (2007) menilai bahwa elite diterjemahkan bukan sebagai kelompok, tetapi mewakili individu-individu yang memiliki kekuasaan dan mampu menggunakan sarana-sarana kekuasaan. Di tingkat lokal kategori elite dibagi karena pengaruh yang dimilikinya, yaitu: pertama, individu atau siapa yang memiliki posisi tinggi terutama yang memiliki jabatan-jabatan tinggi. Dalam kategori ini dapat diasumsikan pada siapa yang memiliki posisi dan berpengaruh, atau memiliki posisi tapi tidak berpengaruh. Kedua, individu dilihat dari reputasinya. Reputasi ini karena pengaruh yang dimiliki dalam suatu daerah terkait pada siapa informannya. Ketiga, elite yang mempunyai pengaruh akibat keputusan yang diambil yang memiliki dampak yang luas, dalam hal ini yang diidentifikasi adalah siapa yang membuat keputusan dan akibat dari keputusan tersebut pada objek penerima.

Sedang dalam memahami perilaku elite politik, Nasruddin Syamsuddin (1993, 124) mengemukakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, dengan melihat aspek keberadaan aktor politik, sedangkan pendekatan kedua memusatkan diri pada produk dari proses politik. Dalam pendekatan pertama, yang dianggap sebagai elite politik adalah tokoh puncak di antara para pelaku yang melaksanakan kegiatan politik. Sementara pendekatan kedua, fokusnya lebih

luas lagi dan tidak terbatas pada elite politisi saja, di dalam kategori ini dimasukkan elite yang memengaruhi proses dan produk, tanpa membedakan apakah mereka berasal dari bidang politik, pemerintahan, militer atau ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semua elite yang mempunyai kepentingan politik dan berusaha memengaruhi proses politik yang memformulasikan kepentingannya disebut elite politik.

Secara umum, telah dijelaskan pembedaan dalam mengkaji elite, yaitu secara elitis dan pluralis. Uraian selanjutnya menelaah tiga penekanan yang ditentukan para ilmuwan sosial dalam memberikan kategori elite, tujuannya agar mudah untuk membedakan orientasi elite berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini kemungkinan ada tiga sudut pandang tentang pengertian elite, yaitu : Pertama, sudut pandang struktur. Kedua, sudut pandang lembaga. Ketiga, sudut pandang nilai. Ketiga aspek ini dijelaskan lebih lanjut.

1. Sudut Pandang Struktur

Sudut pandang struktur menekankan pada kedudukan elite dalam struktur masyarakat, sehingga menyebabkan mereka memegang peranan terpenting dalam aktivitas masyarakatnya. Kedudukan tersebut dicapai melalui usaha dan prestasi yang tinggi (*achieved status*) atau melalui kedudukan sosial yang melekat seperti keturunan, prestasi ataupun karena kelahiran. Ilmuwan yang mendukung sudut pandang ini adalah C. Wright Mills (1957) dan J.W. Schoolr (1986: 128). Mills memandang bahwa elite adalah kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari mereka yang menduduki posisi komando pada puncak pranata masyarakat. Inti pendapat ini menunjukkan bahwa elite berperan penting dalam masyarakat karena posisi mereka pada puncak pranata sosial masyarakatnya. Sementara itu J.W. Schoolr menyatakan bahwa elite merupakan golongan-

an utama dalam masyarakat didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam struktur masyarakatnya. Posisi yang tinggi tersebut terdapat dalam bidang kehidupan, antara lain; ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan lainnya. Pendapat ini ditekankan pada posisi puncak struktur masyarakat itulah yang menyebabkan peranannya demikian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Dari pandangan ilmuwan ini, dapat disimpulkan bahwa peranan dominan elite dalam kehidupan bersama masyarakat disebabkan oleh posisi pada lapisan puncak yang didudukinya dalam masyarakat.

2. Sudut Pandang Lembaga (Organisasi)

Sudut pandang lembaga menekankan adanya lembaga atau organisasi merupakan alat pendukung elite dalam peranannya di masyarakat. Dasar dari pengaruh dan peranan elite tersebut adalah lembaga atau organisasi tempat ia berada. Dengan demikian, individu atau kelompok dapat menjadi kelompok yang berpengaruh atau berperanan, karena berada dalam lembaga sehingga memungkinkan masyarakat dapat menerima keadaan tersebut. Ilmuwan yang melihat dari pandangan ini menyatakan bahwa elite dapat berperan besar dalam kehidupan bersama, khususnya dalam pembangunan, karena memiliki wewenang nyata sebagai organisasi pemerintah wilayahnya (Smith, 1984). Pandangan tersebut menunjukkan elite didasarkan atas dukungan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya. Misalnya wewenang kepala desa untuk memimpin desanya, sekaligus menempatkannya sebagai elite desa.

Pandangan lain menyatakan bahwa kelompok elite terdiri dari tokoh-tokoh yang memegang dan memiliki otoritas tradisional yang mengendalikan sistem komunikasi secara terpadu dan sebagian besar tertutup. Inti pandangan ini adalah elite dapat memainkan peranan penting karena landasan otoritas tradisional. Dasarnya karena

penerimaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sekaligus sebagai sumber keabsahan kekuasaan elite tersebut.

3. Sudut Pandang Nilai

Sudut pandang nilai menekankan pada kemampuan elite sebagai kelompok dalam masyarakat untuk membentuk atau menciptakan nilai-nilai (*values*) yang diakui dan mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakatnya. Nilai tersebut dapat berupa kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan kehormatan atau kesempatan, atau suatu kombinasi diantaranya, karena yang menjadi dasar adalah kemampuan membentuk atau mencipta, maka semakin banyak nilai yang dapat dikumpulkan akan semakin tinggi kedudukan elite tersebut dalam masyarakatnya.

Ilmuwan yang mendukung sudut pandangan ini, antara lain Harold D. Laswell (1952), Robert Michels (1949) dan Karl Mannheim (1947). Laswell mengatakan bahwa elite adalah kelompok yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh nilai yang mereka bentuk atau ciptakan mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakat. Sementara itu, Michels mengemukakan bahwa kaum elite tidak hanya ada, tetapi juga keberadaan dan kemunculannya tidak dapat dihindari. Dasar teori ini adalah kekuasaan yang dipegang oleh kaum elite, mereka membuat keputusan cepat dan membentuk nilai-nilai masyarakat yang luas. Masyarakat tidak memiliki arah dan menerima nilai-nilai kaum elite. Dalam hal ini, Michels membagi kehidupan manusia menjadi dua kelompok: elite dan masyarakat, apabila kaum elite membuat keputusan cepat dan membentuk masyarakat berdasarkan gambaran pikirannya sendiri, maka secara logika satu-satunya cara yang paling efektif untuk menjelaskan pengalaman politik berbagai negara atau untuk meramalkan kebijakan yang akan datang melalui pengidentifikasian kaum elit di negaranya dan memahami nilai-nilai

yang dipegangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Karl Mannheim (dalam Varma, S.P, 1985; 212) berpendapat bahwa pembentukan kebijakan sebetulnya, ada di tangan para elite, tetapi hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tersebut tidak demokratis. Masyarakat dapat bertindak menggantikan para pemimpin mereka atau memaksanya mengambil keputusan atas dasar nilai dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Mannheim menilai dan menekankan bahwa kekuasaan politik selalu dijalankan oleh minoritas elite berdasarkan nilai yang diberikan oleh masyarakat.

Terkait dengan uraian di atas, penulis dapat menegaskan bahwa elite yang berperan dalam konstruksi identitas di Mandar, mempunyai kedudukan utama atau dominan dalam struktur masyarakat. Hal itu didasarkan atas kemampuan mereka dalam membentuk atau menciptakan nilai-nilai identitas, apa yang telah dibangunnya diakui dan mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakat, karena elite berpengaruh dan berperan dalam lembaga sosial sehingga masyarakat menerima keadaan tersebut.

Secara khusus, konsep elite pada tingkat lokal diperkenalkan oleh Koentjaraningrat (1984) dan Sunyoto Usman (1991). Menurut pandangan Koentjaraningrat, di tingkat lokal elite (pemimpin) terbagi dalam dua, yaitu elite atau pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin masa kini (1984, 128-147). Elite tradisional adalah mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa karena memiliki ciri-ciri tradisional yang dinilai tinggi oleh masyarakat lokal, seperti keturunan, berkekuatan sakti, karismatik, berkemampuan ekonomis untuk melakukan upacara-upacara keagamaan, berkemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sangsi. Sedangkan elite masa kini adalah mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa karena memiliki ciri-ciri masa kini, seperti kemampuan pilihan rasional untuk

memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan, legitimasi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Sunyoto Usman (1991; 27-37) mengelompokkan elite dalam dua tipologi yakni: elite institusional (*institutional elites*) yakni mereka yang berada pada puncak strata masyarakat karena jabatan formal terutama dalam pemerintahan, dan elite yang berada di luar garis birokrasi (*non legitimate elites*), mereka adalah individu-individu yang dikategorikan dalam kelompok elite karena garis keturunan yang terhormat dalam masyarakat, kaya atau memiliki ilmu keagamaan yang tinggi.

Pandangan elite yang dinyatakan Koentjaraningrat dan Usman memiliki kesamaan, keduanya menilai bahwa elite merupakan orang yang mempunyai kecakapan dalam memengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut akhirnya berperilaku sebagaimana yang dikehendaki elite itu. Hanya saja, tidak semua elite menjadi pemimpin, karena tidak semua elite mempunyai pengikut yang dapat dilihat secara fisik, akan tetapi dengan status yang disandanginya, elite masih mendapat ruang yang berbeda dengan masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa elite dapat dipandang sebagai teladan pada satu pihak dan pada pihak lain sebagai pemegang kekuasaan. Mereka disebut teladan karena mempunyai bakat yang lebih unggul dan memenuhi misi historis tertentu. Sebutan pemegang kekuasaan berlaku karena mereka secara kolektif merupakan pemimpin, pengambil keputusan, orang-orang yang berpengaruh dalam mengendalikan berbagai kegiatan dalam masyarakat (Schoorl, 1980; 128).

Pengertian elite tersebut dapat ditemukan dalam bidang sosiologi dan politik. Oleh karena itu dalam kajian ini yang dipakai acuan pengertian elite dalam dimensi institusional yakni mereka yang ber-

ada pada puncak strata kekuasaan, dan non-institusional yakni mereka yang berada di luar garis birokrasi tetapi mempunyai pengaruh dan kewibawaan terhadap masyarakatnya.

Berangkat dari disiplin ilmu tersebut, secara umum, elite dipandang sebagai kelompok yang sangat potensial sebagai agen perubahan, terutama dalam fungsinya menjadi jembatan yang menghubungkan antara kemauan pemerintah dan kepentingan anggota masyarakat. Dalam kedudukannya semacam ini, mereka menyanggah beban sosial untuk dapat menerangkan kebijaksanaan umum dan prioritas pembangunan yang dirancang oleh pemerintah kepada anggota masyarakat, dengan demikian, keberadaannya, akan sangat diperlukan untuk kepentingan dan masyarakat

Catatan

- 1 Akar interaksi simbolik adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme psikologis. Pragmatisme dirumuskan oleh John Dewey (Sjoberg, 1997), William James (Musolf, 1994), Mead (Charon, 2000; Joas, 1993) lihat juga Hewitt (1984:8), Shalin (1986). Pandangan behaviorisme psikologis (Badwin, 1986, 1988a, 1988b; 109-127) lihat juga Watson (Buckley, 1989), Meltzer, 1978, 1998; 29-33) dan Blumer (1955, 1969; 94-97)
- 2 Blumer menciptakan istilah interaksi simbolik tahun 1937 dan menulis beberapa esai yang menjadi penting bagi perkembangannya. Sementara Mead berupaya membedakan interaksionisme-simbolik yang baru lahir dari behaviorisme, Blumer melihat interaksionisme-simbolik berperang di dua front. Pertama adalah behaviorisme-reduksionisme yang membuat Mead cemas. Masih ada ancaman serius yang berasal dari teori berskala luas terutama fungsionalisme struktural. Menurut Blumer, baik behaviorisme maupun fungsionalisme struktural sama-sama cenderung memusatkan perhatian pada faktor yang melahirkan perilaku manusia (contohnya, stimulus dari luar dan norma). Menurut Blumer, kedua perspektif itu mengabaikan proses penting yang memberikan aktor kekuatan bertindak terhadapnya dan yang memberikan makna atas perilakunya sendiri.
- 3 Mengikuti hasil kajian Poloma (1984), perspektif interaksi simbolik yang dikemukakan oleh Blumer mengandung beberapa ide-ide dasar, yaitu: (1) masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial. (2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non-simbolis mencakup stimulasi respon, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan. (3) Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, (a) objek fisik; (b) objek sosial, dan (c) objek abstrak. (4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek. (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat manusia itu sendiri (6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota kelompok. Ini merupakan "tindakan bersama". Sebagian besar tindakan bersama tersebut dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam kondisi stabil. Dan di saat lain dapat melahirkan suatu kebudayaan.
- 4 Yinger menyebutkan bahwa kelompok etnik adalah suatu segmen masyarakat yang lebih luas dilihat oleh yang lain berbeda dalam beberapa karakteristik berikut bahasa, agama, *race*, dan nenek moyang dengan budayanya para anggota memersepsi diri seperti itu, dan mereka berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan sekeliling mereka (*rill* atau mistik) asal atau budaya bersama.

- 5 Hal ini diperkuat dengan tulisan Marx, *On the Jewish Question* (1843) berisikan dukungan perlawanan hak-hak sipil Yahudi atas revolusi sosial untuk kaum buruh. Marx merespons pengaruh pemahaman dan hubungan antara identitas privasi, seperti agama (kepercayaan) dan negara.
- 6 Dalam pemikiran tentang identitas dan ketidaksetaraan, Bradley menyatakan bahwa konsep identitas tidak pernah modern dan tidak *postmodern*, tapi memiliki bentuk atas dirinya sendiri. Kunci objektif menjadi pokok dalam memandang identitas secara bersamaan atas pendekatan klasik dan modern yang lebih baru dari perspektif *postmodern* dan postrukturalis (Bradley, 1997) Point penting Bradley dalam membedakan dua pendekatan itu antara lain: pertama, pendekatan modern lebih menekankan pada pentingnya struktur (kelas atau patriarki), sedang pendekatan *postmodern* tekanannya pada pilihan; kedua, pendekatan modern melihat bahwa masyarakat terpolarisasi (kaya dan Miskin), sedang *postmodern* melihat masyarakat dan identitas anggota, terfragmentasi dalam beberapa kelompok berbeda; ketiga, pendekatan modern melihat kelas dan gender sebagai sumber utama identitas, sedang *postmodern* menyatakan bahwa kelas dihilangkan. Penekanan pada *race*, etnisitas, nasionalitas, budaya dan agama, sebagai yang berbeda, saling berkaitan, sebagai sumber identitas; keempat, pendekatan modern melihat masyarakat relatif dapat diramalkan, dengan derajat tatanan sosial, sedang *postmodern* menekankan pada kekacauan dan kebingungan, suatu yang tanpa batas mendekati peristiwa unik; kelima, pendekatan modern menekankan pada material sebagai sumber kekuasaan, sedang *postmodern* menekankan pentingnya budaya dan simbol. Dari sudut pandang *postmodern*, kekuasaan berasal dari kontrol atas wacana, atas bagaimana rakyat berbicara dan berpikir tentang isu atau kelompok sosial. Makna dipandang sebagai sentral.
- 7 Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda daripada suatu kenyataan tunggal. Kenyataan kehidupan sehari-hari memiliki dimensi objektif dan subjektif. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif memengaruhi kembali manusia melalui internalisasi yang menciptakan kenyataan subjektif. Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Karya ini berimplikasi dalam dimensi kenyataan objektif dan subjektif, maupun proses dialektis dari objektivitas, internalisasi dan eksternalisasi
- 8 “Eksternalisasi” dan “objektivasi” adalah istilah dari Hegel, dan dipahami sebagaimana terhadap kolektivitas fenomena Marx. “Internalisasi” dipahami dalam psikologi sosial Amerika. Dasar teori dari karya G.H. Mead, cf. dengan tulisannya *Mind, Self and Society* (University of Chicago Press, Chicago, 1934); Anselm Strauss (ed); *George Herbert Mead on Social Psychology* (University of Chicago Press, Chicago, 1956). Istilah *sui generis*, sebagaimana diterapkan

pada masyarakat, dikembangkan oleh Durkheim dalam *Rules of Sociological Method* (Free Press, Glencoe, III, 1950, Collier-Macmillan, London, 1964)

- 9 Penggunaan konsep-konsep: identitas, identitas utama, makna dan simpul makna di sini digunakan dalam pengertian seperti yang dirumuskan oleh Manuel Castell dalam karyanya, *The Power of Identity* (1997:6-7) bahwa: “*Identity is people’s source of meaning and experience...by identity, as refers to social actors, I understand the process of construction of meaning on the basis of a cultural attribute, or related set of cultural attributes, that is/are given priority over other sources of meaning...I define meaning as the symbolic identification by a social actor of the purpose of her/his action...meaning is organized around a primary identity (that is an identity that frames the others).*”
- 10 Untuk lebih jelasnya dapat ditelusuri dalam karya Daniel Sparringa yang berjudul: Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik. Makalah, yang disampaikan pada kursus dan pelatihan singkat tentang HAM dan demokrasi yang diselenggarakan CESASS-UGM bekerja sama dengan *NCHR-Oslo University*, Norwegia, Jogjakarta, 28 November-2 Desember 2005.
- 11 Vilfredo Pareto dalam karya *The Mind and Society*, untuk studi yang lebih rinci tentang Pareto kita dapat mengacu pada George C. Homans dan Charles. P Curtis, Jr., *An Introductions to Pareto*, New York, Knopf, 1934; Lawrence J. Handerson, *Pareto’s General Sociology*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1935; Franz Borkenau, *Pareto* London, Chapman and Hall, 1936.

3

Penggunaan Metodologi dalam Perspektif Konstruktivis Interaksi Simbolik

Perspektif konstruksionis berangkat dari pemikiran teoretis Jerman abad ke 19, yaitu Georg Simmel dan Max Weber. Perspektif ini menjadi payung dalam melahirkan teori sosial modern yaitu fenomenologi, etnometodologi dan interaksi simbolik (Waters, 1994: 7-8). Merujuk pada interaksi simbolik sebagai bagian dari perspektif konstruksionis, maka metodologi dalam penelitian ini diarahkan pula pada perspektif interaksi simbolik khususnya tradisi yang dibangun dari aliran Chicago oleh George H. Mead dan Herbert Blumer. Penempatan interaksi simbolik dimungkinkan, karena dalam kajian ini, menekankan pada makna dari tindakan individu (aktor), karena dalam interaksi simbolik individu merupakan titik sentral kajian. Hal ini merujuk pada pemahaman terhadap perilaku manusia sebagai proses yang melibatkan individu dalam membentuk perilakunya dengan berinteraksi dengan dunia luar. Dalam hal ini, individu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, bertindak berdasarkan objek-objek yang ada di luar mereka, dan sekaligus tindakan tersebut dibangun melalui proses di mana para pelaku memperhatikan,

mengartikan, sekaligus menilai situasi yang menghadang mereka. Selain itu, dipahami bahwa tindakan manusia merupakan pertalian kompleks dalam institusi tertentu di mana struktur yang ada di dalamnya berada dalam kondisi saling ketergantungan dan terus menerus bergerak, dan bukan masalah yang statis.

3.1. Rancangan Penelitian

Kajian ini memfokuskan pada tujuan memperoleh pemahaman politik lokal, terutama pada tema identitas dengan mengambil latar etnisitas. Pemahaman terkait pada pengetahuan tentang mekanisme yang dilakukan oleh aktor (subjek) dalam mengonstruksi identitas dengan mengatasmakan kepentingan etnik dan politik. Oleh karena itu, perspektif dan metode disesuaikan dengan tujuan tersebut, sehingga peneliti dapat memilih subjek penelitian sekaligus informan yang dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan.

Merujuk dari perspektif teoretis dengan menggunakan konstruktivis, melihat fenomena politik identitas yang dipercaya oleh sebagian dari ilmuwan sosial sebagai konstruktivis-interpretivis, maka dalam konteks ini, perspektif penelitian diarahkan pada kualitatif dengan pendekatan interpretatif (Collin, 1997, Azevedo 1997, Denzin and Lincoln, 2000) termuat dari gagasan pemikiran interaksi simbolik yang memandang bahwa interpretasi atas sebuah tindakan sosial (*social action*) sebagai inti dari usaha memahami realitas sosial. Melalui pemahaman tersebut, perilaku individu semestinya dipahami sebagai sesuatu yang terkait dengan proses internal dalam mana individu melakukan penafsiran dunia di sekitar mereka dan memberi makna kepada kehidupannya

Dalam studi ini, pemahaman atas realitas sosial merujuk pada pemikiran interaksi simbolik, khususnya dari tradisi pemikiran

Mead yang mencetuskan ide pemikirannya tentang *mind*, *self* dan *society*, lalu dikembangkan oleh Blumer. Gagasan Mead menyebutkan bahwa masyarakat mempresentasikan pola terkonstruksi atas aktivitas yang terkoordinasi yang dipertahankan oleh, dan diubah melalui, interaksi simbolik di antara dan di dalam aktor. Dengan demikian baik pemertahanan maupun perubahan dalam masyarakat terjadi melalui proses-proses *mind* dan *self*. Meskipun banyak interaksi yang menyebabkan stabilitas atau perubahan dalam kelompok dipandang oleh Mead dapat diprediksikan, kemungkinan bagi tindakan spontan dan tidak dapat diprediksikan yang mengubah pola-pola interaksi yang ada.

Secara metodologis, penyerapan pemikiran Blumer dalam memahami konstruksi identitas etnik Mandar, ditekankan pada kebutuhan untuk “merasakan pengalaman dan tindakan aktor”. Pengamat perilaku harus masuk ke dalam dunia sang aktor atau kelompok yang diteliti untuk dapat melihat peristiwa sebagaimana sang aktor melihatnya, karena perilaku aktor dan kelompok berlangsung berdasarkan maknanya sendiri yang khusus. Dalam hal ini, sebagai interaksi simbolik Blumer merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar satu manusia dengan manusia yang lain. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsir dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke mana arah tindakannya. Artinya aktor (individu) dapat membentuk objek tersebut.

Formasi identitas yang terdapat dalam model stimulus-respons Blumer terkait pada makna dari rangsangan yang bergantung pada tujuan pembentukan provinsi. Dalam hal di titik beratkan pada bagaimana elite dan masyarakat memproduksi secara dominan iden-

titas etnik mereka, menanggapi berbagai peluang dan informasi yang ditujukan pada pemerintah lokal untuk menjadi daerah yang otonom. Situasi seperti ini yang kemudian dimobilisasi untuk menggulirkan wacana pembentukan provinsi baru dengan berbagai alasan yang tersembunyi, antara lain pencegahan pembentukan provinsi etnik. Akan tetapi yang terpenting untuk dimaknai adalah tindakan aktor untuk mencapai tujuan seperti yang ada dalam pikirannya, dengan begitu aktor sadar dan reflektif dengan menyatukan objek yang diketahuinya yang kemudian disebut dengan *self indication*.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman terhadap subjek penelitian dilakukan dengan mendengarkan mereka secara aktif (*active listening*) dengan menempatkan subjek dalam posisi sentral serta memahami makna, dan kepercayaan mereka (Kasper, 1994;271). Dengan demikian, penulis mencoba melihat usaha subjek dalam menjawab permasalahan bagaimana konstruksi etnik itu diciptakan, mengapa identitas etnik sangat penting, siapa yang berupaya menciptakan konstruksi identitas dan apa saja yang menjadi elemen penting membentuk identitas etnik Mandar tersebut.

3.2. Subjek dan Proses Penetapannya

Dalam kajian ini, unit analisis yang disoroti adalah individu, yakni individu yang masuk dalam ranah politik lokal di Mandar. Oleh sebab itu, sejak awal peneliti berusaha mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang identitas etnik dari individu-individu tersebut. Dalam kenyataannya, individu yang memberi respons terhadap tema ini, adalah mereka yang terlibat secara aktif dalam konstruksi dan ditambah individu yang mengamati proses konstruksi. Mereka tidak hanya berasal dari etnik Mandar saja, tetapi juga dari etnik lain di Sulawesi Selatan, tujuannya agar data yang diperoleh tidak bias, tidak berat sebelah tetapi lebih kaya dan komprehensif, se-

hingga data dan informasi tentang identitas etnik dimaknai sebagai pemahaman pribadi individu atau konstruksi sosial yang berlaku dalam kelompok, dibangun oleh kelompok etnik dan lingkungannya.

Pemilihan subjek dilakukan dengan banyak pertimbangan. Dalam konteks ini, subjek dilihat sebagai pribadi yang unik dan spesifik (Sparringa, 2000:7). Unik karena memiliki pengalaman-pengalaman yang khas, spesifik karena memiliki harapan-harapan sendiri. Pada dasarnya, pemilihan subjek merupakan upaya menemukan kedalaman (*depth*), kekayaan (*richness*) dan kompleksitas (*complexity*) sebuah realitas sebagai hasil konstruksi sosial melalui individu-individu yang secara aktif melakukan interpretasi subjektif dan intersubjektif atas struktur. Merujuk pada pemahaman tersebut, maka dalam kajian ini, peneliti langsung melakukan pemilihan orang-orang berdasarkan atas pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya (Koentjaraningrat, 1997:158; Oetomo, 1995:152).

Pada awalnya yang menjadi subjek penelitian yakni elite intelektual, yang aktif dalam konstruksi (khususnya pada elite yang mengkonstruksi di tahap kelima). Subjek adalah mereka yang menjadi pengurus utama dalam (KAPP-Sulbar) Komite Aksi Pembentukan Provinsi-Sulawesi Barat (baik ketua, sekretaris, dan ketua kelompok kerja). Akan tetapi bagi peneliti data yang dikumpulkan masih kurang mewakili, untuk menghindari pemihakan kepada kelompok elite intelektual semata, maka dipilih pula elite tradisional sebagai subjek untuk menambah data yang telah diperoleh.

Walau awalnya terkadang sangat sulit, karena tidak semua orang siap memberi respons untuk kepentingan penelitian, bahkan tidak jarang mereka mencurigai peneliti karena dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Untuk mengantisipasi kondisi demikian, maka yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah memahami perilaku tersebut dimulai dari subjek yang dekat dengan peneliti. Cara

ini dilakukan dengan sangat hati-hati walaupun peneliti juga berasal dari daerah eks afdeling Mandar, yang diharapkan bahwa peneliti memperoleh kepercayaan sebagai bagian dari subjek penelitian dan dapat memahami *setting* dan menyimpulkan data empirik.

Namun, setelah kurang lebih tiga bulan peneliti melakukan penelitian, data yang diperoleh dianggap masih sangat minim, karena jika tetap bertahan pada data yang telah diberikan subjek sebelumnya, kecenderungan miskin informasi. Artinya, beberapa informasi yang diberikan oleh subjek banyak yang memiliki kesamaan, sehingga data cenderung stagnan dan kurang berkembang. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi yang demikian, peneliti mencoba mencari informasi lewat orang-orang lain (di luar struktur organisasi KAPP-Sulbar) untuk dijadikan pembanding terhadap data dan informasi sebelumnya, identifikasi data tersebut lewat informasi dari informan tambahan.

Langkah selanjutnya, peneliti mencoba meyakinkan subjek yang diharapkan dapat memberikan data yang diperlukan, melalui orang-orang yang dekat dengan tulisan ini diberikan pengertian mengenai tujuan dan maksud adanya penelitian. Dalam posisi seperti ini, pemilihan subjek penelitian dan informan sebagaimana yang disarankan oleh Patton (1994; 208-229) yakni pemilihan subjek penelitian dan informan dengan menggunakan metode pilihan sengaja (*purposive*)

Pemilihan subjek dengan metode *purposive* dilakukan dengan dipilih dari tiga kelompok, yaitu (1) subjek penelitian sebagai sumber data terutama aktor-aktor yang memproduksi ide atau gagasan konstruksi identitas etnik, dalam hal ini mereka yang dikategorikan sebagai elite tradisional. (2) subjek penelitian sebagai aktor (pelaku), adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses konstruksi, tergabung dalam kelompok intelektual terutama anggota KAPP-Sulbar,

baik ketua, sekretaris dan anggota lain, dan (3) disebut dengan informan, yaitu orang yang mengetahui tentang subjek, atau sebagai pengamat yang memiliki pengetahuan terhadap konstruksi identitas etnik. Mereka merupakan etnik lain, seperti etnik Bugis, Makassar, Toraja, dan lainnya.

Ketiga kelompok tersebut adalah elite lokal yang sengaja dipilih sebagai orang-orang yang dianggap betul-betul dapat memahami realitas sosial yang terjadi. Pemilihan subjek ini melalui beberapa penekanan yaitu; pendidikan, status sosial ekonomi, status kebangsawanan atau elit penguasa. Dalam penyajian data sebagian besar subjek penelitian dan informan dengan menggunakan nama samaran, tujuannya untuk menghindari konflik internal antar subjek jika kajian ini rampung, sekaligus menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Untuk melihat refleksi individu terhadap realitas sosial untuk menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti juga telah menggunakan cara khusus dengan menggali informasi penting dari informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konstruksi identitas etnik Mandar. Peneliti dengan sabar dan tidak putus asa mendatangi subjek, walaupun terkadang diantara subjek enggan menerima kedatangan peneliti, bahkan menolak untuk diwawancarai, tetapi dengan cara pendekatan kerendahan hati dan meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan sangat berhasil jika ada bantuan informasi dan kerja sama dari subjek tersebut.

Berdasarkan pemilihan subjek dari perspektif interaksi simbolik, maka di saat ingin mengetahui pemahaman politik subjek, maka peneliti lebih banyak mengarahkan pertanyaan dan berbicara tentang politik lalu mengaitkannya dengan identitas mereka. Cara yang dilakukan peneliti yaitu secara tatap muka, menelaah bahasa mereka, bagaimana mereka menggunakan dan apa maknanya bagi

mereka, sehingga subjek yang dipilih betul-betul mewakili permasalahan penelitian.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memberikan kebebasan pada peneliti untuk mengembangkan diri atau melakukan improvisasi dalam mencari keterangan demi memahami masalah secara akurat. Dalam hal ini subjektivitas menjadi sangat penting karena menjadi bagian keberhasilan penelitian (Sparringa, 1997, 74). Peneliti berusaha mencari data sedalam mungkin dengan tujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang, sebagaimana dirasakannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, karena metode ini dianggap oleh peneliti sangat potensial dalam pengumpulan data.

Kegiatan dalam pengumpulan data empirik, peneliti lakukan sejak agustus 2005 hingga penulisan kajian ini rampung, artinya selama masih dalam bimbingan dan perlu penambahan data, peneliti tetap berusaha melengkapi data tersebut untuk menjawab permasalahan. Pada awal penelitian, peneliti memulai mengakrabkan diri dengan subjek penelitian, maksudnya agar dapat saling mengenal. Pada tahap ini, peneliti mengutarakan tujuan kehadiran dan penjelasan ringkas penelitian, walaupun sebagian dari subjek penelitian telah mengenal peneliti, namun kegiatan sosialisasi ini tetap dilaksanakan.

Dalam tahap sosialisasi, awalnya dimudahkan oleh subjek ketika mereka dimintai informasi tentang identitas Mandar, akan tetapi respons mereka menunjukkan sikap tidak terbuka bila pertanyaan menyangkut etnisitas khususnya kebenaran diskriminasi yang dialami oleh Mandar, pembicaraan seringkali tersendat bahkan mem-

buat subjek malas untuk melanjutkan. Menghadapi situasi tersebut, peneliti akhirnya memahami sikap pasif mereka dan sesekali memancing pertanyaan lain secara tidak langsung berhubungan dengan etnisitas.

Wawancara mendalam berhasil menemukan pernyataan tertulis, peneliti bekerja keras untuk mendapatkan pola pengalaman, pengetahuan, keyakinan dan nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam mengungkap ide-ide konstruksi. Data yang telah dikumpulkan berisikan jawaban-jawaban, ucapan-ucapan ataupun pola perilaku dari subjek penelitian. Data tentang makna identitas bagi Mandar dan pola konstruksi yang dilakukan untuk memperoleh identitas dilakukan dengan wawancara mendalam. Aktor-aktor penting sebagai tokoh kunci berhasil diwawancarai oleh peneliti, baik dari elite intelektual dan elite tradisional.

Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu membuat janji dengan subjek. Untuk memperoleh data secermat mungkin, peneliti menggunakan *tape recorder* karena wawancara mungkin berlangsung cukup lama, tetapi sebelum peneliti melakukan hal itu, terlebih dahulu memberitahukan pada subjek penelitian untuk memperoleh izin darinya. Keuntungannya menggunakan *tape recorder* agar peneliti dapat berkonsentrasi penuh terhadap informasi yang diberikan, dan data yang peneliti peroleh lengkap sehingga lebih leluasa untuk merumuskan temuannya. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara tidak formal, bahkan lebih saling menceritakan pengalaman masing-masing. Wawancara lebih banyak dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan keinginan subjek agar kesannya tidak kaku.

Selanjutnya, pengumpulan data dengan pengamatan berperan serta merujuk pada pemahaman yang dikemukakan oleh Paul Rock (1978:178), yang melihat bahwa pengamatan berperan serta sangat

strategis dan penting dalam interaksi simbolik yang memungkinkan peneliti menggunakan “diri” (*self*)-nya untuk menjelajahi proses sosial. Metode ini mengarahkan peneliti dan menempatkan diri dalam situasi yang ingin analisis, sehingga peneliti terlibat untuk mengamati dan berpartisipasi pada saat yang sama, karena dengan penggunaan metode dalam interaksi simbolis peneliti meramu pengetahuan yang didefinisikan sebagai aktivitas praktis yang berlangsung. Dalam hal ini, peneliti tidak mengetahui hanya berdasarkan dugaan semata, tetapi realitas penampakan menjadi sangat penting.

Bertitik tolak dari pemahaman di atas, maka observasi dimulai dengan pemahaman terhadap *setting*, hal ini dimaksudkan agar peneliti masuk (*getting in*) menjadi bagian untuk berperan-serta dalam kelompok tersebut. Upaya ini dilakukan agar memperoleh kepercayaan sebagai bagian dari subjek penelitian. Harapan dalam proses ini, peneliti dapat memahami *setting* dan data empirik (*primer*) lalu melakukan pemahaman serta refleksi terhadap subjek penelitian sebagai unit pengamatan. Selain itu, observasi partisipan dilakukan peneliti dengan mengamati berbagai ragam perilaku subjek yang terkait dengan pengalaman dan pandangan, menyimak kata-kata, ungkapan-ungkapan yang relevan dengan identitas. Selama melakukan penelitian di lokasi, peneliti berusaha mencatat dalam bentuk *fields notes*. Dalam penulisan berisikan kutipan langsung yang dipaparkan apa adanya, sebagian besar kutipan-kutipan tersebut menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi ada juga yang berbahasa daerah, terutama bahasa Mandar dan hal ini tidak menyimpang dari substansi yang ingin diutarakan oleh subjek.

Peneliti telah memperoleh banyak informasi ketika ikut terlibat langsung dalam kelompok *malab’bi*, suatu kelompok di mana sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki sikap kritis. Komunitas ini dibangun dengan tujuan melakukan kri-

tikan terhadap proses konstruksi identitas yang dianggap memiliki banyak kekurangan. Pembentukan komunitas ini dihadiri oleh seniman Emha Ainun Majid, seseorang yang banyak memberikan perhatian di Mandar, merasa diri sebagai warga Mandar, beliau merasa prihatin jika nilai-nilai kemandaran maknanya mengabur di saat proses konstruksi.

Sebelum melakukan penelitian tentang konstruksi identitas, peneliti pernah ikut menjadi partisipan dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat (tahun 2000-2001). Ketika itu peneliti menjadi salah satu pendukung kelompok kerja, peneliti banyak memperoleh informasi, walaupun sifatnya sangat rahasia tetapi peneliti dapat memperolehnya, terutama terkait ada informasi-informasi yang dapat menimbulkan konflik, karena temanya cenderung berisi saling tidak percaya antar elite. Mengatasi kondisi seperti ini, peneliti hanya menempatkan diri sebagai anggota yang pasif, dan tidak memberitahukan kepada seluruh anggota KAPP-Sulbar kondisi tersebut, karena jika diketahui mereka tidak memberikan respons positif dan kemungkinan tidak mau bekerja sama.

Dalam tataran pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam, peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (*taking the role of the order*), secara intim menyelam ke dalam dunia psikologi dan sosial subjek penelitian. Agar mencapai tujuan, peneliti berusaha mendorong subjek penelitian mengemukakan semua gagasan dan perasaannya dengan bebas dan nyaman. Dalam tataran ini peneliti berusaha menggunakan bahasa yang akrab dan informal, situasi percakapan ditandai dengan spontanitas, peneliti berusaha juga mengarahkan wawancara sesuai tujuan penelitian.

Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, oleh peneliti dianggap kurang bisa mewakili untuk memperoleh kedalaman dan kekayaan data, sehingga kemudian peneliti melakukan analisis

dokumen (yang mencakup historiografi tradisional dan modern sejak kolonial) untuk melihat marginalisasi, mobilisasi dan resistensi etnik. Dalam hal ini, historiografi ini mengandung kelemahan karena fakta sejarah yang diungkapkan bercampur dengan unsur-unsur mitos, legenda dan simbolisme. Kelemahan tersebut dapat diatasi bila karya tradisional tersebut diartikan sebagai sistem nilai budaya dari etnik setempat.

Pengumpulan data secara dokumentasi juga diperoleh dari otobiografi, buku, surat kabar, jurnal, catatan harian, surat-surat pribadi maupun beberapa hasil penelitian yang terkait. Apa yang dilakukan peneliti adalah bagian dari saran yang diajukan oleh Schatzman dan Strauss (1973:14), ditegaskannya bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Menurutnya, sebagai bagian dari metode lapangan (*field method*), peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut.

3.4. Analisis data

Seperti yang telah dikemukakan dibagian awal bagian ini, studi ini berangkat dari perspektif kualitatif untuk dapat memahami pertanyaan mengapa Mandar sebagai satu komunitas etnik mengupayakan kembali identitasnya. Dengan pemikiran tersebut, maka peneliti dengan sepenuh hati berusaha menemukan dan memahami apa yang ada pada fenomena dan dibalik fenomena politik identitas etnik, karena hal tersebut terkadang sulit untuk diketahui dan dipahami. Analisis kualitatif ini memungkinkan untuk memahami kedirian etnik Mandar, dalam hal ini untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku subjek, mendiskripsikan latar belakang interaksi yang kompleks, memahami keadaan yang terbatas jumlah-

nya dengan fokus mendalam dan rinci, menghendaki terfokus pada interaksi dan proses-proses yang di gunakan (William dalam Faisal, 1990).

Karena sangat subjektif maka sifat empati peneliti dalam penelitian menjadi sangat penting, terutama dalam usaha memahami subjek dan dalam hubungannya dengan penerapan metode *verstehen*. Analisis kualitatif ini lebih mengedepankan pada hakekat realitas yang terbentuk secara sosial terutama dalam usaha menjawab bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna.

Langkah analisis yang dilakukan peneliti dalam menangkap makna dari perilaku dan tindakan subjek penelitian, melalui tiga tahap, yaitu: pertama, memahami sudut pandang subjek penelitian dari tiga kelompok, terdiri dari (1) subjek yang memproduksi ide konstruksi identitas etnik, (2) subjek yang terlibat dan menjadi pelaku utama dalam konstruksi identitas etnik, dan (3) subjek pengamat dan memiliki pengetahuan tentang konstruksi identitas etnik. Tahap ini dilakukan untuk memahami pemahaman subjek-subjek atas interpretasinya terhadap realitas. Interpretasi subjek atas realitas tersebut dipahami sebagai tahap *first order understanding*.

Tahap *first order understanding* dilakukan dengan harapan agar subjek penelitian menyampaikan informasi yang akurat. Peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari subjek dan berusaha mengarahkan pertanyaan yang dapat mendorong para subjek untuk semaksimal memberi alasan melakukan konstruksi identitas etnik.

Kedua, *second order understanding*. Setelah tahap pertama selesai, peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil interpretasi subjek, cara ini oleh Surbakti (kuliah Teori Sosial, 19 Oktober 2002) disebut dengan metode *understanding of understanding*. Metode ini merupakan hasil interpretasi terhadap informasi subjek mengenai

realitas yang kemudian oleh peneliti diinterpretasi kembali sehingga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman agar diperoleh suatu makna yang baru.

Ketiga, *third order understanding*, selain kedua tahap tersebut di atas, pemahaman yang dilakukan oleh peneliti adalah menilai segala peristiwa-peristiwa yang mendukung konstruksi identitas etnik. Artinya bahwa peneliti melakukan pengobservasi lingkungan di dalam dan di luar konstruksi tersebut. Salah satu wujud dari tahap ini, melibatkan peneliti menjadi bagian kelompok masyarakat Mandar *malab'bi* di Tinambung.

Setelah ketiga tahap tersebut selesai peneliti melakukan pengolahan bahan empiris menjadi pola-pola dan kategori yang tepat untuk mewakili metode interaksi simbolik. Data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari wawancara mendalam, observasi berperan serta dan transkrip di lapangan diolah dengan teliti berdasarkan kategori tertentu. Kategori-kategori yang dipakai oleh peneliti antara lain: (1) konteks yang melatarbelakangi subjek atau aktor dalam mengkonstruksi identitas, (2) interaksi antar aktor, sekaligus lingkungan diluar aktor. (3) pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor dan makna simbol-simbol yang mewakili aktor.

Dalam kepercayaan seperti di atas, analisis atas pemahaman subjek yang memproduksi narasi disebut dengan metode reflexif (*reflexive methodology*) yang dikenal luas dalam tradisi kualitatif (Avesson and Skoldberg, 2000; Hertz, 1996, Steier, 1991). Metode ini penekanannya bertitik tolak pada sebuah prosedur analisis yang melihat data sebagai sebuah produk interpretasi yang dipengaruhi oleh ideologi, politik, dan seluruh kepercayaan yang dihasilkan oleh atas teks dan konteks.

Implikasi atas metode ini adalah kebutuhan akan hadirnya kecermatan terhadap sebuah narasi yang dihasilkan melalui proses produksi pengetahuan yang secara sosial adalah hasil interpretasi aktif individu atas teks dan konteks. Dengan demikian, maka penulis sangat mencermati bagaimana sebuah pernyataan dihasilkan dalam wawancara, atau bagaimana respons atas sebuah pertanyaan muncul, adalah sesuatu yang esensial dalam analisis data. Akhirnya dipahami penulis bahwa analisis data adalah sebuah kegiatan penelitian karena melibatkan proses pencarian (*inguiry*) yang secara sosial adalah hasil konstruksi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh subjek.

Secara konkret dapat disimpulkan bahwa secara metodologis, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, lebih memfokuskan pada perspektif interaksi simbolik, dengan tujuan untuk menangkap makna dari perilaku dan tindakan individu. Dalam hal ini yang ditekankan adalah memahami interpretatif subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan tema politik identitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek *voice*, *reflexivity*, dan *subjectivity* (Sparringa, 1997)

4

Etnik Mandar di Pulau Sulawesi

Bagian ini secara khusus membahas dua tema pokok, masing-masing dilakukan untuk mengenal setting penelitian, yaitu: Pertama, sejarah terbentuknya kerajaan Mandar dari kelompok etnik di Sulawesi Selatan. Kedua, identitas etnik Mandar. Pendekatan yang diambil dalam pembahasan atas kedua tema itu tersebut, kecenderungan dengan pendekatan sejarah (historis), mengingat data-data dalam menentukan suatu kejadian diterima sebagai fakta sejarah. Penulis menyadari, pendekatan ini mengandung kelemahan karena fakta sejarah yang diungkap sedikit bercampur dengan unsur-unsur legenda dan simbolisme. Kelemahan ini diartikan sebagai sistem budaya etnik daerah yang dikaji.

4.1. Asal Usul Etnik di Sulawesi Selatan

Sejarah Sulawesi Selatan sangat erat hubungannya dengan keramaian orang Cina berkunjung di Nusantara pada abad X-XII, diperkirakan sezaman dengan *I La Galigo*.¹ Bangsa Cina saat itu, merupakan bangsa yang paling terkemuka, kaya dalam kebudayaan dan

berjaya dalam kehidupannya, sampai pada hubungannya dengan negeri-negeri di Nusantara, termasuk Sulawesi Selatan.

Sementara itu, asal usul etnik di Sulawesi Selatan berlatar belakang sejarah keberadaan *To-Manurung*. Kehadirannya, seolah-olah menjadi kata kunci bagi kehidupan masyarakat kaum yang terpecah-pecah, menuju tatanan baru. Konsepsi kepemimpinan *To-Manurung* juga disusul oleh terbentuknya konsepsi kenegaraan dengan wilayah teritorial yang lebih luas dan meliputi sejumlah kaum yang mengikat perdamaian dan menyepakati menerima kepemimpinan

Kepemimpinan *To-Manurung* di Sulawesi Selatan membawa banyak dampak positif bagi perkembangan masyarakat, kenegaraan dan kehidupan politik, ekonomi, sosial yang kecenderungan terjadi spesialisasi fungsi-fungsi dan peranannya. Saat ini kemudian membentuk lapisan-lapisan Masyarakat yang disebut : (1) lapisan *Arung/Anakarung*; (kaum bangsawan keturunan *To-Manurung*), (2) lapisan *To-Deceng*; (orang kebanyakan keturunan kelompok *Anang*, dan (3) *Ata*, lapisan kecil yang terdiri atas mereka yang kalah perang, melanggar aturan adat dan menjual diri (Abidin, 1980: 28).

Munculnya upaya identifikasi kelompok-kelompok kaum semakin nampak membedakan diri antara satu dengan yang lainnya. Bermula dari lambang-lambang bunyi-bahasa, peralatan hidup sampai akhirnya menemukan nama bagi diri dan bagi masing-masing kelompok, dilihat dari makna yang mereka tentukan sesuai dengan kekhususan masing-masing dan muncullah *To-Wugi* (Bugis), *To-Raja*, *To-Mangkasa*, dan *To-Menre* (Mandar). Identifikasi itu kemudian diterima menjadi sebutan atas kelompok-kelompok kaum yang bergabung menjadi semakin besar, dan orangpun menamakan kelompok-kelompok etnik (Suku-Bangsa), Bugis, Toraja, Makassar dan Mandar. Semuanya empat kelompok etnik utama di Sulawesi Selatan.

Kelompok etnik tersebut dalam perjalanan sejarah dan berkelanjutan masing-masing memiliki kedekatan antara satu dengan yang lain. Sekurang-kurangnya ada tiga kelompok etnik utama, yaitu: (Abidin, 1980:70)

Pertama, Bugis (termasuk Luwu'), sementara Toraja, Makassar dan Mandar dalam keadaan isolasi mencari dan mengembangkan identitas masing-masing.

Kedua, Bugis-Toraja, dan Makassar-Mandar; (1) dalam perjalanan sejarah Bugis dan Toraja, saling mendekati dalam kehidupan sosial-budaya, sehingga dengan menyebut *Wugi'* (Bugis), cukup mewakili keduanya. (2) dalam perjalanan sejarah Makassar dan Mandar saling mendekati dalam kehidupan sosial-budaya, sehingga dengan menyebut Makassar, cukup terasa mewakili keduanya.

Ketiga, Bugis-Makassar, berkembang menjadi identitas yang diterima mewakili keempat kelompok etnik-utama, sehingga acapkali juga dinamakan identifikasi jenis minor, seperti;

1. Bugis-Makassar, bagi orang Makassar;
2. Bugis-Toraja;
3. Bugis-Mandar, bagi orang Mandar;
4. Bugis-Wajo, bagi orang Wajo, demikian seterusnya.

Lekatnya nama kaum, ke dalam nama dan tempat tinggal (peemukiman) di Sulawesi Selatan itu, rupa-rupanya menjadi salah satu ciri kehidupan yang telah berlangsung lama dalam sejarah kebudayaan mereka. Maka dalam kehidupan sehari-hari biasa terdengar (1) *To-Luwu'* atau *To-Wugi*, di Luwu dan di *Tana-Ugi*; (2) *To-Raja*, di *Tana-To-Raja*; (3) *To-Mangkasara*, di *Butta Mangkasara* (Makassar); dan (4) *To-Mandar*, di *Lita Mandar*.

Pelekatan tersebut diperkirakan sebagai awal terbentuknya kelompok-kelompok etnik utama di Sulawesi Selatan, yang mengidentifikasi diri lewat kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok, terutama dalam bahasa atau dialek yang mengikuti nama kelompok etnik tersebut atau pada masalah kepercayaan mereka. Selain itu, berbagai perbedaan dalam penekanan berbagai aspek kebudayaan, seperti orientasi kehidupan yang terkait pada keadaan geografis menimbulkan penampilan-penampilan khas kelautan, pertanian, perniagaan dan sebagainya. Keadaan seperti ini yang terjadi dalam sejarah Sulawesi Selatan abad ke-15.²

Pelekatan nama etnik yang terbentuk, juga mengarah pada pembedaan nama negeri-negeri dan wilayah, seperti *Tana-Ugi*, *Butta Mangkasara*, *Tana Toraja*, dan *Lita' Mandara*, hal ini terwujud dalam abad XV-XVI. Saat itu, pembedaan ini telah menunjukkan identitas dan jati diri etnik masing-masing yang seolah-olah berbeda di antara satu dengan lain. Mereka memperlihatkan bahwa masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri, cara berpakaian dan menampilkan perbedaan dalam ciri-ciri kehidupan, hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan geografis dan iklim yang berbeda di tempat pemukimannya, sampai akhirnya perbedaan ini menunjukkan ciri utama negeri di Sulawesi Selatan yaitu: (1), sebagai *palloang-ruma* (petani), (2), sebagai *pakkaja* (pelaut atau nelayan), dan (3), sebagai *pabbalu'* atau *padangkang* (pedagang).

Sementara itu, ada satu hal menjadi dasar kebudayaan etnik Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, yaitu *pangadereng*, adalah dasar yang amat teguh bagi satu etnik dengan etnik yang lain disebut dengan "*Sipakatau*" (saling menghormati, sebagai orang seketurunan) yang melahirkan konsep "*siri*" untuk mempertahankan harkat dan martabat pribadi, dan konsep "*passe*" yang menjadi acuan solidaritas dan kebersamaan etnik.

Berdasarkan konsep kebersamaan tersebut, maka dapat dilihat dalam tiga negeri yang disebut *TellumpoccoE* (tiga negeri puncak) Sulawesi Selatan Abad XIV-XVI, yaitu Luwu, Bone dan Gowa. Tana Luwu (Ware) dipandang negeri yang tertua dan berjaya, memiliki kekuasaan atau pengaruh meliputi seluruh negeri di Sulawesi dan sekitarnya. Tana Luwu mengalami kemunduran pada masa *Simpurusiang* akibat desakan Tana Bone. Sementara itu, Tana Bone berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan besar, karena melakukan ekspansi dan merebut wilayah-wilayah negeri di sekitarnya, termasuk Tanah Luwu yang berbatasan dengan wilayahnya (Abidin, 1980, 89-95; Rahman, 1984).

Ekspansi Tana Bone juga ke negeri-negeri daratan selatan, sampai ke selat Makassar, memainkan kekuatan perang Gowa. *Butta Gowa* memperlihatkan cara-cara perluasan wilayah kekuasaannya lebih agresif dan ekspansif, tetapi lebih memberikan kelonggaran otonomi atas wilayah yang berada dalam kekuasaannya. Perluasan wilayah melingkupi beberapa negeri di *Lita' Mandar*, akan tetapi bagi Mandar, Gowa bukan merupakan musuh, akan tetapi dalam perkembangannya, lewat pembelajaran kehidupan ketatanegaraan dari Gowa, *Lita Mandar* berubah menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Todi-laling, seorang panglima perang Gowa yang berasal dari Mandar.

4.2. Etnik Mandar dalam Bingkai Sejarah

Kerajaan-kerajaan di Mandar sebelum membentuk konfederasi, sebelumnya terdiri dari sejumlah daerah-daerah kecil (daerah *tomakaka*), setiap daerah diperintah *tomakaka* atau tokoh yang dituan dan dipanuti. *Tomakaka* adalah sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan masalah rakyat melalui sifat pengayoman dan sekaligus sebagai sosok yang mampu mengendalikan dirinya untuk kepentingan orang banyak.

Keberadaan *Tomakaka* di seluruh daerah di *Lita Mandar*, banyak diceritakan oleh penduduk setempat dan telah dicatat oleh Leysd (1940:24-25). Sebelum Leysd, telah diceritakan di *lontara* serta penuturan tokoh-tokoh adat dan budayawan bahwa sejumlah daerah di tanah Mandar dipimpin oleh *Tomakaka* dan mereka memerintah dan menyandang nama berdasarkan wilayah yang di kuasainya. Wilayah Mandar seluruhnya memiliki 41 *Tomakaka* (Rahman, 1988; 164-166), yaitu :

*“Tomakaka Ulu Sa’dang, Tomakaka di Motting (Botang, Rantebulahan), Tomakaka Rantebulahan, Tomakaka Lembang Apu (Allu), Tomakaka Makula (Pambusu-ang), Tomakaka Salimbo’bo (Sambo’bo’, Ulu Mandak), Tomakaka Lenggo (Mapilli), Tomakaka Batuwulawang, Tomakaka Garombang (buta, Mapilli Utara), Tomakaka di Taramanu, Tomaka di Pojosang, Tomakaka Saragian (Allu), Tomakaka Ambo, padang, Tomakaka Kelapa Dua, Tomakaka Passokoran, Tomakaka Malandi (Campalagian), Tomakaka Karamangang, Tomakaka Titie (Mapilli), Tomakaka Lerang-lerang, Tomakaka Napo, Tomakaka Pangale (Samasundu), Tomakaka Sajoang (Allu), Tomaka Salarri (Limboro), Tomakaka Leppong (Renggean), Tomakaka Puttanganor (Allu), Tomakaka Patui (Tandassu-ara), Tomakaka Tande (majene), Tomaka Buttupau (Pamboang), Tomakaka Salabose (Majene), Tomaka Sonde (Tampalang), Tomakaka Selumase (Tampalang), Tomakaka Puttade (cenrana), Tomakaka Seppong (Ulu Mandak), Tomaka Tabang (sebelah Timur Mamasa), Tomakaka Balopang (Pamboang), Tomakaka Puabang (Majene), Tomakaka Lebani (Mamuju), Tomakaka Kalukku (Mamuju), Tomakaka Kalumpang, Tomakaka Lomo (Mamuju)”*³

Nama wilayah yang disebutkan di atas, hingga saat ini sebagian masih dapat ditemukan sebagai nama desa, lingkungan, rukun kam-

pung dan rukun tetangga dalam wilayah tanah Mandar. Masa kepemimpinan *Tomakaka* di Balanipa terus berlangsung sampai masa terbentuknya *amaradiang* (kerajaan) Balanipa, yaitu pada akhir abad ke-15 dengan naiknya I Manyambungi (*Todilaling*) sebagai *maradia* (raja) Balanipa yang pertama (Leyds, 1940:27-29). Bagi sebagian keturunan Tomakaka, menilai bahwa kepemimpinan I Manyambungi merupakan sebagian penggambaran dari pola kepemimpinan *Tomakaka*. Dia sebagai pemimpin mengarahkan semua pola pikirannya untuk kesejahteraan orang banyak serta memikirkan masa depan mereka, khususnya dalam hal keamanan wilayah dan rakyat, termasuk cukupnya pangan bagi rakyat. Dengan demikian, I Manyambungi melahirkan kekuasaan dalam arti yang luas berupa wewenang, wibawa dan karisma yang tercermin melalui sifatnya yang terpuji. Komponen kekuasaan itu melekat pada diri tomakaka yang memberikan kekuatan padanya untuk tetap diikuti dan dipatuhi oleh rakyatnya dalam masa yang panjang (Rahman, 1988, 168)

Kepemimpinan Tomakaka di wilayah tanah Mandar mengalami benturan dan mengubah wajah orientasi nilai luhurnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya masyarakat Mandar, yang menyebabkan diversifikasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial budayanya. Kondisi ini memunculkan pola kepemimpinan ambisi dari para Tomakaka. Gejolak ini mengakibatkan adanya saling memengaruhi satu dengan lain dan lahirlah perpecahan antara Tomakaka. Perpecahan tersebut akhirnya menghancurkan kepemimpinan Tomakaka dan muncullah kerajaan Balanipa sebagai sentral pemerintahan.

Wacana mengenai sejarah kerajaan di Mandar pada umumnya dimulai dari terbentuknya kerajaan pada pertengahan abad ke-16, sekalipun terdapat dua kerajaan besar yang menonjol sebelumnya yaitu Kerajaan Passokkorang (di Mapili Polmas) dan kerajaan Ba-

ras (di Pasangkayu, Mamuju) (Darwas, 1995, 13). Kerajaan Balanipa menjadi sangat relevan dalam perspektif Sulawesi Barat karena kerajaan inilah yang dianggap sebagai inisiator atau pelopor dari sejumlah fakta kesejarahan yang bernilai budaya tinggi dan tetap menjadi rujukan di bidang hukum (adat), pemerintahan dan kepemimpinan bagi orang-orang Mandar. Kerajaan ini berdiri awal abad ke-16 oleh I Manyambungi atau Todilaling (Hafid, 2000; 23)

I Manyambunyi yang bergelar *Todilaling* jika ditelusuri merupakan keturunan dari *To-Manurung*. Walaupun konsep *To-Manurung* ini tidak dikenal lebih jauh oleh masyarakat Mandar, akan tetapi turun di daerah *Ulu Sa'dan*. Konsep *To-Manurung* dapat ditelusuri dalam lontara Mandar dan disebutkan bahwa:

“Tomanurung tidak turun di daerah Mandar tetapi turun di Ulu Sungai Sa'dan yang kemudian memiliki tujuh orang anak yang kemudian ketujuh anak tersebut tersebar keseluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satu anaknya yang bernama Pongkapadang datang ke daerah Mandar menurunkan 11 (sebelas) orang anak dimana salah satu dari sebelas itu bernama Tobitteng kawin dengan salah satu seorang anak Tomakaka Napo, dan hasil perkawinan mereka lahirlah I Manyambungi yang kemudian menjadi amaradia (raja) di Balanipa.⁴

I Manyambungi adalah putera satu-satunya raja Napo' (Tomakaka Napo) yang menghabiskan masa remajanya di kerajaan Gowa dalam lingkungan istana mulai dari raja Gowa ke-7 (Karaeng Bata Gowa) hingga raja Gowa ke-9 (Karaeng Tumapa'risi Kallonna) dan raja Gowa ke-10 (Karaeng Lakung Tunipalangga Ulaweng). Disaat remaja dia diberi kepercayaan kerajaan Gowa –untuk pertama kali- terjun langsung memimpin perang untuk menaklukkan kerajaan Lohe. Setelah kerajaan Lohe jatuh ke tangan kerajaan Gowa, dia

diberi tugas kembali menaklukkan kerajaan Pariaman di Sumatera, dalam jangka tiga bulan, dengan kekuatan 120 perahu kerajaan Pariaman berhasil ditaklukkannya. Keberhasilan I Manyambungi memimpin pertempuran membuat dirinya tersohor sampai ke tanah kelahirannya di Mandar (Syah, 1977: 17).

I Manyambungi kembali ke Mandar setelah memperoleh pengalaman sekitar 20 tahun sebagai Panglima perang kerajaan Gowa, penasehat kerajaan, pemimpin ekspedisi dan bahkan kawin dengan kemenakan raja Gowa puteri Karaeng I Sanrobone. Beliau kembali ke Mandar atas permintaan rakyatnya di Napo. Setibanya di daerah Mandar dia langsung dilantik menjadi raja Napo yang kemudian menjadi raja Balanipa. Di zamannya dia banyak mengadopsi pelaksanaan hukum dari kerajaan Gowa. Todilaling dikenal sebagai peletak dasar pemerintah yang demokratis dan mewariskan pesan-pesan dan pengalaman kepemimpinan yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan keluhuran budi. Salah satu pesannya yang paling terkesan ialah ungkapan sebelum mangkat tentang syarat-syarat untuk bisa menjadi raja.

Pesan tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Madondong duang bongi annamatea, mau anaqu’, mau appoqu’ da muannai menjari maraqdia muaq tanai tanamasasyayanni litaq tonamaasayanni paqbanua. Da muannai dai dipeuluan muaq masuani pau-paunna muaq matodori kedona apaq iyamo tuqu na merruppr ruppuq”

Artinya:

“Manakala besok atau lusa saya mangkat, walaupun anak saya, cucu saya, janganlah hendaknya diangkat menjadi raja jika ia bukan orang yang cinta kepada tanah air dan rakyatnya. Janganlah pula diangkat seorang pemimpin, bila ia mempunyai tutur kata yang kasar, perbuatan dan

tindakan yang kasar pula, karena orang yang demikian itu yang akan menghancurkan negeri” (Rahman, 1984: 46; Salam, 1994:87).

Todilaling meletakkan prinsip bahwa tidak mutlak seorang putera raja menjadi pengganti ayahnya kalau ia tidak memenuhi syarat-syarat seorang raja. Prinsip yang diletakkan ini sekaligus mewariskan nilai betapa sopan santun, etika dan akhlak mulia menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin rakyat.

4.3. Lita' Mandar di Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Uluuna Salu

Masa pemerintahan I Manyambungi (Todilaling) sebagai *maradia* (raja) kerajaan Balanipa telah membawa perubahan besar di dalam negerinya. Beliau membuat beberapa peraturan yang mengikat secara bersama antara rakyat dan penguasa, pola kebudayaan lama yang kurang sesuai di ganti dengan yang baru berdasarkan isi *lontara* yang telah diberikan oleh raja Gowa. Dasar-dasar sebuah kerajaan telah didirikannya, hukum telah ditetapkan di mana *maradia* sebagai kepala pemerintahan dan dewan adat sebagai anggota.

Sesudah I Manyambungi mangkat, digantikan oleh putranya yang bernama Tomeppayung dan menjadi raja ke-2 Balanipa. Dalam mengendalikan pemerintahan, Tomeppayung senantiasa menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram. Dia menegaskan bahwa segala kegiatan harus tunduk pada hukum dan adat istiadat yang berlaku di Balanipa, oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan *maradia* terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para anggota adatnya yang bergelar *Pepuangan* dan *Pabbicara* serta Appe Banuang Kaiyang. Pernyataan tersebut dilontarkan ungkapan “*An-diang mala sisara' ulu anna salakkana*” artinya tidak boleh bercerai

kepala dengan kerangka badan, maksudnya bahwa seorang raja tidak boleh mengambil keputusan tanpa permufakatan dengan adatnya (Saharuddin, 1985: 9). Raja inilah kemudian yang menyatukan beberapa kerajaan dengan terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian yang dikenal dengan nama “perjanjian *Tammajarra*”. Kerajaan-kerajaan yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu, kerajaan Balanipa, kerajaan Sendana, kerajaan Majene (Banggae), kerajaan Pamboang, kerajaan Tappalang, kerajaan Mamuju (Kila, 2001:15)

Hasil pertemuan *Tammajarra* inilah yang menjadi dasar terbentuknya persekutuan kerajaan-kerajaan Ba’bana Binanga (kerajaan-kerajaan yang berada di muara sungai). Pada awal mula terbentuknya persekutuan ini, hanya terdiri atas enam kerajaan (enam Ba’bana Binanga). Keputusan lain yang dihasilkan dalam pertemuan menetapkan kerajaan Balanipa sebagai sentral dari kerajaan yang lain.

Masa pemerintahan raja Balanipa ke-2 ini diadakan pula suatu perjanjian antara kerajaan Pitu Ba’bana Binanga dengan kerajaan Pitu Ulunna Salu untuk mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Perjanjian dilaksanakan di salah satu wilayah di Balanipa yang bernama “Luyo”. Perjanjian inipun dikenal dengan perjanjian di Luyo, dan menghasilkan “*allamunga Batu di Luyo*” (Saharuddin, 1985; 41). Perjanjian ini akhirnya mengklasifikasikan dua konfederasi beberapa kerajaan yaitu: kerajaan Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Dua konfederasi kerajaan tersebut diuraikan lebih lanjut.

4.3.1. Kerajaan Pitu Ba’bana Binanga

Kerajaan Pitu Ba’bana Binanga adalah tujuh kerajaan di Mandar yang berada dan masing-masing berpusat di tujuh muara sungai atau wilayah pantai (Darwas, 1997: 20 Saidong, 1997, 19; Hafid, 2000: 24; Kila, 2001:15).

Ketujuh kerajaan tersebut adalah:

1. Kerajaan Balanipa (di kecamatan Tinambung Polmas)
2. Kerajaan Banggae (di kecamatan Banggae Majene)
3. Kerajaan Pamboang (di kecamatan Pamboang Majene)
4. Kerajaan Sendana (di kecamatan Majene)
5. Kerajaan Tapalang (di kecamatan tapalang Mamuju)
6. Kerajaan Mamuju (di Mamuju)
7. Kerajaan Binuang (di kecamatan Polewali Mamasa)

Dari tujuh kerajaan yang cukup besar ini, masih terdapat kerajaan-kerajaan kecil lainnya, akan tetapi ketujuh kerajaan ini memiliki pengaruh ke seluruh wilayah Mandar, bahkan sampai keluar wilayah Mandar. Ketujuh kerajaan ini pula yang eksis hingga sampai zaman pendudukan Belanda membentuk suatu struktur pemerintahan hingga pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kerajaan ini pula yang mewariskan beberapa nilai-nilai kesejarahan yang pada saat ini masih dipatuhi sebagai nilai budaya yang tetap menjadi patokan dasar dalam kehidupan politik, sosial dan kemasyarakatan dari seluruh rakyat Mandar. Pada pemerintahan raja sesudah Todilaling, syarat-syarat untuk menjadi raja atau anggota adat harus dipilih secara ketat karena tanggung jawab dan tugasnya begitu berat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yaitu:

“Naiya maraqdia, tammatindoi diwongi, tarrarei diallo, manandandang mata di mamatana daung ayu, dimalimbongna rura, dimadinginna diajarianna tau diatepuannana agama”.

Artinya:

“seorang raja tidak boleh tidur nyenyak di waktu malam, tidak boleh berdiam diri dan berpangku tangan di waktu siang. Seorang pemimpin seharusnya senantiasa

memperhatikan dan memikirkan: (1) kesuburan tanah dan lahan; (2) pengembangbiakan tanam tanaman, berlimpah ruahnya hasil tambak dan perikanan (3) aman dan damainya masyarakat/negara; (4) sehat dan berkembangnya manusia/penduduk; dan (5) mantapnya kehidupan beragama (Rahman, 1984: 57; Salam, 1994:88)

Kelima syarat yang ketat untuk menjadi seorang raja ini mewariskan suatu prinsip tentang kepemimpinan yang harus mendahulukan kepentingan rakyat terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai kepemimpinan ini mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan beragama karena raja Balanipa ke-14 sebagai raja yang pertama kali memeluk agama Islam.

Selain kelima syarat tersebut dalam kepemimpinan orang Mandar diperlukan pula sifat-sifat yang terpuji lainnya. Sifat ini harus dimiliki seorang pemimpin, agar dapat melakukan ekspansi ke wilayah lain sehingga wilayahnya lebih luas. Sifat-sifat yang dimaksudkan, antara lain:

“Makkassau pai di tallu tappaq; tappaq lila, tappaq gayang, siola tappaq ataung”

Artinya:

“Seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat, yaitu kepandaian berdiplomasi atau berbicara, pintar dalam strategi peperangan atau berani, dan juga melakukan strategi perkawinan dengan keturunan wilayah yang akan ditundukkan” (Salam, 1994: 89)

Nilai budaya terkait dengan sumpah seorang pemimpin, dapat dilihat dalam sumpah jabatan seorang pemimpin anggota adat. Sumpah jabatan merupakan hal yang sakral dan dianggap berat karena

menyangkut pada loyalitas rakyat, sehingga sangat dituntut keharusan dan kepatuhan dari rakyat. Dalam hal ini, raja dan pejabat tidak boleh berbuat salah karena loyalitas akan berbalik menjadi oposisi apabila raja melakukan kesalahan. Ini tercermin dalam ucapan raja, yakni :

“Irigma na daung ayu moq o, rarumma na buttangmoq o”

Artinya:

‘Saya adalah angin dan kamu semua daun kayu, saya jarum dan kamu benang’

Dan yang menjadi pejabat yang ditunjuk raja harus mengatakan:

“Naiya napassiratangi anna hukum, ada’ siola abiasang”

Artinya:

“Sepanjang sesuai dengan hukum, adat dan kebiasaan”

Sumpah yang diikrarkan tersebut begitu tegas menekankan aspek demokrasi serta kedudukan seorang raja yang harus taat dan patuh kepada keinginan rakyat yang terwakili dalam lembaga adat. Jika raja melakukan kesalahan, maka lembaga adat wajib memanggil raja dan mempertanggungjawabkan perbuatan kepada rakyat yang terwakili dalam lembaga adat. Jika raja tetap bersikeras, maka lembaga adat lembaga adat wajib menegur dan meluruskan bahkan bila perlu perintah raja yang tidak benar dapat ditolak atau raja diturunkan dari tahtanya (Salam, 1994: 94) .

4.3.2. Kerajaan Pitu Ulunna Salu dan Perjanjian Luyo

Kerajaan Pitu Ulunna Salu berupa tujuh kerajaan yang berada di kawasan pegunungan termasuk dalam wilayah Mandar. Dikata-

kan demikian karena kerajaan-kerajaan tersebut berpusat di tujuh hulu sungai yang semuanya dalam wilayah Kabupaten Polmas dulu (Saidong, 1997: 20; Hafid, 2000: 26; Kila, 2001:16).

Ketujuh kerajaan tersebut antara lain:

1. Kerajaan Rante Bulahan
2. Kerajaan Aralle
3. Kerajaan Mambi
4. Kerajaan tabulahan
5. Kerajaan Matanga
6. Kerajaan Bambang
7. Kerajaan Tabang

Ditinjau dari sudut geografi dan historis ketujuh kerajaan Ulunna Salu tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dengan kerajaan Ba'bana Binanga, karena baik raja-raja maupun para bangsawan dan rakyat percaya kepada mitos bahwa nenek moyang mereka satu yaitu To-manurung yang berasal dari Ulu Sadang. Akan tetapi beberapa tulisan sejarah Mandar tidak mengenal figur To-manurung karena mereka menganggap bahwa To-manurung adalah manusia biasa yang kebetulan tampil sebagai figur dengan kelebihan dan keunggulan yang dimilikinya sehingga menjadi manusia panutan (*todippicoe*). Pada dasarnya masyarakat Mandar menurut Darmawam Mas'ood (sejarawan mandar), tidak mengenal istilah To-manurung dalam pengertian orang muncul dari dunia lain. Walaupun budaya dan adat istiadat diantara perserikatan kerajaan berbeda, tetapi hubungan sosial-politik ekonomi dan historis relatif lebih kuat dan berakar sehingga memiliki kebutuhan yang sama untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam suasana damai dan harmonis.

Setelah kerajaan Pitu Ba'bana Binanga semakin kuat sebagai perserikatan kerajaan dan Pitu Ulunna Salu berkembang pula menjadi perserikatan yang kuat, maka kerajaan Balanipa sebagai ketua perserikatan kerajaan Pitu Ba'bana Binanga melakukan upaya untuk lebih memperkokoh persatuan dan bersifat "persaudaraan" dengan kerajaan Pitu Ulunna Salu. Pertemuan lengkap kedua kerajaan besar itu berlangsung di Luyo (wilayah kerajaan Balanipa) dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang tidak terhitung nilainya bagi masyarakat Mandar sebagai perekat persatuan (Darwas, 1997: 22; Saidong, 1997:19; Hafid, 2000: 25; Kila, 2001:15).

Adapun isi perjanjian Luyo kedua kerajaan tersebut:

1. Bahwa kerajaan Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu adalah bersaudara dan oleh karena itu tidak boleh saling mengalahkan atau menyerang
2. Kedua kerajaan sebagai bentuk perserikatan kerajaan harus saling menghargai sistem hukum adat masing-masing yang berlaku dan tidak boleh saling mencampuri
3. Kedua kerajaan harus saling membantu dan memperkuat dibidang pertahanan dimana musuh dari pegunungan dihadapi oleh kerajaan Pitu Ulunna Salu dan musuh dari laut/pantai dihadapi kerajaan Pitu Ba'bana Binanga.⁵

Kesepakatan yang dibuat itu harus saling dihargai dan untuk kesepakatan yang ketiga biasa disebut "*Sipamandar*" yang berarti saling kuat menguatkan dan telah menjadi satu peristiwa sejarah monumental yang kuat yang menjadi pegangan 14 kerajaan selama berabad-abad sehingga bisa hidup rukun dan damai sampai selalu.

Realisasi kesepakatan tersebut pada tahun 1610 melalui dasar perjanjian di Luyo, pemerintahan raja Balanipa ke-4 I Daengta membentuk suatu kesepakatan dari federasi Pitu Ba'bana Binanga

dan Pitu Uluunna Salu dengan “*Sipamandar*”. Melalui istilah tersebut menurut Lopa (1983) awal penyebutan kata “Mandar” dapat diartikan sebagai kata “kuat”. Pernyataan Lopa ini didasarkan atas isi perjanjian Luyo yang menyebutkan :

“Ulu Salu memata di sawa, ba’ba binanga memata dipear-appeanna mangiwang, sisara’pai mata malotong anna mata mapute, anna sisara Pitu Uluunna Salu anna Pitu Ba’bana Binanga”.

Artinya:

kerajaan dari hulu sungai mengawasi musuh yang datang dari arah gunung, dan Pitu Ba’bana Binanga kerajaan yang mengawasi musuh yang datang dari arah laut. Kerajaan hulu sungai dan kerajaan muara sungai adalah laksana sebiji mata yang di dalamnya terpadu warna hitam dan warna putih (Saharuddin, 1985: 41).

Dari pengertian di atas, maka Mandar diambil dari sepenggal kata Sipamandar, selain itu ada beberapa pendapat dari budayawan yang menyebutkan bahwa Mandar berasal dari kata Mandara dapat diartikan pula sebagai “cahaya” atau Mandaq artinya “kuat” , dan ada pula menyebutnya sebagai wilayah dari sungai Mandar di Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Uluunna Salu (Saharuddin, 1985: 3).

Keempat belas kerajaan di atas meliputi wilayah eks afdeling Mandar maka nama Mandar sebagai kawasan yang besar pada dasarnya mengandung pengertian suatu negeri yang sangat kuat yang memiliki rasa persatuan yang dimanifestasikan dalam hubungan antar kerajaan yang saling membantu, melindungi dan menghargai.

Secara historis keempat belas kerajaan tersebut sekarang berada dalam wilayah kabupaten Polewalimandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Nama “Mandar” sebagai suatu persekutuan

kerajaan secara etimologis berarti “kuat”, “bersinar” atau “bercahaya”, dan dalam masyarakat Mandar sendiri secara etimologis tidak terlalu dipertentangkan artinya tetapi semakin dipertahankan untuk memperjelas identitas etnikya.

4.4. Konstruksi Afdeling Mandar ke Provinsi Sulawesi Barat

Afdeling Mandar meliputi seluruh wilayah yang termasuk di dalam kekuasaan kerajaan Pitu Ba’ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu dari Paku (perbatasan Pinrang-Polmas) hingga Suramana (perbatasan Mamuju-Donggala). Tidak diketahui persis kapan batas itu berubah, akan tetapi jika batas kerajaan menjadi patokan maka kerajaan Binuang berbatasan dengan kerajaan Sawitto di Binanga Karaeng. Jadi ada perubahan batas wilayah dan ini menyangkut luas seluruh wilayah kerajaan Pitu Ba’ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu dengan gabungan luas wilayah kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju (sebelum dimekarkan).

4.4.1. Terbentuknya Afdeling Mandar

Kekalahan kerajaan Gowa oleh Belanda yang dibantu oleh Arung Palakka ditandai dengan penandatanganan suatu perjanjian yang dilakukan di Bongaya pada tahun 1667 kemudian disebut perjanjian Bungaya. Berdasarkan perjanjian tersebut, diadakan pula suatu perjanjian damai antara kerajaan Pitu Ba’Bana Binanga dengan kerajaan Bone yang terjadi tahun 1670 setelah raja Gowa Sultan Hasanuddin wafat, dan kerajaan Bone dipimpin oleh raja La Patau. Untuk memperluas pengaruh Belanda, pada tahun 1846 Belanda mengambil alih pengaruh kekuasaan Gowa dan Bone atas Pitu Ba’bana Binanga, saat itu Belanda mengikat kerajaan ini di bawah pengaruhnya dengan suatu ikatan politik. Ikatan politik yang dimak-

sud diadakannya suatu perjanjian (kontrak panjang) terutama untuk pengangkatan raja baru dan wilayah kekuasaannya (Kila, 2001: 16).

Sekalipun kolonialisme Belanda menganggap telah menguasai Sulawesi Selatan sejak perjanjian Bungaya pada tahun 1667, tetapi kerajaan-kerajaan Mandar sendiri tidak pernah merasa sebagai penjajah. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipatuhinya beberapa perjanjian yang ditandatangani secara bilateral antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan Mandar. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kerajaan Mandar lebih mendorong pertimbangan untuk menjaga kedamaian rakyat di samping karena perjanjian bilateral tersebut tidak merupakan pemberian kekuasaan pemerintah dari raja kepada Belanda. Itulah sebabnya maka banyak terjadi pemberontakan yang muncul terutama bila Belanda berusaha mencampuri urusan pemerintah raja atau tindakan dan perilaku Belanda yang merugikan rakyat.

Pada tahun 1916, Belanda memosisikan kerajaan Pitu Ba,ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu menjadi satu afdeling, yang diberi nama afdeling Mandar dan dipimpin oleh seorang *asistent Resident*. Afdeling Mandar sebagai salah satu afdeling dari sebelas afdeling dari dua kresidenan di Celebes yakni kresidenan Celebes Utara dan kresidenan Celebes Selatan. Afdeling Mandar dianggap oleh Belanda sangat luas, sehingga dipecah menjadi empat onder afdeling, yaitu onder afdeling Polewali, *onder afdeling Mamasa*, *onder afdeling Mamuju* dan *onder afdeling Majene* yang dijadikan sebagai ibukota afdeling tempat berkedudukan dan berkantor *asistent Resident* (Kila, 2001: 17).

Wilayah afdeling yang terbagi ke onder afdeling tersebut, sebenarnya meliputi empat belas kerajaan, hal ini menunjukkan bahwa:

1. Mandar berarti wilayah yang meliputi 14 persekutuan kerajaan besar

2. Mandar diakui sebagai suatu wilayah pemerintahan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang berakar pada keempat belas kerajaan sehingga nama Mandar dapat diterima oleh semua kerajaan
3. Afdeling Mandar setara dengan beberapa afdeling lain di Celebes misalnya afdeling Buton yang kemudian menjadi satu provinsi
4. Mandar adalah suatu wilayah strategis di Celebes, khususnya jika ditinjau dalam perspektif ekonomi dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Belanda di Celebes (Sulawesi) melaksanakan dua bentuk pemerintahan, yaitu (1) daerah-daerah yang diperintah langsung seperti: afdeling Makassar dan afdeling Bantaeng, dan (2) daerah-daerah yang tidak diperintah langsung dan wilayah ini mempunyai otonomi sendiri yang luas, mempunyai kas (keuangan) sendiri, pengadilan adat sendiri dan menjalankan pendidikan dasar terbatas, daerah yang termasuk kelompok ini adalah : Luwu, Soppeng, Wajo, Bone, Gowa setelah tahun 1938 serta afdeling Mandar. Khusus untuk afdeling Mandar, selain terdapat seorang *asis-tent Resident* dan empat *controleur*, terdapat tujuh wilayah yang ber-pemerintahan sendiri (swapraja) yaitu Balanipa, Sendana, Majene, Pamboang, Tappolang, Mamuju dan Binuang (Kila, 2001: 17).

Bagi raja-raja dan rakyat di Mandar, pemerintahan afdeling Mandar adalah proses yang dianggap realistis setelah semua daya dan kekuatan untuk melakukan perlawanan ternyata mengalami kegagalan. Hal ini dipengaruhi juga oleh tahapan perjuangan di Jawa yang memasuki perlawanan yang bersifat politik. Seperti halnya di Jawa, rakyat ikut termotivasi untuk berjuang lewat organisasi-organisasi yang terinspirasi oleh tokoh-tokoh pejuang di Jawa, terutama sejak berdirinya syarikat Islam pada tahun 1911, yang didahului dengan gerakan syarikat dagang Islam. Demikian juga dengan lahirnya Budi

Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 berikut lahirnya sejumlah perkumpulan daerah Misalnya, Pasundan, Maluku, Celebes dan lain-lain. Partai nasional Indonesia dan Sumpah Pemuda semuanya memengaruhi bentuk dan warna perjuangan di Sulawesi Selatan, termasuk di Mandar. Sampai Belanda dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1942, tidak ada lagi pemberontakan yang berarti kecuali perjuangan yang bersifat politik. Dari sejumlah organisasi politik yang cukup berpengaruh yakni syarikat Islam yang dikampanyekan di Mandar pertama kali 1914 dan partai Nasional Indonesia, kader-kader partai inilah kemudian menjadi motivator perjuangan di era perjuangan fisik di wilayah ini.

4.4.2. Afdeling Mandar dan Sulawesi Barat

Pada masa Belanda berkuasa di Celebes (Sulawesi), termasuk konfederasi kerajaan di Mandar yaitu Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu dijadikan satu afdeling, yakni afdeling Mandar. Afdeling ini dipimpin oleh seorang *asistent Resident*. Mungkin karena dianggap terlalu luas sehingga Belanda tidak dapat mengontrol dengan baik, maka wilayah afdeling Mandar dipecah menjadi empat onder afdeling, yaitu *onder afdeling* Mamuju, Majene, Polewali dan Mamasa. Majene yang dijadikan sebagai ibukota afdeling tempat berkedudukan *asistent Resident*.⁶ Wilayah ini kemudian disebut sebagai Mandar Lama (Rahman, 1988 : 51)

Dari aspek kesejarahan pemerintahan afdeling Mandar mulai diterapkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1916 berdasarkan *staatsblad* No. 325/1916. Pada waktu itu Celebes (Sulawesi) di bagi sebelas afdeling, setingkat dengan kabupaten (Sadi dalam Susanto, 2003: 160). Empat afdeling berada di kresidenan Celebes Utara dan tujuh afdeling Celebes Selatan, merupakan cikal bakal dari provinsi Sulawesi Selatan. Ketujuh afdeling tersebut, yakni:

- a. Afdeling Makassar;
- b. Afdeling Bantaeng (Bontain);
- c. Afdeling Bone;
- d. Afdeling Luwu;
- e. Afdeling Pare-pare;
- f. Afdeling Mandar;
- g. Afdeling Buton-Lawai.

Apabila disimak bahwa pembagian wilayah afdeling ini Belanda lebih mempertimbangkan aspek historis dengan melihat latar belakang kerajaan-kerajaan besar yang ada. Maksud pembagian tersebut adalah untuk lebih memudahkan penyelenggaraan pemerintahan karena raja melibatkan dan menjadi bagian dari pemerintah. Untuk melegitimasi kekuasaannya, maka Belanda menunjuk kepala pemerintahan dari orang Belanda asli pada level Residen, *asistent Resident* dan *Controleur*. Dalam hal ini, Belanda tidak mengikut sertakan komponen kerajaan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Wilayah afdeling Mandar, sejak terbentuknya di bagi dalam empat *onder-afdeling* (Kadir, 1978: 8; Rahman, 1988: 50; Hafid, 2000: 27; Kila, 2001:17), yaitu:

1. *Onder afdeling* Polewali

Onder afdeling Polewali ini mulanya disebut *onder afdeling* Balanipasche and Binuangshe Benenlanden yaitu gabungan dari kerajaan Balanipa dan kerajaan Binuang dari bagian pantai;

2. *Onder afdeling* Mamasa

Onder afdeling Mamasa ini mengalami beberapa perubahan yang mulanya bernama *onder afdeling* Boven Benuang dan Pitu

Ulunna Salu, Mamasa dipilih sebagai ibu kota *onder afdeling* pada tahun 1942 (*Staatsblad* No. 467) dan menjadi *onder afdeling* Mamasa;

3. *Onder afdeling* Majene

Onder afdeling ini adalah gabungan dari tiga kerajaan, yaitu Banggae, kerajaan Pamboang dan kerajaan Sendana, sejak awal telah menjadi *onder afdeling* Majene dengan ibu kota di Majene (eks kerajaan Banggae);

4. *Onder afdeling* Mamuju

Onder afdeling Mamuju ini adalah gabungan dari kerajaan Tappalang dan kerajaan Mamuju, sejak awal ibukotanya Mamuju.

Sebagai wilayah yang cukup luas, ternyata seorang asisten Residen kurang mampu untuk mengawasi dan membina empat *onder afdeling*, oleh sebab itu pemerintah Belanda masih menempatkan seorang asisten *Contoleur* di wilayah-wilayah strategis antara lain untuk *onder afdeling* Majene dan *onder afdeling* Polewali.

Kebijaksanaan memanfaatkan lembaga kerajaan dan lembaga adat dalam pemerintahan *afdeling* dan *onder afdeling* sesungguhnya hanya karena pertimbangan praktis yakni karena jumlah aparat Hindia Belanda yang sangat terbatas. Mereka memang tidak mungkin untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam wilayah yang begitu luas. Itulah sebabnya maka pada level di bawah *onder afdeling*, dilakukan pengelompokan kampung-kampung yang dianggap bisa menjadi suatu distrik. Ini dilakukan untuk mengefektifkan peran *maradia-maradia* yang kehilangan kekuasaan dan anggota adat/*pappuangan*. Mereka ditunjuk sebagai wilayah distrik yang dalam struktur kerajaan pada umumnya sebagai *pa'bicara* atau *maradia*. Dengan demikian pemerintah Belanda dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif. Di bidang yudikatif, pemerintah

Belanda langsung mengkonversi pengadilan adat Balanipa menjadi pengadilan tinggi di mana Maradia Balanipa dipertahankan sebagai ketua, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari anggota adat yang bergelar *pa'bicara* atau *papuangan*. *Controleur* sendiri secara *ex-officio* bertindak sebagai penasehat pengadilan tinggi (Hafid, 2000: 28-29).

Pemerintah Hindia Belanda pada bentuk ini berlangsung hingga Jepang mulai menduduki afdeling Mandar pada tahun 1942. Pada masa peralihan kekuasaan terjadi transisi yang cukup kritis karena Jepang sendiri tidak terlalu fokus pada pemerintahan dan lebih menitikberatkan pada bidang militer. Selain itu pada asisten Residen dan *Controleur* meninggalkan tempat dan tugasnya, bahkan ditawan dan dimasukkan ke dalam *camp-interniran* di Makassar, dan di Mandar, penahanan ditempatkan di Tubi dalam wilayah kecamatan Campalagian Polmas.

Pemerintahan Jepang yang menduduki daerah telah mempersiapkan satu orang untuk menduduki jabatan utama. Jabatan tersebut setingkat dengan *asistent Resident*, yang disebut dengan Kenkariken dan berkedudukan di Majene. Di samping itu Jepang juga menunjuk satu orang untuk menduduki jabatan yang setingkat *Controleur*, dengan sebutan Bunken Kenkariken yang berkedudukan di Polewali, sedangkan jabatan-jabatan lainnya di bawah *Controleur*. Jepang menunjuk dan mengangkat aparat setempat yang umumnya berasal dari keturunan bangsawan (*maradia*) maupun keluarga atau keturunan asal anggota adat (Hafid, 2000: 30).

Pada masa kekosongan pemerintahan sipil pendudukan Jepang sekitar tahun 1942, roda pemerintahan untuk sementara di seluruh wilayah bekas kerajaan Balanipa dipegang oleh *maradia* Andi Baso dan dibantu oleh Abdul Majid sebagai *maradia* Matowa yang merangkap *maradia* Campalagian, selanjutnya *maradia* ini diangkat oleh Jepang sebagai aparat dengan gelar Sunco. Sedang setiap kepala distrik

yang berasal dari anggota hadat diberi jabatan dalam status yang sama dengan gelar Gunco dan untuk jabatan kepala kampung diberi gelar Gonco. Adapun aparat Belanda yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil di afdeling Mandar seperti Hulp Berstuur Asistent (HBA) diberi gelar Hasakan. Sedang untuk jabatan jaksa masih tetap difungsikan dengan gelar Kensatsukan (Rahman, 1988: 30).

Masa transisi itulah pemerintah diserahkan kepada unsur-unsur swapraja yang berlangsung hingga 1943. Ketika itu yang menjalankan tugas asisten Residen adalah Maradia Balanipa Andi Baso Pabiseang didampingi oleh Bestuur asisten Alimuddin. Pimpinan onder afdeling diserahkan kepada tokoh swaspraja, antara lain:

1. Andi Tonra (*Maradia Banggae*) untuk onder afdeling Majene;
2. Abdul Madjid (*Maradia Matoa Balanipa*) untuk onder afdeling Polewali;
3. Djalaluddin Ammana Inda (*Maradia Mamuju*) untuk onder afdeling Mamuju;
4. Abdul Madjid Pattarapura untuk *onder afdeling* Mamasa (Sinrang, 1997; 295).

Pada masa ini secara bertahap jabatan yang menggunakan istilah Belanda di ganti istilah Jepang termasuk istilah di bidang militer. Karena Jepang melakukan pendudukan dalam waktu yang relatif singkat, maka secara prinsip tidak sempat melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, yang dirubah hanyalah kebijaksanaan sikap dan politik yang memberi perhatian pengembangan sumber daya di bidang kemiliteran dengan melakukan milisi dan melatih secara intens para pemuda.

Setelah Jepang kalah oleh sekutu dan proklamasi kemerdekaan dinyatakan, di wilayah Mandar ditandai dengan situasi pergolakan, secara *de facto* selama beberapa waktu Jepang meninggalkan tempat

dan menunggu perkembangan politik, di beberapa daerah terjadi gejolak yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat karena rakyat berjuang berusaha menguasai instansi, kantor-kantor, bahkan persenjataan milik Jepang. Dalam situasi yang demikian, tidak jarang terjadi insiden kecil yang menghadapkan antara kelompok masyarakat yang percaya kepada kemerdekaan dan kelompok yang tidak percaya bahwa kemerdekaan memang telah diproklamasikan. Di Majene, yang menjadi ibu kota afdeling Mandar, berita proklamasi baru didengar pada tanggal 22 Agustus 1945 dari radio yang dimiliki oleh kantor Penerangan.

Akan tetapi kemerdekaan yang kita peroleh tidak diakui oleh Belanda, bersama sekutu mereka kembali ke Sulawesi Selatan. Tentara Nica, dengan membonceng tentara sekutu tiba di Mandar pada bulan November 1945. Dan wacana yang muncul kemudian menjadi fakta adalah berdirinya Negara Indonesia Timur setelah Van Mook berhasil mendorong suatu konferensi di Malino.

Di wilayah Sulawesi, pemerintah Republik Indonesia yang resmi (gubernur Ratulangi) oleh Brigadir Jendral F.O. Chilton (komandan tentara Australia di Sulawesi) bahkan memberitahu gubernur untuk tidak menjalankan fungsinya sebagai gubernur oleh karena pemerintah sipil telah dilakukan oleh NICA atas tanggung jawab dan perlindungan tentara Australia yang bertindak sebagai kesatuan Sekutu (Agung, 1999: 38).

Gambaran sikap para pejuang di Mandar terhadap bentuk pemerintahan yang terjadi di wilayahnya setelah kemerdekaan, dapat dijelaskan dalam beberapa peristiwa di sekitar bulan September-November 1945, ini merupakan peristiwa-peristiwa sebagai wujud awal keinginan Mandar untuk menjadi wilayah yang harus diperhitungkan oleh Belanda dan pemerintah Sulawesi. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

1. Pada tanggal 16 September 1945 di Majene yang menjadi ibu kota afdeling Mandar berlangsung rapat akbar menyambut kemerdekaan dan mendeklarasikan kebulatan tekad merah-putih yang disebut “rapat konsultasi merah-putih” dan dipimpin oleh Andi Tonra.
2. Selama bulan September-Desember 1945 para pemuda dan tokoh pejuang nekad untuk memasang merah putih, tetapi NICA selalu menghalangi dan ini mengundang perlawanan para pejuang kemerdekaan hal ini dipimpin oleh Ibu Andi Depu mempertahankan bendera dengan memeluk tiang bendera, peristiwa ini memicu semakin gencarnya perlawanan tokoh lain seperti H.A. Malik Pettana Endeng dan Muh. Riri Amin Daud.
3. Di tempat lain seperti pamboang, Sendana, Tapalang dan Wonomulyo masalah pengibar bendera merah putih menyebabkan bentrokan antara tentara Belanda dengan militansi para pemuda pejuang.⁷

Berdasarkan peristiwa tersebut diidentifikasi bahwa mayoritas rakyat Mandar menginginkan proklamasi kemerdekaan dipertahankan dan bentuk negara kesatuan. Pandangan tentang negara kesatuan telah melekat dalam jiwa rakyat Mandar seperti halnya daerah lain di Sulawesi Selatan, selain itu semangat patriotik juga bersumber dari budaya “*siri*” yang menekankan pada terjaganya martabat, harga diri yang langsung dipelopori oleh kelompok raja-raja (*maradia* dan *bangsawan*). Dan tahap perjuangan mencapai kemerdekaan, kelompok aristokrat dalam peranannya sebagai penanya nasionalisme tidak saja memberi kemudahan berupa sumbangan dana dan kepentingan perjuangan, tetapi juga langsung menjadi pemimpin dalam militer melawan Belanda (Abdullah, 1999; 49).

Beberapa fakta yang perlu dicermati di eks afdeling Mandar menjelang berdirinya Negara Indonesia Timur, yakni:

1. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Negara Indonesia Timur adalah kelompok politisi terdidik yang menjelang proklamasi tergabung dalam organisasi perjuangan bernama Sudara (Sumber Darah Rakyat) dipimpin oleh Andi Mappanyukki dan Dr. Ratulangi. Sementara Ratulangi berunding dengan Belanda dengan mempertimbangkan perlunya segera diciptakan tertib pemerintahan agar rakyat bisa tenang dan aman.
2. Mulai perjanjian Linggarjati dan Reville serta Konprensi Meja Bundar konsep negara federal ternyata menjadi kesepakatan resmi dan bukan sesuatu yang tidak disetujui bagi negara Republik Indonesia.
3. Sejumlah naskah pidato tokoh seperti Nadjamuddin daeng Malewa menyiratkan sikap yang utuh sebagai seorang nasionalisme yang tidak ingin pisah dengan Republik Indonesia. Konsepnya tentang pembangunan ekonomi di Indonesia Timur cukup operasional dengan berorientasi kepada ekonomi kerakyatan
4. Tokoh intelektual dan adat dari Mandar yakni Hoesain Poeang Limboro yang pernah menjadi Menteri Perekonomian dan ketua parlemen NIT berpendapat bahwa konsep NIT adalah realistik dilihat dalam perspektif kondisi politik Sulawesi Selatan yang sudah begitu lama dan berada dalam ketidakpastian.⁸

Setelah NIT dibubarkan dan Negara Republik Indonesia menjadi negara Kesatuan, maka ditempatkan kembali seorang gubernur untuk provinsi Sulawesi Selatan menggantikan fungsi adat tinggi yang dibubarkan. Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1952 No 34 yang menyangkut perubahan bahwa setiap afdeling di Sulawesi Selatan menjadi daerah Swatantra, sehingga afdeling Mandar menjadi daerah Swatantra Tingkat II Mandar. Selang kurang tujuh tahun terjadi lagi perubahan wilayah berdasarkan Undang-undang No. 29 tahun 1959, yaitu perubahan tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II (Kabupaten), maka daerah-daerah

Swatantra termasuk Mandar serta swapraja-swapraja asli, di antaranya Pitu Baba'na Binanga dan Neo Swapraja Kondo Sapata (eks kewredanan Mamasa) dihapuskan dan dibubarkan. Para ketua adat dan anggota Swapraja serta para kepala distrik pada saat itu dialihkan menjadi pegawai negeri atau pegawai daerah otonom. Dengan demikian daerah Swapraja Mandar terbagi atas tiga daerah tingkat II masing-masing Polewali Mamasa (Polmas), Majene dan Mamuju, merupakan bekas *onder afdeling* (Syah, 1984: 41-42). Ketiga daerah kabupaten ini memiliki struktur aparat pemerintahan yang sama dengan daerah yang lain dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Setelah terbentuk Polewali Mamasa menjadi daerah tingkat II, dan setelah keluarnya Kepres No. 6 tahun 1959 yang memuat tentang status kepemimpinan daerah yang bergelar raja tidak lagi digunakan, maka dengan keputusan Menteri dalam Negeri No.17/12/38 tanggal 1 Juli 1960, H. Andi Depu yang bergelar *marãdia* diberhentikan dan beliau digantikan oleh H. Andi Hasan Magga sebagai kepala daerah pertama di Polewali Mamasa (Polmas). Dengan dibentuknya Polmas sebagai Dati II, maka terbentuk pula kecamatan-kecamatan melalui Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor jo 674 tanggal 19 Desember 1961, tentang pembentukan kecamatan setelah terlebih dahulu distrik-distrik yang ada di wilayah bekas Swapraja dihapuskan (Saharuddin, 1985: 116; Hafid, 2000: 32).

Dari uraian di atas, maka dapat dicermati bahwa aspirasi pembentukan provinsi sebagai sesuatu proses sejarah yang panjang. Proses ini memerlukan banyak aspek, salah satu aspek yang dikedepankan adalah aspek sejarah (historis), yaitu sejarah eks afdeling Mandar sebagai kerajaan Mandar Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Upaya ini menjadi salah satu bentuk konstruksi identitas Mandar yang melibatkan segenap unsur baik masyarakat maupun tokoh-tokoh pejuang. Tokoh ini memiliki kebanggaan jika

Mandar dapat mandiri (baca: lepas) dan menjadi wilayah otonom, namun kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk direalisasikan oleh pemerintah menjadi sebuah provinsi baru.

4.5. Sekilas Wilayah Daerah Mandar

4.5.1. Letak Geografis Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari lima kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Utara. Dalam hal ini akan dijelaskan hanya pada tiga kabupaten sebelum dimekarkan yakni Polmas, Majene dan Mamuju, dan data yang disajikan dalam uraian pada bagian ini juga didasarkan pada waktu sebelum terjadinya pemekaran di tiga kabupaten tersebut.

Kabupaten Mamuju terletak di bagian Utara, Kabupaten Majene di tengah diapit oleh kabupaten Polmas di sebelah Timur. Gabungan dari tiga kabupaten ini menempatkan Sulawesi Barat pada posisi yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara baik dilihat dari Utara ke Selatan maupun dari Barat ke Timur. Dalam peta Sulawesi, Sulawesi Barat berada dan diapit oleh provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi Sulawesi Selatan dan hanya 2° di bawah garis khatulistiwa (lihat peta Sulawesi).

Penggabungan ini juga mengubah kondisi Sulawesi Barat batas-batas wilayahpun mengalami perubahan seperti: sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu dan Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Barat adalah 16.796,18 km² atau 26,88% (hampir sepertiga) dari wilayah Sulawesi Selatan yang luasnya 62.361,71 km². Tabel 2 di bawah ini memperlihatkan luas wilayah

provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten termasuk tiga kabupaten di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat berada pada posisi pantai barat pulau Sulawesi dengan panjang bentangan pantai sekitar 580 km, sama dengan panjang pantai Sulawesi Selatan yang melintasi 10 (sepuluh) kabupaten dari Pinrang hingga Bulukumba.

Tabel 2. Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan menurut Kabupaten

Wilayah Kab/kodya	Luas (km²)	Persentase luas
Selayar	903,35	1,45
Bulukumba	1.154,67	1,85
Bantaeng	395,83	0,63
Jeneponto	737,64	1,18
Takalar	566,51	0,91
Gowa	1.883,32	3,02
Sinjai	819,96	1,31
Bone	4.509,00	2,60
Maros	1.619,12	1,78
Pangkep	1.112,25	1,88
Barru	1.174,71	7,31
Soppeng	1.359,44	2,18
Wajo	2.506,19	4,02
Sidrap	1.883,25	3,02
Pinrang	1.786,01	3,15
Enrekang	17.796,01	28,86
Luwu	17.791,43	28,38
Tator	3.205,77	5,14
Polmas	4.741,53	7,68
Majene	947,84	1,52
Mamuju	11.057,81	17,69
Makassar	175,77	0,28
Pare-pare	99,33	0,16
Jumlah	62.361,71	100.00

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2003

Berdasarkan data luas wilayah Sulawesi Barat di atas, ternyata wilayah ini lebih luas dari wilayah provinsi Sulawesi Utara (setelah dikurangi Gorontalo), provinsi Banten, provinsi Gorontalo, provinsi Bali dan hampir sama dengan provinsi Bengkulu. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Perbandingan Luas wilayah Sulawesi Barat dengan beberapa provinsi di Indonesia.

Provinsi	Luas (km ²)	Keterangan
Sulawesi Tengah	63.689	
Sulawesi Utara	15.798	Setelah dikurangi provinsi Gorontalo
Banten	8.053,65*	
Gorontalo	11.690	
Bali	5.633	
Sulawesi Barat	16.796,19	
Sulawesi Selatan	45.565,52	Setelah dikurangi Sulawesi Barat
Bengkulu	19.789	

Sumber: Statistik Indonesia, 1999 dan KAPP Sul-Bar

*) Belum termasuk Kodya Tangerang dan Kotip Cilegon

Posisi geografis dan perbandingan luas wilayah di atas memperlihatkan bahwa Sulawesi Barat yang sudah terbentuk memiliki wilayah luas dibandingkan dengan provinsi yang lain, sehingga sangat layak untuk menjadi sebuah provinsi.

4.5.2. Kondisi Masyarakat di Mandar

Secara demografis, menurut data tahun 2001 jumlah penduduk Sulawesi Barat adalah 1.092.967 (sebelum dimekarkan) yang terdistribusi di kabupaten Polmas 675.721 jiwa, di kabupaten Majene 120.621 jiwa dan kabupaten Mamuju 299.625 jiwa. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 4. Komposisi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur	Polmas		Majene		Mamuju	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0-9	56.208	54.571	15.474	14.992	40.561	39.014
10-19	47.360	46.679	13.384	13.800	32.880	30.954
20-29	36.705	42.299	8.747	11.052	26.281	28.688
30-39	29.617	32.122	7.545	8.286	23.258	21.302
40-49	20.234	22.579	5.532	6.062	15.282	12.668
50-59	13.860	15.083	3.762	4.059	8.402	6.054
60-69	8.504	9.617	2.185	2.592	6.962	3.118
70-75+	5.321	6.006	1.494	1.655	2.940	1.657
Total	228.956	446.765	58.123	62.498	153.170	143.455

Sumber: Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001

Tabel berikut menggambarkan demografi sosial budaya dikategorikan berdasarkan agama dan etnik di kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju.

Tabel 5. Komposisi penduduk berdasarkan agama

Agama/Kabupaten	Polmas	Majene	Mamuju
Islam	347.133	120.277	250.035
Katholik	4.580	88	4.310
Protestan	86.698	221	29.168
Hindu	3.412	9	12.155
Budha	76	26	247
Lainnya	4.866	-	611
Total	446.765	120.621	296.625

Sumber : Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001

Tabel 6. Komposisi Penduduk menurut Etnik (Suku Asli dan Pendatang)

Etnik/Kabupaten	Polmas	Majene	Mamuju
Mandar	231.478	115.505	82.288
Bugis	35.474	1.294	54.935
Makassar	2.968	679	9.352
Toraja	106.650	148	16.342
Luwu	603	55	1.315
Jawa	17.891	314	26.648
Duri	596	8	757
Selayar	11	15	121
Lainnya	51.294	2.605	104.867
Total	446.765	120.621	296.625

Sumber : Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001

Berdasarkan fenomena kependudukan di atas, ada beberapa hal yang dapat diungkapkan sebagai perbandingan dan kecenderungan yang terjadi di wilayah ini, yaitu:

1. Jumlah penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2001 ternyata besar dan menunjukkan angka sekitar 18 % dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan. Penyebaran penduduk pada dasarnya memang belum merata pada semua daerah kabupaten di wilayah Mandar. Kondisi ini perlu pembenahan bagi perencanaan perwilayahan termasuk perencanaan investasi yang dipastikan akan memberikan dampak kependudukan. Proses transformasi akan dibarengi oleh proses industrialisasi yang menjadi strategi dasar pembangunan wilayah ini, sehingga kecenderungan urbanisasi akan mudah terjadi.
2. Gerak pembangunan imigrasi akan meningkatkan proporsi jumlah penduduk dari luar (bukan penduduk asli), terutama terkonsentrasi pada wilayah Mamuju sebagai ibu kota provinsi dan Polmas sebagai kota niaga, ataupun juga di Majene yang akan

diprediksi menjadi kota pendidikan. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan dampak yang sosial yang positif apabila dikelola dengan baik, namun akan mudah pula menimbulkan dampak negatif jika tidak diberi arah dan perencanaan yang jelas melalui konsep pembangunan sosial.

3. Perbandingan penduduk menurut etnik dan agama cenderung akan tetap dan kurang ditemukan variabel yang dapat merubah proporsinya secara signifikan. Perubahan hanya akan terjadi oleh gerak migrasi yang didorong oleh motif ekonomi. Maka dalam hal ini perlu dihindari kebijakan yang memberikan keistimewaan tertentu yang dapat mengarahkan pada kesenjangan ekonomi dan sosial antar penduduk asli dengan penduduk pendatang, antar kelompok penganut agama dan tentu saja antar suku, sehingga program transmigrasi yang selama ini berlangsung di Mamuju akan tetap menjadi faktor pendorong meningkatnya produktivitas seluruh penduduk dan tidak memberi kesan adanya perlakuan tidak adil khususnya pada pemanfaatan lahan.

Pada dasarnya Mamuju memiliki angka pertumbuhan yang lebih besar karena wilayah ini merupakan wilayah penempatan transmigrasi dan tujuan imigrasi penduduk di luar wilayah karena saat ini Mamuju menjadi ibukota provinsi. Selain itu pula, di wilayah Mandar berdasarkan data dari Dinas Sosial masih terdapat kelompok masyarakat suku terasing yang sejak tahun 1975 sampai april 1999 dari 10 daerah tempat bersebarannya masyarakat suku terasing, 3 daerah yang penyebarannya lebih banyak, yaitu di Mamuju ditemukan di daerah kecamatan Pasangkayu dan Kalukku yang disebut To Bunggu, To Pembuni dan To Sumonya, dengan jumlah 752 kepala keluarga. Di daerah pedalaman Polmas terdapat di daerah kecamatan Tutallu, Sumarorong, Campalagian, dan Wonomulyo yang dise-

but dengan *To Sareung*, *To Taramanu*, *To Kaleo* dengan jumlah 418 kepala keluarga. Kemudian di daerah Majene terdapat di pedalaman kecamatan Malunda yang disebut *To pamoseang* jumlahnya 102 kepala keluarga.

Masyarakat di wilayah Mandar terdiri dari multienis, yaitu Mandar sebagai penduduk asli, kemudian Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, Bali Timor dan lainnya. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Mandar. Etnik Mandar sebagian besar mendiami daerah kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju, dan merupakan penduduk mayoritas. Mereka umumnya memilih pekerjaan sebagai petani, nelayan, pedagang, pengrajin dan merantau.

Etnik Bugis sebagian besar mendiami daerah Polmas dan Mamuju, secara besar-besaran mereka mendiami wilayah tersebut sekitar tahun 40-an khususnya di daerah kecamatan Polewali, Wonomulyo dan Campalagian di Polmas, kemudian sejak tahun 70-an mereka juga berpindah ke wilayah Mamuju, mereka umumnya memilih pekerjaan sebagai pedagang, petani dan pengrajin (*pande* atau tukang besi).

Etnik Makassar berdiam di wilayah kabupaten Mamuju dan Polmas, mereka selain memilih pekerjaan sebagai pedagang dan pengrajin alat-alat dapur dan petani, tidak sedikit pula memilih pekerjaan sebagai buruh dan penarik becak.

Etnik Toraja sebagian besar mendiami wilayah pegunungan kabupaten Polmas dan Mamuju, mereka pada dasarnya adalah penduduk asli wilayah tersebut. Hanya mereka biasa menyebut dirinya sebagai orang Mamasa di Polmas atau orang Kalumpang di Mamuju. Tidak sedikit pula di antara mereka sudah berdiam di daerah daratan rendah seperti di kota Polewali dan Mamuju dengan memilih pekerjaan sebagai petani, buruh, peternak dan pegawai negeri.

Ke semua etnik tersebut baik Bugis, Makassar dan Toraja setelah daerah kabupaten Mamuju berkembang sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru semakin banyak pula yang berpindah dan bermukim di daerah ini. Hal ini terkait dengan upaya untuk memperbaiki tingkat hidup yang lebih baik sebagai daerah baru dan ibu kota provinsi.

Etnik Jawa yang datang di wilayah Mandar sejak jaman kolonialis Belanda, mereka terutama mendiami daerah Polmas, khususnya kecamatan Wonomulyo yang hampir semua nama kampung, desa dan kelurahan menggunakan nama Jawa, seperti Sidodadi, Sugiwaras, Cirebon, Kuningan, Sumberjo, Bumiayu, Blitar, Kediri, Sidoarjo dan lain-lain. Selain itu sebagian besar pula mendiami daerah Mamuju sebagai daerah penempatan transmigrasi, mereka umumnya memilih pekerjaan sebagai petani, pengrajin (alat-alat dapur, genteng dan batu bata). Kemudian etnik bali dan Timor juga secara umum datang sebagai transmigran dan berdiam banyak di daerah Mamuju dengan pekerjaan sebagai petani dan pengrajin ukir.⁹

4.6. Nilai-nilai Budaya ke-Mandaran

Kebudayaan pada dasarnya meliputi sistem nilai budaya, sistem sosial dan fisik. Menurut Rahman (2001), hubungan ketiganya terkait secara struktural dan fungsional, sehingga nilai budaya berfungsi menata aspek konkret dan membangun aspek yang abstrak. Sebagai landasan dasarnya adalah sistem nilai budaya yang merupakan inti di dalam terbentuknya budaya manusia, maka nilai budaya berperan sebagai penggerak dan berfungsi sebagai penata sikap, perilaku dan identitas manusia.

Terkait dengan pandangan tersebut, pada bagian ini penulis menguraikan nilai budaya Ke-Mandaran yang telah tumbuh dan

berkembang sejak adanya kerajaan-kerajaan di *lita'* (tanah) Mandar dan menjadi sumber identitas yang penting bagi masyarakat Mandar. Nilai budaya ini terlahir berbarengan dengan kemegahan kepemimpinan dari *marad'ia* (raja pertama) Balanipa yaitu I Manyambungi atau Todilaling.

Di masa kepemimpinannya *marad'ia* Todilaling, nilai ini sangat dijunjung tinggi dan diajarkan kepada keturunannya secara bergilir sampai 53 orang *marad'ia*. Maksud diajarkannya nilai budaya ini agar sampai kapanpun Mandar tetap utuh dan menjadi kerajaan yang diperhitungkan oleh kerajaan lain.

Nilai budaya Mandar sebagai amanat Todilaling ini mengandung dua unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Unsur tersebut yaitu: pertama, *maasayanni lita'* Mandar (kecintaan terhadap tanah atau negeri Mandar); dan kedua, *maasayanni pa'banua* Mandar (kecintaan terhadap orang atau masyarakat Mandar). Kedua syarat itu harus melekat dalam diri orang Mandar sebagai sifat luhur yang akan membawa kebaikan (Rahman, 1988: 215; Hafid, 2000: 44).

Dari dua elemen penting kecintaan tersebut kemudian menca-
bar ke dalam berbagai nilai budaya yang menggambarkan simbol se-
orang pemimpin yang harus senantiasa menjadi panutan (*todipeccoi*)
dan menjaga sikap dan tindakan agar tidak dikucilkan oleh adat atas
nama rakyat, sekaligus berlaku pula pada orang-orang Mandar. Bagi
seorang pemimpin, untuk tidak mendapat sanksi dari rakyat, maka
pantangan yang setidaknya memutuskan sendi-sendi adat (*marrat-
tas-rattas uake*) dan menghancurkan aturan (*marruppu-ruppu*) ha-
rus dihindari. Demikian pula bagi orang Mandar, elemen itu juga
menjadi dasar kehidupan bermasyarakat sehingga sedini mungkin
telah di tanamkan dalam diri orang Mandar.

Manakala sifat-sifat itu dimiliki oleh seorang Mandar, maka dianggap sebagai orang yang memiliki sifat “*tomalab’bi*” (manusia utama). Sifat *tomalabbi* ini memiliki tiga unsur yaitu “*malab’bi pau*” (utama dalam bertutur kata) “*malab’bi kedo*” (utama dalam berbuat) dan “*malab’bi gau*” (utama dalam bertindak). Ketiga unsur *malab’bi* ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Malab’bi pau*, terdiri atas:
 - a. *Tatammasuang kedo gau’na* (orang yang tidak kaku dan bertindak);
 - b. *Totammengnganga sassabuaran* (orang yang tidak kasar tutur kata);
 - c. *Totammallesei puroloa* (orang yang memegang teguh perjanjian);
 - d. *Totammake’ la-ke’ la tau* (orang yang tidak iri hati).
2. *Malab’bi kedo*, terdiri atas:
 - a. *Tomandandan mata* (orang yang memberi penuh perhatian);
 - b. *Tatammarrusa allewuang* (orang yang tidak akan merusak kesatuan dan persatuan);
 - c. *Tomaasayanni pabanua* (orang yang menyayangi orang banyak);
 - d. *Totammarrappa atonang* (orang yang tidak merampas tanah orang lain).
3. *Malab’bi gau*, terdiri atas:
 - a. *Totamballang mata* (orang yang tidak berkhianat);
 - b. *Tomappinra ammemanga* (orang yang tidak akan mengubah kebiasaan baik);

- c. *Tomallette diatongan* (orang yang berjalan pada jalan kebenaran);
- d. *Totammaimbai api tue* (orang yang tidak menghembuskan perpecahan);
- e. *Tomaissan baying ri lau* (orang yang mengerti tata aturan dunia);
- f. *Tomarakke di puang* (orang yang takut pada pencipta);
- g. *Tomappatumballe lita* (orang yang menyelamatkan negeri).

Sifat-sifat utama yang dikategorikan dalam komponen diri Mandar merupakan konsep nilai budaya yang mengarahkan masyarakat Mandar untuk bertindak dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 1988:213).¹⁰

Semua identifikasi tersebut di atas menunjukkan adanya pengajaran untuk membentuk sifat manusia yang luhur. Memberikan arahan kepada diri orang Mandar untuk dapat bersosialisasi di dunia sosialnya. Sosialisasi dan enkulturasi tetap dimulai sejak dini yang bermula dari kehidupan keluarga lalu masyarakat. Hal ini menjadikan pewarisan nilai-nilai budaya bagi generasi selanjutnya.

Dalam pemikiran orang Mandar, untuk mengenal dirinya harus terlebih dahulu menjadi bagian dari dunia luas. Secara vertikal dirinya makhluk ciptaan Tuhan, dengan menggunakan akalnnya mereka tidak dapat menghindar untuk tidak mengerti tentang dunia. Berdasarkan pemikiran seperti ini, maka orang Mandar harus mampu melihat dirinya sendiri (subjektif) sebagai salah satu unsur yang selalu terkait dengan kenyataan sosial (objektif).

Pemahaman akan diri yang terkait dengan lingkungan akan dapat membuat memahami tentang dirinya sendiri. Dari pemahaman ini, orang Mandar dapat mendapatkan pengetahuan tentang diri,

lingkungan yang menumbuhkan kesadaran fungsional. Keterkaitan antara diri dan lingkungan tersebut akan menghasilkan keteraturan diri dalam tindakannya. Wujud tindakan seperti ini adalah dianggap sebagai orang Mandar yang *malab'bi*, karena keterkaitan antara diri dan lingkungan merupakan suatu model pemikiran yang diselimuti oleh sistem nilai dan pandangan hidup. Pandangan hidup ini yang kemudian digunakan untuk menginterpretasikan dirinya dan lingkungan sebagai interaksi yang berkelanjutan.

Interaksi karena pemahaman tersebut di atas, melahirkan berbagai keteraturan pada diri, alam dan lingkungan yang secara vertikal dan horizontal dapat terjadi dalam pribadi sendiri. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hubungan vertikal (mengenal diri dan alam), dalam konsep nilai budaya meliputi:
 - a. *maissanni nawang* (mengenal diri dalam dunia)
 - b. *maissanni baying rilau* atau *maissanni bari lau-lau* (mengenal tata krama dunia)

Dalam alam kenyataan kedua hal tersebut dinyatakan sebagai *naissanni maengei nawang* (memahami dan menempatkan dirinya di dalam dunia secara wajar dan tepat). Kedua sistem pengetahuan ini disimpulkan sebagai mengenali diri sendiri berada dalam dunia dan dunia berada dalam diri sendiri (*alawe membolong di nawang membolong dialawe*).

2. Hubungan horizontal (diri dan masyarakat), dalam konsep nilai budaya meliputi:
 - a. *maissanni disanga* (mengenal diri dalam lingkungan masyarakat) dan
 - b. *maissanni atorani* (mengenal dirinya di dalam tata krama sosial).

Dalam alam nyata kedua konsep nilai tersebut dinyatakan *nais-sanni disangamatu-matu* (dia mengenal dengan sesungguhnya aturan hubungan sosial kemasyarakatan). Kedua sistem pengetahuan ini disimpulkan sebagai pengenalan diri yang berada dalam masyarakat dan adat, masyarakat berada di dalam diri sendiri (*alawe membolong diakkeadang, akkeadang membolong dialawe*)

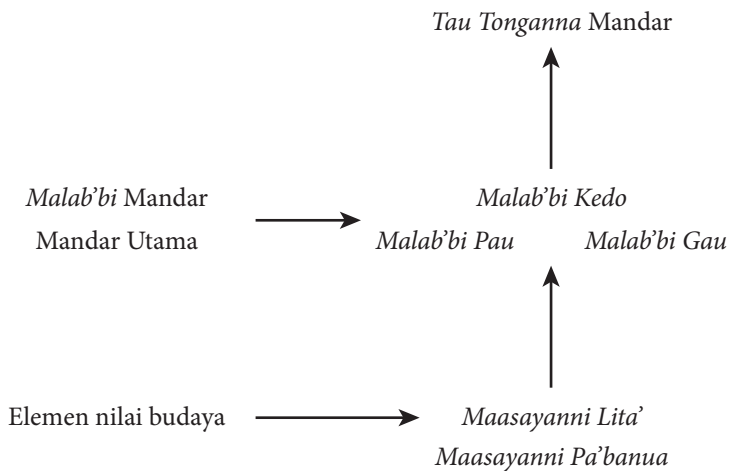
3. Hubungan internal (di dalam diri), dalam nilai budaya meliputi:
 - a. *maissanni alawena* (menegal dirinya sendiri), dan
 - b. *maissanni engeanna* (menegal tempatnya dalam lingkungan)

Dalam alam nyata kedua konsep nilai tersebut dinyatakan *naissanni narupa alawena* (dia mengenal dengan sesungguhnya wujud dirinya sebagai manusia). Kedua sistem pengetahuan ini disimpulkan sebagai pengenalan diri sendiri berada dalam kemanusiaan dan kemanusiaan berada dalam diri sendiri (*alawe membolong diatauwang, diatauwang membolong dialawe*).

Semua pandangan di atas, menyatakan sangat jelas bahwa manusia sebagai subjek tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya yang nyata sebagai objek, sehingga pandangan tentang diri dan lingkungannya serta makna dalam kehidupan tetap tegas dipertahankan.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya ke-Mandaran merupakan rambu untuk mengenal kriteria seseorang sebagai orang yang bersifat baik, memiliki keturunan yang baik sehingga akan mendapatkan Mandar sebagai tau tonga (manusia utuh) sebagai realisasi sifat *To-malab'bi*.

Untuk jelasnya, uraian tentang Nilai Ke-Mandaran (*To-malab'bi*) penjabarannya dapat diikuti dalam bagan berikut



Gambar 1. Penjabaran Sifat To-malab'bi Mandar Sebagai nilai Ke-Mandaran
 Sumber: diramu oleh peneliti berdasarkan literatur tentang nilai budaya ke-Mandaran serta wawancara penulis dengan subjek penelitian. Nilai budaya ini menjadi salah satu elemen identitas Mandar yang dikonstruksi kembali.

Catatan

- 1 *I La Galigo* atau *Sure' Galigo*, merupakan sumber yang memuat petunjuk tentang berbagai peristiwa di Sulawesi Selatan yang dikisahkan dalam bentuk ke-susasteraan dan bahasa simbolik. Kedua hal tersebut kemudian diinterpretasi dalam makna realitas kultural, artinya terdapat berbagai nilai-nilai budaya yang abstrak, tetapi amat kuat memengaruhi realitas sosial yang konkret, dan terjelma dalam interaksi sosial. Dalam *La Galigo*, sesungguhnya terdapat sejarah yang pemeran utamanya adalah Sawerigading. Episode-episode dalam peran Sawerigading disebut Kenr sebagai sejarah Sawerigading, dan menurutnya dapat dipandang sebagai sejarah orang Bugis, sebelum mereka mendapatkan tempat dalam daerah-daerah yang kini didiami. (Kern adalah orang yang menerima salinan *I La Galigo* dari ahli bahasa yang pernah bekerja di Makassar yaitu J.C.G. Jonker tahun 1886-1896, berhasil membuat salinan *La Galigo* sebanyak 500 buku. Salinan itu dibawa ke Belanda dan dihibahkan kepada Perpustakaan Negeri Belanda melalui Dr. R.A. Kern).
- 2 Penamaan dan pelekatan nama etnik di Sulawesi Selatan menurut Edward Poelinggomang (sejarawan) adalah hasil dari rekayasa kolonialisme Belanda saat Spelman berkuasa. Penamaan ini bertujuan untuk membedakan nama wilayah semata akan tetapi berubah menjadi nama etnik. Masyarakat Bugis awalnya diambil dari sekelompok masyarakat dari Donggala yang oleh Spelman dipindahkan ke wilayah Makassar, kemudian daerah di mana orang-orang ini dipindahkan disebut dengan Bugis. (Wawancara, 25 Agustus 2005).
- 3 Nama *Tomakaka* masih terpatri dalam benak orang Balanipa, dibuktikan dengan banyaknya kuburan keramat sebagai kuburan *Tomakaka*. Kuburan-kuburan tersebut terletak di desa Lampoko, Parampe, Luyo, dan Tammangalle, Pambusuan, Samasundu. Penamaan *Tomakaka* juga masih digunakan oleh pemuka masyarakat di berbagai desa di Tinambung, misalnya di Mosso, Pallis dan kecamatan Campalagian, desa Beru-beru, Sumarrang, Tenggelang. Khususnya, dalam penggunaan sebagai sapaan, dan sebagai tambahan nama.
- 4 Dikutip oleh Hamzah, Aminah (dkk) dalam *Lontara Mandar*, dalam Tesis Muliadi "Gerakan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat", 2001.
- 5 Diformulasikan dan disarikan dari berbagai sumber yang diungkap dalam bahasa Mandar dan bahasa Ulu Salu, dalam *Provinsi Sulawesi Barat Dan Keniscayaan Sejarah* (Studi Kelayakan), 2000: 18.
- 6 Berdasarkan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 1952 No 34, wilayah ini kemudian berubah nama menjadi daerah Swatantra Tingkat II Mandar. Perubahan wilayah selanjutnya berdasarkan undang-undang 29 tahun 1959 yang dilaksanakan pada tahun 1960. Wilayah

itu kemudian dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Mamuju, Majene dan Polewali Mamasa. Ketiga kabupaten itu memiliki struktur aparat pemerintahan yang sama dengan daerah lainnya dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

- 7 Seperti yang dijelaskan dalam Provinsi Sulawesi Barat dan Keniscayaan Sejarah (Studi Kelayakan) Oleh KAPP Sulawesi Barat, 2000.
- 8 Berdasarkan catatan sejarah tokoh ini cukup berjasa dalam membebaskan pejuang yang menjadi tawanan, khususnya pejuang Mandar yang ditawan NICA (Anas, 2000: 28). Pada saat terakhir NIT, beliau dalam kapasitas sebagai ketua parlemen, menyampaikan langsung keputusan pembubaran NIT kepada Presiden Soekarno dan siap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- 9 Seperti yang diuraikan dalam Tesis Mulyadi, Gerakan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Suatu kajian Antropologi Politik), 2001, hal 64-66.
- 10 Nilai-nilai itu dapat dijabarkan di dalam kehidupan dan diperinci sebagai berikut: 1) *Malabbi pau* menjadi *mapia pau*, terdiri atas: *mapia akke pau* (baik dalam mulai berbicara); *mapia pulu-pulu* (baik dalam bertutur kata); *mapia turalloa pulu-pulu* (baik dalam merangkai kata); *mapia turappau* (baik dalam mengucap kata); dan *mapia pau, tongan pau* (baik dan benar berkata-kata). 2). *Malabbi kedo* menjadi *mapia kedo*, terdiri atas: *mapia penawa* (legah dalam perasaan); *mapia peita* (berpandangan luas); *mapia pella* (melihat jauh ke depan); *mapia akke lette* (melangkah dengan telaten); *mapia pelli* (melangkah dengan penuh perhitungan); *mapia pekkedde* (berdiri di atas kebenaran); dan *mapia buassoe* (berjalan dengan penuh keteraturan). 3) *Malabbi gau* menjadi *mapia gau*, terdiri atas: *mapia pennia* (baik dalam niat); *mapia pa'mai* (berbudi luhur); *mapia ate* (berhati ikhlas); *mapia appe* (bertatakrama yang sopan); *mapia pikkiran* (berpikir yang jernih); *mapia pettugangan* (teguh pada keputusan); dan *mapia pekkeddean* (tegas dalam pendirian).

5

Proses Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Sebagai *Project Identity* dari Konstruksi Sosial

Identitas etnik adalah suatu proses pengukuhan atau penciptaan terhadap suatu nilai-nilai atau simbol-simbol etnik yang mendasari suatu sistem. Proses itu dapat terbentuk lewat interpretasi realitas fisik dan sosial sebagai atribut-atribut etnik. Identitas etnik yang terinternalisasi dalam tindakan memiliki makna yang sangat penting karena dibutuhkan seseorang atau kelompok dalam mengaktualisasikan apa yang menjadi problem dalam dirinya. Aktualisasi problem biasanya dilakukan dengan tindakan. Tindakan dalam penciptaan identitas etnik merupakan bagian dari tindakan luar yang mengikutsertakan tindakan dalam dirinya yang tersembunyi. Dalam hal ini, identitas etnik dipandang sebagai suatu tindakan yang bermakna pada peran yang dibangun oleh seseorang atau kelompok untuk menentukan ranah kekuasaan etniknya.

Penentuan ranah kekuasaan etnik merupakan bagian dari aktivitas politik. Aktivitas ini biasanya dilakukan secara sadar dan selalu menyediakan waktu dan ruang yang lebih konstan untuk bertindak dan berpikir demi identitas mereka. Identitas etnik tersebut diben-

tuk dalam aksi-aksi politik. Segala hal yang terkait dengan aksi-aksi politik yang dijalankan oleh aktor selalu menunjukkan identitas etniknya. Identitas etnik itu dijadikan sebagai jembatan untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam tahap ini, penulis akan memaparkan aktor-aktor yang mengonstruksi identitas etnik Mandar. Dalam hal ini, konstruksi identitas etnik dibangun sebagai kesadaran politik individu atau kelompok untuk melakukan tindakan menempatkan posisi terbaik bagi etniknya. Apa yang dilakukannya setidaknya merupakan upaya untuk menemukan kembali (*re-invention*) identitas yang telah mengabur.

Secara khusus, bagian ini akan membahas empat hal yang terkait dengan konstruksi identitas Mandar, terutama dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat. (1) tahapan sejarah konstruksi identitas, (2) proses konstruksi identitas dan aktor yang berperan di dalamnya, (3) polemik setelah provinsi terbentuk, dan (4) posisi elite pejuang dan penerus konstruksi. Pendekatan yang dipakai dalam membahas ke-empat hal tersebut dengan membandingkan apa yang telah dilakukan oleh elite pejuang (penggagas) dan apa yang dilakukan oleh elite intelektual dalam merealisasikan gagasan pembentukan provinsi.

5.1. Tahapan Sejarah Konstruksi Identitas Etnik Mandar

Konstruksi identitas etnik Mandar lewat penguatan pembentukan provinsi, pada dasarnya berkembang dari ide atau pemikiran yang tidak hanya terjadi saat reformasi, tetapi juga sebelum reformasi. Sebenarnya tahap pertama pemikiran itu dimulai sejak awal kemerdekaan dan berlanjut pada tahap berikutnya hingga terben-

tuknya provinsi Sulawesi Barat. Semua tahap pembentukan provinsi tersebut, pada dasarnya diilhami dari keinginan yang kuat untuk membentuk wilayah itu sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri. Dalam otonomi daerah diberikan kebebasan untuk berprakarsa dan berinisiatif mengolah dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Karena itu dalam daerah otonom dituntut adanya kebebasan dan kemandirian. Tanpa kebebasan dan kemandirian sulit ditemukan daerah otonom yang sesungguhnya.

Bertitik tolak dari kebebasan dan kemandirian tersebut, maka beberapa tokoh (elite-elite pejuang) telah beberapa kali mencoba menempatkan posisi etnik Mandar untuk dapat disegani dengan etnik lain di Sulawesi. Hal itu direalisasikan melalui tahapan-tahapan konstruksi. Tahapan tersebut berdasarkan pernyataan para elite pejuang yang kemudian menjadi persepsi umum di kalangan masyarakat Mandar. Tahapan itu dikategorikan dalam lima tahap, yang dicirikan berdasarkan fenomena yang mengikutinya, yaitu:

5.1.1. Tahap Tercetusnya Ide dan Gagasan (Agustus 1945)

Tahap ini merupakan tahap awal, karena kategori konstruksi identitas masih dalam bentuk ide atau pemikiran para elite pejuang kemerdekaan di Wilayah Mandar. Artinya konstruksi mereka masih terbatas dalam bayang-bayang atau pikiran elite pejuang Mandar. Salah satu di antaranya adalah H.A. Malik Pettana Endeng sebagai pemuda pejuang saat itu. Adapun catatan pentingnya, sebagai alat penggerak bagi pemuda Mandar saat itu yaitu:

“Jika pada suatu saat nanti Indonesia merdeka, maka wilayah konfederasi kerajaan Pitu Ba’bana dan Pitu Ulunna Salu akan menjadi satu Kresidenan atau provinsi sendiri dan otonom. Karena konfederasi ini merupakan bentuk kejayaan kerajaan-kerajaan Mandar yang harus diben-

tuk kembali sebagai wilayah yang diperhitungkan. Selain itu, wilayah ini sangat kaya dan berpotensi, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini dan mengupayakan kembalinya Mandar lagi”.

—Elite pengagas

Elite pejuang itu memiliki pemikiran awal untuk memberikan kesadaran bagi elite pejuang selanjutnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang kuat tentang arti pentingnya Mandar bagi mereka. Walaupun masih dalam tataran pemikiran, tetapi setidaknya pemikiran dasar yang dikembangkan oleh Malik Pettana Endeng menjadi kesadaran awal pada elite-elite yang melanjutkan gagasan itu.

Pemikiran elite itu tidak mendapat respons yang positif pemerintah saat itu. Kenyataannya setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan rapat tanggal 19-08-1945. Dalam rapat tersebut hanya membagi Indonesia ke dalam delapan provinsi saja, yakni: provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Etnik Mandar tidak berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Etnik Mandar menjadi bagian dari provinsi Sulawesi.

5.1.2. Tahap yang Dijembatani oleh Organisasi Bapnas (17 Agustus 1948)

Tahap ini juga disebut sebagai tahap kedua, konstruksi identitas masih dalam masa pemerintahan Negara Indonesia Timur. Saat itu beberapa kekuatan sosial politik di wilayah Mandar bersatu pada satu rencana persiapan pembentukan keresidenan/provinsi. Rencana itu kemudian difasilitasi oleh satu organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan Bapnas yaitu Badan Permufakatan Nasional. Organisasi itu dibentuk pada tanggal 17-08-1948, berkedudukan di Majene, pembentukan organisasi itu mendapat dukungan yang

sangat kuat dari Partai Syarikat Islam (PSI) dan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

Organisasi itu kemudian dipimpin oleh salah satu elite pejuang, yaitu Wahab Anas, saat itu dia dianggap tokoh yang sangat militan dan getol untuk merealisasikan rencananya, di lain tempat, khususnya di Balanipa (Sekarang Tinambung), elite elite pejuang KRIS MUDA Mandar terdiri dari H. Abd. Malik, H. Riri Amin Daud, Rahman Tamma juga berpikir untuk segera membentuk propinsi. Konstruksi itu dianggap sebagai lanjutan dari pemikiran dan gagasan H.A. Malik Pettana Endeng. Pernyataan Wahab Anas saat itu :

“Pada saat itu saya membantu Puang Malik memperjuangkan cita-cita murni tersebut. Yang paling bersejarah pada perjuangan ini, adalah saat puncak perjuangan, dimana diadakan musyawarah daerah di Arajang Tinambung dan berhasil membentuk formatur Pembentukan Pemerintah Darurat R.I provinsi Sulawesi Barat “.

—Elite pejuang

Kelanjutan konstruksi itu tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Kecuali suatu babak baru yang kelam menyelimuti eks afdeling Mandar. Walaupun berhasil merebut opini secara luas dan Bapnas telah berhasil menyosialisasikan pemikiran dan gagasan tersebut ke masyarakat, tetapi pada saat bersamaan muncul pula Pemerintah Darurat di Pamboang dan mengangkat Djuhaeni Ahmad sebagai gubernur militer. Hal itu menjadi sebuah dilema bagi masyarakat.

Muh. Riri Daud dengan rasa kecewa mengisahkan kembali peristiwa pertemuan dengan pejabat pemerintah masa itu :

“Saat itu saya bersama Abd. Malik, Abd Rauf dan Mak-karaeng, Hamzah Tumpu melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Pekerja KNIL di akting Presiden

R.I Mr. Assaat dan Menteri Dalam Negeri M. Susanto Tirtoprojo dan menyetujui pembentukan Propinsi Sulawesi Barat di mana menunjuk H.A. Malik sebagai Residen Sulawesi Barat, namun keinginan pada saat itu belum juga menjadi kenyataan. Kami berdua juga tidak diberi alasan mengapa perjuangan kami masih ditunda, tapi disinyalir bahwa akibat kondisi politik dan keamanan yang kurang stabil akhirnya menunda pembentukan Sulawesi Barat”.

—Elite pejuang

5.1.3. Tahap Dualisme Kepemimpinan Sipil-Militer (1950)

Tahap ini merupakan tahap ketiga, berkisar tahun 1950-1965, waktu itu terjadi pemberontakan Kahar Muzakkar. Seperti wilayah lain di Sulawesi, wilayah Mandar juga terimbas dan praktis terisolasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebagian besar Polmas, Majene, dan Mamuju menjadi daerah defakto DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), sehingga terjadi dualisme pemerintahan. Kondisi itu semakin buruk ketika pemerintah wilayah itu berada dalam keadaan darurat perang. Adanya dualisme kekuatan yang berlangsung antara sipil-militer yang pada saat itu di pimpin oleh Letkol A. Selle yang sudah berlangsung sejak awal tahun 1954. Kapten A. Selle merupakan salah satu bawahan Kahar Muzakkar yang tergabung dalam Corps Cadangan Nasional, dan menjadi orang pertama masuk bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Menurut catatan sejarah, Kapten A.Selle adalah pemimpin yang selalu menjaga hubungan baik dengan anak buahnya. Beliau memakai gaya kepemimpinan sebagai pelindung dari sistem feodalisme (Gonggong, 183), dengan mempraktikkan kepemimpinan yang menggambarkan gaya feodal. Selain mempertahankan hubungan

dengan bawahan, beliau juga membentuk beberapa batalion cadangan dengan biaya sendiri. Gaya kepemimpinan itu dilaksanakan dengan mengeksploitir beberapa sumber daya alam yang ada di wilayah Mandar sehingga masyarakat Mandar melakukan eksodus ke Pare-pare, Makassar, Kalimantan, dan Jawa. Tokoh-tokoh Mandar saat itu tidak mampu berbuat banyak selain menunggu momentum perubahan.

Dinamika politik demikian memicu gerakan pemuda untuk membentuk Front Pembebasan Rakyat Tertindas Mandar (FPRTM) yang bertujuan mengakhiri dualisme kekuasaan melalui penghapusan kekuasaan A. Selle di wilayah Mandar, karena banyak melakukan pelanggaran hak azasi manusia. Tokoh yang terlibat dalam tahap ini antara lain: H.A. Depu, Baharuddin Lopa, Husni Djamaluddin, S. Mengga, Muh Riri Amin D, A. Syaiful Sinrang dan lain-lain. Hal itu dituturkan oleh elite pejuang sebagai berikut:

“Perjuangan Front ini mendukung pada dua hal yaitu pengakhiran kekuasaan dualisme Letkol A. Selle pada tahun 1964 di mana dia dinonaktifkan serta perjuangan untuk mengusahakan pemekaran wilayah provinsi di mana peluang swatantra Tingkat II Mandar saat itu sangat terbuka dan berpeluang untuk menjadi sebuah provinsi, namun tahun 1959 wilayah mandar swatantra Mandar malah dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Polmas Mejene dan Mamuju dan bukan sebuah provinsi. Kemudian pada tahun 1960, Front perjuangan ini membentuk Dewan Perjuangan Pembentukan Provinsi Dati I Mandar, akan tetapi belum berhasil karena pemerintah sibuk dengan perjuangan pembebasan Irian Barat, sehingga sosialisasi perjuangan secara lokal kurang dapat dilaksanakan”.

—Tokoh Adat/ Budayawan

Senada dengan itu seorang tokoh intelektual yang ikut bergabung dalam perjuangan itu membenarkan pernyataan di atas. Dengan penuh kehati-hatian beliau menuturkan apa yang pernah dialaminya:

“Beberapa orang yang masuk dalam kelompok kami seperti Baharuddin Lopa, Andi Mappatunru, S. Mengga dan yang lainnya berpandangan bahwa untuk menghilangkan pengaruh kekuasaan yang sentralistik, kami mengusulkan penghapusan daerah swatantra Mandar untuk kemudian di mekakan menjadi tiga kabupaten, dengan maksud agar nantinya mudah untuk menjadi sebuah provinsi sehingga akhirnya kami membentuk Dewan Perjuangan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Mandar sebagai wadah tempat kami melakukan perjuangan. Dewan kami bekerja dengan maksimal, tetapi saat itu kami tidak memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah, suara kami tidak didengarkan karena saat itu, pemerintah masih sibuk membenahi pembebasan daerah Irian Barat. Dan alasan yang sangat kuat, bahwa pemerintah belum bisa merespons akibat situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif untuk segera daerah Mandar menjadi provinsi baru”.

—Elite int/pejuang

Pemerintah saat itu menganggap bahwa eks afdeling Mandar belum layak menjadi sebuah provinsi dan untuk meredam kekecewaan barisan pemuda maka tokoh Muda Baharuddin Lopa diangkat menjadi Bupati Majene, H. A. Paccoba sebagai Bupati Mamuju serta A. Hasan Mangga menjadi Bupati Polmas. Menurut Baharuddin Lopa (dikutip oleh Hasanuddin dkk, 2000) bahwa pengangkatan dirinya menjadi Bupati Majene dengan cara dispensasi (karena saat itu beliau belum cukup umur), pengangkatannya dimaksudkan untuk

membawa misi penegakkan pemerintahan yang taat pada azas sekaligus untuk mengimbangi kekuasaan dualisme A. Selle yang menyimpang dari tugas kemiliteran, sekaligus mengupayakan keamanan wilayah pemerintahannya.

Pengangkatan itu menunjukkan bahwa mereka bertigalah yang menjadi Bupati pertama di tiga kabupaten yang dimekarkan, dan saat itu *onder afdeling* Mamasa luput dari pemekaran, wilayahnya tidak dikembangkan menjadi satu kabupaten, tetapi masuk menjadi bagian dengan kabupaten Dati II Polewali Mamasa.

Selama beberapa tahun, ketiga kabupaten tersebut kurang dapat berkembang dengan baik. Hal itu disebabkan kondisi daerah yang belum normal. Saat yang sama, ada isyarat pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi pemekaran terutama di Sulawesi selatan dan Tenggara, yang akhirnya memacu kembali para tokoh-tokoh Mandar untuk mengkonstruksi kembali pemikiran dan tindakan agar Mandar dapat ditetapkan sebagai satu propinsi yang mandiri.

5.1.4. Tahap difasilitasi organisasi lintas kabupaten MSSC “Mandar Study and Sport Club” (1965).

Tahap keempat dimulai sejak runtuhnya Orde lama, konstruksi kembali diupayakan oleh elite-elite yang sama pada tahap sebelumnya serta ditambah dari beberapa mahasiswa Mandar yang menimba ilmu di perguruan tinggi di Makassar. Saat itu mulai terbentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dari Mandar, ada yang mewakili dari tiap kabupaten, bahkan ada juga yang mewakili dari tiap-tiap nama kerajaan-kerajaan dulu, seperti Kerukunan Masyarakat Mandar Majene (K3M) dan Himpunan Mahasiswa Balanipa (HMB).

Menurut salah satu elite pejuang yang saat terlibat dalam konstruksi menuturkan :

“Sebenarnya pemikiran dan perjuangan untuk pembentukan provinsi Sulawesi Barat sudah ada sejak Orde lama hingga zaman Orde baru, akan tetapi di setiap tahap perjuangan tidak pernah ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah karena tuntutan tidak diprioritaskan. Padahal pemerintah dulu menjanjikan bahwa ketujuh daerah afdeling di Sulawesi semuanya akan menjadi daerah provinsi “.

—Elite pejuang

Zaman Orde baru ditandai dengan terbentuknya organisasi yang mengatasnamakan Polmas, Majene dan Mamuju sebagai organisasi lintas kabupaten. Salah satu organisasi ini adalah “*Mandar Study and Sport Club (MSSC)*”, yang dibentuk tanggal 10 November 1964. Melalui organisasi ini, muncul gagasan ke arah kesadaran baru untuk bangkit membangun kembali Mandar seperti yang telah dipikirkan dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pencetus gagasan sebelumnya dan tetap mendesak pemerintah pusat agar dengan cepat menjadikan wilayah Mandar menjadi sebuah provinsi .

Pelaku konstruksi dengan rasa kecewa mengisahkan peristiwa gagalnya perjuangan tahap keempat. Dia merasa pemerintah kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat Mandar, saat itu beliau mengisahkan:

“Penggagas dalam studi Mandar itu diprakarsai oleh tokoh muda Ma'mun Hasanuddin. Walaupun telah bekerjasama dengan tokoh tokoh sebelumnya. Namun pemerintah tidak juga memperhatikan tuntutan pembentukan provinsi, dimana didukung oleh Perda No 2/1964 dan UU No. 13/1964 bahwa provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Tenggara hanya dibagi dalam dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sementara Sulawesi Barat masih ditunda padahal kenyataan di lapangan bahwa eks afdeling Mandar lebih layak menjadi sebuah

provinsi dibandingkan dari Sulawesi Tenggara saat itu dan ada kecenderungan dari pemerintah untuk tidak mau melepaskan Mandar sebagai satu provinsi”.

—Elite int/pelaku

Kekecewaan intelektual itu sangat mendasar, karena pemerintah telah menjanjikan bahwa Mandar akan menjadi provinsi sendiri dari pemekaran Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tapi kenyataannya, Mandar masih tetap menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Hal itu menumbuhkan kekecewaan yang mendalam dari sebagian masyarakat, karena sebenarnya Mandar lebih layak untuk dimekarkan dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara, kalau ditinjau dari aspek kesiapan infrastruktur dan sumber daya, akan tetapi kalau ditinjau aspek wilayah pelayanan Sulawesi Tenggara tergolong sangat jauh dari ibukota provinsi, sehingga yang lebih cepat dimekarkan menjadi provinsi sendiri adalah Sulawesi Tenggara.

5.1.5. Tahap Perjuangan antara Elite Tradisional (Pejuang) dan Elite Intelektual (1998)

Merupakan tahap kelima, sebagai tahap lanjutan dari upaya yang dilakukan oleh elite-elite Mandar yang sejak tahun 1964 ingin membentuk provinsi, akan tetapi tidak mendapat respon dari pemerintah. Tahap itu sebagai upaya puncak dan merupakan gabungan pemikiran pembentukan provinsi Mandar (Sulawesi Barat) dalam proses yang cukup lama. Kegagalan upaya pembentukan provinsi berlangsung hampir tiga puluh tahun, dan sejak itu tidak ada lagi aspirasi terbuka yang menuntut perubahan politik dan pemerintahan, termasuk aspirasi pemekaran wilayah. Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik, sehingga aspirasi daerah kurang diperhatikan, termasuk aspirasi pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah hanya dibenarkan

jika benar-benar dipandang perlu itupun hanya terbatas pada pemekaran kabupaten/kotamadya saja.

Pembentukan provinsi ke 27 Timor Timur, pada masa orde baru bukan disebabkan adanya pemekaran wilayah, tetapi lebih merupakan pengintegrasian wilayah bekas jajahan Portugal ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pembatasan pemekaran wilayah karena setiap wilayah yang terbentuk itu membebani anggaran pendapatan dan belanja Negara, sebab setiap kabupaten baru terbentuk itu akan membebani APBN seperti, gaji pegawai, tunjangan jabatan Bupati, kepala Dinas dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Tahap kelima merupakan gabungan pemikiran dari elite, yaitu elite intelektual dan elite pejuang. Elite pejuang adalah mereka yang masuk sebagai kategori penggagas pemikiran tahap awal, mereka kemudian berjuang dalam tahap-tahap berikutnya dan telah menanamkan pemikiran untuk membentuk provinsi. Sedangkan elite intelektual adalah mereka yang kemudian mengonstruksi ulang pemikiran dan ide-ide dari elite pejuang. Gabungan dua kelompok elite ini membentuk sebuah forum yang disebut dengan forum Sipamandar, forum yang mengatasnamakan dirinya seperti nama awal dari kata Mandar, yaitu saling menguatkan. Forum itu sebagai media komunikasi dan partisipasi masyarakat Mandar. Forum itu dibentuk oleh para pemimpin organisasi kemasyarakatan Pemuda. Orientasi forum itu lebih banyak berkiprah sebagai forum antar tiga kabupaten dan bebas dari kegiatan politik, sehingga forum itu hanya memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan, kemahasiswaan dan kepemudaan yang arahnya adalah pada peningkatan sumber daya manusia.

Organisasi kemasyarakatan dan pemuda mahasiswa yang membentuk forum ini adalah, Kerukunan kekeluargaan Masyarakat Mandar Polmas (KKM-MP), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali

Mamasa (KPM-PMM), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Majene Mandar (IPPMIM), Perhimpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mamuju (HIPERMAJU), dan Persatuan Keluarga Mamuju (PER-SUKMA). Selain itu, forum ini juga beranggotakan elite-elite yang berpengaruh di Mandar, antara lain: H.A Mappatunru, Husni Djamaluddin, Prof. Dr. Darmawan MR, Andi Maksun D'ai, H. Borahima, Mahmud Hadjar, Rahmat Hasanuddin, Ma'mun Hasanuddin dan sejumlah elite yang lain.

Salah satu anggota menyebutkan:

“Forum ini membentuk presidium yang terdiri dari tiga anggota presidium yang secara bergiliran menjadi ketua masing-masing Husni Djamaluddin (Polmas), Asnawi Parampasi (Mamuju) dan Prof. Dr. Amin Abdullah (Majene). Karena sesuatu hal kemudian ketua presidium dari Majene digantikan oleh Rahmat Hasanuddin yang juga putera daerah Majene. Harapannya bahwa ketiganya mewakili aspirasi dari tiga kabupaten yang ada di Mandar”.

—Elite int/pelaku

Aktivitas forum itu diwakilkan kepada Ma'mun Hasanuddin sebagai ketua harian dan H. Borahima selaku sekretaris Jendral. Selama kurun waktu sejak berdirinya forum ini sampai tahun 1997, pemikiran untuk membentuk provinsi masih diobsesikan dalam tataran wacana politik dalam bentuk diskusi dan sarasehan. Tahap itu menempatkan idealisme dan aspirasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat berada pada keinginan yang kuat untuk secepatnya dikonstruksi kembali, sebagaimana pemikiran elite-elite sebelumnya. Atas dasar pemikiran mereka harus dilaksanakan dengan tindakan yang konkrit, mengingat ada peluang yang telah diberikan pemerintah dengan undang-undang otonomi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam forum Sipamandar belum berhasil. Hal itu disebabkan masih kuatnya cengkeraman orde baru dalam melakukan pembatasan pemekaran wilayah. Akan tetapi forum Sipamandar bangkit kembali ketika kekuasaan orde baru runtuh, diganti dengan orde reformasi.

Euforia reformasi telah menggoyahkan pemerintah pusat sehingga sistem pemerintahan sentralistik berubah menjadi ke arah yang lebih desentralisasi. Gerakan desentralisasi dan otonomi daerah dikumandangkan di berbagai daerah di Indonesia, utamanya daerah kaya seperti aceh dan Papua. Hal itu diikuti oleh daerah-daerah lain yang tergabung dalam etnik tertentu untuk membentuk daerah otonom sendiri.

Salah satu etnik di provinsi Sulawesi Selatan yang ingin berdiri sendiri sebagai daerah otonom adalah etnik Mandar. Gerakan menuju pembentukan provinsi Sulawesi Barat pasca reformasi diawali tahun 1999. Saat itu elite Mandar bersepakat membentuk KAPP-Sul-Bar (Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat), yaitu sebuah lembaga yang memelopori gerakan perjuangan yang lebih terencana, sistematis dan konstitusi. Dalam perkembangannya mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh rakyat melalui persetujuan tiga DPRD, kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju. Alasan utama ditujukan karena konstruksi untuk menempatkan Mandar sebagai wilayah yang otonom seperti kejayaan konfederasi kerajaan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, tidak sekalipun menjurus pada pelanggaran hukum dan perundang-undangan karena sebagai masyarakat, orang Mandar sangat menghargai konstitusi, etika dan nilai persaudaraan dan persatuan. Rakyat Mandar mencintai dan komit terhadap negara kesatuan.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa konstruksi identitas Mandar etnik direalisasikan dengan upaya pembentukan provinsi,

artinya melibatkan perasaan emosional kesejarahan dari konfederasi kerajaan yang digulirkan sejak awal kemerdekaan. Elite pejuang sebagai penggagas pemikiran merekomendasikan bahwa tidak ada alasan bagi Sulawesi Selatan untuk menghalangi etnik Mandar untuk membentuk provinsi yang berdiri sendiri. Mandar berjuang semaksimal mungkin, dan membuktikan bahwa Mandar ada, Mandar kuat dan dikuatkan oleh kecintaan pada tanah dan rakyat Mandar.

Harapan tersebut diperkuat oleh salah seorang pelaku konstruksi, yang menuturkan:

“Pemikiran pembetulan provinsi Sulawesi Barat merupakan amanat yang harus segera dilakukan oleh kita sebagai generasi penerus. Ini harus segera diupayakan agar ada perasaan tenang bagi pejuang-pejuang pendahulu. Mandar harus tetap dibuktikan keberadaannya, jangan kita hanya bergantung pada orang-orang yang tidak memperhatikan rakyat kita sepenuhnya. Mandar harus bangkit menempati kedudukan yang sama dengan etnik-etnik lain di Sul-Sel ini. Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan kalau bukan kita sekarang. Jangan kita memberikan pekerjaan ini kepada anak cucu kita. Sekaranglah Mandar harus diperhitungkan”.

—Elite agama/pelaku

Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa semua subjek penelitian yang memberikan informasi tentang konstruksi pembentukan provinsi membenarkan keberadaan pemikiran dan gagasan tersebut. Pemikiran itu banyak dikonstruksikan oleh bangsawan, walaupun belum mendapat respons dari pemerintah, akan tetapi perjuangan tetap diteruskan sampai pada momen yang dianggap tepat untuk membentuk provinsi tersendiri.

5.2. Proses Konstruksi Identitas Etnik Mandar dan Aktor yang Berperan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konstruksi identitas etnik Mandar dalam tulisan ini diwakili melalui penguatan pembentukan provinsi. Proses konstruksi itu melibatkan segenap pihak, baik komponen masyarakat maupun elite. Elite menjadi kajian penting, karena menempatkan diri sebagai unsur penggerak sekaligus pelaku utama.

Bagian ini secara khusus akan membahas tiga hal, yaitu (1) awal konstruksi identitas etnik Mandar; (2) realisasi atas tindakan konstruksi di daerah; dan (3) pengaruh elite tradisional. Ketiga hal tersebut merupakan bagian yang saling terkait dalam melihat konstruksi identitas Mandar

Sebagai uraian awal, difokuskan pada tahapan dari ide/gagasan pembentukan provinsi, yang diwakili dalam empat tahap. Dari tahap awal hingga keempat, perjuangan elite belum juga memperoleh hasil. Meskipun gagal akan tetapi usaha pembentukan provinsi tetap dilanjutkan. Perjuangan ini mengalami hambatan pada tahap pertama hingga keempat. Akan tetapi perjuangan tidak dihentikan, sampai pada tahap kelima di mana pemerintah telah memberi peluang dan kesempatan wilayah Mandar untuk berotonomi. Untuk itu uraian selanjutnya akan difokuskan pada tahap perjuangan kelima.

5.2.1. Awal Konstruksi Identitas Etnik Mandar

Pembentukan provinsi baru di Mandar merupakan proses yang panjang. Awal pembentukan berasal dari aspirasi yang kuat dari masyarakat. Kondisi itu diakibatkan oleh dorongan dan motivasi yang besar dari masyarakat. Hal itu merupakan bentuk kesadaran masyarakat bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah

Mandar. Aspirasi masyarakat berkembang dalam bentuk mendukung (pro), pesimis, dan bahkan menolak (kontra) pembentukan tersebut.

Kesadaran untuk membentuk provinsi mencapai puncaknya ketika dibentuk Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAAP-Sulbar) di Makassar pada tanggal 9 september 1998. KAAP-Sulbar merupakan wadah yang di dalamnya bergabung antara elite-elite pejuang baik elite penggagas (elite tradisional) maupun elite penerus (gabungan elite: seperti elite intelektual, elite birokrat, elite agama, dan lain-lain).

Gabungan elite itu merupakan kekuatan moril dan diharapkan secepat mungkin melakukan tindakan konkrit. Hal itu dituturkan kembali oleh Ketua KAPP-Sulbar Rahmat Hasanudin, ditemui di ruangan kerjanya, beliau sangat antusias menerima peneliti dan merasa bangga ada yang meneliti pembentukan provinsi. Selain sebagai ketua KAPP-Sulbar, beliau juga salah satu rektor perguruan tinggi swasta di Makassar, sehingga sebagai intelektual, maka awal perjuangan pembentukan provinsi banyak dilakukan dengan kegiatan diskusi. Ketika ditanyakan awal perjuangannya dengan penuh semangat beliau menceritakan:

“Walaupun awalnya kami lakukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan diskusi dan sarasehan semata, tapi dari kegiatan awal tersebut melahirkan kesepakatan dan keinginan yang kuat untuk melakukan tindakan-tindakan konkret tidak hanya sekadar wacana belaka, tetapi menjadi keinginan yang harus segera diwujudkan. Kami merasa pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebagai pijakan awal berpikir mendapat titik terang, karena dukungan itu mengalir terus-menerus dan memang kita boleh tinggal diam saja. Jadi realisasinya bahwa kita harus membentuk suatu wadah yang menampung aspirasi pembentukan dan wadah itu kami sebut dengan

Komite Aksi Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat atau KAPP-Sulbar (wawancara, 12 September 2004).

—Elite Int./Pelaku

Ditambahkannya:

Komite ini terdiri dari orang-orang Mandar yang berpotensi, memiliki jiwa dan semangat ke-Mandaran, mencintai Mandar sebagai tanah kelahirannya, dan mencintai Mandar karena ingin berbuat baik untuk masyarakatnya. Kedua hal itu menjadi salah satu dasar mengambil tindakan yang terbaik bagi Mandar untuk tetap eksis menunjukkan identitasnya.

Selanjutnya, komite itu membentuk kelompok-kelompok kerja (pokja) di tiap kabupaten. Tujuan kelompok kerja adalah langsung terjun pada masyarakat. Ketua koordinator kelompok kerja Polmas, Syahrir Hamdani ditemui dikediamannya di Polmas mengisahkan kembali perjuangannya. Ketika ditanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh kelompok kerja, beliau menuturkan:

“Penunjukkan sebagai koordinator di Polmas bagi saya merupakan pekerjaan yang berat, mengingat saya banyak yang mengetahui kondisi riil di wilayah ini, maka amanah ini harus betul-betul saya jalankan. Terlebih dahulu yang kami lakukan adalah silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama mereka-mereka dari kelompok bangsawan adat yang suaranya dapat menjadi pengaruh di masyarakat. Mungkin yang dilakukan oleh pokja-pokja di Majene dan Mamuju sama dengan yang kami lakukan, tapi pada dasarnya kami telah bekerja keras untuk meletakkan dasar pemahaman kepada masyarakat (wawancara, 14 September 2005)

—Elite Int./Pelaku

Kelompok kerja (pokja) itu lebih mendekatkan tugasnya pada masyarakat tingkat bawah dengan dijembutani oleh elite tradisional sebagai kelompok pendukung kuat. Pokja melakukan tugas sosialisasi dengan maksud agar masyarakat memahami dan mendukung kerja keras dari KAPP-Sulbar.

Di tingkat lokal, selain KAAP-Sulbar bersama dengan kelompok kerja di tiap kabupaten, terdapat juga DP3SP (Dewan Perjuangan Pembela Provinsi Sulawesi Barat) sebuah dewan yang dibentuk pada tanggal 19 Januari 2001 sebagai hasil keputusan kongres rakyat Mandar di Majene. Dewan itu dibentuk untuk memudahkan masyarakat menyuarkan aspirasinya.

Para pemuda juga tidak mau ketinggalan. Mereka membentuk beberapa wadah kepemudaan antara lain, BPPSB (Barisan Pemuda Pembela Sulawesi Barat), dan lain-lain. Organisasi kepemudaan itu menjadi fasilitator bagi mahasiswa dan pemuda yang aktif untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Salah satu penasehat BPPSB mengatakan:

“Untuk memperkuat dukungan, kami tidak melupakan kelompok pemuda. Pemuda dan mahasiswa merupakan elemen penting, untuk mensinergikan potensi-potensinya kami menyambut dengan senang hati kemunculan organisasi kepemudaan ini. Karena pada dasarnya, mereka memiliki tujuan suci, untuk kembali menjadikan Mandar wilayah yang otonom, tidak perlu bergantung pada Sulawesi Selatan” (wawancara, 15 September 2005)

—Elite/pelaku

Untuk tingkat pusat, dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar membentuk suatu wadah bersama yang disebut dengan BPN-PPSB (Badan Pekerja Nasional-Pembentukan Provinsi Sula-

wesi Barat), tokoh-tokoh yang berdomisili di Jakarta bersama-sama menyatukan misi pada bulan Januari tahun 2000. Diantaranya adalah Arif Djamaluddin, Puang Limboro, ARH, Imran P. Limboro, dan lain-lain. Tugas utama dari badan ini adalah menyalurkannya aspirasi di tingkat pusat, berbarengan dengan KAPP-Sulbar dari tingkat lokal.

Dari hasil observasi, keinginan untuk mempercepat pembentukan provinsi, dilakukan dengan tujuh agenda kerja yang dapat di-himpun sebagai berikut:

1. Menggalang seluruh potensi dan elemen masyarakat Mandar dan non Mandar menyatukan persepsi dan tujuan bersama. Hal itu dilakukan melalui seminar, rapat akbar, dan deklarasi.
2. Membentuk komite-komite aksi di setiap wilayah terkonsentrasi pada warga Mandar seperti di Palu, Jakarta, Surabaya, Samarinda, Kendari, Balikpapan, Manado dan kota-kota lainnya. Sementara di tiga kabupaten (Polmas, Majene dan Mamuju) sepenuhnya dilakukan oleh kelompok kerja.
3. Menggalang kekuatan intelektual untuk menjadi nara sumber dan membentuk opini publik dan mengajak masyarakat Mandar berperan aktif dalam pembentukan provinsi.
4. Melakukan sosialisasi visi dan misi pembentukan provinsi melalui media massa seperti media cetak dan elektronik. Penyebaran dan pemasangan stiker, pamlet, spanduk, dan lain-lain.
5. Menggalang dukungan dari seluruh masyarakat Mandar melalui solidaritas lintas etnik dan agama. Hal itu dapat dilihat pada pembentukan pansus di tiga DPRD (Polmas, Majene dan Mamuju) yang akhirnya DPRD dan Bupati masing-masing daerah mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya diikuti rekomendasi Gubernur dan DPRD provinsi Sulawesi Selatan untuk dilanjutkan ke Jakarta.

6. Membuka rekening untuk menggalang dana melalui pengusaha asal Mandar, elite, dan masyarakat luas. Di samping itu pemerintahan daerah menyediakan pos anggaran bagi pembentukan provinsi yang kemudian dituangkan dalam APBD.
7. Melakukan lobi dan negosiasi untuk meyakinkan rasionalitas dan kelayakan provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan baik oleh KAPP-Sulbar melakukan pertemuan dengan DPRD Pusat, Komisi II DPR, DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) Departemen Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan presiden Abdul Rahman Wahid (saat itu). Sementara BPN-PPSB melakukan lobi dengan DPR khususnya komisi II juga dengan menteri PAN Ryas Rasyid (saat itu).¹

5.2.2. Realisasi atas Tindakan Konstruksi di Daerah

Bagian ini secara khusus membahas observasi atas sosialisasi yang dilakukan di tiga kabupaten, yaitu di daerah Polmas, Majene dan Mamuju. Sosialisasi yang dilakukan melalui kekuatan kelompok kerja (pokja) masing-masing daerah. Aktifitas kelompok kerja tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

Pertama, untuk daerah Polmas, kelompok kerja yang ditunjuk oleh KAPP-Sulbar, dikoordinasi oleh Syahrir Hamdani, seorang aktifis, mantan anggota DPRD Polmas, dan staf pengajar pada perguruan tinggi terkemuka di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan tugas, strategi sosialisasi yang dilakukan disebutnya sebagai tindakan gerilya. Hal itu dilakukan dengan mendatangi tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapat simpati dan persetujuan untuk membentuk provinsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh pokja tersebut, awalnya hanya sebatas wacana untuk meyakinkan sebagian elite saja. Akan tetapi karena saat itu kondisi belum memungkinkan, dan masa pemerin-

tahan orde baru tidak pernah memberi kesempatan kepada etnik Mandar untuk membentuk propinsi sendiri. Ketua kelompok kerja Polmas, Syahrir H mengatakan:

“Bukan hanya pemerintah pusat yang tidak respons pada perjuangan kami, tetapi orang nomor satu di daerah ini (Polmas) juga seakan-akan tidak pernah respons dengan ide yang kami bawa. Beliau sempat mengatakan “jangan pernah mengambil wilayah saya untuk membentuk provinsi karena tidak akan pernah oleh pemerintah daerah”, lalu bagaimana bisa berjalan dengan baik jika ada hambatan struktural seperti itu. Tapi dengan hambatan seperti itu tidak membuat kami merasa harus mundur dari perjuangan. Kami tetap berusaha mengupayakan yang terbaik bagi warga kami, walaupun mungkin sebagian birokrat mengecam perjuangan kami, tapi niat kami tulus” (wawancara, 14 September 2005).

—Ketua Pokja/pelaku

Sementara itu, walaupun dalam proses sosialisasi kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah, akan tetapi tetap dijalankan dan sebagian besar melakukan rapat atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan di Tinambung, perjuangan tersebut cocok dengan karakter masyarakat Tinambung karena masyarakatnya tegas dalam prinsip, terbuka, dan mudah kompromi. Selain itu, Tinambung tempat menetapnya beberapa tokoh pejuang yang masih hidup dan mendukung gerakan perjuangan tersebut. Tokoh yang dimaksud, antara lain H. Abd. Malik Pettana E. Di tempat ini juga ada sekelompok pemuda yang siap memberi dukungan. Kelompok itu tanpa henti-hentinya melakukan diskusi untuk mempercepat pembentukan provinsi.

Responsnya tokoh-tokoh masyarakat, terlihat pada peringatan hari pahlawan tanggal 10 november 1998. Saat itu diadakan deklarasi di makam pahlawan korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kecamatan Tinambung. Acara itu dihadiri seluruh komponen pejuang pembentukan provinsi, selain dihadiri oleh sesepuh masyarakat Mandar, hadir pula tokoh masyarakat dari Makassar yang tergabung dalam “*Sipamandar*”, KAPP-Sulbar dan Pokja-pokja dari masing-masing kabupaten. Kehadiran tokoh masyarakat, terutama penggagas awal sejak awal kemerdekaan yang setiap tahunnya diundang, memberikan semangat bagi elite intelektual dan para pemuda, bahwa perjuangannya tidak sia-sia dan mendapat dukungan kuat dari elite pejuang (tokoh-tokoh masyarakat).

Setelah dari Tinambung, beralih ke Polewali. Di wilayah itu, sosialisasi menggunakan media elektronik, seperti radio Sawerigading, salah satu radio swasta yang memberikan waktu siaran untuk diskusi-diskusi pembentukan provinsi dan mencari masukan-masukan dari masyarakat. Di samping itu, koran daerah yaitu Mandar pos, memberikan rubrik sebagai ruang khusus sebagai tempat menuangkan opini bagi elite untuk memengaruhi masyarakat. Kegiatan seperti itu, terus menerus dilakukan oleh kelompok kerja.

Sosialisasi itu mencapai puncaknya pada rapat akbar di Wonomulyo tanggal 12 januari 2000. Dalam rapat akbar itu bermunculan aspirasi masyarakat mendukung pembentukan provinsi baru. Aspirasi itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan pada acara tersebut. Bahkan ketua DPRD Polmas dan Mamuju sempat hadir dalam acara tersebut dan memberikan dukungan secara pribadi.

Gencarnya dukungan masyarakat terhadap karya kepada kelompok kerja, sehingga DPRD berinisiatif membentuk pansus guna menjaring dan menampung kehendak rakyat untuk membentuk

provinsi sendiri. Hasil yang diperoleh pansus kemudian dikolaborasi dengan hasil pertemuan tiga DPRD Kabupaten yakni: Polmas, Majene, dan Mamuju). Pertemuan tiga DPRD itu bertempat di Mamuju tanggal 3 Juni 2000. Setelah kembali ke daerahnya DPRD Polmas mengeluarkan rekomendasi pembentukan propinsi, setelah itu disusul rekomendasi dari Bupati Polmas.

Kedua, sosialisasi di Majene, seperti halnya strategi yang dilakukan di Polmas, yaitu mendatangi tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah memperoleh dukungan dan simpati masyarakat. Di samping itu menyampaikan visi dan misi pembentukan provinsi. Pada dasarnya, tokoh-tokoh tersebut cukup mendukung, akan tetapi belum dinyatakan dengan dukungan resmi, mengingat belum ada respons dari pemerintah daerah. Hal itu terlihat ketika diadakan pertemuan di Padasalama Majene bulan September 1998. Pertemuan tersebut hanya dihadiri 3 orang dari 30 orang yang diundang. Kurangnya undangan yang hadir disinyalir karena keraguan atas kegiatan yang dianggap ilegal.

Kondisi awal tersebut, tidak menurunkan semangat kelompok kerja Majene. Kelompok kerja itu kemudian membentuk kelompok kerja yang lebih kecil di tiap kecamatan. Hal itu dimaksudkan agar sosialisasinya lebih mudah dikoordinasi. Hasil dari sosialisasi itu adalah terbentuknya kesadaran masyarakat, sehingga melakukan rapat akbar di gedung Assamalewuang Majene tanggal 9 April 2000. Dalam rapat akbar tersebut, tidak hanya dihadiri tokoh dari Majene tetapi juga tokoh masyarakat dari dua kabupaten lainnya. Berawal dari rapat akbar itu sehingga pihak DPRD Majene segera membentuk pansus. Pansus itu menyepakati pembentukan provinsi baru. Kesepakatan pansus itu ditindaklanjuti dalam rapat tiga DPRD di Mamuju tanggal 3 Juni 2000. Dalam rapat itu tiga DPRD bersepakat membentuk provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan kesepakatan itu sehingga DPRD Majene mengeluarkan rekomendasi dukungan kelembagaan kepada KAAP-Sulbar. Rekomendasi itu diteruskan kepada Bupati untuk segera memberi rekomendasi pembentukan provinsi baru di Mandar. Realisasi dukungan di Majene ditunjukkan saat diadakan Kongres Nasional I rakyat Mandar. Saat itu, dukungan masyarakat meluas dan berbagai acara-acara tertentu selalu disisipkan komitmen dan semangat pembentukan provinsi. Sementara dukungan pemerintah daerah Majene dan DPRD sudah bulat, dengan membentuk kepanitiaan daerah dan aparat pemerintah terlibat secara langsung. Sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD. Anggaran itu digunakan untuk perjuangan pembentukan provinsi.

Ketiga, proses sosialisasi di daerah Mamuju sedikit berbeda dengan Polmas dan Majene. Di Mamuju ketika wacana ini bergulir, pemerintah daerah dan DPRD menyambut positif dan memberikan dukungan bulat. Hal itu dapat dilihat dari adanya keinginan pemekaran Mamuju menjadi beberapa kabupaten, sehingga sosialisasi tidak mengalami hambatan. Demikian juga dari masyarakat, karena sebagian besar daerah Mamuju dihuni oleh pendatang yang cukup dinamis, sehingga mereka sebagian besar memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di daerah baru.

Sosialisasi dilaksanakan secara bergilir, dari daerah satu ke daerah yang lain, dengan memulai pada daerah yang akan dikembangkan menjadi kabupaten. Upaya tersebut memperoleh hasil yang maksimal. Hal itu ditandai dengan adanya persetujuan melalui tanda tangan dan pernyataan sikap dari 4500 tokoh masyarakat dari berbagai etnik, 100 tokoh masyarakat dari setiap desa dan terakhir dukungan dari 18 partai politik. Segenap dukungan tersebut akhirnya direspon oleh pemerintah daerah, dan wujud aspirasi masyarakat

itu kemudian disetujui dengan rekomendasi dari DPRD Mamuju dan Bupati, dalam hal ini rekomendasi tersebut sangat spesifik karena didalamnya mencantumkan keinginan Mamuju sebagai ibukota propinsi. Untuk hal ini, oleh KAAP-Sulbar akan diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri.²

5.2.3. Pengaruh Elite Tradisional

Dinamika pembentukan provinsi diwarnai oleh aktivitas dan pemikiran elite, khususnya elite atau pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin masa kini (Koentjaraninggrat, 1945, 128). Dalam disertasi ini, elite tradisional adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kekuasaan atas nama massa karena memiliki ciri-ciri tradisional yang dinilai tinggi oleh masyarakat lokal, seperti; keberanian, kharisma, berkemampuan ekonomis, serta unsur kebangsawanan untuk dapat menggerakkan, memengaruhi dan mengorganisasikan massa. Sedangkan elite massa kini, diartikan sebagai mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa kini, ditandai dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki ciri-ciri kepemimpinan terutama dalam pilihan rasional untuk memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan, serta legitimasi berdasarkan hukum yang berlaku.

Ketika ulasan kepemimpinan elite dibahas dalam struktur sosial masyarakat, tampaknya diperoleh gambaran bahwa elite dipandang sebagai teladan pada satu pihak dan pada pihak lain sebagai pemegang kekuasaan. Elite dipandang sebagai teladan karena memiliki bakat yang lebih unggul dan memenuhi misi historis tertentu. Sedangkan elite yang dipandang sebagai pemegang kekuasaan, adalah mereka yang secara kolektif merupakan pemimpin, pengambil keputusan, orang-orang yang berpengaruh dalam mengendalikan berbagai kegiatan dalam masyarakat (Schoorl, 128). Setiap elite mempunyai pengaruh atau kekuasaan terhadap masyarakatnya, dalam

pengertian ini kekuasaan mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si objek, individu atau kelompok dengan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, wawancara dilakukan dengan salah seorang elite birokrat, yang tidak masuk dalam proses konstruksi, tetapi sebagai fasilitator ketika kelompok kerja ingin menemui petinggi-petinggi daerah, seperti Bupati. Tampaknya para birokrat bersikap dingin terhadap ide/gagasan pembentukan provinsi, karena menurutnya merupakan keinginan dari kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

Sikap dingin itu terlihat ketika birokrat tersebut hendak diwawancarai, mereka merasa tidak berkompeten untuk memberi informasi. Meskipun kelihatan enggan dan kurang bersahabat, akan tetapi dengan penuh kesabaran penulis dapat menemui kembali, sampai akhirnya beliau mau meluangkan waktu. Saat ditanyakan bagaimana kekuatan elite tradisional sebagai kelompok penentu, dengan sedikit hati-hati beliau mengatakan:

“Jika kita menghubungkan berkembangnya ide atau gagasan pembentukan provinsi Sulawesi Barat ini dengan elite, sangat jelas bahwa gerakan perjuangan ini karena elite, terutama datang elite tradisional yang kemudian dimobilisasi oleh elite intelektual dari kelompok Hasanuddin cs, sebagai kelompok yang merasa dirinya terpinggirkan. Gabungan kedua kekuatan tersebut yang membentuk kelompok kerja yang senantiasa mendatangi tokoh masyarakat dan memengaruhinya, sehingga nyata-nyata sekarang mereka dapat mudah mendapat tempat di hati masyarakat. Tapi sebaiknya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah” (wawancara, 21 September 2005).

—Elite birokrat

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan tokoh masyarakat lain. Tokoh itu pernah dikunjungi kelompok kerja (pokja) Polmas untuk memberikan dukungannya. Sebagai tokoh yang berpengaruh di wilayahnya, dia merasa sangat terhormat ketika harus memberikan wejangan kepada kelompok-kelompok anak muda yang memiliki semangat memperjuangkan pembentukan provinsi.

Hal yang mengecewakan adalah birokrat di daerah ini tampaknya bersikap dingin terhadap usaha kelompok kerja. Birokrat itu menganggap elite tradisional hanya pemanis belaka. Hal itu dapat dilihat dari penuturannya:

“Kita tidak boleh lupa bahwa pembentukan provinsi di daerah Mandar telah ada sejak awal kemerdekaan, dipelopori oleh elite lokal masa itu. Sekarang bukan merupakan hal yang baru, jika keinginan itu muncul kembali berupa perjuangan yang berkelanjutan yang tidak boleh melupakan jasa dari elite tradisional tersebut, jangan seperti lupa kacang akan kulitnya, karena bagaimanapun juga mereka (elite tradisional) adalah pejuang-pejuang pembentukan provinsi “ (15 November, 2005).

—Tokoh masyarakat/Adat

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat diperoleh suatu pernyataan bahwa untuk mewujudkan cita-cita membentuk provinsi baru faktor elite lokal tidak boleh diabaikan. Mereka dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam perjuangan tersebut. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya dikotomi antara putra daerah dan non putra daerah yang semakin berkembang dalam wacana pembentukan provinsi.

Dalam kasus ini, putra daerah Mandar awalnya menilai bahwa setidaknya jangan melibatkan orang lain atau etnik luar dalam proses konstruksi, karena mereka takut kedudukannya dapat digeser.

Keterlibatan etnik lain dalam pembentukan provinsi dianggap mempersempit ruang gerak mereka sebagai putera Mandar. Menanggapi hal demikian, salah satu anggota Pokja Polmas menuturkan:

“Jika kita mengharapkan bahwa putera daerah untuk kemudian tampil memimpin daerahnya sendiri, maka ini adalah sesuatu hal yang salah. Untuk pengembangan daerah baru memang sangat memerlukan SDM yang handal dan professional, akan tetapi jangan hanya dari daerah Mandar saja. Jika nanti terbentuk, berilah kesempatan yang bukan putera daerah yang berpotensi untuk mengembangkan dan melaksanakan pembangunan dalam kawasan ini. Saya kira ini akan memudahkan daerah Mandar cepat maju” (wawancara, 14 September 2005).

—anggota pokja

Elite ini menganggap, bahwa keterlibatan orang yang bukan putra daerah ternyata memberikan banyak kontribusi. Seperti dukungan dari Ibnu Munsir, beliau secara emosional bukan orang Mandar, tetapi pandangan dan responnya cukup besar dibandingkan dengan sesama anggota DPR-RI asal Sulawesi Selatan, di DPRD pusat. Meskipun mendapat kecaman dari orang Sulawesi Selatan yang lain, tetapi beliau tetap ikut berjuang bersama dengan orang Mandar misalnya Hasanuddin bersaudara dan Syahrir Hamdani (Pokja Polmas). Hal itu dilakukan karena Ibnu Munsir merasa memiliki hubungan dekat dengan beberapa elit Mandar yang berjuang membentuk provinsi baru.

Elit Mandar yang berupaya membentuk provinsi baru berusaha mendapatkan dukungan baik putra daerah maupun yang bukan putra daerah. Putra daerah tidak semuanya langsung memberikan dukungan terhadap pembentukan provinsi baru. Ada diantara putra

daerah yang apatis, sehingga mereka tidak diajak dalam perjuangan itu.

Kelompok yang merasa tidak diikuti dalam perjuangan menganggap apa yang telah dikerjakan oleh KAPP-Sulbar dan rekan-rekannya hanyalah demi kepentingan kelompoknya semata. Apa yang dilakukan dianggap belum cukup mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Ketika kasus seperti itu ditanyakan kepada salah seorang kelompok Hasanuddin, beliau mengatakan:

“Sebenarnya sebuah perjuangan, tidak mudah tercapai jika diharapkan muncul dari rakyat semata, diperlukan adanya motivator atau penggerak untuk mempercepat perjuangan tersebut. Sama dengan daerah Mandar ini. Dalam perjuangan yang dilalui ada saja faktor penghalang yang muncul dalam prosesnya. Disini saya melihat yang lebih cenderung menghalangi itu karena adanya elite lokal yang merasa tersisih kemudian tidak dilibatkan. Namun awalnya mereka itu kurang tanggap dan menganggap apa yang dilakukan merupakan hal yang sia-sia, tapi dengan segenap hati kami melakukan ini hanya demi kemaslahatan rakyat Mandar, dan apapun kendalanya kami tidak akan mundur, kepalang basah” (wawancara, 15 November 2005).

—Unsur ekonomi/pengusaha

Optimisme tersebut berhasil mendapat respon positif dari tokoh masyarakat Mandar. Walaupun pada dasarnya, tokoh-tokoh masyarakat itu mengetahui siapa saja yang merasa tersisih dalam gerakan tersebut, tapi menurutnya itu bukanlah kendala besar yang harus dihadapi tapi sebagai salah satu pemicu untuk tetap bertahan berjuang. Dalam banyak wejangan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat, salah satu yang berasal dari etnik Jawa dan sebagai penggerak massa ikut memberikan pernyataan:

“Kami merasa perjuangan ini memang menerjang apa saja yang menghalangi. Begitulah wujud dari perjuangan kami, kami tahu bahwa ada saja kendala yang dihadapi tapi itu bukan berarti kami harus mundur. Sebagai suatu proses menuju yang lebih baik kami menerima semua kritikan, semua kecaman yang dilontarkan. Ini malah memicu semangat kami untuk lebih berbuat sebaik mungkin dengan cara damai dan konstitusi.

Memang awal perjuangan kami mendapat kritikan dari berbagai pihak, baik dari kalangan birokrat maupun dari beberapa tokoh masyarakat. Tapi kami mampu mensosialisasikan kepada mereka dan Alhamdulillah mereka dapat menerima perjuangan kami dan bersama-sama untuk segera mewujudkannya“(wawancara, 15 November 2005).

—Tokoh masyarakat/Adat

Pernyataan di atas memperjelas bahwa setiap perjuangan selalu ada saja kelompok yang kurang berkenan karena merasa kepentingan mereka tidak tersalurkan. Akan tetapi wujudnya tidak dalam bentuk penolakan yang bersifat merusak hubungan secara fisik, tetapi cenderung berupa kritikan semata yang akhirnya hilang dengan sendirinya. Seperti diungkapkan kembali oleh salah satu anggota kelompok Hasanuddin:

“Dalam gerakan perjuangan ini, ternyata tidak hanya kami yang terlibat dalam KAPP- Sulawesi Barat yang memotori. Setelah ada reaksi dari pemerintah daerah ketiga kabupaten tersebut. Tiba-tiba muncul kelompok kepentingan baru yang berusaha mengambil alih, mereka merasa tidak dilibatkan dan merasa bahwa daerah Mandar adalah daerahnya yang perlu segera lepas dari Sulawesi Selatan. Akan tetapi kelompok kepentingan itu tidak direspons oleh masyarakat. Akhirnya hilang

dengan sendirinya bahkan sebagian anggotanya bergabung dengan untuk berjuang dalam gerakan ini” (Idem).

—Idem

Untuk mengantisipasi kondisi itu, maka setiap anggota kelompok kerja berusaha mendekati kelompok-kelompok yang tidak sejalan. Mereka berdialog dan terbuka satu sama lain sehingga konflik dapat dihindari. Hasilnya hubungan mereka semakin akrab dan dapat terjalin silaturahmi dengan baik. Akibatnya kelompok yang tadinya tidak sejalan dapat memahami dan ikut bersama-sama dalam kegiatan itu, bahkan ada diantara mereka yang menjadi pionir di wilayahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang pada awalnya tidak setuju dapat diajak bergabung dalam pembentukan provinsi. Sejalan dengan hal itu, maka salah satu anggota kelompok penekan mengatakan:

“Sebenarnya kami tidak berarti mengecam atau menghalangi keinginan sebagian kelompok elite lokal yang memperjuangkan provinsi baru . Akan tetapi masyarakat harus mengerti sasaran yang akan dicapai dengan melihat permasalahan dari provinsi Sulawesi Selatan . Kalau rakyat mengerti benar terserah kemauan mereka, mau berpisah dengan membentuk provinsi sendiri juga terserah rakyat” (wawancara, 21 November 2005)

—Anggota kel. penekan

Sejalan dengan perdebatan yang terjadi diantara kelompok pejuang dengan kelompok yang tidak setuju, selain dapat diselesaikan oleh sebagian kelompok kerja, ada pula campur tangan dari elite tradisional sebagai peletak wacana pembentukan provinsi. Campur tangan elite tradisional adalah mengundang kedua kelompok tersebut

sehingga terjadi dialog yang konstruktif. Dalam dialog itu dicapai titik temu antara kedua kelompok itu.

Kegiatan itu dilakukan oleh Malik Pettana Ende. Beliau mengundang KAPP-Sulbar dan berbagai kelompok yang tidak setuju di kediamannya, dan meminta semua pihak (elite pejuang/intelektual, kelompok yang tidak setuju, dan elite birokrat) bekerjasama untuk mempercepat proses terbentuknya provinsi. Berdasarkan kenyataan tersebut, ketua KAPP-Sulbar mengatakan:

“Bahwa berhasil tidaknya usaha pembentukan provinsi tersebut sangat tergantung pada kemampuan dan kapabilitas pihak atau tokoh pencetusnya dahulu. Karena itu, dia menyarankan agar para tokoh masyarakat dari ketiga kabupaten di wilayah Mandar dapat betul-betul dilibatkan. Kalau masalah ada yang disebut Panitia Pembentukan Provinsi Sul-Bar, para tokoh itu sebagai elite lokal yang memiliki kapabilitas harus diajak berbicara. Pemikiran mereka sangat penting dan diperlukan untuk kepentingan rakyat Mandar “ (Idem).

—Idem

Berdasarkan hal tersebut di atas, seorang fungsionaris partai politik mengatakan:

“Adanya kritikan dari beberapa orang terhadap gerakan perjuangan Sulbar, menurut saya karena ada faktor penyebabnya. Beberapa orang yang bersebrangan dengan pemerintah daerah khususnya para elite lokal merasa terpanggil untuk mencetuskan ide atau gagasan ini. Tokoh masyarakat yang dulu merasa tersisih (tokoh lama) juga merasa ingin tampil seperti generasi muda pencetus ide tersebut. Jadi memang mereka tidak dapat dilupakan, akan sangat bersalah generasi muda jika meninggalkan atau tidak pamit kepada golongan tua.

Oleh karena itu, di sinilah peran yang penting bagi elite tradisional, karena tanpa beliau sulit bagi KAPP-Sulbar bergerak dan memperoleh dukungan” (wawancara, 21 Oktober 2005).

—Fungsionaris Partai Politik

Segean wawancara yang telah dilakukan diperoleh suatu kenyataan, bahwa elit lokal yang kharismatik, khususnya mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Mandar. Perannya diperlukan dalam membangun kekuatan baru. Artinya kekuatan elite tradisional memengaruhi pemikiran generasi berikutnya untuk tetap berusaha menempatkan Mandar sejajar dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Dengan demikian apa yang dicita-citakan elite terdahulu menjadi perpanjangan tangan elite sekarang untuk mempertegas kembalinya identitas Mandar.

Dari seluruh rangkaian proses konstruksi dan aktor yang berperan, maka analisis pada proses ini memperlihatkan beberapa hal yang penting. Pertama, berkembang pemikiran bahwa etnik Mandar, sebagai etnik yang minoritas dan marginal, menggerakkan elite khususnya gabungan antara intelektual dan tradisional membentuk identitas politik. Dalam hal ini, elite menyediakan ruang dan waktu untuk bertindak dan berpikir secara konstan untuk berbuat yang terbaik untuk kehormatan etniknya. Semua kegiatan itu dilakukan dalam bentuk aksi-aksi politik.

Peran yang dijalankan oleh elite (aktor) sebagai aksi-aksi politik diterjemahkan dalam pembentukan Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar), sebagai wadah untuk mempercepat proses konstruksi dengan membentuk kelompok kerja untuk tiap daerah, serta organisasi lain yang mendukung perjuangan tersebut.

Kedua, proses sosialisasi yang mempercepat wacana ini tersebar dalam masyarakat Mandar. Sosialisasi diperuntukkan pada tiga daerah dan penekanannya pada masyarakat luas, hal ini dimaksudkan agar mudah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah, baik dari DPRD maupun Bupati. Dalam sosialisasi dipaparkan visi dan misi pembentukan provinsi baru, yang tidak bernuansa etnik. Sebab mereka yang terlibat berjuang membentuk provinsi baru itu, meskipun bukan orang Mandar asli, akan tetapi secara emosional memiliki kepekaan terhadap Mandar.

Ketiga, terdapat kesenjangan pemikiran (*mind*) dalam memaknai tindakan konstruksi, terutama dalam memaknai peran elite intelektual yang dianggap oleh sebagian kelompok penekan hanya usaha untuk memperoleh kekuasaan, karena tidak ada kesempatan yang diperoleh dari pemerintah provinsi, sehingga lahan kekuasaan diarahkan kepada daerahnya sendiri. Kecurigaaan semakin berkembang saat elite intelektual hanya melibatkan kelompok yang berpengaruh saja, terutama elite tradisional. Dalam hal ini, sebagian putra daerah merasa tidak memiliki kesempatan yang lebih luas.

Setidaknya dalam tulisan ini ditemukan empat kategori kelompok yang setuju dan tidak setuju dalam proses pembentukan provinsi, yaitu (1) kelompok yang kurang setuju, karena cenderung tidak memiliki sarana untuk menyalurkan aspirasinya, dan merasa pembentukan provinsi tidak penting baginya, kelompok ini sebagian diwakili oleh masyarakat biasa. (2) kelompok yang setuju, tetapi tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui dengan pasti visi dan misi pembentukan provinsi, mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka ibaratnya kelompok penonton yang berada di luar arena dan suatu saat akan memberikan respon jika tidak sesuai dengan koridor yang telah disetujui, kelompok ini juga ada dalam masyarakat. (3) kelompok yang setuju, dan terlibat bahkan sebagai kelompok peng-

gagas pembentukan provinsi. Kelompok ini membentuk gerakan perjuangan yang terencana, sistematis, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gerakan itu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4). kelompok yang kurang setuju, karena kelompok ini merasa tersisih, dan tidak transparan untuk mengatakan ketidaksetujuannya. Namun yang cenderung mereka lakukan mengkritik setiap agenda kerja dalam pembentukan provinsi, kelompok ini diwakili oleh generasi baru dari tokoh lama yang merasa orang tua mereka lebih dahulu memulai gerakan tersebut

5.2.3. Polemik setelah Provinsi Terbentuk

Bersamaan dengan terbentuknya provinsi Sulawesi Barat, muncul beberapa polemik yang biasanya terjadi pula pada daerah yang melakukan pemekaran wilayah. Pada bagian ini, secara khusus membahas dua hal yang dianggap sebagai konflik internal di Mandar, yaitu (1) penentuan nama ibukota, dan (2) konflik di Mamasa. Kedua konflik tersebut diuraikan lebih lanjut.

1. Penentuan Nama Ibu Kota dan Masalahnya

Penentuan ibu kota provinsi setelah Sulawesi Barat terbentuk menjadi salah satu polemik tersendiri. Hal ini terkait dengan rekomendasi DPRD dari tiga kabupaten, yaitu Polmas, Majene dan Mamuju (sebelum pemekaran). Dalam kongres nasional pertama rakyat Mandar, menetapkan bahwa Mamuju akan dipersiapkan menjadi Ibu kota provinsi. Namun hal ini telah menimbulkan perdebatan di Polmas dan Mejene, dua kabupeten tersebut, secara kelembagaan belum menyetujuinya, hal ini tampak ketika sebagian masyarakat Polmas dan Majene kurang setuju ketika Mamuju akan menjadi ibu kota provinsi.

Sebelum polemik ini muncul, DPRD Mamuju telah memberikan rekomendasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat dengan syarat yang spesifik, yaitu menempatkan Mamuju sebagai Ibukota provinsi, karena daerah Mamuju dianggap memiliki potensi untuk menjadi ibu kota dan menjadi wilayah strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi ini diteruskan kepada DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk dipelajari.

Penempatan Mamuju sebagai ibukota provinsi sudah menjadi keputusan final dari DPRD Mamuju, jika kemudian terjadi polemik atas penentuan ibukota karena Polmas dan Majene tidak menyetujui, maka DPRD Mamuju sepakat, Mamuju akan mundur dan tidak bergabung dalam wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Mamuju telah mempersiapkan posisi tawar yang lebih dari dua kabupaten lainnya.

Apa yang telah disepakati oleh DPRD Mamuju tersebut, mendapat reaksi yang keras dari tokoh-tokoh dan masyarakat dari Polmas dan Majene. Ketika observasi dilakukan, khususnya pada penentuan ibu kota, ada pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat Polmas yang mengatakan bahwa secara kasat mata, tiga kabupaten yang sangat berpotensi menjadi ibu kota adalah Polmas, mengingat kabupaten ini telah siap menjadi ibu kota dilihat dari pertimbangan fasilitas dan sarana yang dimiliki. Sementara di Majene berkembang isu bahwa untuk menjadi ibu kota provinsi, Majene yang paling tepat, karena berdasarkan latar belakang sejarah, Majene pernah menjadi pusat pemerintahan afdeling Mandar masa pemerintah Belanda.

Perdebatan penentuan ibu kota menjadi konflik internal dalam masyarakat, hal ini menjadi alasan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi upaya percepatan pembentukan provinsi. Untuk mengantisipasi kondisi demikian, para elite pejuang melakukan dua pendekatan untuk meredam polemik tersebut agar tidak

menjadi konflik yang berkepanjangan, yaitu: Pertama, menyerahkan sepenuhnya penentuan ibu kota kepada pemerintah pusat, DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Hal ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari gubernur dan DPRD provinsi Sulawesi Selatan atas pembentukan provinsi Sulawesi Barat. DPOD diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan studi kelayakan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 dan PP 129 tahun 2000, menentukan kabupaten mana yang pantas untuk menjadi ibu kota provinsi.

Kedua, konflik penentuan ibukota dapat diselesaikan atas bantuan dari tokoh karismatik, yaitu mengingatkan kepada pihak-pihak yang berseteru untuk kembali kepada nilai budaya, “Sipamandar”. Kondisi ini tampak ketika berlangsung kongres nasional di Majene, khususnya pada acara sidang paripurna yang membahas hasil rekomendasi tiga kabupaten, terkait dengan usulan penetapan ibukota. Suasana sidang dipenuhi dengan adu argumentasi, sidang hampir ditunda, saat itu peserta kongres dengan kesadaran dan kearifan menerima pencerahan dari tokoh H. Malik Pettana Endeng untuk kembali mengingat visi dan misi perjuangan mereka.

Selain itu, dua tokoh lainnya juga datang dan memperkuat makna “Sipamandar”, yaitu bangsawan Mamuju A. Maksud Da'i dan Basri Hasanuddin sebagai tokoh dari Majene. Kedatangan kedua tokoh tersebut, setidaknya memberi pengaruh, karena mereka berposisi sebagai penetralisir konflik internal antar masyarakat. Perbedaan atas penentuan ibu kota akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, atas kesadaran dan kekeluargaan, yang berseteru bersepakat di manapun ibu kota akan ditetapkan, yang terpenting mereka tetap menjadi satu wilayah dan satu identitas, yaitu Mandar.

Untuk mengantisipasi konflik internal tersebut, hal yang sama juga dilakukan oleh Baharuddin Lopa, saat beliau masih hidup. Tokoh ini mengundang beberapa elite pejuang melakukan pertemuan

di kediamannya. Tokoh-tokoh masyarakat yang diundang meliputi jajaran KAPP-Sulbar sebagai perwakilan organisasi di daerah dan BPN-PPSB perwakilan organisasi di pusat. Kedua organisasi ini bertemu dijemput oleh Baharuddin Lopa, maksud pertemuan tersebut mengupayakan situasi yang damai, meredam konflik-konflik internal antar organisasi dan bersama-sama bersinergi mewujudkan percepatan pembentukan provinsi Sulawesi Barat, hal ini dibuktikan saat tokoh Makmun Hasanuddin, Rahmat Hasanuddin dari KAPP-Sulbar dan Borahima dan Imran P. Limboro dari BPN-PPSB saling berjabat tangan, berpelukan dan bersepakat berkerjasama. Apa yang dilakukan di kediaman Baharuddin Lopa merupakan tindak lanjut hasil mubes Kerukunan Keluarga Mandar (KKM), sebagai pengengewatahan tugas KAPP-Sulbar di pusat KKM diberi mandat untuk mengintensifkan koordinasi perjuang, termasuk melakukan loby pada lembaga tinggi negara atau instansi yang terkait di pusat.

Menindaklanjuti beberapa polemik yang berkembang, salah satu cara meredam isu pembentukan provinsi bukan merupakan mobilisasi kelompok elite, tetapi sebagai hasil aspirasi dan tuntutan dari masyarakat, maka penentuan nama provinsi tidak didasarkan atas nama etnik yaitu provinsi Mandar, tetapi provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dilatarbelakangi dari makna “Sipamandar”, bahwa Mandar harus diperkuat kembali oleh tiga kabupaten sebagai gabungan koordinasi dan partisipasi rakyat Mandar seutuhnya.

Mengapa harus Sulawesi Barat? dan bukan Mandar?, hasil observasi menunjukkan, ada dua asumsi mengapa Mandar tidak dijadikan sebagai nama provinsi. Pertama, secara etnik, bahwa kata “Mandar” sengaja untuk dihindari, karena kata tersebut akan sangat mencerminkan sentimen etnik, padahal pembentukan provinsi ini bukan hanya untuk etnik Mandar semata, tetapi untuk segenap masyarakat yang berdiam di wilayah Mandar. Di wilayah ini keberada-

an etnik sangat heterogen, ada etnik Mandar, Makassar, Bugis, Jawa, Toraja, Bali, dan lain-lain. Dengan demikian tidak tepat jika harus menggunakan nama Mandar sebagai nama provinsi, karena hal itu hanya menandakan representatif satu etnik saja.

Kedua, secara politik, jika nama Mandar akan dipakai sebagai nama provinsi, maka hal ini akan mempersulit percepatan dalam memperoleh rekomendasi dari pemerintah provinsi. Sulawesi Barat menjadi wacana yang sengaja dikedepankan, karena selama ini Sulawesi Selatan tidak rela melepaskan Mandar menjadi provinsi. Hal ini terlihat dari lambatnya rekomendasi yang dikeluarkan dari gubernur dan DPRD. Kondisi ini, membuat sebagian komponen masyarakat Mandar tidak menerima, dengan melakukan demonstrasi mahasiswa Mandar mengatasnamakan rakyat, mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan dan meminta pemerintah provinsi secepatnya menyetujui pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Tidak berlangsung lama dari peristiwa tersebut, rekomendasi dikeluarkan oleh gubernur H.Z.B. Palaguna tanggal 23 Februari 2001, DPRD provinsi tanggal 27 Februari 2001. Dengan demikian, berdasarkan rekomendasi tersebut, secara politik, wilayah Mandar disetujui membentuk propinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa konflik internal dalam penentuan ibu kota provinsi dan pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan cerminan konflik bagi wilayah yang ingin mandiri. Keberadaan konflik di Mandar menjadi negosiasi antar elite (dalam DPRD) untuk saling memperkuat kedudukan daerahnya. Awalnya, posisi tawar ini menjadi dikedepankan karena masing-masing kabupaten ingin agar daerahnya menjadi ibu kota provinsi. Akan tetapi mengingat semakin panjang proses yang akan dijalani, dan menyebabkan provinsi Sulawesi Selatan tidak percaya akan kesungguhan dalam pembentukan provinsi, maka dengan penuh rasa kecintaan terhadap tanah dan

orang Mandar konflik dapat diredam. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran antar elite di Mandar tersebut merupakan kebersamaan yang mencerminkan menguatnya identitas Mandar *malab'bi*.

Walaupun dalam penamaan provinsi tidak menyebutkan sebagai provinsi Mandar, bukan berarti bahwa itu sebagai pengingkaran pada Mandar *malab'bi*. Akan tetapi penamaan provinsi dengan nama Sulawesi Barat menerjemahkan kehidupan etnik yang heterogen di Mandar, provinsi ini bukan provinsi etnik atau hanya untuk komunitas Mandar, tapi untuk semua komunitas etnik yang berdiam di wilayah ini.

2. Konflik di Mamasa

Selain polemik atas penentuan nama ibu kota, masalah yang timbul setelah terbentuknya provinsi juga datang dari kabupaten Mamasa. Kabupaten ini asalnya adalah wilayah Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) Mamasa adalah sebuah wilayah kecamatan, dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2002 wilayah ini menjadi kabupaten otonom Di kabupaten ini, ada tiga kecamatan yang tidak ingin bergabung dengan Mamasa, yaitu kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM), setidaknya ada 26 desa/kelurahan dari ketiga kecamatan yang tidak menginginkan bergabung dengan Mamasa, yaitu 10 desa dari kecamatan Mambi, 10 desa dari kecamatan Aralle dan 6 desa dari kecamatan Tabulahan.

Konflik yang terjadi di tiga kecamatan ini bersumber karena adanya warga yang ingin tetap berada di wilayah Polmas, tak ingin bergabung (kontra) dengan Mamasa. Akan tetapi, di wilayah yang sama ada juga warga yang tetap ingin bergabung (pro) dengan kabupaten baru tersebut. Hal ini yang menjadi pangkal masalah yang menimbulkan konflik pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2002.

Penolakan bergabungnya tiga kecamatan Aralle, Mambi dan Tabulahan (ATM), ditandai dengan adanya utusan masyarakat dari ketiga kecamatan tersebut mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Agustus 2003. Kedatangan utusan tersebut bertujuan meminta kepada KPUD mendukung tuntutan mereka, agar masyarakat ATM diperkenankan menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu 2004 di kabupaten Polmas dan bukan Mamasa, karena mereka menganggap masih menjadi bagian Polmas.

Protes masyarakat tidak hanya ke KPUD, tetapi juga ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 September 2003 masyarakat dari ketiga kecamatan tersebut sekitar 200 orang menggelar aksi menginap di kantor Gubernur. Mereka menolak pemekaran wilayah Polmas dan menuntut pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2002. Sebaliknya, kelompok yang pro – Mamasa juga terus melancarkan aksinya, sampai akhirnya kedua kelompok itu saling mengancam.

Puncak dari konflik terjadi pada tanggal 28 september 2003, ketika tiga orang dari kecamatan Aralle tewas dianiaya oleh warga yang diduga dari kelompok pro-Mamasa, sebagai balasan atas aksi pelemparan rumah yang dilakukan kelompok kontra-Mamasa. Pasca peristiwa itu, lebih dari 1.000 penduduk dari ketiga kecamatan tersebut mengungsi ke kabupaten Mamuju. Saat itu situasi keamanan tidak kondusif, bahkan korban jiwa bertambah menyusul tewasnya 16 warga, baik dalam perjalanan ke pengungsian maupun di tempat pengungsian.

Peristiwa terakhir terjadi akhir Juli sampai Agustus 2004, warga pro-Mamasa memblokir jalan ke kecamatan Mambi, kendaraan tidak bisa lewat sehingga lalu lintas lumpuh. Akibatnya, pasokan bahan kebutuhan sehari-hari jadi tersendat. Mereka melakukan *sweep-*

ing (pemeriksaan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap warga yang melintas. Warga yang bukan dari kelompoknya dilarang melintas, sebagai balasan dari kelompok kontra yang telah memblokir jalan di kawasan Pokko dekat Polewali. Mereka melakukan hal yang sama, melarang kendaraan melintas dan memeriksa KTP.

Serangkain peristiwa penolakan Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM) menjadi satu dengan kabupaten Mamasa, dapat diidentifikasi dari beberapa faktor, antara lain:

Pertama, faktor historis (sejarah). Pusat konfederasi kerajaan Pitu Ulunna Salu awalnya berada di Tabulahan, bukan di Mamasa. Hal ini berlatar karena raja dari Mamasa keturunan dari Ulu Sadding (yang berasal dari Tojaja) menikah dengan bangsawan Tabulahan, sehingga pusat konfederasi kerajaan di Tabulahan. Ketika Belanda menguasai wilayah ini, secara administrasi pusat kerajaan diubah ke Mamasa, tidak lagi di Tabulahan. Mamasa dijadikan ibu kota wilayah sebagai satu *onder afdeling* selain *onder afdeling* Majene, Mamuju dan Polewali. Saat terjadi pemberontakan A. Selle, wilayah *onder afdeling* Mamasa dipindahkan, digabungkan dengan *onder afdeling* Polewali. Berdasarkan penggabungan *onder afdeling* Mamasa dan Polewali oleh A. Selle, kemudian direalisasikan pemerintah Republik Indonesia menjadi kabupaten melalui Undang-undang No 29 tahun 1959 tentang perubahan pembentukan daerah tingkat II menjadi satu kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mamasa.

Kedua, penentuan ibu kota Kabupaten. Dampak dari aspek sejarah berimplikasi pula pada penentuan ibu kota kabupaten. Masyarakat ATM yang pro-Mamasa menganggap bahwa yang pantas menjadi ibukota kabupaten adalah Mamasa, karena wilayah ini pernah menjadi *onder afdeling*, sedangkan Tabulahan tidak. Sementara masyarakat ATM (kontra-Mamasa) memandang bahwa Mamasa tidak pantas menjadi ibu kota kabupaten, secara historis Tabulahan

lebih layak menjadi ibu kota kabupaten karena wilayah ini dahulu pernah menjadi ibu kota kerajaan dari konfederasi Pitu Ulunna Salu. Perubahan ibu kota ke Mamasa dianggap oleh sebagian masyarakat ATM (kontra-Mamasa) sebagai cara pemerintah Belanda menghilangkan pengaruh Tabulahan yang mayoritas muslim, sedangkan di Mamasa lebih banyak yang kristen, sehingga pemerintah Belanda dianggap lebih dekat ke Mamasa daripada ke Tabulahan. Akan tetapi, pengalihan ibu kota dari Tabulahan ke Mamasa oleh pemerintah Belanda dimaksudkan agar mengurangi hegemoni Tabulahan ke Mamasa karena sebagian masyarakat Mamasa asalnya dari Toraja, sehingga orang ATM (kontra Mamasa) menganggap orang Mamasa bukan orang Mandar, karena wilayahnya lebih dekat ke Toraja Barat daripada ke Polewali.

Ketiga, kepentingan politik. Penolakan Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM) bergabung dengan Mamasa, disinyalir bukan hanya berasal dari aspirasi masyarakat ketiga kabupaten tersebut. Akan tetapi, bentuk penolakan kelompok elite menengah yang tidak mendapatkan kekuasaan, jika Mamasa di tempatkan sebagai ibu kota kabupaten. Kelompok tersebut menghembuskan wacana kesejarahan, etnik dan agama untuk menuntut ATM dimekarkan juga menjadi kabupaten, lepas dari Mamasa. Dalam hal ini, kelompok elite menengah dari ATM dapat berbagi kue politik (baca: kekuasaan) menduduki jabatan seperti Bupati, anggota Dewan, kepala Dinas, dan lain-lain. Sementara untuk menjadi daerah otonom (kabupaten) tidak hanya menitik beratkan pada persoalan etnik dan agama saja, tetapi menyangkut sistem administrasi dan kapabilitas, siapa yang mampu otonomi, dialah yang berhak, sedangkan ATM dianggap belum mampu memenuhi syarat tersebut.

Berkembangnya konflik tersebut, mengakibatkan berkembangnya pula dua kekuatan di Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM),

ada yang pro dan kontra bergabung dengan Mamasa. Karena dua kekuatan tersebut sama banyaknya, masyarakat di tiga kecamatan tersebut hanya mengakui pemimpinnya masing-masing. Masyarakat yang pro hanya tunduk pada pemimpin versi Mamasa. Begitu juga masyarakat yang kontra, patuh pada pemimpin yang ditunjuk Polmas. Dualisme kepemimpinan di ATM saat itu dapat diidentifikasi dari dua camat, dua lurah, dua kepala desa, bahkan dua kepala sekolah (satu sekolah), dan dua kepala puskesmas (satu puskesmas).

Fenomena tersebut telah meresahkan masyarakat wilayah ATM dan Mamasa, untuk mengantisipasi kondisi demikian, pada tanggal 6 oktober 2003 diadakan pertemuan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik di wilayah ini. Pertemuan itu dihadiri beberapa utusan, seperti: utusan pemerintah kabupaten Polmas, kabupaten Mamasa, DPRD Polmas, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dari dua kekuatan. Pertemuan menghasilkan kesepakatan damai dan saling pengertian untuk memberikan hak bagi masyarakat di tiga kecamatan untuk tidak bergabung dengan Mamasa.

Sementara pemerintah provinsi dalam mengantisipasi konflik di ATM, mengundang 29 pejabat dalam jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) provinsi Sulawesi Selatan dengan muspida kabupaten Polmas dan kabupaten Mamasa. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2004 di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan dan menghasilkan empat kesepakatan yaitu: (1) pembukaan pemblokiran jalan, (2) kesepakatan agar pemerintah dan DPRD Polmas dan Mamasa proaktif melakukan pengendalian di wilayah masing-masing, (3) penyelesaian tapal batas oleh tim sendiri, (4) sepakat agar polisi bertindak tegas bila ada tindakan yang meresahkan warga.

Konflik Polmas-Mamasa seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi

kurang mampu memahami arti dari otonomi daerah. Keinginan segelintir elite-elite (karbitan) merekayasa wacana sejarah yang berdampak pada etnik dan agama, membuat keresahan bahkan pertikaian masyarakat di tiga kecamatan tersebut. Ini membuktikan bahwa konsep Mandar malab'bi yang dijadikan kehormatan etnik telah diingkari hanya karena berebut kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik di Aralle, Tabulahan dan Mambi merupakan konflik mengambil bentuk yang lebih keras (*hard*), seperti pembakaran, pemblokiran jalan bahkan tindakan pembunuhan.

Fenomena konflik di Aralle, Tabulahan dan Mambi merupakan wajah betapa kekuasaan bisa mengalahkan kebersamaan dan kemegahan etnik Mandar dalam Pitu Baba'na Binangan dan Pitu Ulunna Salu. Nilai-nilai identitas yang telah diwariskan dikhianati demi kepentingan kelompok masing-masing. Apa yang telah terjadi di tiga kecamatan ini adalah bukti bahwa belum dipahaminya makna multikultural sebagai pengejawantahan berbagai perbedaan, sehingga dengan demikian perlu pembelajaran untuk masyarakat dan pemerintah memahami konsep tersebut sebagai rangkaian dari politik identitas.

3. Posisi Elite Pejuang dan Penerus setelah Provinsi Terbentuk

Dalam rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 September 2004, masing-masing fraksi mengemukakan pendapat akhirnya. Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi DPR-RI pada dasarnya berharap pembentukan provinsi Sulawesi Barat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pesan khusus yang dititipkan oleh Fraksi Perserikatan Daulatuh Ummah, Sayuti Malik yang berpesan “jangan sampai pembentukan provinsi ini hanya dinikmati segelintir elite, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Mandar”.

Harapan fraksi-fraksi yang dititipkan tersebut sebenarnya sesuai dengan amanah nilai kemandaran yaitu kecintaan terhadap tanah Mandar, dan sekaligus terhadap masyarakat, karena bagi orang Mandar, jika hal tersebut ada dan melekat dalam setiap diri orang Mandar maka dialah yang menyandang sifat *malabbi'* (Mandar utama). Sifat luhur ini yang kemudian dimobilisasi untuk memudahkan dalam pengukuhan identitas Mandar.

Setelah pendapat akhir fraksi dikemukakan masing-masing fraksi, maka rapat Paripurna DPR-RI Rabu tanggal 22 september 2004 akhirnya secara bulat menyetujui rancangan Undang-undang pembentukan provinsi Sulawesi Barat menjadi undang-undang (Kompas, 23 September 2004). Persetujuan DPR-RI tersebut harus mendapat pengesahan Presiden, paling lambat 30 hari. Tanggal 21 Oktober 2004 Presiden mengesahkan RUU tersebut menjadi UU Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Barat. Sejak saat itu daerah Mandar resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Menurut Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno (saat itu), provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi yang ke 33.

Provinsi Sulawesi Barat yang baru terbentuk memiliki luas 16.796,19 km², daerah ini memiliki potensi sumber daya alam besar di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Hasil penelitian tim pengkaji Departemen Dalam Negeri mencatat Sulawesi Barat memiliki cadangan minyak bumi berikut tambang emas, perak, dan batu granit dengan deposit cukup besar. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepuluh tahun mendatang. Potensi sumber daya alam yang besar harus dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan semua elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan provinsi baru itu. Hal itu perlu dikonstruksikan setelah provinsi baru itu terbentuk.

Bagian ini akan diuraikan hasil wawancara dari informan yang mewakili fenomena tindakan elite setelah pembentukan provinsi. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dibarengi juga dengan pengamatan langsung dilapangan. Kombinasi antara wawancara dan pengamatan langsung tersebut menghasilkan 2 kesimpulan sebagai makna tindakan elite dalam mengkonstruksi identitas etnik. Beberapa informasi dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu:

1. Pada dasarnya yang ditonjolkan oleh orang-orang Mandar adalah keinginan untuk memperoleh peranan. Peranan tersebut kecenderungan dibungkus, dimasukkan sebagai agenda pemikiran untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan orang Mandar semata.
2. Literatur dan penuturan dari tokoh-tokoh masyarakat menyebutkan, Mandar memiliki sebuah identitas yang layak untuk dipertahankan, yakni sebuah identitas *malabbi'*, yang direlevansikan menjadi visi dan misi provinsi Sulawesi Barat.

Kedua pernyataan tersebut menjadi kabur setelah terwujud menjadi provinsi. Beberapa pernyataan yang dapat dikelompokkan merupakan perwujudan atas bentuk kekecewaan. Kekecewaan tidak hanya berasal dari elite-elite di Mandar tapi juga dari etnik di luar Mandar. Pernyataan berikut berasal dari subjek penelitian yang telah memberikan data dalam pemahaman marginalisasi dari etnik Mandar (Bab III hal 225). Lebih lanjut subjek penelitian ini juga telah menguraikan kekecewaannya terhadap hasil konstruksi, hal ini diuraikan akan pada bagian berikut.

5.3. Pemahaman Etnik Mandar terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite Penerus Konstruksi

Bagian ini akan menguraikan pemahaman etnik Mandar terhadap kondisi yang tengah dialami oleh elite pejuang dan penerus

konstruksi. Wacana ini berkembang di saat Sulawesi Barat telah terbentuk menjadi provinsi. Apa yang dirasakan elite tersebut dapat dilihat dari wawancara dari subjek penelitian berikut. Ketika ditanyakan bagaimana posisi gabungan elite yang memperjuangkan pembentukan provinsi, Hadjar M, sebagai pelaku konstruksi mengatakan:

“Sekarang setelah provinsi terbentuk, setelah identitasnya diperoleh, apa yang dilakukan? Kita telah terlampau jauh dari apa yang menjadi cita-cita luhur, terlampau jauh dari konsep dasar pemikiran pembentukan provinsi. Entah Mandar mau dibawa kemana. Ini sangat memalukan...” (wawancara, 5 Mei 2005)

—elite int./pelaku

Ditambahkannya pula, sekarang di Mandar masuk dalam proses saling tidak percaya, antara elite pejuang dan elite penerus. Hal ini ditandai dengan hubungan yang tidak simultan antara masyarakat, DPRD dan pemerintah. Masyarakat terkadang melakukan tekanan kepada DPRD dan pemerintah daerah, karena menganggap masyarakat sebagai ujung tombak perjuangan. Tetapi masalahnya, masyarakat sendiri tidak memahami politik. Sedangkan di Mandar politik diartikan pada siapa yang masuk dalam sistem baik di DPRD dan pemerintah daerah.

Konteks demikian berlangsung di Sulawesi Barat. Ada kendala-kendala internal antar elite sehingga melahirkan kecurigaan-kecurigaan di antara mereka. Kecurigaan tersebut mengakibatkan *distribution position* yang tidak berjalan setelah provinsi ini terbentuk.

Kekecewaan ini juga disebutkan oleh intelektual politik, beliau dengan penuh keprihatinan mengatakan:

“Saya tidak habis pikir, mengapa setelah terbentuk provinsi masing-masing pihak tidak mau duduk bersama-sama memikirkan apa yang selanjutnya terbaik dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kita. Sebelum provinsi ini ada, terasa sekali kebersamaan, kita dengan kelompok anak muda menyatukan pandangan untuk masa depan Mandar. Tetapi ini bagaimana kelanjutannya, perbedaan pendapat menyebabkan masyarakat kebingungan siapa yang sepatutnya harus diteladani. Hilang kecintaan mereka kepada rakyat, kepada lita Mandar. Katanya demi kemajuan Mandar ke depan, tapi yang terlihat saling menjatuhkan, kasihan Mandar jika terus menerus terjadi persaingan yang tidak sehat antar elite” (wawancara, 2 September 2005).

—Intelektual Politik

Di Mandar, setidaknya dapat diidentifikasi kategori elite. Kategori tersebut sering mengatasnamakan identitas Mandar malab’bi. Perbedaan kategori disebabkan adanya perbedaan perilaku elite. Penulis mengelompokkan sebagai berikut:

1. Elite yang memiliki kekuatan modal, baik berupa kekuasaan, uang maupun harta. Kelompok ini melakukan penggalangan opini di masyarakat, bahwa kekuatan merekalah yang patut dan layak untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Barat. Setidaknya ini diwakili oleh elite politisi didukung oleh elite agama.
2. Elite yang memutarbalikkan fakta sejarah, mencoba mengingkari kebenaran, terutama pengingkaran terhadap kelompok elite pejuang yang mengonstruksi awal pembentukan provinsi. Hal itu dilakukan oleh elite yang banyak memberikan kontribusi, tetapi sangat berambisi untuk mencapai posisi politik tertinggi di Sulawesi Barat. Kelompok ini diwakili oleh elite politisi (praktisi politik).

3. Elite yang dikelompokkan sebagai elite yang secara finansial banyak mendanai pembentukan provinsi, sehingga wajar untuk memperoleh posisi penting sesuai pengorbanan yang telah dikeluarkannya. Konteks itu menyiratkan adanya unsur balas bayar utang, berusaha menyakinkan masyarakat atas pembentukan provinsi, dengan tujuan mendapat dukungan kuat. Setidaknya ini diwakili oleh elite birokrat
4. Elite yang berpikir rasional adalah gabungan dari elite yang kurang memiliki modal, tapi tetap berpegang teguh pada pemikiran dasar pembentukan provinsi yang intinya tetap berusaha menempatkan Mandar pada posisi *malab'bi*. Elite ini memiliki tanggung jawab moral, tetapi kendalanya mereka tidak masuk dalam sistem politik, mereka tidak memiliki modal yang cukup besar. Setidaknya ini diwakili oleh elite tradisional dan akademisi, yang juga para penggagas dan pelaku konstruksi.

Pengkategorian elite di atas menjadi sangat tajam ketika mereka bersaing menggantikan pejabat sementara menjadi calon gubernur Sulawesi Barat. Persaingan yang ketat semakin mengaburkan identitas Mandar yang selalu diagungkan, karena dalam nilai budaya Mandar, orang yang diunggulkan untuk menjadi pemimpin di Mandar adalah mereka yang memiliki jiwa kesatria yang tidak hanya mengutamakan kepentingannya, tetapi juga lebih menekankan pada masyarakat dengan dua model kecintaan, yaitu tanah (negeri) dan orang (masyarakat) Mandar.

Nilai kecintaan tersebut diharapkan melekat dalam jiwa kepemimpinan orang Mandar, sehingga ketika hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Tau-tonganna Mandar* (orang utuhnya Mandar) dengan segala keutamaannya (*ke-malab'bi-an*). Jika nilai itu tidak dianut oleh calon pemimpin, maka orang itu tidak patut dipilih menjadi pemimpin di Mandar.

Nilai ke-Mandaran menjadi kabur dalam pencalonan gubernur Sulawesi Barat. Hal itu disayangkan oleh Husni Dj seperti penuturannya:

“Tindakan yang seolah-olah mengesampingkan elite pejuang adalah sesuatu tindakan “*siri*”, perasaan menempatkan hanya sebagai batu loncatan semata. Tidak ada lagikah kebersamaan berjuang menyejahterakan kita dan rakyat Mandar? Harusnya ada kesepakatan seperti kesepakatan Sipamandar untuk memperkuat, kemudian dilakukan distribusi, siapa yang patut mendapat jabatan, dan siapa yang harus ikhlas membatu kelancaran pembangunan. Jadi ada upaya untuk saling terbuka, saling mencoba menghargai. Tidak saling menjatuhkan, karena itu jauh dari konsep apa yang telah kami perjuang-an dulu, untuk membawa Mandar sejajar dengan etnik lain di Sulawesi. Setelah barang ini didapat, dibagikan secara adil. Jangan ada yang mendominasi, karena orang Mandar yang sebenarnya tidak memiliki sifat seperti itu” (wawancara, 20 September 2005)

—Elite. Tradisional

Sifat tamak, haus kekuasaan pada dasarnya bukan sifat orang Mandar. Akan tetapi sifat itu memudar ketika provinsi Sulawesi Barat terbentuk karena pada saat itu banyak jabatan-jabatan penting yang masih lowong, sehingga banyak orang Mandar yang terkesan berambisi untuk menduduki posisi penting meskipun pada yang bersangkutan kurang pantas menduduki jabatan itu. Fenomena itu menimbulkan kesan bahwa orang yang seperti itu telah meninggalkan sifat kemandarannya, karena mereka terlihat tamak dan haus kekuasaan.

Menurut salah satu pelaku konstruksi;

“Jika seandainya Mandar menjadi provinsi masih dilihat oleh beberapa pejuang yang telah tiada, mungkin mereka akan sangat kecewa dengan apa yang ada. Cita-cita murni mereka untuk menegakkan ke-Mandaran kurang dihargai, para elite sibuk dengan apa mencari lahan-lahan untuk berkuasa, tidak lagi banyak memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat, jadi cita-cita pejuang menjadi kurang tersampaikan oleh elite-elite itu. Lalu bagaimana semangat kecintaan yang selalu diucapkannya?” (wawancara, 5 Mei 2005)

—Elite pelaku

Dari paparan beberapa informan dapat dipahami bahwa kekecewaan mereka terletak pada upaya yang dilakukan oleh kelompok elite yang tidak lagi menghormati nilai dasar perjuangan mereka, lebih disibukkan pada upaya perebutan kekuasaan daripada upaya kesejahteraan rakyat. Walaupun banyak elite mengatasnamakan rakyat tapi yang disayangkan adanya peta konflik yang sengaja diciptakan untuk memisahkan antara elite yang berjuang dengan elite birokrat yang memiliki kekuatan modal.

5.4. Pemahaman Etnik Lain Terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite Penerus Konstruksi

Bagian ini akan menguraikan data yang diperoleh dari informan dari etnik lain. Informan ini sebelumnya telah membahas marginalisasi terhadap etnik Mandar (Bab 3 hal 234). Uraian tentang kekecewaan juga berasal dari informan ini, sebagian menyayangkan terjadinya jarak antara elite.

Jarak antara elite seperti itu menurut pengamat politik dari Unhas disebut dengan pengkhianatan politik, dikatakannya:

“Konteks ke-*malab’bi*-an Mandar telah berubah, seperti yang telah saya katakan, orang Mandar jika sudah diberi kepercayaan menjadi tidak bisa memegang amanat tersebut. Mereka cenderung terlena dengan apa yang diperoleh tetapi tidak bisa berusaha untuk mempertahankan apa yang telah diperolehnya. Adanya pengingkaran terhadap kesepakatan bersama, mereka kurang mengingat kembali cita-cita luhur untuk kesejahteraan rakyat Mandar, yang terjadi malah saling sikut, tidak ada lagi konteks ke-*malab’bi*-an yang saya lihat. Ini menjadi pertanyaan saya sampai kapan mereka akan bersikap seperti itu? Mereka telah berusaha memperoleh kehormatan etnik, malah sekarang antar mereka kurang saling menghargai” (wawancara, 30 Agustus 2005).

—Elite. Int. Ternate

Apa yang dikatakan oleh intelektual itu bukan tanpa alasan. Beliau menganggap adanya gesekan-gesekan politik untuk mencapai kedudukan nomor satu di Mandar pasca pembentukan provinsi. Persaingan kelompok-kelompok elite menyebabkan tertundanya pemilihan gubernur. Akibatnya banyak masalah yang timbul yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemilihan gubernur dilaksanakan.

Ditambahkannya, mereka berebut untuk menjadi orang nomor satu di Mandar. Kondisi itu merupakan euphoria karena selama ini daerah Mandar, tidak pernah mendapat kesempatan menjadi gubernur Sulawesi Selatan sehingga ketika kesempatan diberikan kepada elite Mandar, maka mereka berlomba-lomba merebut posisi penting itu. Walaupun akhirnya ada beberapa elite melakukan pengingkaran politik atas hal itu.

Pengkhianatan politik itu juga disebutkan oleh intelektual Makassar, sebagaimana dituturkannya:

“Sejak awal saya mengamati proses jalannya pembentukan provinsi, karena saya berteman dekat dengan pengagas sekaligus pelaku pembentukan provinsi, saya mengetahui siapa-siapa saja yang awalnya tidak mau menyetujui. Misalnya Irfan Mungsi (bukan nama sebenarnya), dulunya dia tidak mau menyetujui kesepakatan untuk pembentukan provinsi bahkan menolak, karena dia adalah birokrat yang mendapat tempat di Makassar. Sekarang kenyataannya malah mendukung, dan menempatkan dirinya bareng Mustafa Zainal (bukan nama sebenarnya) untuk bersama-sama mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakilnya” (wawancara, 13 Agustus 2005)

—Elite. Int. Makassar

Ditambahkannya, banyak pejabat-pejabat yang dulu menolak, bahkan mendemo pembentukan provinsi, sekarang malah mendukung. Karena berharap posisi penting akan mudah didapatkan di Mandar. Kondisi itu melahirkan persaingan baru antara elite pejuang dan elite birokrasi yang menginginkan jabatan.

Kondisi itu banyak dikaburkan sehingga orang Mandar tidak lagi memiliki rasa malu kepada dirinya sendiri. Karena banyak elite Mandar yang tidak punya andil besar waktu perjuangan, tiba-tiba merasa memiliki hak dan kepentingan yang sama untuk memajukan Mandar, hanya karena mereka memiliki modal finansial yang kuat. Fenomena itu telah mengaburlah makna *malab’bi to Mandar*, hanya karena ingin memperoleh kursi politik.

Dalam politik, pembagian kekuasaan dimungkinkan jika ada kesepakatan dan kesepahaman di antara aktor-aktor, tapi jika kesepahaman tersebut dikhianati, maka mudah timbul perpecahan politik. Menurutny hal itu sudah terjadi di Mandar, perebutan kekuasaan untuk menjadi gubernur telah mengawali terjadinya konflik intern antar elite yang ingin berkuasa.

Apa yang dikatakan oleh intelektual ini, juga didukung oleh pengamatan yang dilakukan oleh intelektual Bugis, sebagaimana dituturkan:

“Menarik untuk diamati apa yang sekarang terjadi di Mandar, setelah mereka berusaha semampunya untuk tidak termarginalkan di Sulawesi Selatan, malah timbul marginalisasi antar mereka sendiri. Kelompok pejuang tidak lagi ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya, mereka terpojokkan karena tidak adanya dukungan partai tertentu atau tidak ada partai yang menawarkan mereka sebab sebagian besar mereka adalah kelompok akademisi, yang tidak memiliki kekuatan materi, memang awalnya kurang memperhatikan distribusi kekuasaan, tetapi setelah posisi mereka digeserkan oleh elite birokrat, mereka merasa perlu untuk bersaing” (wawancara, 7 Setember 2005)

—Elite Int. Bugis

Marginalisasi tampak ketika terjadi gesekan-gesekan politik. Kelompok akademisi sebagai pelaku konstruksi tidak lagi diundang untuk ikut serta dalam arena politik. Mereka menjadi penonton di tengah-tengah tawar menawar kedudukan penting di Mandar. Calon seperti Mustafa Zainal, dapat dianggap menjadi calon orang nomor satu di Mandar, karena beliau selain seorang birokrat, juga memiliki pengorbanan yang besar dalam proses pembentukan provinsi baru, setidaknya 40% dana perjuangan dari beliau. Wajar apabila mendapat kesempatan untuk menjadi calon gubernur.

Intelektual itu menambahkan, Mustafa Zainal seharusnya mengetahui peta-peta politik penting. Kalau beliau ingin mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, seharusnya tidak menggandeng Irfan Muni yang juga dari kalangan birokrat. Akan tetapi menggandeng salah satu elite pelaku dari kalangan akademisi, mereka adalah

kelompok yang banyak mengetahui proses pembentukan provinsi dan langsung berhadapan dengan masyarakat saat sosialisasi.

Sosialisasi setelah provinsi terbentuk dilakukan sebagai upaya pembelajaran politik masyarakat. Saat itu masyarakat kebingungan sebab apa yang dirasakan setelah terbentuknya provinsi Sulawesi Barat kurang baik dibanding ketika masih bergabung dengan provinsi Sulawesi Selatan. Intelektual itu menganggap, rasa pesimis masyarakat akibat tidak berjalannya proses pemerintahan, berimplikasi pada berkurangnya elite-elite pejuang ikut dalam proses pencalonan gubernur.

Kondisi itu semakin dipertajam dengan munculnya kelompok elite tandingan yang mengupayakan tidak terpilihnya Mustafa Zainal. Kelompok elite tandingan banyak bermunculan. Kelompok itu tergolong minoritas. Asal usul kelompok itu berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh dan kharisma dalam masyarakat. seperti; kelompok Manggarani, kelompok Masdar, kelompok S. Mengga, kelompok Kambo, dan lain-lain.

Realitas tersebut menurut tokoh masyarakat dari etnik Toraja, sebagai upaya mengecilkan kesempatan kekuasaan dominan satu kelompok, dikatakannya:

“Sekarang banyak muncul kelompok elite lain, sebagai kelompok penentang, karena merasa suaranya tidak didengar lagi, mereka melabelkan dirinya dengan memakai nama keluarga besar, khususnya orang tuanya yang dulu menjabat di Mandar. Saya kira ini dilakukan untuk mencoba menetralkan kondisi, karena selama ini ada persingungan antara kelompok birokrat yang memiliki dana dengan kelompok akademisi, padahal mereka kalau disatukan akan menjadi sebuah ikatan yang kuat” (wawancara, 14 Oktober 2005)

—Tokoh Masyarakat/Toraja

Munculnya kekuatan minoritas tersebut akan sangat baik, jika dibarengi dengan koalisi antar mereka. Mereka lebih kuat bila bersatu dari pada harus membentuk kekuatan baru, hal ini tidak bisa menyaingi dua kekuatan antara elite birokrat dan elite pejuang. Masyarakat dapat menilai mana yang dapat dipilih dan mana yang tidak, karena suka ataupun tidak, pilihan rakyat menentukan akhir konflik interen antar elite.

Tokoh masyarakat ini menilai bahwa kekuatan yang sinergis lebih baik jika ada kolaborasi antara siapa yang memiliki modal yang kuat, dengan siapa yang mengetahui kondisi riil masyarakat Mandar. Artinya, jika dimungkinkan kolaborasi itu dapat berasal dari birokrat yang secara finansial memiliki dana yang cukup, ditambah pengetahuan pemerintahannya serta disandingkan dengan pelaku dari konstruksi yang pengorbanannya bukan hanya finansial tetapi pengorbanan biaya dan pikiran.

Kenyataannya kolaborasi yang diharapkan tidak ada, malah muncul kelompok-kelompok tandingan yang masuk dalam areal persaingan politik. Kelompok tersebut memiliki calon tersendiri dalam pemilihan Gubernur. Akibatnya banyak pasangan calon gubernur yang ikut bersaing. Banyaknya pasangan calon yang muncul telah memicu persaingan tidak sehat diantara pasangan calon. Persaingan yang tidak sehat menandakan adanya krisis ketidakpercayaan terhadap pemimpin Mandar. Otonomi yang diperoleh, malah membuat tidak sinkronnya antara pemikiran dan gagasan dengan tindakan untuk mensejahterakan Mandar. Lalu menurut tokoh masyarakat ini, ke mana nilai ke-Mandaran yang selalu diagungkan, seperti yang mereka suarakan saat membentuk provinsi baru.

Rangkaian data di atas melahirkan analisis, bahwa terjadi kesenjangan (distorsi) dalam memaknai proses konstruksi. Adanya posisi-posisi yang dijalankan antar elite birokrat dan intelektual

menimbulkan jarak sosial antar dua kekuatan itu. Jarak yang dilahirkan setelah proses berimplikasi pada jarak dalam *distribution of power*, karena masing-masing kekuatan merasa telah banyak berkorban dalam perjuangan pembentukan provinsi, maka kedua kekuatan tersebut merasa berhak pula untuk memimpin Sulawesi Barat. Kenyataannya kedua kekuatan tersebut saling bersaing dan bahkan saling tidak percaya, akibatnya muncul konflik internal antar elite, terutama pada masalah siapa yang akan menjadi orang nomor satu memimpin Sulawesi Barat.

Catatan

- 1 Agenda kerja yang disosialisasikan oleh Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dalam laporannya “Provinsi Sulawesi Barat Dan Keniscayaan Sejarah (studi Kelayakan), 2000.
- 2 Diramu dari beberapa informasi yang diperoleh dalam Muliadi, Tesis “Gerakan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 2001, juga dapat dilihat dalam Gustiana A Kambo, Tesis “Perjuangan Eks Afdeling Mandar Dalam Proses Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 2002.

6

Politik Identitas dan Provinsi Sulawesi Barat

Analisis yang akan diuraikan pada bagian ini terkait dengan bagian sebelumnya. Kaitannya dilihat dari perspektif teoretis, metodologis, serta temuan-temuan di lapangan. Tujuannya agar ketiga aspek itu sejalan dan memberikan kontribusi teoritik yang cukup kuat dari penelitian yang telah dilakukan.

Pembahasan sebelumnya telah memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) temuan-temuan di lapangan. Temuan tersebut merupakan pemahaman penulis dalam melihat konstruksi identitas etnik di Mandar. Dalam tahap ini, dikategorikan oleh penulis sebagai kolaborasi antara *first order understanding* dan *third order understanding*, yaitu dimulai dengan mencari informasi yang akurat dari subjek atas konstruksi serta penilaian terhadap segala peristiwa-peristiwa yang mendukung konstruksi tersebut, karena dalam memperoleh informasi dari subjek selalu terkait dengan peristiwa konstruksi.

Uraian selanjutnya, merupakan lanjutan dari kedua tahap tersebut yaitu tahap *second order understanding*. Tujuan tahap ini,

sebagai pemahaman penuh penulis terhadap hasil interpretasi subjek terhadap konstruksi identitas etnik, berbarengan dengan peristiwa-peristiwa yang mendukungnya. Metode ini, sedapat mungkin diupayakan memberi penjelasan dan pemahaman makna dari konstruksi identitas etnik tersebut.

6.1. Pemahaman Hasil Penelitian

Bertitik tolak dari perspektif teoritis, tulisan ini merujuk pada perspektif konstruktivis etnik. Perspektif ini, secara operasional dipandang sebagai sesuatu yang tidak tetap, pragmatis, oportunistik, dan dibentuk oleh orang-orang tertentu dengan memiliki tujuan tertentu pula. Akibatnya aktor-aktor yang aktif dalam suatu hubungan mengkonstruksi etnisitas ke dalam dunia sosial mereka, sesuai dengan alam pikirannya (Delanty dalam Ritzer dan Smart, 2001 : 427).

Perspektif ini memandang etnisitas sebagai instrument yang membantu individu atau kelompok, khususnya kelompok elite dan institusi untuk memperoleh *power*. Dalam hal ini etnisitas merupakan upaya dari elite untuk merespons, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan dalam lingkungannya. Sebagai sesuatu yang pragmatis, etnisitas menjadi tidak tetap dan tidak alamiah, dijadikan sebagai sumber politik, sarana untuk kohesi bagi orang yang akan dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan orang dan kelompok. Hasilnya adalah suatu arena politik tawar menawar dalam situasi plural. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik merupakan arena konflik elite memperoleh kekuasaan.

Kekuasaan yang diperoleh dapat bersumber dari etnisitas. Artinya, etnisitas adalah sesuatu yang *manipulated* dan *construction* yang sengaja diciptakan, sesuatu yang tidak hanya diperoleh dari pembawaan turun temurun dan fisik saja, tetapi juga adanya kon-

struksi yang dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain secara intersubjektif (Feagen & feagen, 1996:12). Akhirnya, bahwa sesuatu yang diupayakan melalui etnisitas dapat dikategorikan sebagai bentuk identitas. Hal ini dapat pula dibarengi dengan pengupayaan identitas politiknya. Dengan demikian identitas dapat diperoleh melalui ikatan sinergis antara etnik dan politik.

Ikatan sinergis etnik dan politik dalam karya ini, diasumsikan dari konstruksi identitas etnik di Mandar dengan pengupayaan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Konstruksi tersebut menunjukkan suatu proses yang dimobilisasi oleh kelompok elite, mempresentasikan makna etnik sebagai sesuatu nilai budaya kelompok, terutama pada makna kecintaan yang menyatukan mereka dalam satu identitas etnik. Pengupayaan makna kecintaan, merupakan pengikatan komunitas Mandar atas dasar kesamaan keanggotaan etnik, pertimbangan bahwa mereka satu etnik, khususnya dilihat dari latarbelakang kelahiran, tempat tinggal, bahasa, geneologis, dan lain-lain sebagai wujud kepemilikan tanah/wilayah (*lita*) dan orang (*pa'banua*) Mandar.

Di satu pihak, kesamaan keanggotaan etnik tersebut menjadi ciri khas, merupakan pengakuan fakta secara objektif etnik Mandar, fakta tersebut oleh Jenkins (Haralambos, 2000: 886) disebut dengan identitas internal. Di pihak lain, kesamaan anggota etnik dapat juga diperoleh atas pengakuan orang lain terhadap etniknya, atau disebut pula dengan identitas eksternal, ini merupakan pengakuan secara subjektif, bagaimana penilaian penting orang lain, hal ini dalam istilah interaksi simbolik disebut dengan *significant others*.

Orang Mandar, menganggap identitas etnik tidak mudah dihilangkan, tapi akan selalu diupayakan, dikonstruksi kembali. Konstruksi identitas terkadang menimbulkan sentimen etnisitas. Hal itu merupakan kesadaran perbedaan dengan orang lain, dan suatu

perasaan akan diri mereka. Pemikiran seperti itu menurut Andrain (1995: 98) dapat menentukan tindakan untuk penghargaan kehormatan diri.

Konstruksi identitas di Mandar dapat dideteksi dari dua fungsi etnik, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal fungsi etnik merujuk pada pemahaman bahwa etnik digunakan sebagai suatu ikatan untuk menjaga integrasi, memperkokoh dan menjaga kesinambungan nilai-nilai dari identitas kelompok etniknya. Nilai identitas tersebut dijadikan instrumen mempersatukan komunitas Mandar dalam menjaga keutuhan etniknya.

Upaya untuk menjaga kesinambungan identitas etnik, terlebih dahulu ditanamkan pemikiran akan “siapa dirinya yang sebenarnya” di tengah pluralitas etnik. Dalam posisi demikian, etnik menjadi alat untuk menyatukan dan memperkokoh kelompok etnik sehingga koeksistensi tetap terjaga. Perasaan sebagai satu kelompok etnik memperkuat rasa kebersamaan (*in group*) dan berbeda dengan kelompok etnik lain (*out group*).

Secara eksternal etnik berfungsi sebagai sumber potensi yang efektif dalam menggerakkan massa (mobilisasi) untuk menggalang integrasi sosial. Hal ini menimbulkan penegasan akan siapa “kita” (*we*) dan siapa “mereka” (*they*), dengan demikian ada legitimasi etnik yang diutamakan. Legitimasi ini mempermudah elite melakukan mobilisasi dengan penguatan sentimen-sentimen etnik, sehingga yang dipengaruhi seolah-olah mengikuti apa yang dimobilisasikan tersebut adalah demi kepentingan kelompok etniknya.

Terkait dengan fungsi etnik tersebut, terdapat pemahaman tentang siapa yang menjadi bagian kelompok etnik dan siapa yang bukan anggota kelompok etnik. Hal ini terlihat pada kelompok elite dari etnik Mandar yang melibatkan etnik lain (Bugis, Makassar,

Jawa), baik yang terlibat dan tidak terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi. Kelompok ini dimaknai sebagai kami (we) dan mereka (*they*), yang dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, kelompok orang Mandar (dalam KAPP-Sulbar) yang terlibat berjuang dan memiliki kepentingan sama dalam pembentukan provinsi dapat berkonotasi “kami”, demikian pula dengan orang lain yang bersama-sama berjuang dalam KAPP-Sulbar tetap dianggap sebagai kelompok “kami” walaupun mereka dari etnik lain, seperti Bugis, Makassar dan Jawa.

Kedua, kelompok orang Mandar yang tidak terlibat atau berada diluar garis dalam pembentukan provinsi dapat berkonotasi “kami” apabila mereka memiliki tujuan yang sama dan mendukung keinginan kelompok elite membentuk provinsi. Demikian juga dengan etnik lain dapat dikategorikan sebagai kelompok “kami” jika mendukung pembentukan provinsi, walaupun mereka tidak berjuang bersama-sama orang Mandar akan tetapi dianggap menjadi bagian dari etnik Mandar.

Ketiga, orang Mandar jika mereka tidak setuju pada pembentukan provinsi dan berada di garis luar dalam perjuangan (tidak sejalan dengan kelompok elite pejuang) maka dikategorikan sebagai “mereka”, apalagi bagi orang yang sering melakukan kritikan dan kecaman terhadap pembentukan provinsi.

Keempat, secara umum, siapa saja yang tidak mendukung pembentukan provinsi dan tidak mengakui keberadaan perjuangan etnik Mandar, atau hanya bisa mencurigai bahwa kelompok elite berjuang untuk membentuk provinsi etnik dikategorikan sebagai “mereka”, apalagi jika sampai memandang bahwa perjuangan mereka merupakan bentuk *distribution of power* bagi elite di Mandar (baca pula tentang stereotip).

Fenomena penguatan pembentukan provinsi Sulawesi Barat, merupakan kecenderungan bukti atas konstruksi etnik di Mandar, sebagai upaya yang dilakukan elite untuk mempresentasikan identitas agar mendapat penghargaan etnik dari etnik-etnik lain di Sulawesi Selatan. Tindakan dari kelompok elite itu dapat dipahami sebagai upaya mobilisasi etnik untuk memperoleh pengakuan atas etniknya dan kekuasaan di wilayah etniknya.

Pengakuan secara etnik dan politik yang diusahakan oleh kelompok elite, awalnya bertujuan tidak hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, tetapi juga lebih pada keinginan untuk mensejahterakan rakyat dan menempatkan tanah Mandar sebagai wilayah yang otonom. Apa yang diupayakan itu dikukuhkan melalui spirit nasionalisme. Spirit itu mentransfer dan memperkenalkan kembali nilai ke-Mandaran, yang diadopsi dari nilai budaya Mandar pada kerajan Balanipa I, diperkenalkan oleh raja Tondilaling, yakni semangat pengorbanan yang dititikberatkan pada kepentingan tanah dan orang Mandar.

Semangat itu menjadi sangat penting, ketika Mandar mencoba lepas dari provinsi induk dan berjuang untuk menjadi sebuah provinsi baru. Pengenalan nilai-nilai tersebut dilakukan mulai dari high elite sampai pada masyarakat tingkat bawah. Agenda sosialisasi mempertajam bahwa Mandar berbeda dengan etnik Bugis, etnik Makassar, dan etnik Toraja dan etnik-etnik lain di Sulawesi Selatan. Mandar memiliki kekuatan tersendiri, Mandar memiliki wilayah, dan Mandar memiliki imajinasi, semuanya harus dihargai dan dihormati oleh etnik-etnik lain.

Penegasan kecintaan tersebut terakumulasi pada keinginan Mandar untuk berdiri sendiri. Berbarengan dengan itu, terdapat kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang

memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah lebih luas, termasuk dimungkinkannya dilakukan pemekaran wilayah.

Peluang tersebut dimanfaatkan oleh elite, dijadikan sebagai penegasan melepaskan diri dari hegemoni Bugis. Menurut sebagian elite, apa yang dirasakan Mandar merupakan situasi yang kurang menguntungkan, mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang penting di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Mandar dianggap kurang mendapat perhatian yang cukup dalam memperoleh anggaran untuk pembangunan fisik seperti kabupaten-kabupaten yang lain di Sulawesi Selatan.

Kondisi itu membuat orang Mandar merasa termarginal. Perasaan termarginal dalam sumber-sumber politik membuat Mandar menyakinkan masyarakatnya agar bersatu dan bersama-sama berjuang untuk menjadi daerah otonom. Dalam hal ini, Mandar mengusahakan perolehan hak-hak kuasa menjadi provinsi, elite sebagai penggerak mengelaborasi segala tuntutan dari rakyat (in put) dengan dukungan dari luar lingkungannya,

Pemahaman marginalisasi tersebut, tidak lepas pula dari kekalahan Mandar berkompetisi memperoleh jabatan politik strategis. Hal itu direduksi sebagai bentuk marginalisasi struktural etnik Bugis. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan bagi etnik Mandar yang ingin memperoleh bagian dalam pembagian kue politik di provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena itu dikonstruksi untuk membangun kesadaran etnik Mandar untuk memperoleh kembali kehormatan etniknya. Apa yang dilakukan Mandar sebagai bentuk keinginan memperoleh hak kuasa di wilayahnya. Elite Mandar mengelaborasi berbagai kepentingan sebagai agregrasi kepentingan rakyat dari tuntutan (input) dan dukungan rakyat. Selain itu, elite juga menerjemahkan dukungan dari luar lingkungannya, karena adanya peluang

secara yuridis maupun karena lingkungan yang tidak kondusif selama bergabung dengan provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Politik Identitas Etnik Mandar

Dalam tulisan ini, ditemukan aksi-aksi politik oleh kelompok elite di Mandar, terkait pada konstruksi identitas etniknya. Merujuk pada fenomena tersebut, secara metodologis telah melahirkan stereotip antaretnik selama proses pembentukan provinsi. Stereotip itu telah melahirkan pro dan kontra. baik itu dari orang Mandar sendiri maupun dari etnik lain di luar Mandar.

Pro kontra dapat diklasifikasi dalam dua kategori. Pertama, selama proses konstruksi. Kategori pertama pro dan kontra berasal dari kelompok masyarakat, terutama putra daerah yang orang tua mereka adalah penggagas awal konstruksi. Kedua, pro kontra terjadi setelah provinsi terbentuk. Pro kontra terjadi antara elite pejuang dengan elite birokrat.

Pro dan kontra atas pembentukan provinsi mengasumsikan, bahwa selama ini kajian politik identitas menjadi bagian penting dalam proses pembentukan propinsi Sulawesi Barat. Politik identitas itu mengemuka di saat wacana pembentukan provinsi masuk dalam tahap kelima. Tahap itu merupakan gabungan antara elite tradisional dan elite intelektual untuk mengambil peran besar dalam upaya penguatan identitas etnik Mandar.

Politik identitas etnik Mandar, kecenderungannya mengacu pada suatu bentuk gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*), divisi sosial (*social division*) dan ketidaksetaraan (*inequalities*) sebagai kategori politik utama yang menimbulkan perselisihan etnik. Perselisihan etnik yang terjadi dibarengi dengan relasi kuasa, dominasi, dan resistensi. Hal itu disebabkan

adanya kelompok yang dominan dan mayoritas sebagai pemegang kekuasaan.

6.2.1. Kelompok Mayoritas dan Minoritas Etnik

Dalam percakapan sehari-hari, pemahaman kelompok mayoritas dan minoritas selalu dihubungkan dengan mayoritas dan minoritas agama, suku bangsa, ras atau etnik, dan golongan, serta keanggotaan legislatif yang mewakili partai politik. Di Indonesia, secara rasional orang akan memandang bukan sebagai negara Islam, tetapi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, artinya orang muslim merupakan mayoritas dan non muslim sebagai minoritas. Hal itu dapat menciptakan jarak sosial sehingga dapat menjadi beban sosial, dan kultur, jika tidak disikapi secara bijaksana.

Berbeda dengan Amerika dan Australia yang mendorong multikulturalisme sebagai suatu potensi yang bermanfaat. Amerika bangga dengan masyarakat yang beragam. Mereka menikmati situasi mayoritas dan minoritas, sehingga mereka memahami benar makna *melting pot* atau *salad bowl*, yaitu suatu pemahaman yang menjelaskan perbedaan beragam kebudayaan yang membentuk bahasa dan bahkan budaya USA. Meskipun mereka mengakui keragaman dalam sebuah makna *melting pot*, tetapi mereka tetap menjadikan faktor identitas etnik dan ras sebagai penentu mayoritas dan minoritas tersebut. Namun makna tersebut banyak mengalami perubahan seperti penghapusan diskriminasi atas hak pilih, maupun jenis pekerjaan. Secara umum, meskipun masih ada pemahaman mayoritas dan minoritas, tetapi hanya merupakan kategori sosial demi menjelaskan identitas asal usul (Liliweri, 2005: 99).

Dominasi kuasa etnik biasanya berlangsung dalam suatu komunitas yang di dalamnya ada kelompok mayoritas dan minoritas etnik.¹ Kelompok mayoritas dalam kekuasaan memberi kesempatan

an kaum minoritas mengambil bagian dalam menjalankan kekuasaan melalui partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, karena mereka juga merupakan bagian sistem politik. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok mayoritas dan minoritas akan berbeda secara ekstrem, karena itu untuk mengatasinya dibutuhkan proses akomodasi yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjamin hak-hak kelompok minoritas. Keadaan itu harus terus diperjuangkan karena fakta menunjukkan bahwa kelompok minoritas yang tidak berkuasa tidak hanya dialami oleh etnik Mandar saja tetapi juga oleh sebagian etnik lain di berbagai belahan dunia.

Etnik Bugis sebagai kelompok mayoritas dan kelompok dominan memiliki kekuasaan yang besar dalam masyarakat. Kelompok itu memiliki sumber daya kekuasaan dalam *setting* institusi yang berbeda-beda. *Setting* institusi itu cenderung lebih penting karena hal tersebut memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dominasi etnik Bugis di Sulawesi Selatan bukan hanya dalam kuantitas tetapi juga kualitas. Dari segi kuantitas etnik Bugis jumlahnya lebih banyak dari pada etnik Makassar, Mandar, dan Toraja. Sedangkan dari segi kualitas, etnik Bugis lebih di atas dibanding dengan etnik lainnya, karena etnik Bugis lebih dahulu mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dibanding dengan etnik lain di Sulawesi Selatan. Wajar apabila mereka dapat mendominasi dan mengontrol aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan demikian etnik-etnik lain, seperti Makassar, Toraja dan Mandar kurang berpeluang pada bidang-bidang tersebut.

Dominasi etnik Bugis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mayoritas sejak awal terkait dengan pembagian kekuasaan (*sharing power*). Kekuasaan untuk “mengatur” dan “mengurus” ma-

syarakat selalu dihubungkan pada pemahaman superioritas etniknya yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap etnik yang lain. Artinya, bahwa kelompok mayoritas memosisikan dirinya sebagai pihak yang berkuasa. Mempunyai status sosial yang tinggi, dan harga diri yang harus dihormati. Etnik Bugis sebagai mayoritas memperoleh lebih banyak hak privilese dibanding dengan etnik minoritas di Sulawesi Selatan.

Sebagai kelompok minoritas, etnik Mandar merasa kurang mempunyai akses terhadap sumber daya, *privilege* sedikit, bahkan kurang berpeluang mendapat kekuasaan politik. Pembagian kekuasaan yang kurang proporsional telah mendorong munculnya prasangka (*prejudice*) bahkan stereotip pada etnik Mandar. Mereka menganggap etnik mereka kedudukannya lebih rendah dari kelompok mayoritas. Masalah itu sama seperti pengungkapan masalah telur dan ayam, mana yang lebih dahulu? Bahwa prasangka membiarkan kekuasaan menjadi tidak seimbang dan kekuasaan yang tidak seimbang yang mendorong prasangka.

Gejala yang menarik dari dominasi etnik terkait pada kekuasaan yang tidak seimbang, dapat dilihat ketika etnik Mandar berkompetisi dalam ranah-ranah politik. Gejala ini juga diperkuat oleh konsep perluasan wilayah termasuk diantaranya adalah perkawinan politik, dalam hal ini etnik Bugis menempati wilayah-wilayah lain dan cenderung menguasai.

Selanjutnya, sebagai kelompok minoritas etnik Mandar memandang dirinya berada pada posisi termarginal. Pemahaman ini oleh etnik Mandar dipertegas sebagai konstruk politik, yang menganggap etniknya diperlakukan tidak adil, merasa kelompok etniknya dijadikan sasaran diskriminasi. Semakin kuatnya pemahaman sebagai kelompok minoritas sehingga etnik Mandar merasakan tiga hal yang kurang baik. Pertama, etnik Mandar merasa ditekan. Kedua,

etnik Mandar merasa tidak diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi meraih jabatan strategis di Sulawesi Selatan. Ketiga, etnik Mandar merasa tidak pernah beruntung mendapatkan kekuasaan, dan dalam perkembangan kekuasaan etnik Mandar memang selalu kalah dalam kompetisi menduduki jabatan-jabatan politik.

Pembedaan kelompok mayoritas dan minoritas, diasumsikan sebagai pengelompokan sejumlah orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan ketidakmampuan pada kelompok etnik, terutama terkait pada aspek politik. Dalam hal ini etnik Mandar tidak diberi kesempatan memperoleh kekuasaan secara adil. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan stereotip dari interaksi antaretnik.

Berikut pembedaan kelompok mayoritas dan minoritas.

Kelompok Mayoritas diwakili etnik Bugis	Kelompok Minoritas diwakili etnik Mandar
1. Memiliki kekuasaan	1. Kurang, bahkan tidak memiliki kekuasaan
2. Kedudukan lebih tinggi (superior)	2. Kedudukan lebih rendah (inferior)
3. Kompetisi kuat	3. Lemah dalam kompetisi
4. Melakukan diskriminasi	4. Mendapat perlakuan tidak adil

6.2.2. Stereotip Antaretnik

Pembedaan mayoritas dan minoritas, pada dasarnya muncul ketika ada interaksi sosial antarmanusia. Sejalan dengan itu, tulisan ini menemukan hubungan interaksi yang dilakukan oleh kelompok etnik untuk menyatakan identitasnya kepada orang lain (etnik lain), dan menerima pengakuan atas identitas tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas diantara mereka. Identifikasi itu dapat dilihat dari pengakuan bahwa kelompoknya sangat penting, karena pengakuan tersebut menjadi kekuatan moral bagi kelompok etniknya.

Hasil di lapangan menemukan beberapa pernyataan yang diidentifikasi memiliki makna stereotip, baik stereotip negatif dan positif terhadap etnik Mandar. Stereotip berkembang didasarkan atas keinginan etnik Mandar mengkonstruksi identitasnya melalui pembentukan provinsi baru. Stereotip tersebut menunjukkan perbedaan kategori: (1) “kami” (*we*) dengan “mereka” (*they*), di mana kami selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok *in group* dan mereka sebagai inferior atau kelompok *out group*; (2) proses kategori sosial yang menghasilkan “kami” dan “mereka”, atau *in group* dan *out group*. *In group* biasanya cenderung menyenangkan kelompok sendiri, dan cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan cara pandang dari kelompok “kami”. Hal itu akan menghasilkan kontribusi atas perilaku tertentu. Sementara itu, stereotip yang dimaksudkan adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, bisa karena berasal dari kelompok itu, atau berasal dari kelompok lain. Pemberian sifat tersebut dapat bersifat positif dan negatif.

Stereotip pada etnik Mandar berkembang berdasarkan pengalaman dan interaksi antaretnik Mandar dengan etnik lain. Dari sejumlah pengalaman tersebut dipahami sebagai pengetahuan mengenai ciri-ciri etnik Mandar. Walaupun pengetahuan tersebut terbatas dan subjektif, akan tetapi semua didasarkan pada interpretasi pada hubungan tersebut, yang digeneralisasikan sebagai ciri spesifik etnik Mandar. Sebuah stereotip yang berisikan pemberian sifat yang jelek dapat menimbulkan prasangka. Dengan demikian, berdasarkan pada prasangka-prasangka, mengakibatkan tindakan diskriminasi terhadap etnik Mandar.

Pada umumnya elemen masyarakat yang pro terhadap pembentukan provinsi menganggap bahwa pembentukan provinsi merupakan upaya mempertegas wilayah Mandar untuk dihargai. Peng-

hargaan terhadap identitas wilayah memang tidak dapat ditawar lagi, mengingat telah ada peluang dari pemerintah pusat kepada daerah dalam memberikan hak otonomi untuk berdiri sendiri sebagai satu provinsi.

Peluang itu direspons oleh elite yang tergabung dalam perjuangan tahap kelima. Gabungan itu mengagendakan untuk segera mengkonstruksi identitas kemandaran, seperti wilayah konfederasi kerajaan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Upaya elite itu dianggap oleh masyarakat sebagai tahap menumbuhkan tanggung jawab kebangsaan melalui pemerintahan yang bersih, kreatif dan dinamis karena telah mendapat dukungan yang luas dari tiga kabupaten (sebelum dimekarkan) yaitu Polmas, Majene, dan Mamuju. Dengan demikian masyarakat menganggap elite mendapat angin segar untuk membentuk provinsi.

Selain kelompok yang pro terhadap pembentukan provinsi, ada pula yang kontra terhadap pembentukan provinsi, hal ini cenderung melahirkan stereotip negatif. Kelompok kontra ada tiga kategori, Pertama, kelompok yang menganggap bahwa yang baik sebenarnya untuk wilayah Mandar bukan membuat provinsi sendiri, akan tetapi pemekaran pada tingkat kabupaten. Artinya otonomi pada tingkat kabupaten lebih dipertegas. Mengingat, bila membentuk provinsi memerlukan dana yang banyak dan segala fasilitas untuk menjadi provinsi harus segera disiapkan. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kesiapan secara materi belum dapat dianggap mampu mewadahnya dalam membentuk provinsi.

Kedua, kelompok yang menganggap bahwa pembentukan provinsi hanyalah merupakan keinginan sekelompok elite tertentu yang memiliki kepentingan yang selama ini tidak terakomodasi. Kelompok tersebut disinyalir sebagai kelompok pemburu jabatan semata, karena setelah dikecewakan di tingkat provinsi, akhirnya mengkon-

struksi gagasan membentuk provinsi sendiri, dengan demikian mereka nantinya akan memperoleh jabatan di provinsi baru.

Ketiga, kelompok yang menganggap bahwa pembentukan provinsi merupakan pembentukan provinsi etnik. Kondisi ini kecenderungan melahirkan implikasi sosial yang tidak kondusif bagi perkembangan dan dinamika sosial masyarakat. Sebab ada yang menilai apa yang dilakukan oleh kalangan elite tersebut usaha dalam mengorganisir kepentingannya yang mengatasnamakan kepentingan dan kehormatan etnik Mandar, karena dalam hal ini isu etnik lebih mudah dimobilisasi.

Setelah konstruksi dilakukan, muncul kondisi yang memprihatinkan. Satu sama lain antar elite sudah tidak saling mempercayai. Adanya distorsi pemahaman antar kelompok elite pejuang dengan elite birokrat. Di antara mereka masing-masing merasa mengklaim berhak untuk menduduki posisi penting di Mandar, khususnya menjadi orang nomor satu sebagai gubernur pertama di Sulawesi Barat.

Kenyataan itu diperlihatkan dengan adanya pasangan-pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Terdapat pasangan yang berasal dari kalangan birokrat dan juga terdapat pasangan dari kalangan putra-putra mantan Bupati. Pasangan-pasangan calon tersebut membuat kelompok sendiri, dan jelas melahirkan jarak sosial antar-elite. Elite kemudian menjadi terpisah-pisah, yang tragisnya, merasa tidak peduli dan bahkan tidak mengakomodir kepentingan elite-elite pejuang yang selama ini banyak berkorban dalam pembentukan provinsi.

Elite pejuang (terutama dalam tahap kelima), lebih banyak dari kelompok akademisi. Kelompok itu sebagian besar kurang memiliki modal yang memadai untuk disandingkan dengan elite-elite birokrat sehingga mereka tidak dilamar oleh partai politik untuk dijagokan

menjadi calon gubernur. Sementara elite birokrat dan putera mantan Bupati memiliki modal yang memadai sehingga mereka diberi peluang besar menjadi calon gubernur. Elite birokrat sengaja dipilih oleh partai Golkar karena alasan sejarah. Selama pemerintahan orde baru, salah satu pendukung utama Golkar (sekarang partai Golkar) adalah kalangan birokrat. Wajar apabila partai Golkar dengan kalangan birokrat masih memiliki hubungan emosional sehingga partai Golkar cenderung memilih calon gubernur dari kalangan birokrat.

Lebih jelasnya, teridentifikasi stereotip antaretnik Mandar dalam tabel berikut:

Stereotip Antaretnik Mandar	
Positif	Negatif
Penegasan Identitas kemandaran	Mengaburkan identitas
Keinginan masyarakat dan untuk Kepentingan umum	Keinginan dan Kepentingan elite
Hak-hak untuk otonomi	Hak kekuasaan elite
Lepas dari marginalisasi dan dominasi etnik lain	Timbul marginalisasi antaretnik.
Membentuk provinsi Sulawesi Barat	Membentuk provinsi etnik

Sementara itu, perdebatan yang berkembang di Mandar juga melahirkan stereotip (penilaian sifat) dari etnik lain di Sulawesi Selatan. Dalam bagian ini diuraikan analisis tentang stereotip terhadap etnik Mandar. Analisis ini terilhami dari stereotip yang berasal dari lima etnik, yaitu pertama, Makassar; kedua, Ternate; ketiga, Bugis; keempat, Toraja; dan kelima Jawa. Stereotif tersebut diuraikan lebih lanjut.

Pertama, dari etnik Makassar, menyebutkan bahwa posisi hegemoni Bugis menyulitkan etnik Mandar untuk mendapat posisi politik. Perlakuan tidak adil sangat dirasakan dalam aspek politik. Pemilihan gubernur tahun 1992 menjadi momentum sejarah bahwa Mandar ti-

dak dipercayakan untuk menduduki posisi nomor satu di Sulawesi Selatan. Walaupun Mandar memiliki kekuatan dari dua orang calon, akan tetapi dua calon tersebut masih belum mampu menandingi satu calon dari etnik Bugis. Dua tokoh Mandar walaupun bergabung menjadi satu belum bisa mengalahkan satu orang Bugis dalam pertarungan politik. Bukan karena sosok Mandar tidak memiliki kemampuan tapi lebih pada persekongkolan elite Bugis untuk menjatuhkan orang Mandar dan memberikan perlakuan yang tidak adil.

Dalam penilaian tertentu, Orang Mandar, dianggap lebih jujur, lebih memegang komitmen, dan memiliki kebersamaan. Kebersamaan itu sangat kuat, di saat mereka terdesak dan tertekan. Akan tetapi sangat disayangkan, kebersamaan tersebut melahirkan keinginan komunitas Mandar untuk memisahkan diri membentuk provinsi. Pemisahan tersebut, diperkirakan terimajinasi dari pembentukan provinsi Banten dan Gorontalo. Apa yang telah dilakukan oleh etnik Mandar lepas dari kelompok dominan dan mayoritas, sama halnya dengan gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh orang Palestina di bawah pimpinan Yaser Arafat, yang membentuk negara merdeka agar terpisah dari mayoritas dominan orang Israel.

Kedua, dari etnik Ternate, mengidentifikasi bahwa sebagian besar orang Mandar dipandang sebagai figur *low profile*, jujur dan punya kesetiakawanan yang tinggi. Sifat ini tidak hanya berlaku bagi sesama etnik, tetapi juga di luar etniknya. Namun ada kecenderungan, di saat yang berbeda, orang Mandar terkadang memiliki sifat yang lamban dan cenderung kurang respek. Hal Ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena setelah provinsi terbentuk. Fenomena distorsi antarelite yang dirasakan di Mandar dianggap telah menghilangkan semangat kebersamaan, karena ada kepentingan tertentu dari sebagian kelompok elite untuk mempertahankan harga diri dan akibatnya mereka saling menjelek-jelekkkan satu sama lain.

Orang Mandar, dianggap kurang mampu masuk dalam persaingan politik, terutama yang diciptakan Bugis. Walaupun memiliki sifat agresivitas, sifatnya kontemporer semata. Sifat tersebut tidak melekat menjadi sesuatu yang mendasar, hanya pada tataran tertentu saja. Sebab di saat orang Mandar tertantang dalam lingkungan pekerjaan mereka dapat beradaptasi, namun disaat menerima tantangan yang cukup berat dari pekerjaan tersebut sifat agresivitasnya menurun. Terdapat kecendrungan bahwa orang Mandar kurang percaya diri, sehingga menghilangkan identitas dirinya.

Hal seperti itu dipandang sebagai kelemahan orang Mandar, sehingga dengan mengonstruksi identitas, penguatan pembentukan provinsi ditakutkan menimbulkan permasalahan baru. Karena pemahaman atas etnik Mandar tersebut, menyebabkan kurang optimisnya etnik lain terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi Sulawesi Barat. Apa yang ditakutkan itu dilatarbelakangi oleh dinamika politik yang terjadi di Mandar. Usaha untuk mendistribusikan kekuasaan bagi elite-elite hampir tidak berjalan seperti keinginan para elite yang berjuang. Posisi penting lebih mengedepankan elite birokrat semata tanpa memedulikan siapa lagi yang harus direkrut untuk dapat duduk bersama memajukan Mandar.

Ketiga, dari etnik Bugis, menyebutkan pandangan yang berbeda, mendapat pemahaman bahwa orang Mandar dinilai memiliki daya saing dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, daya saing tersebut hanya berlaku pada tingkat jabatan menengah saja. Mereka kurang berani bersikap tegas untuk mendapatkan hak-hak politik, hal ini disebabkan karena secara kuantitas mereka lebih sedikit, sehingga sulit menduduki jabatan penting di pemerintahan provinsi, bahkan tidak diberi kesempatan.

Hal yang sama dalam menilai orang Mandar, diidentifikasi sebagai figur-figur yang konsisten, jujur dan dapat dipercaya. Wa-

laupun dalam kondisi termarginal sebenarnya mereka memiliki kemampuan dalam memimpin. Sifat luhur ke-Mandaran tersebut, tidak bisa mengalahkan posisi etnik Bugis yang cenderung memiliki sifat menjajah (kolonialisme), seperti selalu menempatkan etniknya sebagai etnik yang memiliki kelas tertinggi di Sulawesi Selatan, sehingga walaupun dinilai Mandar mampu memimpin, tetap tidak akan pernah dipercayakan untuk menjadi pimpinan bagi etnik Bugis.

Dibalik keluhuran sifat Mandar, dipahami pula bahwa orang Mandar cenderung memiliki sifat agresif dalam kondisi tertekan, akan tetapi mereka kurang memiliki kekuatan sosial antaretnik, ada persaingan dari etnik Mandar sendiri. Jika ada salah satu dari etnik Mandar yang mendapat jabatan, maka akan berusaha mempertahankan dengan lebih menghargai etnik yang dominan (Bugis) daripada harus membangun kekuatan etniknya. Dengan demikian maka jaringan etnik Mandar sangat lemah, karena antar mereka tidak saling merekrut.

Keempat, dari etnik Toraja, menilai bahwa etnik Mandar tidak bisa superior dari etnik Toraja, karena bagaimanapun juga secara historis Mandar merupakan titisan dari orang-orang Toraja, mereka ada karena menurut sejarah orang Toraja To-manurung orang Mandar berasal dari tanah Toraja. Asumsi yang demikian dapat dipahami penulis, bahwa etnik Toraja memandang Mandar sebagai etnik yang inferior masih berada di bawah kelasnya. Walaupun demikian, etnik Toraja merasakan apa yang dirasakan etnik Mandar sebagai kondisi yang tidak menguntungkan, posisinya di pemerintahan masih belum bisa mengalahkan etnik Makassar ataupun Toraja.

Hal yang sangat dikagumi, bahwa etnik Mandar memiliki sifat yang jujur, lebih empati pada etnik lain. Dari sifat inilah, sehingga mereka sangat konsisten terhadap prinsip dan terkadang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing pada sesuatu yang tidak sehat.

Mereka hanya bisa bergabung pada etnik-etnik minoritas, sehingga daya saingnya hanya sebatas sesama etnik dan kurang memiliki keberanian untuk melawan secara frontal pada etnik yang lain.

Kelima, figur *low profile* orang Mandar, hampir sama dengan figur orang Jawa, semakin di atas semakin merunduk. Etnik Jawa menganggap, etnik Mandar lebih terbuka dengan orang lain, mampu bekerja sama. Tapi di saat harga dirinya terpojokkan, cenderung menghindari konflik frontal dan terbuka, mereka cenderung lebih bersikap dingin untuk menghindar dari hal-hal yang tidak menguntungkan.

Sifat dasar tersebut, dapat menjadi kelemahan etnik Mandar tapi dapat juga menjadi kelebihan. Disebut kelemahan karena etnik Mandar lebih mengutamakan pertentangan yang tertutup, tapi menimbulkan dampak perselisihan yang panjang. Sedangkan disebut sebagai kelebihan, mereka mencoba menjauhi konflik terbuka, karena hal itu menurut mereka akan menjatuhkan harga dirinya.

Secara singkat diklasifikasikan stereotip etnik lain terhadap etnik Mandar seperti dalam tabel berikut:

Etnik	Stereotip Etnik	
	Positif	Negatif
Etnik Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Jujur - Komitmen kuat - Kebersamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang mampu bersaing - Kebersamaan berkurang tatkala tertekan
Etnik Bugis	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki daya saing - Lebih agresif 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing menurun dalam persaingan politik - Kurang tegas - <i>Basic</i> sosial lemah
Etnik Toraja	<ul style="list-style-type: none"> - Jujur - Empati - Konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> - Inferior - Kurang mampu bersaing - Bekerja sama hanya dengan etnik minoritas

Etnik	Stereotip Etnik	
	Positif	Negatif
Etnik Ternate	<ul style="list-style-type: none"> - Jujur - <i>Low profile</i> - Agresivitas tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang percaya diri - Lamban - Agresivitas menurun tatkala tidak mendasar
Etnik Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu bekerja sama - Terbuka dengan etnik lain - Meredam konflik terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih memendam konflik tertutup

6.2.3. Tindakan dan Makna dalam Mengukuhkan Identitas

Fenomena hubungan antaretnik Mandar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan melahirkan berbagai stereotip positif maupun negatif. Jika ditelaah, tatkala hubungan antaretnik berlangsung, maka di dalamnya berlangsung pula interaksi sosial. Interaksi sosial antaretnik biasanya dipertegas dengan pengenalan identitas etnik, hal ini biasanya dilakukan untuk mempertegas dalam membedakan etniknya dengan etnik yang lain.

Interaksi antar etnik Mandar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, dirasakan sebagai penempatan etnik Mandar sebagai kelompok etnik minoritas, termarginal dan kurang mendapat kesempatan dalam kompetisi politik. Posisi yang tidak menguntungkan ini, menjadi suatu kesadaran diri dari etnik Mandar untuk menempatkan identitas etniknya sebagai sesuatu yang harus diperoleh, dipelihara, dimodifikasi atau dibentuk kembali. Dengan demikian, sebagai konstruksi sosial, identitas etnik terinternalisasi dalam tindakan yang memiliki makna penting bagi kedudukan etniknya, seperti halnya dengan etnik Mandar. Kesadaran etniknya telah melahirkan tindakan nyata dalam aktualisasi etniknya, yang kemudian direalisasikan dalam perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Perwujudan pembentukan provinsi merupakan penegasan identitas etnik Mandar. Keberadaannya dapat memproduksi kesadaran aktif politik dari kelompok etnik. Kesadaran tersebut sebagai instrumen bagi aktor-aktor untuk mengerahkan kelompok etnik dalam pemenuhan kepemilikan etnik dan sejarah. Atas dasar pemahaman tersebut, kesadaran identitas etnik ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Di saat yang sama, identitas itu dibentuk dalam aksi-aksi politik sebagai relasi kekuasaan, yang merupakan suatu petanda agar etnik lain sebagai lingkungan luar mengetahui dan mengenal identitasnya tersebut.

Di Mandar, konstruksi identitas etnik lebih mengarah pada penegasan kembali pemikiran-pemikiran untuk menempatkan Mandar sebagai wilayah yang patut dibanggakan dan dihargai oleh etnik lain di Sulawesi Selatan. Penghargaan etnik dikukuhkan kembali, karena tidak adanya kesempatan yang diberikan bagi etnik Mandar untuk berkompetisi memenangkan kekuasaan politik. Untuk memperoleh kekuasaan, maka tindakan yang dipilih adalah berusaha membentuk provinsi, hal ini sebagai pengejawantahan hak-hak etnik dan politik. Kedua hak tersebut oleh Mandar memang telah diupayakan untuk diperoleh, karena Mandar sejak dulu dalam memperoleh hak-hak tersebut mengalami hambatan. Pada masa kejayaan konfederasi kerajaan, Belanda masuk mengatak-antik kekuasaan kerajaan, sehingga melemahkan posisi kerajaan di Mandar. Kekuasaan konfederasi kerajaan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu dipecah Belanda, dengan membaginya dalam satu afdeling yaitu afdeling Mandar. Penyatuan tersebut oleh Belanda tidak dilakukan dengan sendirinya, tapi mendapat bantuan dari kerajaan dari Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. Saat itu Mandar diserang oleh dua kekuatan Belanda dan kerajaan Bone.

Kekuatan Belanda dan kerajaan Bone inilah yang akhirnya meredam kejayaan kerajaan-kerajaan di Mandar. Adanya serangan dari

kedua kekuatan tersebut menyebabkan Mandar merasa kehilangan identitasnya, Mandar ditempatkan sebagai wilayah jajahan Belanda sekaligus menghilangkan hubungan harmonis kerajaannya dengan kerajaan Bone. Kolonialisme ini tidak hanya didapat dari Belanda tetapi juga kerajaan Bone yang ikut campur menaklukkan konfederasi kerajaan-kerajaan di Mandar.

Secara reaktif, faktor sejarah menjadi salah satu alasan menghilangkan kepemilikan etnik Mandar. Mandar dilebur menjadi wilayah yang terkotak-kotak oleh Belanda. Dalam kondisi demikian, sedikit-demi sedikit memupuskan kecintaan Mandar terhadap wilayahnya sendiri. Selain itu telah memutuskan kecintaan raja-raja terhadap rakyat, karena Belanda telah mengambil alih wilayahnya, sehingga menghilangkan wilayah kerajaan.

Posisi kolonialisme ini berlangsung lama hingga kemerdekaan. Saat negeri ini telah mendapat kemerdekaan. Kecintaan tersebut kemudian digulirkan dalam pemikiran-pemikiran pejuang tapi sampai pada tahap ke-empat perjuangan, akan tetapi keempat tahap tersebut, belum menempatkan Mandar sebagai provinsi. Hingga akhirnya, zaman reformasi mengubah kondisi ini, Mandar mendapat kesempatan untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom serta kembali memperoleh kepemilikan etnik dan sejarahnya. Wujud kepemilikan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran pentingnya identitas Mandar. Walaupun usaha yang dilakukan mengalami kegagalan selama empat tahap, namun identitas tersebut tetap diupayakan dalam tahap kelima sebagai tahap perjuangan antara elite intelektual dan elite tradisional untuk mewujudkan Mandar sebagai provinsi sendiri.

Realisasi perjuangan tahap kelima masyarakat Mandar telah mendapat dukungan dari presiden Megawati (ketika menjabat). Dukungan yang diberikan oleh Megawati disinyalir sebagai bentuk pertarungan kepentingan antara pemerintah lokal dengan pemerintah

pusat. Dukungan Megawati sebagai dukungan politik, dibuktikan dengan kunjungannya ke Polmas, hal ini sebagai bukti pemberian peluang atas percepatan pembentukan provinsi. Walaupun posisinya sebagai presiden akan tetapi kedatangan Megawati ke Polmas membawa misi untuk kepentingan partainya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat di Polmas.

Posisi tawar yang diberikan kepada masyarakat Mandar adalah hubungan timbal balik atas dukungan Megawati. Artinya apa yang akan diberikan masyarakat Mandar kepada Megawati berisikan dukungan penuh terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat pemilihan presiden berikutnya. Dukungan kepada Megawati berasal dari dua kekuatan yaitu kekuatan di tingkat daerah dan tingkat pusat, artinya bahwa dukungan diberlakukan tidak hanya bagi masyarakat di wilayah Mandar saja, tetapi juga oleh masyarakat Mandar di luar wilayah tersebut, seperti komponen-komponen perjuangan yang berada di Jakarta, ataupun komponen di daerah lain seperti, di Surabaya, di Samarinda, di Kendari, di Palu, dan lain-lain.

Pembentukan provinsi, pada dasarnya diawali dengan resistensi pada kekuatan sosial politik. Resistensi seperti ini muncul ketika sebagian elite merasa tersisih dan tidak diabaikan oleh Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar) sebagai panitia pembentukan provinsi. Elite yang kecewa kemudian mengembangkannya wacana kontra atas konstruksi dengan merujuk pada hal tiga berikut: (1) perlunya peran serta fungsi kemandirian yang kuat dari lingkungan elite pemerintah dan juga rakyat Mandar pada umumnya, (2) hasil reformasi memang memunculkan undang-undang otonomi daerah. Keberadaan undang-undang tersebut membangkitkan semangat beberapa elite intelektual untuk menampilkan kembali pemikiran pembentukan provinsi, akan tetapi konstruksi itu telah mengabaikan beberapa elite lokal daerah, dan (3) pemikiran pem-

bentukan provinsi dianggap belum saatnya untuk kembali dikumandangkan, karena pengaruh kepemimpinan tradisional (bangsawan) masih kuat di daerah ini.

Wacana tersebut menjadi dilema bagi para penggagas. Untuk mengantisipasi kondisi demikian, diperkenalkanlah strategi sosialisasi guna mengendalikan dinamika sosial politik di Mandar. Strategi tersebut merupakan upaya yang ditempuh untuk memudahkan gagasan pembentukan provinsi diterima oleh masyarakat Mandar. Melalui sosialisasi ini, walaupun bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi pada intinya pihak-pihak yang merasa dikecewakan dapat memahami tujuan pembentukan provinsi, dan akhirnya menyetujui. Dengan demikian diharapkan mereka tidak perlu terus menerus kontra terhadap ide atau gagasan tersebut, tetapi dapat mengenal lebih dekat gagasan dan program perencanaan untuk daerahnya.

Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan konsep (program) yang menjadi visi dan misi dari gerakan perjuangan pembentukan provinsi. Selain itu, disela-sela sosialisasi selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa keberadaan Mandar sangat penting untuk menjadi provinsi, seperti kejayaan konfederasi kerajaan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Pada dasarnya konsep yang selalu didengungkan mengandung dua makna, yaitu pertama, kecintaan mereka kepada tanah Mandar agar kembali memperoleh hak kepemilikan etnik dan sejarahnya sebagai bentuk identitas. Kedua, menanamkan kecintaan kepada orang/masyarakat Mandar agar tidak menjadi etnik kelas empat di Sulawesi Selatan. Pemikiran tersebut, dapat terealisasi jika Mandar ditempatkan sebagai satu wilayah otonom dan lepas dari dominasi etnik mayoritas di Sulawesi Selatan.

Salah satu bentuk sosialisasi dilakukan dengan bentuk Deklarasi. Sebelum Deklarasi dicetuskan, KAPP Sulbar telah mempercepat pengenalan konsep terhadap masyarakat dengan membentuk

kelompok kerja (Pokja). Kelompok kerja ini dibentuk pada setiap kabupaten, bertugas untuk menerima masukan-masukan dari anggota masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap pembentukan provinsi. Untuk mempercepat konsep konstruksi, metode kerja dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan di masing-masing kabupaten. Pertemuan-pertemuan tersebut antara lain:

1. Pertemuan di Majene, meliputi:

- (1). Pertemuan pertama di Majene tanggal 30 September 1999 yang menghasilkan kesepakatan: Semua Parpol peserta Pemilu (minus Golkar) mendukung pembentukan provinsi Sulawesi Barat dan segera melakukan dengar pendapat dengan DPRD kabupaten Majene.
- (2). Pertemuan Kedua berlangsung tanggal 1 Oktober 1999 dengan kesepakatan: Seluruh komponen masyarakat mendukung pembentukan provinsi Sulawesi Barat dan semua partai politik peserta Pemilu, termasuk partai Golkar. Tugas selanjutnya adalah melakukan sosialisasi secara intensif melalui distribusi dan penyebaran informasi tentang provinsi Sulawesi Barat.

2. Pertemuan di Mamuju

Pertemuan berlangsung tanggal 2 Oktober 1999 di mana dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat pimpinan parpol anggota DPRD kabupaten dan birokrasi dalam kapasitas pribadi. Hasil pertemuan menyimpulkan; perlu sosialisasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat ke semua kalangan masyarakat termasuk para pendatang (non-Mandar); konstruksi menjadi sebuah provinsi Sulawesi Barat harus satu paket dengan pemekaran kabupaten Mamuju menjadi beberapa kabupaten dan diusulkan agar ibukota ditetapkan di wilayah Mamuju.

3. Pertemuan di Polewali Mamasa (Polmas)

Pertemuan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 1999 dengan keputusan yang diambil ada dua hal; pertama, sosialisasi yang intensif harus dilakukan dengan memanfaatkan seluruh saluran yang tersedia; kedua, konstruksi pembentukan provinsi Sulawesi Barat sudah harus dilakukan secara terbuka. Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan provinsi yaitu harus mempertimbangkan aspek historis dan kultural terutama dalam menentukan batas pemekaran, dengan tetap mempertimbangkan aspek topografi ekonomi, geografi dan demografi (aspek pengembangan wilayah).

Setelah melakukan pertemuan-pertemuan, agenda kerja berikutnya adalah mencetuskan deklarasi perjuangan. Deklarasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh ratusan pemuda pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, pejuang, tokoh agama, kaum cendekiawan dan parpol. Acara yang digelar di Taman Makam Pahlawan korban 40.000 jiwa di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung kabupaten Polmas, tanggal 10 November 1999.

Adapun isi Deklarasi Galung Lombok tersebut :

1. Menegaskan komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu konsep kenegaraan yang final.
2. Menyatakan komitmen bulat untuk berupaya memperjuangkan terwujudnya provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi wilayah eks afdeling Mandar/Daerah Swatantra Mandar, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini.
3. Mengimbau kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah kabupaten

Polmas, Majene dan Mamuju serta Lembaga Legislatif (DPR-DPRD provinsi – DPRD kabupaten) agar segera melakukan proses pemekaran wilayah Kelurahan/Desa dan Kecamatan, serta Kabupaten di wilayah yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, aspek sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang menurut visi, persepsi dan cita-cita luhur kami sejak lama, sudah sangat memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah dalam bentuk daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Deklarasi ini disepakati, dibuat, dan dibacakan serta akan disosialisasikan secara umum ke seluruh wilayah Mandar. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, kemudian dibubuhi tanda tangan sebagai bukti sejarah yang autentik pada sebuah pajangan kain merah dan putih yang merupakan rangkaian kesatuan dengan Deklarasi Galung Lombok ini.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa deklarasi yang mereka kumandangkan, merupakan perwujudan lanjutan perjuangan yang dirintis oleh para elite pejuang sebelumnya sejak awal kemerdekaan. Deklarasi yang dijadwalkan bersamaan dengan hari Pahlawan menandakan bahwa keinginan pembentukan provinsi Sulawesi Barat suatu momentum yang tidak main-main. Acara penandatanganan dukungan pada deklarasi tersebut diawali tokoh pejuang dan tokoh adat, seperti A. H Malik Pettana Endeng, H, Ma'mun Hasanuddin, H Borahima serta Sekjen Forum Sipamandar, KAPP-Sulbar, Kelompok Kerja dan seluruh peserta yang mewakili kelompok-kelompok yang ada di daerah Mandar.

Kehadiran A. H. Malik Pettana Endeng yang merupakan elite kharismatik dan tokoh masyarakat tidak boleh diabaikan. Hal itu ternyata membawa dampak positif bagi perjuangan pembentukan provinsi untuk meredam dinamika politik yang terjadi di daerah Mandar. Sekelumit tentang A. H. Malik, bahwa beliau adalah tokoh utama dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Pada tahap awal perjuangan, tokoh ini sebagai pelopornya, untuk perjuangan selanjutnya berharap banyak dan mengimbau agar apa yang telah diupayakan merupakan perjuangan yang tiada akhir. Tokoh ini tampil sebagai pelopor penandatanganan pernyataan dukungan yang ditorokkan di atas sehelai kain putih kemudian disusul oleh seluruh warga masyarakat dan peserta sarasehan di Galung Lombok. Artinya, *maradua* A. H. Malik Pettana yang sepuh itu siap menghabiskan sisa hidupnya untuk perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi yang puncaknya dengan deklarasi tersebut, ternyata mendapat perhatian dan respons dikalangan anggota DPRD (kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju). Hal itu ditandai dengan kerelaan mereka untuk membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan dukungan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. DPRD Majene tanggal 10 Maret 2000 yang menghasilkan keputusan No. 006/KPTS/DPRD/III/2000, sementara DPRD Polmas menyetujui penandatanganan tanggal 19 Juni 2000 dengan keputusan No. 12/KPTS/DPRD/IV/2000, dan Mamuju terakhir tepatnya tanggal 6 Oktober 2000 melalui keputusan No. 12/KPTS/DPRD/V/2000 yang disertai dengan syarat-syarat pemekaran kabupaten dan usulan agar Mamuju menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Dari sosialisasi yang dilakukan baik jalur legislatif, eksekutif maupun jalur masyarakat Mandar, titik berat perjuangan ini adalah memperkuat budaya "*Sipakatau*" yaitu saling menghargai semua komponen yang berada di daerah Mandar, karena merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dan diharapkan saling menghargai dan mendukung selama tetap berada dalam jalur damai dan konstitusi.

Dari seluruh rangkaian politik identitas, yang diartikan sebagai politik perbedaan antaretnik di Sulawesi Selatan, didasarkan atas dominasi etnik dominan (Bugis) atas kelompok minoritas dan marginal (Mandar), oleh penulis analisis atas kasus ini memperlihatkan beberapa hal yang penting. Pertama, munculnya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, terlihat sebagai upaya pemahaman perbedaan antara etnik Mandar sebagai minoritas dan etnik Bugis sebagai mayoritas, kondisi ini dilatarbelakangi oleh ketidakberdayaan kekuasaan oleh kaum minoritas akibat ketidakmampuan persaingan yang diciptakan oleh kaum mayoritas. Persaingan yang tekadang dibarengi dengan perlakuan yang tidak adil mengakibatkan penempatan kaum minoritas sebagai sasaran diskriminasi, atau yang lebih terasa pada dominan kultur, di mana kelompok mayoritas merasa dirinya lebih mengutamakan etika kerja, dan menganggap keberhasilan secara materi sebagai kunci peran yang tinggi sebagai kelompok mayoritas. Secara sederhana dari pemahaman etnik minoritas yang demikian, maka menetapkan kriterianya sebagai: (1) relatif kurang berpengaruh/berkuasa; (2) menunjukkan diferensiasi yang berbeda dengan kelompok mayoritas; (3) selalu distereotif; (4) diperlakukan tidak adil.

Kedua, penilaian sifat (stereotip) berkembang saat interaksi antar kelompok mayoritas dan minoritas etnik. Penilaian negatif atas etnik Mandar sebagai etnik yang kurang memiliki agresivitas, kurang percaya diri dan kurang tegas adalah sebuah bentuk generalisasi, setidaknya mengurangi kesempatan dan membuka jarak sosial. Penilaian tersebut memudahkan prasangka sosial bahwa etnik Mandar sebagai etnik kelas bawah, yang pada akhirnya mendorong asumsi mengenai superioritas dan inferioritas etnik.

Ketiga, diskriminasi struktural biasanya terjadi karena kesenjangan dari sumber politik dan ekonomi, terutama berhubungan dengan aspek instrumental dan material (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ataupun pada siapa yang kehilangan dan berapa banyak), kondisi seperti itu dibentuk oleh pola institusionalisasi dari kelompok mayoritas yang berkuasa. Karena kekuasaannya, mereka mendominasi sehingga tanpa sadar telah menimbulkan konflik (yang ditata dalam tatanan dengan rapi), dalam hal ini konflik mengambil bentuk yang lebih lunak, halus (*subtle*) seperti ketidaksukaan (*dislikeness*) atau ketidaksetujuan (*disagreement*).

Konflik lunak karena diskriminasi struktural terhadap etnik Mandar berakar dari institusionalisasi rasisme (tatanan dan aturan membatasi ruang gerak etnik), hal ini terkonstruksi dari stereotip dan prasangka yang berkembang. Diskriminasi karena prasangka sosial berdimensi pada motivasi dan berpengaruh dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini, tindakan diskriminasi tanpa sadar oleh etnik Bugis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berbasis pada sentimen-sentimen etniknya.

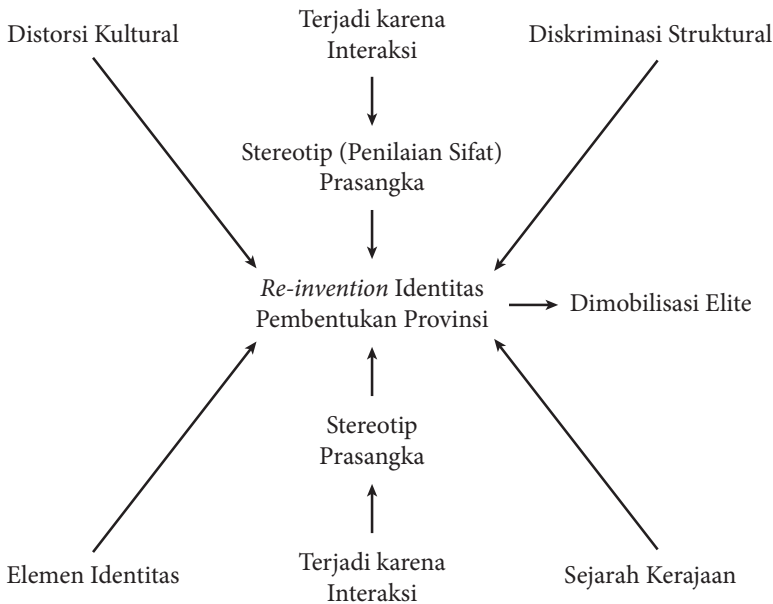
Keempat, semakin tingginya derajat diskriminasi tersebut, dapat diprediksi akan semakin mempersempit ruang gerak etnik Mandar. Menyadari kondisi seperti ini, maka oleh etnik minoritas menggulirkan isu politik perbedaan (politik identitas) sebagai sarana untuk melepaskan diri dari mayoritas. Peran yang diambil oleh aktor (elite) adalah memobilisasi makna-makna budaya dan historis. Tindakan yang bermakna peran yang dibangun tersebut adalah untuk menentukan ranah kekuasaan etniknya. Artinya, makna tersebut dimunculkan dan diciptakan kembali dengan tujuan untuk mengamankan dan menempatkan kembali kehormatan etnik sekaligus politik.

Tindakan nyata untuk memperkuat *re-invented* identitas, ditandai dengan pembentukan daerah administratif, diwujudkan da-

lam provinsi Sulawesi Barat, hal ini memperlihatkan adanya teritorialisasi identitas yang berimplikasi pada pemisahan diri daerah Mandar. Teritorialisasi tersebut merupakan *re-grouping* kultural dengan dasar wilayah yang pada akhirnya mengambil wajah pembentukan daerah otonom.

Kelima, setelah konstruksi, ternyata melahirkan kendala antar elite. Timbul kecurigaan antara kelompok elite dalam pemahaman *distribution position*, khususnya sebagai gubernur Sulawesi Barat. Munculnya kategori-kategori elite yang tidak memudahkan reformasi kepemimpinan bahkan pada ketidakpercayaan pada kepemimpinan etnik Mandar. Fenomena demikian sebagai akibat distorsi kekuatan antara elite pejuang dan elite birokrat, persaingan antar elite tersebut, sehingga demikian dapat dimaknai mengaburkan identitas Mandar *malab'bi*.

Secara singkat rangkaian analisis di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

Reinvention identitas melalui proses politik dengan pembentukan provinsi merupakan hasil interaksi baik dalam etnik Mandar sendiri dan antar etnik lain. Interaksi tersebut sumbernya dari empat titik sentral, yaitu: elemen identitas, sejarah kerajaan, distorsi kultural dan diskriminasi struktural. Keempat hal tersebut memicu stereotip atas etnik Mandar, yang kemudian dimobilisasi oleh elite sebagai respons dari stereotip untuk membentuk provinsi baru.

6.3. Interaksi Simbolik Memahami Konstruksi Identitas Etnik Mandar

Interaksi simbolik dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide dasar. Ide dasar ini mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau masyarakat, interaksi sosial, objek manusia sebagai pelaku, tindakan manusia dan interkoneksi saluran-saluran tindakan. Interaksi simbolik dipahami, merujuk pada karakter interaksi khusus yang terjadi antar manusia. Sifat khusus ini terdapat pada kenyataan bahwa manusia menginterpretasikan dan mendefinisikan antara tindakan yang satu dengan tindakan yang lain.

Sebagai makhluk yang bertindak, manusia merupakan makhluk sosial dalam pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta berinteraksi sosial dengan dirinya, dengan membuat indikasi sendiri, dan memberi respons pada sejumlah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia sebagai suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri bahkan di luar lingkungannya.

Untuk memperjelas tradisi interaksi simbolik, maka dalam analisis ini penulis menguraikan dalam pemikiran dasar Mead yang kemudian diperkuat oleh interaksi simbolik ala-Blumer. Bertitik tolak pada prinsip dasar tersebut, penulis membaca ulang pemikiran Mead sebagai alat analisis dasar untuk memperkuat fenomena. Hal

ini diuraikan secara sederhana dalam menjelaskan konstruksi identitas etnik di Mandar.

Pemikiran *mind*, *self*, dan *society*, merupakan suatu pemikiran yang memperkenalkan dialektika hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini, konsep diri (*self*) bersifat sebagai objek maupun subjek secara sekaligus. Sebagai objek bagi diri sendiri, hal inilah yang menjadikan manusia mampu mencapai kesadaran diri (*self consciousness*). Hal ini pula yang membuat seseorang dapat mengambil sikap yang impersonal dan objektif untuk dirinya sendiri, juga untuk situasi di mana dia bertindak. “Diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum berada pada posisi sebagai subjek. Dalam hal ini “diri” akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subjektif atas realitas struktur yang lebih luas. Dia merupakan produk dialektis dari “*I*” —impulsif dari diri, aku sebagai subjek— dan “*Me*”-sisi sosial dari masyarakat. (Wallace and Wolf, 1980; Zetlin, 1995). Dengan demikian, “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru menyadari dirinya sendiri di dalam suatu interaksi sosial. Salah satu contoh bahwa elite di Mandar melakukan pemahaman atas diri etniknya selain sebagai subjek juga sebagai obyek dapat dilihat dari konstruksi awal identitas Mandar.

Dalam tataran subjek, penempatan etnik Mandar, diwakili oleh aktor-aktor (elite) yang mengalami proses kesadaran diri (*self consciousness process*). Kesadaran diri ini merupakan bentuk kesadaran etnik dan melekat dalam diri etnik. Dalam hal ini, etnik dibangun sebagai pijakan dasar dalam memberikan penguatan bahwa apa yang melekat dalam diri etnik merupakan simbol kemegahannya. Artinya, Mandar memiliki simbol identitas yang dapat dibedakan dengan etnik lain baik dari aspek bahasa, wilayah, kebudayaan, organisasi sosial maupun imajinasi etniknya.

Pemahaman terhadap simbol identitas etnik, menyebabkan Mandar mengambil sikap dan peran yang sepatutnya, hal ini berdasarkan situasi yang mengharuskan mereka untuk sadar akan posisi etniknya. Apa yang dilakukan merupakan kemampuan dalam memahami bahwa dirinya berbeda dengan etnik lain, dirinya memiliki kelebihan dibanding yang lain dan kesemuanya itu membangkitkan semangat untuk tetap mempertahankan kehormatan etniknya.

Melalui posisinya sebagai subjek, dapat juga dicermati dari realitas elite (penggagas konstruksi identitas) memahami secara historis etnik Mandar. Elite penggagas *me-review* peristiwa-peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya sebagai bentuk baku identitas etnik. Peristiwa sejarah ditransfer dari kemegahan konfederasi kerajaan Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, sebagai kerajaan yang memiliki otoritas membangun wilayah Mandar, layaknya kemegahan kerajaan Bugis dan Makassar. Kemegahan konfederasi kerajaan di Mandar oleh elite penggagas dijadikan sebagai instrumen identitas diri etnik untuk dibangun kembali melalui penguatan pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Sedangkan pemahaman nilai-nilai budaya sebagai unsur identitas berakar dari amanat raja I (pertama) Balanipa Tondilaling, nilai identitas telah diajarkan kepada keturunan ke-53 *marad'ia* (raja). Nilai budaya tersebut diproduksi menjadi kesadaran diri etnik Mandar, karena nilai itu berisikan nilai-nilai perilaku dan sikap seutuhnya orang Mandar.

Orang Mandar, diharapkan selain mampu menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri, juga harus berhasil memimpin orang lain, apabila mereka berada pada posisi menjadi pemimpin, seharusnya menjadi orang yang patut dijadikan panutan (*todipeccoi*). Kategori panutan hanya dapat dicapai jika mereka mampu menerapkan dua elemen identitas, *maasayanni lita'* (kecintaan terhadap tanah/negeri Man-

dar) dan *maasayanni pa'banua* (kecintaan terhadap orang/masyarakat Mandar). Kedua kecintaan ini, manakala menjadi kesadaran diri orang Mandar, maka mereka dianggap memiliki sifat “*to-malab'bi*” suatu sifat luhur yang teraplikasi dalam cara mereka berbuat (*mal-ab'bi kedo*), cara mereka bertutur kata (*malab'bi pau*) dan cara mereka bertindak (*malab'bi gau*). Sifat *to-malab'bi* jika ditelusuri dalam pemikiran Mead menjadi cara pandang orang Mandar (sebagai subjek) terhadap dirinya sendiri, memahami dirinya bahwa ketika mereka menerapkan sifat *to-malab'bi*, maka mereka akan menjadi manusia utama, mengenal dirinya dalam lingkungan sosial, dan sekaligus menjadi pengikat sesama etniknya.

Dalam tataran objek, sebagai awal sebelum adanya pemahaman subyek. Artinya, “diri” akan menjadi objek sebelum berada pada subyek. Diri masuk dalam proses internalisasi atau interpretasi atas realitas sosial yang lebih luas. Berger dan Luckman (1990:186) mengatakan bagaimanapun juga dalam bentuk internalisasi yang kompleks, individu tersebut tidak hanya memahami proses-proses subyektif orang lain, melainkan juga memahami dunia dimana ia hidup di dunia itu menjadi dunia lainnya.

Internalisasi merupakan pemahaman diri mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu atas orang lain dalam mengenal dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil kolaborasi atas penciptaan makna secara otonom individu yang tersosialisasi, dengan makna yang dapat diperoleh individu atas orang lain. Dalam hal ini, internalisasi dicerminkan dari interaksi elite penggagas dan pelaku konstruksi identitas terhadap dunia sosial di luar etniknya.

Di saat etnik Mandar memandang diri pada posisi sosial, hal ini dapat dicermati ketika etnik Mandar melakukan pemahaman terhadap dirinya sendiri, di dalam lingkungan luarnya. Artinya, etnik Mandar (lewat elite-elite yang mengkonstruksi) dapat menjadi objek

pemahaman atas etnik lain. Mengapa mereka berusaha untuk mengkonstruksi identitasnya sebagai kepemilikan etnik dan sejarah, dan apa makna dibalik konstruksi tersebut. Pemahaman etnik lain terhadap etnik Mandar merupakan makna perkembangan kesadaran diri etnik Mandar. Dalam hal ini, kesadaran tersebut ada karena bergantung pada sejumlah orang-orang penting di luar etnik Mandar, atau dalam istilah Mead disebut dengan *significant other*.

Selanjutnya, *significant other* dapat memberikan penilaian, pandangan dan pemahaman, di saat mereka terlibat khusus dalam melakukan interaksi sosial. Interpretasinya tersebut dapat merujuk pada peran yang dilakukan oleh etnik Mandar, bagaimana hubungan sosialnya, terutama cara mereka terlibat dalam kompetisi politik di Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, etnik Mandar dapat pula dipahami dari posisi etniknya atas etnik lain, termasuk cara mereka menyertakan simbol-simbol etnik yang dimaknai sebagai bentuk identitasnya.

Pada gilirannya interaksi telah melahirkan kesadaran diri (*self*) juga pikiran (*mind*), hal ini melalui penggunaan bahasa dan isyarat-isyarat simbolik. Karena melalui instrumen ini manusia dapat berpikir, dan mewujudkannya sebagai bentuk internalisasi antar individu dengan dirinya sendiri akibat pengaruh orang lain.

Bagi orang Mandar, *mind*, dapat diterjemahkan dari stereotip terhadap etnik Mandar dalam hubungannya dengan etnik lain di Sulawesi Selatan. Etnik Mandar menilai bahwa konstruksi identitas diperkuat oleh faktor kolonialisme internal dan kompetisi (khususnya politik). Pemikiran ini didasari atas posisi etnik Mandar yang “termarginal” dari etnik lain di Sulawesi Selatan. Akibat marginalisasi, dirasakan ada batas-batas sosial antara etnik Mandar dengan etnik lain. Artinya berdasarkan batas-batas etnik tersebut, anggota etnik berpikir adanya perbedaan dirinya dengan yang lain, dan menggolongkan sejumlah orang menjadi satu golongan etnik sebagai “kita”

dan suatu kelompok etnik yang lain dengan “mereka”. Melalui batas-batas etnik, akhirnya stereotip menjadi lestari, karena melalui dan di dalam stereotip tersebut pemikiran perbedaan-perbedaan ini muncul.

Apa akibatnya jika pemikiran ini terus berlangsung? Mandar, merasa tidak memiliki kesempatan untuk dapat berkembang, dominasi Bugis yang teramat kental, batas-batas etnik menjamur ketika berada dalam posisi memperoleh kekuasaan, rekayasa politik dijalankan, sehingga realitas tersebut memicu pemikiran etnik Mandar untuk segera bertindak melepaskan diri dan memperoleh kehormatan etniknya.

Pikiran-pikiran etnik Mandar tersebut, dikategorikan sebagai mekanisme penunjukan diri (*self indication*), yaitu suatu penunjukan makna atas diri-sendiri (orang Mandar) kepada orang lain. Pikiran tersebut mengisyaratkan sejauh mana Mandar melihat diri mereka sendiri, siapa dan apa mereka, objek di sekitarnya sebagai komunitas masyarakat. Sehingga demikian pikiran tersebut merupakan bagian integral dari masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat, individu membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat membentuknya (Zeitlin, 1995). Dalam hal ini, masyarakat dibentuk dari individu-individu yang memiliki diri sendiri. Bahwa tindakan manusia merupakan konstruksi yang dibentuk oleh individu melalui dokumentasi dan interpretasi hal-hal penting di mana ia akan bertindak. Bahwa tindakan kelompok terdiri atas perpaduan dari tindakan-tindakan dan pikiran dari individu-individu atau diri (*self*).

Tindakan orang Mandar dalam mengonstruksi identitasnya, merupakan tindakan kelompok etnik yang diramu dari perpaduan pemikiran diri (masing-masing elite) yang memahami bahwa etnik

Mandar berada pada posisi terkalahkan dan terpuruk. Pikiran-pikiran individu tersebut memicu lahirnya tindakan sosial yang diletakkan berdasarkan tindakan individu. Artinya bahwa segala bentuk tindakan individu akhirnya diidentifikasi menjadi tindakan sosial berdasarkan interpretasi individu. Dengan demikian, segala tindakan tersebut telah menerjemahkan aktivitas *mind*, *self* dan *society*.

Akhirnya dapat diasumsikan bahwa konstruksi identitas etnik Mandar, merupakan tindakan kolektif (*collective action*) etnik berdasarkan pemikiran dan tindakan masing-masing elite. Elite sebagai individu merupakan bagian dari diri baik secara subjek maupun objek. Tindakan yang dilakukan oleh diri merupakan bentukan dari masyarakat. Dengan demikian, tindakan elite (sebagai diri) dalam mengonstruksi identitas adalah representatif dari bagian masyarakat (baca: komunitas) Mandar.

Secara singkat analisis di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Momen	Proses	Pemahaman Etnik Mandar
<i>Self</i>	Kesadaran diri (<i>self consciousness</i>)	Melahirkan kesadaran etnik, yaitu sebagai identitas yang membedakan etniknya dengan etnik lain, sekaligus kesadaran bahwa identitas yang dikonstruksi tersebut adalah pengikat antaretnik Mandar.
<i>Mind</i>	Penunjukan diri (<i>self indication</i>)	Melahirkan pemikiran bahwa etnik Mandar termarginal, hal ini disebabkan adanya kolonial internal yang dijalankan oleh etnik Bugis. Selain itu, etnik Mandar dianggap tidak mampu berkompetisi dalam sumber politik dan ekonomi. Pemikiran demikian yang berkembang kemudian dimobilisasi oleh elite dan diformulasi sebagai instrumen penunjukan diri untuk memperoleh kehormatan etnik dan sejarah.

Momen	Proses	Pemahaman Etnik Mandar
<i>Society</i>	Mengarah pada tindakan kelompok, yaitu perpaduan antara tindakan individu dan pemikiran diri (<i>self</i>).	Secepatnya mengonstruksi identitas etnik-nya melalui tindakan pengupayaan wilayah Mandar sebagai wilayah otonom. Tindakan tersebut sebagai wujud dari tindakan masing-masing elite (secara pribadi), atas pemikirannya terhadap kondisi etniknya.

Uraian diatas telah menjelaskan bagaimana pemikiran dasar Mead memahami fenomena konstruksi identitas etnik Mandar. Selanjutnya untuk mempertegas tradisi interaksi simbolik, penulis menguraikan analisis melalui pemikiran yang dikembangkan oleh Blumer.

6.4. Interaksi simbolik Blumer dalam Memahami Konstruksi Identitas Etnik Mandar

Herbert Blumer adalah murid Mead, gagasannya tentang psikologi sosial banyak dipengaruhi dari teori interaksi simbolik Mead. Namun demikian, Blumer memiliki kekhasan dalam pemikirannya. Blumer (1969) memandang interaksi simbolik sebagai suatu kumpulan dari suatu prosedur-prosedur interpretatif yang memungkinkan kita memberi arti interpretasi yang ditujukan terhadap interpretasi orang lain. Dalam hal ini, Blumer mengedepankan tentang interaksi. Menurutnya, interaksi merupakan proses kemampuan berpikir yang perlu dikembangkan dan diungkapkan. Semua jenis interaksi, memperhalus kemampuan untuk berpikir, karena berpikir menurut Blumer membentuk proses interaksi.

Kekhasan pemikiran Blumer, diwakili dalam tiga premis interaksi simbolik, yaitu: pertama, manusia bertindak atau merespons lingkungan (*thing*) berdasarkan makna yang dimiliki oleh komponen-komponen lingkungan bagi mereka; kedua, makna tersebut di-

peroleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, khususnya orang yang dianggap mempunyai arti penting (*significant others*); ketiga, makna sebagai hasil interaksi sosial disempurnakan melalui suatu proses penafsiran, dengan demikian tindakan manusia merupakan tindakan interpretatif, dalam arti manusia bertindak berdasarkan berbagai pertimbangan sehingga melahirkan perubahan perilaku.

Dalam kaitannya dengan konstruksi identitas etnik Mandar, ketiga premis tersebut menjadi tugas penulis untuk melakukan pembacaan ulang dalam menjelaskan fenomena di lapangan. Premis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tindakan yang dilakukan oleh etnik Mandar, dalam mengkonstruksi identitas etnik mengandung makna yang dalam. Tindakan yang diwujudkan dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat, terbangun dari makna yang berasal dari etnik Mandar sendiri (internal) dan makna yang berasal dari luar etnik Mandar (eksternal).

Dalam tataran makna internal, orang Mandar, menganggap tindakan tersebut dilatarbelakangi atas pemahamannya sebagai etnik yang terkalahkan dan termarginal. Diskriminasi struktural (*structural discrimination*) yang berkembang telah membedakan etnik Mandar dan etnik lain, melahirkan posisi dominan etnik Bugis. Respons yang diberikan atas persaingan politik menjadi tujuan dalam melepaskan hubungan mayoritas dan minoritas antara etnik Bugis dan etnik Mandar. Dominasi Bugis yang berlebihan dimaknai sebagai relasi kekuasaan yang timpang, struktur yang menempatkan Mandar sebagai etnik yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kemampuan daya saing.

Dalam makna eksternal, etnik lain menganggap bahwa di balik tindakan pembentukan provinsi Sulawesi Barat, selain merupakan

keinginan etnik Mandar lepas dari ketergantungan terhadap etnik dominan —yang menempatkannya sebagai etnik minoritas dan marginal— juga merupakan usaha pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dari elite yang mengkonstruksi. Keinginan memiliki kekuasaan etnik yang absolut (*absolute ethnic power*) di wilayahnya sendiri dimaknai sebagai bentuk dari konstruksi elite yang diasumsikan sebagai fenomena pembentukan provinsi etnik (*ethnic province*).

Kedua, makna yang terbangun dari interaksi sosial oleh *significant others*, merujuk pada pemahaman bahwa etnik Mandar tidak mampu mengembangkan kemampuan. Pemaknaan ini terinspirasi dari fenomena politik pada kasus pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 1992, saat itu dua calon dari etnik Mandar akhirnya harus tunduk pada aturan main (*the rule of game*) politik dari DPRD provinsi, terutama pada pembagian suara yang memberikan kemenangan mutlak bagi calon dari etnik Bugis.

Uraian dari informan penting (*significant others*) tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengadu kemampuan dua calon dari etnik Mandar, secara rasional pilihan akan dijatuhkan pada salah satu calon dari Mandar. Untuk menjadi seorang pemimpin, figur Baharuddin Lopa yang patut dipilih menjadi pemimpin, beliau dianggap tokoh yang sederhana, jujur dan sangat mencintai rakyat. Namun kenyataan berbeda, kekuatan elite penentu (Anggota DPRD) merelaya pemilihan tersebut. Hal ini menyebabkan dua calon etnik Mandar, Baharuddin Lopa dan Basri Hasanuddin takluk atas kemenangan Zainal B. Palaguna.

Pemaknaan Mandar sebagai etnik yang termaginal, dimobilisir elite sebagai instrumen *re-invention* identitas. Hal ini dimungkinkan agar Mandar menempati posisi yang setara dengan etnik lain. Artinya, apa yang diupayakan merupakan perjuangan memperoleh kembali kehormatan etnik (*ethnic honor*), dan yang terpenting ada-

lah membongkar relasi kekuasaan yang tidak setara untuk menciptakan stratifikasi sosial (*social stratification*) yang baru. Dengan demikian, segala upaya mensejajarkan kedudukan etnik Mandar dengan etnik-etnik lain di Sulawesi Selatan, adalah untuk mengurangi dan sekaligus menghindari sumber konflik (*conflict resource*) internal antaetnik Mandar dan etnik lain.

Tindakan konstruksi dimaknai sebagai hasil interaksi dengan dunia lingkungannya, sekaligus sebagai interaksi di dalam lingkungannya. Interaksi yang melahirkan tindakan konstruksi etnik Mandar disempurnakan melalui penafsiran atas fenomena, khususnya pada kompetisi politik yang tidak sehat. Kompetisi ini memudahkan etnik Bugis mencabarkan kekuasaannya tidak hanya di lingkungannya sendiri, tetapi juga di luar lingkungannya (wilayah Bugis).

Makna atas etnik marginal, patut untuk diketahui, tidak hanya dilihat dari pola interaksi dengan etnik lain, tetapi juga dalam interaksi antaretnik Mandar. Ketika proses konstruksi berlangsung, melibatkan kolaborasi perjuangan antarelite intelektual dan tradisional. Di tengah pembagian kekuasaan (*distribution of power*), kedua kekuatan itu bersilang pendapat, keduanya kukuh pada kekuatan masing-masing, hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dalam interaksi mereka.

Elite pejuang —sebagai peletak dasar pemikiran dan sekaligus penggerak konstruksi—, setelah membentuk provinsi harus menerima kenyataan dikesampingkan dalam sistem. Mereka sebagian besar berasal dari akademisi, tetapi tidak banyak berperan. Berkurangnya peran mereka, bukan disebabkan berkurangnya kecintaan terhadap *lita'* (tanah) dan *pa'banua* (rakyat), akan tetapi mereka dianggap kurang memiliki modal finansial untuk ikut berkompetisi dalam arena pemilihan gubernur Sulawesi Barat.

Pemilihan calon gubernur Sulawesi Barat merupakan interaksi antaretnik Mandar, realitas ini bermakna memarginalkan posisi elite pejuang. Selain karena faktor finansial, elite pejuang tidak mendapat tempat untuk mewakili partai politik. Mereka bukanlah anggota partai politik yang dapat mencalonkan diri, karena tidak ada partai politik yang berani melamar elite tersebut. Kendala struktural (*structural constraint*), dimanfaatkan oleh elite birokrat untuk memperoleh kedudukan melalui *bargaining position*. Mereka yang memiliki kemampuan finansial dicalonkan oleh partai-partai politik untuk ikut dalam pemilihan gubernur.

Bargaining position yang dijalankan elite, dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap elemen-elemen identitas Mandar. Elemen yang dipahami sebagai kepemilikan etnik dan sejarah menjadi sangat kabur. Hal ini terjadi ketika masing-masing pihak berusaha memperoleh kekuasaan. Makna kecintaan terhadap tanah Mandar (*maasyanni lita'*) dan kecintaan terhadap orang (*maasayanni pa'banua*) telah dikhianati oleh elite yang mengejar kekuasaan. Tidak ada lagi kebersamaan saat seperti identitas Mandar mulai dikonstruksi pemikiran awal saat identitas Mandar dikonstruksikan.

Pengaburan makna identitas, diasumsikan sebagai interpretasi bahwa kelompok elite yang mengejar kekuasaan tidak memaknai perjuangan secara mendalam. Makna tersebut hanya dipakai pada saat elite mengejar identitas semata, akan tetapi saat identitas itu dimiliki, tidak dijaga, dipelihara karena dalam hal ini wujud identitas tersebut sudah tidak merepresentasikan sepenuhnya sosok seorang Mandar. Perubahan makna tersebut menjadi pemikiran, bahwa terjadi transformasi identitas etnik (*transformation of ethnic identity*), terutama yang terkait pada persoalan kompetisi politik antarelite di Mandar.

Ketiga, konstruksi identitas etnik Mandar yang diwujudkan dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan serang-

kaian tindakan yang bermakna. Tindakan dari komunitas Mandar yang diwakili oleh elite merupakan bentuk yang oleh Blumer disebut sebagai tindakan interpretatif. Dikatakan demikian karena pembentukan provinsi merupakan bagian dari proses penafsiran yang panjang dari segala pihak, baik dari etnik Mandar sendiri maupun etnik di luar Mandar.

Tindakan interpretatif (*action of interpretative*) merupakan kolaborasi stimuli dari diri orang Mandar dalam memahami makna tentang etniknya, sekaligus stimuli dari luar lingkungannya. Stimuli-stimuli tersebut direspons oleh etnik Mandar yang diaplikasikan dalam bentuk tindakan yang diinterpretasikan sebagai suatu bentuk interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini, tindakan tersebut disesuaikan dengan tujuan, rencana dan pengetahuan yang dimiliki untuk mewujudkan apa yang diinginkannya.

Serangkaian tindakan tersebut pada dasarnya merupakan interpretasi dari *self indication* (penunjukan diri) dari orang Mandar. Tindakan yang disesuaikan dengan penilaian individu tersebut, sekaligus dapat menjadi instrumen dalam mengambil keputusan, sehingga dalam hal ini, menjadi orang Mandar berarti memiliki kesadaran dan selektif menyatukan objek-objek potensial yang ada dalam etniknya untuk kemudian diperkenalkan sebagai bentuk penunjukan diri. Artinya, dengan konstruksi identitas, etnik Mandar telah mampu menilai dan memberi makna pada tindakannya dan memutuskan tindakan yang terbaik sebagai penunjukan diri secara etnik dan politik.

Secara singkat analisis di atas dapat diidentifikasi dalam tabel berikut:

Momen	Proses	Lingkungan
Tindakan	Konstruksi identitas etnik terjadi melalui proses politik yang dikaitkan dengan pembentukan propinsi Sulawesi Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan provinsi Sulawesi Barat adalah hasil dari merespon makna Mandar yang berusaha menemukan kembali (reinventions) dari elemen-elemen identitas sebagai instrumen pengakuan etnik dan politik. - Pembentukan provinsi Sulawesi juga diupayakan melalui mobilitasi yang dilakukan oleh komunitas etnik Mandar yang selama ini merasa telah diabaikan oleh kekuasaan dominan Bugis serta oleh kekuasaan orde baru yang monolitik.
Makna	Konstruksi identitas etnik dipahami dua makna, yaitu makna internal dan makna eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> - Merespons makna Mandar yang dipahami sebagai etnik minoritas dan marginal akibat diskriminasi struktural yang berkepanjangan dan relasi kekuasaan yang tidak setara. - Respons etnik lain yang memahami akan adanya pembagian kekuasaan untuk <i>absolute ethnic power</i> dengan pembentukan provinsi etnik.
Tindakan Interpretasi	Penunjukan diri (<i>self indication</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi orang Mandar berarti memiliki kesadaran dan selektif dalam menyatukan objek potensial yang membangun keinginan mereka dalam mengonstruksi identitasnya. - Menjadi orang Mandar berarti mampu menilai dan memberi makna pada tindakannya sebagai wujud atas penunjukkan diri secara etnik dan politik.

Catatan

- 1 Pada awalnya, istilah mayoritas sebenarnya lebih dikenal dalam konsep politik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan. Kita sering menyebutnya sebagai mayoritas absolut (dalam Pemilu) di mana kemenangan ditentukan (lazimnya) oleh lebih dari 50% suara, karena jumlah suara itu sangat menentukan jumlah posisi atau wakil politik di lembaga legislatif.

7

Simpulan dan Implikasi Teoretik

Bagian ini menguraikan dua hal yaitu: simpulan dan implikasi teoretik. Kedua bagian tersebut diuraikan lebih lanjut.

7.1. Simpulan

Secara umum, tulisan ini menemukan kenyataan bahwa formasi identitas Mandar terjadi melalui proses politik yang sangat terkait dengan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Dengan kata lain, formasi identitas Mandar pertama-tama merupakan bentuk mobilisasi politik berbasiskan identitas etnik yang sebelumnya ditekan (*suppressed*) bahkan diabaikan (*neglected*) oleh kelompok dominan etnik Bugis dan sampai batas tertentu oleh kekuasaan Orde Baru yang bersifat monolitik. Walaupun memiliki dua dimensi yang bercampur aduk, adalah sangat jelas bahwa respons terhadap marginalisasi merupakan dasar terpenting dari usaha menemukan kembali (*reinvention*) elemen-elemen pokok yang membentuk identitas Mandar sebagai sebuah konstruksi politik dan sosial.

Usaha untuk menemukan kembali elemen-elemen pokok identitas Mandar di satu pihak dan membangun kesadaran baru akan keabsahan klaim atas “pemisahan teritori” (*territorial secession*) dilakukan melalui dua cara dengan arah yang berbeda secara berhadapan. Pertama, melalui apa yang sering disebut dengan “mengunjungi kembali” (*revisiting*) akar sejarah yang bersifat khusus. Kekhususan sejarah (*historical specificity*) yang di dalamnya melibatkan klaim atas kemandirian wilayah (*territorial autonomy*) dan kesetaraan berbasiskan kedaulatan etnik (*equality based on ethnic sovereignty*) merupakan dua pilar penting yang dirujuk untuk membangun kesadaran kritis di antara kelompok etnik Mandar dan meletakkan argumentasi penyokong dalam rangka memenangkan perjuangan keluar dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat yang terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan. Kenyataan bahwa Mandar merupakan salah satu wilayah afdeling di masa kolonial dan posisi etnik Mandar terhadap relasi kekuasaan di antara kerajaan Gowa, kerajaan Bone, dan kerajaan Luwu pada masa prakolonial adalah dua peristiwa sejarah yang dipakai untuk membangun dua pilar penting itu.

Kedua, dikembangkannya kepercayaan bahwa masa depan Sulawesi Barat yang lebih baik dapat dibangun hanya melalui pemisahan diri dari provinsi Sulawesi Selatan adalah klaim lain yang digunakan untuk memperkuat dukungan pembentukan provinsi baru berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Sementara cara pertama menekankan kesadaran akan “autentisitas” (*authenticity*) berbasiskan “warisan sejarah” (*legacy of history*) yang bersifat eksklusif, cara kedua menekankan akan masa depan bersama (*common future*) yang bersifat inklusif dan modern.

Dengan demikian, adalah jelas bahwa seluruh proses konstruksi identitas Mandar adalah hasil dialektika di antara penemuan

“lama” dan “baru” yang di dalamnya juga menyertakan makna yang dimobilisasi berdasarkan proses negosiasi dan renegosiasi atas pengalaman kolektif dan individual dari dan di antara mereka yang secara langsung maupun tidak terlibat dalam proses itu. Ini berarti bahwa, apa yang dikandung secara aktif maupun pasif dalam identitas Mandar bukanlah proses yang sekali jadi, apalagi final. Dengan mengatakan seperti ini, ini juga berarti bahwa proses formasi identitas Mandar senantiasa melibatkan kompetisi makna di antara yang terucap dan tidak (*stated and unstated*), yang dinyatakan dan tidak (*declared and undeclared*), yang dimaksudkan dan yang tidak (*intended and unintended*), dan di atas semua itu di antara yang dipublikasikan dan yang disembunyikan (*go-public and being hidden*).

Selain bahasa, agama, dan tradisi, identitas etnik Mandar sangat terkait dengan kepercayaan pokok akan pentingnya apa yang oleh mereka sendiri disebut dengan “kecintaan terhadap tanah Mandar” (*maasayanni lita*) dan “kecintaan terhadap orang Mandar” (*maasayanni pa’banua*). Sentimen yang melibatkan ikatan emosional terhadap tanah (*land*) dan orang (*people*) adalah salah satu penanda penting identitas Mandar. Catatan terpenting saya dalam ihwal ini adalah, walaupun kecenderungan untuk menekankan sentimen yang kuat kepada dua hal tersebut merupakan hal yang cukup umum ditemukan dalam berbagai kelompok etnik lainnya, terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ikatan itu dirajut kembali untuk dan dalam kerangka pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Sangat jelas bahwa subjek yang diteliti terlihat sangat menekankan pentingnya ikatan emosional itu dan, lebih penting dari itu, ketika mereka menggunakannya sebagai instrumen politik untuk menguatkan klaim atas pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, juga sangat penting untuk dicatat di sini bahwa identitas etnik Mandar yang baru atau yang diperbaharui itu juga

melibatkan usaha untuk membangkitkan kembali dan mengintegrasikan sentimen sejarah yang mengaitkan ke-Mandar-an dengan semangat pembebasan (*spirit of liberation*) dari segala bentuk dominasi dan marginalisasi. Kepahitan akan peristiwa sejarah yang melibatkan konspirasi politik di antara Pemerintah Kolonial dan Kerajaan Bone di masa lalu untuk menaklukkan dan menguasai konfederasi empat belas kerajaan yang merupakan gabungan dari “*Pitu Ba’bana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*” dipakai sebagai landasan untuk membangkitkan “semangat pembebasan” dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Menjadi orang Mandar dalam konteks saat ini berarti meneguhkan kembali kehendak kolektif untuk membebaskan diri dari dominasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh kelompok etnik Bugis. Lebih penting dari itu, menjadi orang Mandar ini berarti juga sebagai pengalaman ketertidasan yang membawa dampak keteringgalan etnik Mandar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, pada akhirnya konteks ini memperkuat pentingnya identitas secara politik dan sosial bagi komunitas etnik Mandar.

Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa, sebagai sebuah konstruksi sosial, identitas etnik Mandar adalah sebuah *project identity* yang berkedudukan melampaui dan di atas (*beyond and above*) *resistance identity* yang dikembangkan dengan orientasinya yang kuat pada usaha untuk membangun kembali martabat sosial (*social dignity*), kehormatan (*honour*), kemandirian (*independence*), otonomi (*autonomy*), kesetaraan (*equality*), dan kemerdekaan (*freedom*). Sebagai sebuah *project identity*, adalah sangat jelas bahwa formasi identitas etnik Mandar adalah sebuah respons politik, sosial, kultural, dan sejarah terhadap realitas etnisitas yang di dalamnya menyeratakan juga transformasi atas relasi kekuasaan di antara kelompok etnik dominan Bugis dan kelompok etnik Mandar. Ini berarti bahwa di dalam formasi identitas terkait pula transformasi dan mobilitas

sosial yang mencoba membongkar kembali relasi kekuasaan yang tidak setara untuk menghasilkan stratifikasi sosial baru.

Menandai *project identity*, konstruksi identitas etnik Mandar terbangun sebagai *collective action* yang mengasumsikan bahwa identitas merupakan kompleksitas dari dimensi individu dan dimensi kolektif. Selain itu, atas revitalisasi identitas yang dirajut dan dikembangkan kembali merupakan definisi dan re-definisi proyek individu dalam berbagai kemungkinan melakukan tindakan kolektif secara terbuka dan tertutup. Atas tindakan konstruksi yang dibangun oleh etnik Mandar, maka identitas adalah proyek politik dan pribadi yang melibatkan aktor terlibat untuk berpartisipasi atau bahkan memobilisasi, sehingga dalam hal ini, identitas tidak hanya berfokus pada kajian psikologis dari proses sosial, tetapi juga dimaknai sebagai *re-invented* hasil dari proses kolektif.

Dengan demikian, sebagai sebuah identitas, Mandar adalah sebuah konstruksi sosial, politik, kultural, sejarah dan etnik sekaligus. Lebih dari itu, tulisan ini juga memperlihatkan bahwa konstruksi identitas etnik Mandar tidak hanya mengedepankan kekhususan (*specifity*) dan kekhasan (*peculiarity*) etnisitas yang bersifat partikular (seperti misalnya bahasa, agama, tradisi, dan keterikatan emosional terhadap tanah dan orang Mandar) melainkan juga pada nilai-nilai umum yang bersifat universal (seperti misalnya kemandirian (*independence*), otonomi (*autonomy*), kesetaraan (*equality*), dan kemerdekaan (*freedom*). Dengan demikian, dalam konteks Mandar, identitas tidak saja berfungsi sebagai penanda, pembeda, dan sebagai institusi sosial yang menciptakan solidaritas dan integrasi sosial si antara anggota kelompok etnik Mandar, namun juga berfungsi secara aktif sebagai “pengada”.

Dalam ihwal yang disebut terakhir ini, identitas Mandar menstrukturkan kesadaran dan sentimen sosial baru yang menegaskan

keberadaan etnik Mandar dalam relasinya yang lebih membebaskan dengan etnik lainnya, terutama Bugis. Dalam fungsinya sebagai “pengada”, identitas etnik Mandar secara aktif menciptakan realitas baru dalam hubungan antar-etnis yang di dalamnya juga mengimplikasikan struktur dan relasi kekuasaan yang baru. Berbeda dalam fungsinya sebagai penanda, pembeda, pemelihara solidaritas dan integrasi sosial, identitas Mandar dalam fungsinya sebagai pengada melibatkan sebuah proses sosial yang mengubah secara radikal hubungan mayoritas dan minoritas yang sebelum terjadinya pembentukan provinsi Sulawesi Barat menandai hubungan di antara kelompok etnik Bugis dan Makassar. Terbentuknya provinsi Sulawesi Barat secara jelas telah mengubah arah hubungan itu.

Walaupun memiliki dimensi sosial, kultur, sejarah dan etnik, tetapi yang jelas pembentukan provinsi Sulawesi Barat lebih merupakan penguatan dari konstruksi identitas politik yang di dalamnya melibatkan reduksi dan manipulasi yang dimainkan oleh elite, hal ini ditandai dengan kemampuan kelompok etnik Mandar mengakumulasi tekanan-tekanan politik sebagai instrumen transformasi kekuasaan dari kekuasaan politik yang dikendalikan menjadi kekuasaan politik yang absolut dan otonom. Tidak hanya itu, melalui konsensus yang menempatkan Mamuju sebagai ibu kota provinsi, dengan tidak secara eksklusif mempertahankan nama “Mandar” sebagai nama provinsi tetapi dengan nama provinsi Sulawesi Barat, jelas memperlihatkan kuatnya kompromi politik dari kelompok Mandar untuk secepatnya pisah dari provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi yang penduduknya berjumlah 1.102. 878 jiwa ini memiliki etnik terbesar Mandar (sekitar 50%), Bugis (sekitar 15%), Makassar (sekitar 5%), Jawa (sekitar 10%), lainnya (sekitar 20%). Walaupun jumlah bukanlah segala-galanya dalam menentukan relasi kekuasaan di antara etnik yang berbeda, adalah jelas bahwa jum-

lah yang besar dan wilayah yang dapat diklaim sebagai teritori etnik memberikan dasar yang luas dan sering kali kuat tidak hanya bagi terjadinya teritorialisasi identitas, tetapi juga re-teritorialisasi identitas yang di dalamnya melibatkan transformasi mandat dan relasi kekuasaan di antara dua kelompok etnik itu, yakni Mandar dan Bugis di satu pihak dan di antara etnik kelompok etnik lainnya di pihak lain.

Ini berarti bahwa formasi identitas Mandar selanjutnya akan ditentukan oleh bagaimana kelompok ini secara resiprokal memahami etnisitas mereka sendiri dan kelompok etnik lainnya. Dengan menyebut semua itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa formasi identitas etnik yang sangat terkait dengan pembentukan provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebuah tahap perkembangan awal dari penstrukturan kembali identitas kelompok Mandar dan kelompok etnik lainnya yang selain mengimplikasikan politik perbedaan (*politics of difference*) juga menegaskan divisi sosial (*social division*) dan ketidaksetaraan (*inequalities*) baru dalam konteks praktik sosial yang senantiasa berubah.

7.2. Implikasi Teoritik

Tulisan ini mencoba memahami dinamika politik lokal yang terjadi pada salah satu komunitas etnik di Sulawesi. Pada dasarnya, studi ini diarahkan untuk menjelaskan fenomena politik identitas yang terjadi pada masyarakat etnik Mandar. Tulisan ini difokuskan untuk menganalisis teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan fenomena di lapangan, yaitu suatu kondisi yang menitik-beratkan pada pentingnya suatu identitas dikonstruksikan sebagai instrumen ‘penanda’ pengikat sesama etnik atau sebagai “pembeda” dengan etnik yang lain, sekaligus sebagai ‘pengada’ suatu kelompok etnik dalam ranah politik.

Penekanan kerangka teori terutama datang dari pemikiran Bradley (1997), Hale (2004), dan Castell (2004) yang menitik beratkan pada kajian identitas etnik. Castell menguraikan bahwa kajian identitas dapat dibidik melalui kacamata *resistance identity* dan *project identity*. Pemikiran *resistance identity* memandang bahwa kecenderungan identitas dimunculkan dari kelompok minoritas, termarginal, dan didevaluasi oleh kelompok dominan. Sedangkan *project identity* menitikberatkan pada identitas tandingan yang dibangun (baca: dikonstruksi) dengan antusias oleh kelompok tertentu yang menginginkan otonomi dan lepas dari jeratan masa lampau. Dalam hal ini kedua hal itu terkait dengan transformasi identitas yang dibangun untuk menghasilkan perubahan.

Sementara itu, Hale menawarkan dua pendekatan dalam melihat identitas etnik yaitu primordialisme dan konstruktivis. Dalam hal ini, pendekatan konstruktivis dipakai sebagai pijakan untuk menelusuri fenomena konstruksi identitas etnik di Mandar, karena implikasi pendekatan ini menekankan konstruksi kesadaran kelompok merespons segala tekanan dan perlakuan pilih kasih kelompok dominan untuk membangun kesadaran baru sebagai kelompok yang diperhitungkan. Sedangkan Bradley mengkategorikan bahwa etnisitas menjadi salah satu sumber dari keberahanan suatu identitas, dalam prosesnya yang dicermati adalah kepentingan kelompok untuk menjaga, mengamankan (*securitization*) agar identitasnya eksis. Upaya yang dilakukan kelompok tersebut adalah untuk menghindari bahkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan, divisi sosial dan perbedaan.

Analisis kualitatif yang digunakan merujuk pada tradisi interaksi simbolik. Suatu tradisi yang digunakan yang bertolak pada tiga premis. Pertama, individu (aktor) merespons situasi simbolik, merespons lingkungan berdasarkan makna sehingga individu sa-

ngat menentukan lingkungan mereka sendiri. Kedua, individu (aktor) membayangkan dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain merespons tindakan mereka lakukan. Ketiga, makna dari produk interaksi sosial, dapat berubah lewat interpretasi individu ketika situasi interaksi sosial berubah.

Perspektif konstruktivistis lebih dikedepankan pada tulisan ini, menyebutkan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Dalam hal ini, individu bukanlah entitas yang ditentukan oleh realitas sosial di luar dirinya, tetapi agen kreatif yang memproduksi sekaligus mereproduksi serta mengkonstruksi dunia sosialnya. Dengan demikian, peran individu sebagai agen konstruksi dapat menjelaskan dinamika politik identitas etnik pada komunitas etnik yang sedang dikaji.

Berdasarkan perspektif yang telah diuraikan, tulisan ini memperlihatkan empat temuan yang membawa implikasi pada teori sosial, antara lain:

Implikasi pertama, masa depan konsep identitas, terutama yang mengaitkan pada pendekatan etnik akan memiliki kelemahan jika penekanannya lebih pada pemahaman etnik secara primordial. Karena pemahaman seperti ini akan memudahkan terjadinya konflik. (Rothchild, 1981: 2; Triyono, 2003: 27). Kecenderungan konflik biasanya terjadi karena tingginya sentimen etnik, sehingga terkadang kelompok etnik sulit untuk dapat berinteraksi dengan kelompok etnik lain. Selain itu, secara primordial etnik yang terlibat dalam kompetisi politik, ekonomi, sosial dan budaya mendorong penguatan identitas dan emotional appeal kelompok etniknya.

Ikatan primordial terhadap etnik oleh McKay (1982) dipercaya dapat dihubungkan dengan ikatan mobilisasi. Keduanya secara

teoretis sebagai manifestasi dari makna-makna etnisitas. Apa yang disandang oleh primordial menjadi instrumen bagi aktor dalam mengaktualisasikan simbol etnik melalui mobilisasi demi kepentingan etniknya. Etnisitas dalam hal ini berfungsi sebagai atribut budaya yang membedakan dengan komunitas lain, sehingga menjadi sesuatu yang dicari kembali (*reinvented*) dan ditafsirkan kembali (*reinterpreted*) dari generasi ke generasi. Dengan demikian, etnisitas merupakan proses yang dinamis dan berkembang sepenuhnya melalui perjuangan panjang.

Implikasi kedua, walaupun identitas etnik yang dirajut mengatasnamakan sentimen etnik dan/atau loyalitas etnik, akan tetapi kenyataannya dipahami sebagai kesadaran diri (*self consciousness*) etnik selanjutnya sebagai langkah dalam penunjukan diri (*self identifications*) identitas etnik. Dalam ihwal tersebut, tulisan ini jelas menemukan, sekurang-kurangnya tiga kategori fungsi identitas, yaitu sebagai ‘penanda’, ‘pembeda’ dan ‘pangada’ yang di dalamnya memiliki kaitan (*linkage*) dengan proses solidaritas dan integrasi sosial.

Implikasi ketiga, konsep identitas tidak dapat dimaknai secara personal dan lokal saja, lebih dari itu, identitas juga bersifat situasional dan global. Dalam situasi tertentu, identitas merupakan representatif dari konstruksi sosial, politik, kultur, sejarah dan etnik yang tidak hanya terjadi pada suatu wilayah saja tetapi juga dapat terjadi pada wilayah lain. Kenyataan bahwa pemekaran wilayah menunjukkan realisasi dari bentuk pengakuan identitas etnik (*confession ethnic of identity*), dan yang lebih penting, sebagai pengakuan identitas politik (*confession politics of identity*). Pembentukan provinsi merupakan respon terhadap peluang yang diberikan pemerintah untuk memekarkan wilayah sebagai daerah administratif dan sekaligus memperlihatkan tidak hanya terjadi teritorialisasi identitas, tetapi juga re-teritorialisasi identitas.

Implikasi keempat, konstruksi identitas politik etnik terjadi dan bahkan berlangsung dalam proses interaksi antar sesama etnik ataupun antaretnik yang lain. Interaksi yang kontinu, dalam batas-batas tertentu membawa implikasi dalam pola hubungan penciptaan stereotip, baik stereotip negatif dan positif, dan semakin lama berkembang menjadi bentuk prasangka-prasangka (*prejudice*) positif dan negatif pula. Dalam situasi yang demikian, aktor yang terkalahkan dalam politik etnik, biasanya memanfaatkan isu etnisitas guna melancarkan siasat dalam tindakan politiknya. Bentuk tindakan tersebut, dalam konteks identitas dipahami oleh Sparringa (2005) sebagai konstruktivis-interpretivis yang menyatakan bahwa identitas adalah hasil dari sebuah konstruksi politik dan sosial yang dipercaya sebagai sumber dan sekaligus membentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjek dan inter-subjektif.

Dengan demikian, apa yang telah diuraikan dalam implikasi di atas tersirat adanya pemahaman dan kesadaran bahwa identitas penting untuk diupayakan selain sebagai alat penegasan pembeda dengan etnik lain, juga mengekspresikan diri akan kemampuan etniknya. Penegasan identitas membuktikan bahwa etnisitas tidak hanya menjadi simbol identitas seseorang -sebagai alat pembeda- tetapi dapat sekaligus sebagai instrumen pengikat solidaritas dari suatu komunitas etnik. Dengan kata lain, etnisitas tidak hanya dikenakan pada ranah individu tetapi juga pada ranah publik. Konstruksi identitas Mandar yang menerjemahkan pemikiran Castell jelas menunjukkan bahwa identitas muncul karena adanya resistensi dari kelompok minoritas dan termarginal atas dominasi yang sangat kuat dari kelompok mayoritas. Dengan kondisi yang demikian, komunitas etnik mudah untuk melakukan *project identity* dengan mengarahkan pada transformasi dan mobilitas sosial agar relasi kekuasaannya seimbang.

Temuan tulisan ini sangat jelas selain menegaskan *resistance identity* juga *project identity* yang didukung oleh pandangan konstruktivis etnik, yang menilai bahwa etnik merupakan sumber penting identitas karena posisinya dapat memproduksi kesadaran aktif dari aktor-aktor politik dari kelompok etnik. Kesadaran tersebut tumbuh akibat posisi etnik yang terkadang kurang menguntungkan dan pemanfaatan identitas secara politik biasanya dilakukan untuk memperoleh kepemilikan etnik dan sejarah. Bersamaan dengan hal tersebut, aktor-aktor memiliki kepentingan lain yang mengatasnamakan etnik.

Kenyataannya bahwa melalui pendekatan konstruktivisme ini suatu identitas etnik dikonstruksi dan diciptakan secara aktif dengan tujuan untuk dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok agar memperoleh akses-akses politik dan sosial. Mereka yang mengkonstruksi biasanya memperkenalkan simbol-simbol etnik sebagai instrumen untuk membentuk dukungan emosional dari segenap pihak. Dukungan yang diperoleh biasanya melontarkan berbagai alasan praktis dan dibaliknya terdapat kepentingan-kepentingan tertentu.

Sementara itu, ditempatkan dalam ranah politik, dalam tulisan ini sangat jelas memperlihatkan implikasi dari kajian politik perbedaan (*difference*) atau politik identitas. Dalam pandangan Foucault, kajian ini disebut dengan politik wacana (*politic of discourse*) dan bio-politik. Disebut sebagai politik wacana karena identitas yang dikonstruksi berasal dari komunitas etnik marginal yang menginginkan persamaan. Perbedaan etnik diletakkan dalam konteks siasat menjadikan mereka berada pada posisi berkompetisi, yakni etnik Bugis yang bersaing (baca: sangat dominan) dengan etnik lain, khususnya Mandar. Posisi keduanya menjadikan orang Mandar memahami bahwa dirinya sebagai etnik kelas empat, hal ini menjadi titik awal

untuk menolak kondisi tersebut, bahkan dijadikan pijakan memperkuat identitas etnik, memproduksi, dan mereduksi strategi untuk perlawanan (baca: lepas dari etnik dominan). Dengan demikian, posisi tersebut mengintegrasikan etnik sebagai satu komunitas yang utuh.

Disebut sebagai bio-politik, karena fokusnya pada entitas kelompok yang berusaha memperoleh hak-haknya agar dapat dikenal, dan dihargai. Dalam pandangan ini, tindakan yang memanfaatkan etnisitas oleh elite Mandar sebagai bentuk negosiasi untuk mendapatkan hak-hak etnik dan politik. Walaupun telah banyak fenomena yang memisahkan hak-hak tersebut antara etnik dominan dengan Mandar, akan tetapi persetujuan tersebut tidak mengarah pada pembersihan etnik (*genocide*). Hak-hak yang diperjuangkan berlandung kepada elemen identitas, suatu makna dan simbol komunitas etnik yang harus dikenal dan dihargai. Dengan demikian, identitas dapat menjadi instrumen pembeda antaretnik satu dengan lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam identitas politik etnik Mandar. Analisis yang dilakukan menerjemahkan pemikiran *collective action* dari Porta, yang didasarkan pada pengalaman dan tindakan kolektif konstruksi identitas etnik, terutama pada perspektif interaksi simbolik. Tulisan ini menemukan kenyataan bahwa konstruksi yang dilakukan elite sebagai bentuk *collective action* tidak hanya melibatkan kepentingan elite saja, tetapi juga membawa nilai-nilai sekaligus common historis yang sengaja dikedepankan. Ketegangan yang berujung pada *re-invented* identitas diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan aktor (elite) selain mengenal diri mereka sendiri juga bertujuan untuk dapat dikenali oleh aktor yang lain sebagai komunitas yang lebih luas. Dalam hal ini identitas yang dikonstruksikan tersebut tidak merupakan objek otonom tetapi sebuah proses yang panjang.

Dalam hal ihwal yang diuraikan terakhir, identitas yang dikonstruksi diterjemahkan sebagai kompleksitas dari kepentingan individu dan kolektif, dalam hal ini melibatkan pemeliharaan dan bahkan revitalisasi identitas sekaligus mendefinisikan dan meredefinisikan proyek individu dari berbagai kemungkinan sebagai tindakan kolektif yang terbuka atau tertutup. Dengan demikian, identitas merupakan proyek politik individu dan kolektif yang melibatkan aktor (elite) untuk berpartisipasi lebih banyak, sehingga identitas dimungkinkan sebagai re-invented hasil dari proses kolektif.

Melalui perspektif interaksi simbolik, tulisan ini memperlihatkan adanya negosiasi dan renegotiasi yang dibangun dari individu yang satu dengan individu yang lain bahkan komunitas etnik yang satu dengan lain. Biasanya individu dan kelompok tersebut menempatkan diri pada konsep diri (*self*) baik sebagai subjek dan objek sekaligus. Dalam kaitannya dengan ihwal ini, subjek mampu mencapai kesadaran diri (*self consciousness*) dan mengambil sikap yang objektif untuk dirinya dan kelompoknya, juga untuk situasi di mana dia bertindak.

Sementara itu untuk menghubungkan dengan interaksi simbolik, Porta menyebutkan bahwa tindakan kolektif (*collective action*) dalam identitas menghadirkan pemaknaan 'we' dan 'other'. We diterjemahkan sebagai penanda 'common traits' dan solidaritas spesifik suatu komunitas. Konstruksi yang dihadirkan oleh komunitas Mandar adalah bentukan dari *common traits* untuk lepas dari provinsi induk, sehingga identitas menjadi alat pengikat solidaritas bersama. Sedangkan dalam pemaknaan 'other' tindakan kolektif identitas menerjemahkan bagaimana kekuatan strategi yang dilakukan oleh elite dalam membangun wacana marginalisasi dan minoritas pada etnik Mandar. Dalam hal ini, elite memiliki *responsibility* terhadap wacana yang dikembangkan untuk kemudian melakukan mobilisasi terhadap masyarakat.

Akhirnya melalui tindakan pembentukan provinsi, para elite melakukan sejumlah strategi untuk memenangkan dan menetapkan identitas secara utuh. Hal itu berarti membangun (baca: mengonstruksi) dan memanfaatkan wacana “marginal etnik” menjadi “loyalitas etnik”. Koalisi elite dibentuk atas dasar kepentingan kelompok tertentu. Kemampuan elite mengkonstruksi elemen identitas etnik merupakan *re-grouping cultural* atas dasar wilayah. Situasi tersebut mempresentasikan wajah teritorialisasi dan re-teritorialisasi identitas, yaitu pemisahan wilayah dengan tujuan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini memperlihatkan betapa wajah project identity dan collective action telah membangun kesadaran kelompok dalam menciptakan perubahan pada masyarakatnya sebagai wujud transformasi identitas.

Serangkaian tindakan konstruksi menunjukkan bagaimana-pun elite-elite memaknai identitas etnik dalam arena politik lokal baik di Sulawesi Selatan (sebelum dimekarkan) ataupun di Mandar (setelah terbentuk provinsi Sulawesi Barat), pada dasarnya adalah bentuk loyalitas anggota etnik terhadap komunitasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor etnisitas menjadi pengaruh kesetiaan dan perilaku politik individu ataupun kelompok. Dalam tulisan ini, temuan empiris terhadap segenap upaya elite mengonstruksi identitas memperlihatkan adanya peneguhan dan penyempurnaan konsep-konsep yang ditawarkan Bradley, Hale, Castell ataupun Porta dengan memakai hubungan interaksi simbolik.

7.3. Implikasi Temuan bagi Politik Lokal di Indonesia

Pemekaran wilayah untuk membentuk suatu kabupaten/provinsi baru merupakan suatu fenomena umum yang bukan saja terjadi di Sulawesi Barat, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi atau kabupaten di Indonesia, seperti Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo.

Dalam pemekaran wilayah yang selalu dikonstruksi sebagai alasan utama adalah memperbesar isu identitas etnik untuk memperoleh pengukuhan politik baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah induknya (provinsi/kabupaten kota) yang menjadi induk dari daerah yang dimekarkan. Tampaknya terjadi reduksi dan manipulasi dari elite-elite yang mengonstruksikan pembentukan provinsi/kabupaten baru.

Tulisan ini jelas menemukan politik etnik Mandar dalam upaya mengonstruksi identitasnya melalui proses politik melalui pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Implikasi lain dalam tulisan ini adalah saran-saran praktis dan teknis implementatif guna pengurangan diskriminasi struktural (*structural discrimination*) dan stereotip kultur serta memperkuat pemahaman multikulturalisme. Kontribusi ini ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha membangun teritorialisasi identitas terutama pembentukan daerah baru. Kontribusi yang dimaksud, ada tiga, yaitu:

Pertama, menciptakan kondisi struktural yang menjamin heterogenitas komunitas, terutama mengurangi bentuk-bentuk rasisme institusional dengan tidak membatasi ruang gerak suatu kelompok etnik tertentu baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya ataupun politik. Kontribusi ini merupakan refleksi dari temuan studi ini, bahwa penyebab mendasar pembentukan provinsi Sulawesi Barat adalah kondisi struktural dalam proses demokrasi, pembangunan dan perubahan dalam *power* struktur politik pemerintahan tidak adaptif terhadap heterogenitas etnik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengurangi kondisi seperti itu sepatutnya dilakukan: (1) menciptakan *politics insecurity* lebih luas, utamanya bagi semua komunitas etnik dalam suatu wilayah. Misalnya dengan tidak membatasi ruang gerak politik satu etnik, memberikan kesempatan semua

komunitas etnik terlibat dalam politik lokal yang sehat, melakukan konsolidasi dan kompromi politik yang menguntungkan semua etnik. (2) membangun kembali pranata sosial dengan tidak menciptakan stratifikasi antaretnik, mengurangi dominasi politik satu etnik, serta menghilangkan hubungan mayoritas dan minoritas. Misalnya melalui upaya peningkatan kapasitas kemampuan dan kekuasaan formal bagi pemimpin semua komunitas, memfasilitasi terbentuknya forum dialog antaretnik dan tetap menyosialisasikan nilai dan tradisi yang mempersatukan semua komunitas, Misalnya tetap menjalin hubungan harmonis antaretnik seperti kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dahulu sebelum kedatangan kolonial Belanda.

Kedua, untuk wilayah dengan heterogenitas etnik, sebaiknya mengurangi bentuk-bentuk stereotip, terutama yang terkait pada sentimen etnik yang berlebihan. Dikembangkan suatu kondisi pencitraan yang baik bagi semua pihak, hal itu dapat dicermati melalui dua cara : (1) tidak menyingkirkan status dan peran sekelompok orang dari hubungan pergaulan serta komunikasi antaretnik. Misalnya, tidak membuat jarak dan memisahkan tempat tinggal mereka. (2) dikembangkan pemeliharaan situasi damai. Situasi yang damai seharusnya tetap dipelihara, karena biasanya, pada batas-batas tertentu kondisi ini menjadi isu penyebab konflik antaretnik. Upaya jangka panjang dengan melakukan pencegahan dini tindakan eskalasi kekerasan etnik secara horizontal maupun vertikal, lebih penting dari itu, pemberian dalam penggunaan kekuasaan dan hukum informal, yaitu dengan jalan menggunakan sanksi budaya dan tradisi yang dikendalikan oleh pemimpin komunitas masing-masing etnik terhadap anggota etnik yang melakukan tindakan kekerasan etnik baik secara fisik dan non fisik.

Ketiga, perlunya segenap pihak memahami arti multikulturalisme, karena gagasan ini melatarbelakangi “*common future* dan *com-*

mon culture” Karena konsep ini telah memberi ruang pada daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah untuk mencapai dua kebutuhan sekaligus, yaitu memeliharanya kemajemukan dan integrasi (*integration*) di tingkat masyarakat yang heterogen, dan memelihara persatuan (*unity*) yang berkelanjutan setelah terbentuknya wilayah baru. Dalam tulisan ini, apa yang disandang oleh multimulturalisme, sangat jelas memperlihatkan kerangka mengunjungi kembali (*revisiting*) dan menemukan kembali (*reinventing*) selain gagasan-gagasan nilai dan tradisi budaya yang bersifat partikular, juga nilai-nilai yang bersifat universal. Dengan kata lain, bagaimanapun kelompok etnik dan budaya yang berbeda denominasinya di satu pihak dapat memiliki kesanggupan memelihara identitas kelompoknya dan di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima pluralisme dan toleransi (mengakui dan menghormati perbedaan). Dengan demikian, pembentukan daerah administratif seharusnya tidak mengenyampingkan konsep multi-kulturalisme, dan bahkan mungkin dapat dijadikan sebagai agenda khusus sebelum membentuk daerah otonom.

Daftar Pustaka

Daftar Buku

- Abidin, Zainal, 1980, *Lontara Sebagai Sumber Sejarah terpendam*.
Makassar: LPH Unhas.
- Abdillah, Ubed., 2002, *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*, Magelang: Indonesiaterra
- Agger, B., 2003, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Alcoff, L.M and Mendieta., 2003, *Identities; Race, Class, Gender and Nationality*, Blackwell Publishing Ltd.
- Alfian., 1998, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia
- Alvesson, M. and Skoldberg, K., 2000, *Reflexive Methodology New Vista for Qualitative Research*, London: SAGE Publications
- Andrain, Charles., 1992, *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*,

- Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- and Apter, D., 1995, *Political Protest and Social Change Analyzing Politics*, Washington: New York University Press.
- Andaya, 1979, *A Village Perception of Arung palakka and The makassar War of 1966-1969 dalam Perception of the Past in Southeast Asia* ed, Anthony Reid dan David Marr. Singapore: Heineman Educational Books
- Antoni, Juli (ed)., 2002, *Living Together in Plural Societies: Pengalaman Indonesia-Inggris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azevedo, J., 1997, *Mapping Reality an Evolutionary Realist Methodologi for the Natural and Social Science*, New York: State University Press.
- Bailey, K., 1978, *Method of Social Research*, New York:The Free Press, hal 31-32.
- Barth, Fredrik., 1988, *Kelompok Etnik dan Batasan ya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Barker, C., 2000, *Cultural Studies Theory and Practice*, London: SAGE Publications.
- Baso, Ahmad, 2002, *Plesetan Lokalitas Politik Pribumi Islam*, Jakarta: Desantara.
- Becker, Howard, 1961, *Boy in White: Student Cultural in Medical Scholl*. Chicago: University Press
- Bell, Daniel, 1976, *Ethnicity and Social, dalam Glazer & Moynihan* (ed), *Ethnicity, Theory and Experience*, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
- Beilharz, Peter (ed)., 2002, *Social Self, Global Culture*, Oxford University Press Australia.

- Berger, P. and Luckman., T.,1990, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES.
- , 1994, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES
- , 1992, *Kabar Angin Dari Langit Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta LP3ES
- Berg, B., 1998, *Qualitative Research Methods for the Social Science*, Singapore: Allyn and Bacon
- Beyme, Klaus, 1996, *Biopolitics, Ideologies and Their Impact on The New Social Movement*, Brookfield, USA:Avebury
- Bottomore, 1976, *Elite and Society*, Penguin Books, New Zeland.
- Bradley, H, 1997, *Fractured Identity: Changing Patterns of Inequality*, Cambridge: Polity
- Brown, Michael, 1997, *Nationalism and Ethnic Conflict*, Cambridge, Library of Congress
- Calhoun, C, (ed), 1994, *Social Theory and Politic of Identity*, Oxford: Blackwell
- Castells, M., 2004, *The Power Of Identity*, USA: Blackwell
- Chilcote, Ronald., 1981, *Theories of Comparative Politics*, The Search for a Freedom; Westview Press Bolder, Colorado, hal 380.
- Cohen, R. and Kennedy, P., 2000, *Global Sociology*, New York: Palgrave
- And Rai, Shirin, 2000, *Global Social Movements*, The Athlone Press, London.
- Collin, F., 1997, *Social Reality*, London and New York: Routledge
- Deutsch, Karl, 1966, *Nationalism and Social Communication*, An

- Inquiry into The Foundation of Nationality*. Edisi II. Cambridge Mass: MIT Press.
- Dweyer, D, 1963, *Rase, Education and Work: The Statistics of Inequality*, Avebury, Aldershot.
- Eriksen, Tomas H., 1993, *Ethnicity & Nationalism*, Anthropological Perspectives, USA Pluto Press
- Erikson, Erik., 1989, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. Terjemahan Agus Cremers. Jakarta: Gramedia
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LkiS
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh
- Fakih, Mansour., 2000, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Field, Lowell and Higley, John., 1980, *Elitism*, London: Flinders University Press
- Fine, Alan (ed), 1995 , *A Second Chicago School? : the development of a postwar American*, Chicago: University Of Chicago Press.
- Feher, Ferenc, 1996, *Biopolitics on The Ruins of Communism*. Dalam *Biopolititc, The Politic of The Body, Race and Nature*. Agnes Heller.
- Feagen, Joe & Feagen, C, 1996, *Racial and Ethnic, Racial and Ethnic Relations*, New Jersey: Prentice Hall.
- Foucault, Michel, 1988, *The Care of The Self*, Harmondsworth. Allend Lane: Penguin Books.

- Fruer, L., 1969, *The Conflict of Generations*; London; Heinemann
- Freud, Sigmund., 1921, *Sekelumit Sejarah Psikoanalisis*, Terjemahan dan Pengantar K Bartens, Jakarta:Gramedia.
- Giddens, A, 1990, *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press
- , 1991, *Modernity and Self-Identity*, Cambridge: Polity Press
- Giddens, A., 2003, *The Constitution of Society Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Pasuruan: Pedati.
- Geertz, Clifford, 1967, *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politic New States, dalam Clifford Geertz, Old Societies and New States*. New York.
- Gellner, Ernest, 1983, *Thought and Change*. London: Weidenfeld and Nicholson.
- Goffman, Erving, 1986, *Stigma, Notes On The Management Of Spoiled Identity*, A Touchstone Book. New York.
- Grillo, R., 1998, *Pluralism and The Politics of Difference*, State, Culture, and Ethnicity in comparative perspective, New York: Clarendon Press. Oxford.
- Hall, S. and du Gay, P (ed), 1996, *Question of Social Identity*, London: Sage Publications.
- Haralambos and Holborn., 2000, *Sociology Themes and Perspectives* Collins Educations.
- Hammersley, M., 1995, *The Politics of Social Research*, London: SAGE Publications.
- Ham, Musahadi (ed), 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*,

- Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Centre
- Huntington, Samuel., 2002, *Political Order in Changing Societies*; Yale Univ. Press.
- , 2001, *Benturan Antar peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, Penerbit; Qalam.
- Heller, Agnes., 1995, *Biopolitics; The Politics of The Body, Race and Nature*, Brookfield, USA:Avebury.
- Hechter, M, *The Political Economy of Ethnicity Change*, dalam <http://www.eh.net/xiiiicongres/cd/paper/27/lordchi201.pdf>.
- Horowitz, Donald, 1985. *Ethnic Group in Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Jenkins, R, 1996, *Social Identity*, London:Routledge.
- Kaplan, David., 1997, *The Theory of Culture*, Princeton University Press, , hal 112.
- Kuper, Adam & Kuper, Jessica, 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Kellas, James, 1998, *The politics of Nationalism and Ethnicity*, London: Macmillan Press
- Keller, Susanne, 1984, *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta Rajawali Pers.
- Kenny, M, 2004, *The Politics of Identity*, Cambridge: Polity
- Keniston, K., 1965, *The Uncommitted: Alienated Youth in American Society*, New York: Harcourt, Brace and Word.
- Koentjaraningrat, 1984; *Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tidak Resmi dalam Miriam Budiarmo*

- (ed), *Aneka Pikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan
- Koenig, Mathias, 1999, *Democratic Governance in Multicultural Societies, Social Conditions for The Implementation of International Human Right through Multicultural Policies. Dalam Management of Social Transformation*. Edisi II Februari 1999
- Krupat, Arnold, 1992, *Ethnocriticism, Ethnography, History, Literature*. California: University of California Press.
- Kymlicka, W., 2003, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES
- Laswell, Harold D. (1984) dalam Miriam Budiardjo (ed), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lay, Cornelis (ed), 2001, *Nasionalisme Etnisitas, Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Liliweri, 2005, *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: Lkis
- Lipset (ed), 1967, *Student Politics*, New York: Basic Book
- Litlejhon, Stephen., 1978, *Theories of Human Communication*, Belmont: Wadsworth
- Lee, R., 1993, *Doing Research on Sensitive Topics*, London: SAGE Publications
- Leysds, 1940, *Memorie van Overgaven*. Majene.
- Lomba, A., 2003, *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, Jogjakarta: Benteng Budaya
- Maslow, A., 1962, *Toward a Psychology of Being*; New York: Van Nostrand

- Mahardika, Timur., 2000, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, Jakarta Lapera :Pustaka Utama.
- Mattulada, 1985, *Latoa*, Gajahmada University Press.
- Manger, Martin, 1994, *Elite and Masses*. California: Wadsworth Publishing Company Belmont.
- Miles, M and Huberman, M, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta UI Press
- Mulyana, Deddy., 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Rosdakarya
- , 2003, *Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berekomunikasi dengan orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT Rosdakarya
- Mulyadi, 2001, *Gerakan Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat*, Tesis, Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UNM.
- Mulgan, Geoff, 1995, *Politik dalam Sebuah Era Anti Politik*. Jakarta:YOI
- Moleong, J.Lexy., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosca, Gaetano, 1976, dalam Robert D. Putnam, *The Comparative Studi of Political Elites*, New Jersey : Prentice Hall
- Mckay, James, 1982, *Primordial and Mobilisations approaches to ethnic phenomena*, Ethnic and Rase Studies.
- Nasikun, 2003, *Reformasi dan Dilema Transisi Demokratik dalam masyarakat Majemuk*. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional “Meluruskan Jalan Reformasi”, Yogyakarta, 25-27 Sept 2003.

- Nash, Kate (ed), 2000, *Reading in Contemporary Political Sociology*, Oxford: Blackwell Publishers.
- Neuman, L., 1991, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Bacon.
- Oetomo, Dede., 1995, *Penelitian Kualitatif*, dalam Bagong (ed): Metode Penelitian Sosial Surabaya: Airlangga Press
- Parson., 1957, *The Distributions of Power in American Society*, World Politics, hal 140.
- Parry, Geraint., 1969, *Political Elite*, London: George Allen and Unwin
- Porta, and Diani, 2004, *Social Movements An Introduction*, Australia: Blackwell Publishing
- Rahman, A Sukirman., 1984, *Sejarah Daerah Mandar*, Makassar: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Makassar.
- Rahman, Darmawan, 1988, *Puang dan Daeng*, Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar, Disertasi. Pada Fak. Pascasarjana Unhas.
- Ritzer, G., 2000, *Sociological Theory*, Singapore: McGraw-Hill Higler Education
- , and Smart, B., 2001, *Hand Book Of Social Theory*, London: SAGE Publications Ltd.
- , and Goodman, D., 2004, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Predana Media.
- Reminick, Ronal., 1983, *Theory Of Ethnicity, An Anthropologist's Perspective*, London University Press Of America
- Rock, Paul., 1979, *The Making Of Symbolic Interactionism* London:

Macmillan Press

- Rose, Richard., 1971, *Governing Without Consensus: An Irish Perspective*, Boston : Beacon Press, hal 485.
- Ryaas, Rasyid, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Jakarta Yarsif Watampone
- , 1991, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta Grafitti Pers
- , 2000, *Otonomi Daerah Dan Kewenangannya, dalam Widyapraja edisi XXV*, Jakarta Media Informasi Masalah Pemerintahan
- Saharuddin, 1985, *Mengenal: Pitu Ba'bana Binanga (Mandar) dalam Lintasan Sejarah daerah di Sulawesi Selatan*, CV.Mallomo Karya: Makassar
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma, Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antar-Sukubangsa*, Jakarta: Yayasanm Pengembangan Ilmu Kepolisian
- Surbakti, Ramlan 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana
- , 1984, *Perbandingan Sistem Politik*, Surabaya Mecphiso Grafika
- , 1999, *Implikasi Undang-undang Politik Terhadap Politik Lokal, dalam Widyapraja edisi XXII*, Jakarta Media Informasi Masalah Pemerintahan
- , 1993, *Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai hubungan Negara dan Masyarakat*, dalam Jurnal Ilmu politik No 14

- Susanto, Budi (ed)., 2003, *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Riyadi., 2002, *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Averroes Press
- Schoolr, J.W., 1986, *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Jakarta Gramedia
- Smith, Anthony., 2002, *Nasionalisme, Teori Ideologi Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Smith, Theodore M 1984, dalam Mirriam Budiarjo (ed), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta Sinar Harapan
- Spradley, James P., 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Storry, M and Childs, (ed), 1997, *British Cultural Identities*, London: Routledge
- Strauss & Corbin., 1990, *Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*, Newbury Park: Sage publication
- Sparringa, Daniel T, 1997, *Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia* (Flinders University Australia: Phd Tesis)
- , 2000, *Kumpulan Bahan Mataajaran Metode Penelitian Kualitatif*, FISIP Unair.
- , 2003. *Analisis Wacana: Sebuah Pendekatan untuk Kajian Sosial Budaya*, Prasasti No. 45/tahun XII/ Mei 2002
- , 2007, *Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik*. Makalah

yang disampaikan pada kursus dan pelatihan singkat tentang HAM dan demokrasi, oleh CESASS-UGM dengan NCHR_ Oslo University, Norgwegia, Yogyakarta, 28 Nov-2 Des 2005.

Steier, F (ed)., 1991, *Research and Reflexivity*, London: SAGE Publications

Tagg, J., 1991, *Globalization, totalization and the discursive field*, in A. King (ed), *Culture, Globalization and the Word-System*, London: Macmilan

Tilly, C., 1978, "*From Mobilization to Revolutions*" Chicago: Addison-Wesley.

Turner, Bryan (ed)., 1998, *Social Theory*, USA: Blackwell Publishers Ltd.

Turner, Jonathan., 1978, *The Structure of Sociological Theory Revised Edition* The Dorsey Press

Toland, Judith D. Ed, 1993, *Ethnicity And The State*. New Jersey: Transaction.

Usman, Sunyoto, 1990, *Elite dalam Perspektif Sosiologi*, Yogyakarta: UGM

Varma, S.P,1985, *Teori Politik Modern*, Jakarta Rajawali Pers

Varshney, A., 2002, *Ethnic Conflict and Civic Life Hindus and Muslims in India*, USA: Yale University.

Yinger, 1981, *Towards a theory f assimilation and dissimilation*, Ethnic and Social Studies.

Agenda kerja Komite Aksi Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat dalam Laporrannya "Propinsi Sulawasi Barat Dan Keniscayaan Sejarah (studi kelayakan), 2000.

Daftar Jurnal

- Bahar, Safruddin, 1995, *Elite dan Etnik Serta Negara Indonesia*, Prisma No.4, April-Mei, Jakarta: LP3ES.
- Bainus, Arry., 2001, *Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, dalam jurnal Centre for Strategic And International Studies*, No. 3 Tahun XXX/2001, hal 317-325.
- Beissinger, Mark., 2003, *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*, Central Eurasian Studies Review, V. 2, No 1, hal 15
- Bakker, Freek., 1997, *Balinese Hinduism and the Indonesian State: Recent Developments*, dalam Journal of the Royal Institue, No. 153, hal 15-41.
- Benhabib, Seyla., 2001, *Political Theory and Political Membership in a Changing World*, dalam American Political Science Association, hal 3.
- Coolins, Alan., 1998, *The Ethnic Security Dilemma: Evidence from Malaysia*, dalam Contemporary Southeast Asia, Vol 20, No 3, hal 261.
- Connor, Walker, 1995, *Ethnonationalism: The Quest of for Understanding*, Princenton University Press.
- David, T., 2002, *Social Networks, Identification and Participation in an Environmental Movement; Low-medium Cost Activism within the British Columbia Wilderness Preservation Movement; The Canadian Review of Sociology and Antropology V 39 no 4*, hal 413-452
- Dudoignon, S. and Hisao, Komatsu (eds)., 2003, *Islam in Politics in*

- Russia and Central Asia (Early Eighteenth to Late Twentieth Centuries)*, Central Eurasian Studies Review, V.2, No.1, hal 13
- Dhillon, Rupinder., 2001, *Nation Building and State Formations in Multi-Ethnic Societies: Focus South Asia*, dalam Biis Journal, V 22. No.2, hal 209-244
- Eulau, Hilnz., 1993, *Technology and the Politics of Civility*, The Journal of Politics 35, hal 368, dan Jessop R.D, 1971; *Civility and Tradisionalism in English Political Culture*, British Journal of Political Science, 1 hal 5-9.
- Fitzgerald, Kattheleen., 2002, *Radical social movement organizations; a theoretical model*, dalam The sociological Quarterly, Vol 41 No 4 hal 573-592.
- George, Boyne., 1984, *Output disaggregation and quest for the impact of local politics*, Political Studies V 32, hal 451-458.
- Guanglei, Zhu., 1998, *Ten Trends of the differentiation of the social stratum in china at the turning point of the century*, dalam Nankai Academic Journal, V.1, hal 31.
- Hale, Henry, 2004; *Explaining Ethnicity*, dalam Comparative Political Studies. Vol 37 No 4 May 2004.
- Hoshour, Cathy A., 1997, *Resttlement and the Politicization of Ethnicity in Indonesia*, dalam Journal of the Royal Institute, No 153, hal 557-576.
- Ira Silver., 1998, *Buying an activist identity: reproducing class through social movement philanthropy*, Sociological Perspectives V 41 no 2, hal 303-321.
- Igram, Helen., 1993, *Social Construction of Target Populations Implications for Politics and Policy*, American Politic Science

Review 07.

- Kathleen., 2002, *Radical Social Movemen* dalam *The Sociological Quarterly* V 41 no 4 , hal 573
- Kasper, A.S., 1994, *A Feminist, Qualitatif Methodology: A Study of Women with Breast Cancer*, *Qualitatif Sociology*, 17:263-281
- Kebede and Shriver., 2000, *Social movement endurance: Colective identity and Rastafari*, *Sociological-Inquiry* V70 no3,hal313-337.
- Link, M., 1996, *Social Constuction and White Attitudes toward Equal Opportunity and Multiculturalism*, *The Journal of politics*, vol. 58, No. 1, hal 149-168.
- Lyons, Barry., 2001, *Religion, authority and Identity; intergenerational politics,ethnic resurgence, and respect in Chimborazo, Ecuador*, dalam *Latin American Review*, Vol 36 No 1 hal 7-48.
- Martin, Virginia, 2003., *Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Ninetennth Century*, *Central Eurasian Studies Review*, V.2, No.1 hal 24
- Marquez, Benjamin., 2001, *Choosing sides; constructing identities in Mexican-American social movement organizations*, dalam *Ethnic and Racial Studies*, Vol 24 No 2 hal 218-235
- Mashad, Dhurorudin., 2001, *Pemisahan Diri Vs Otonomi: Mencari Akar Kemelut Irian Jaya*, dalam *Jurnal Centre For Strategic And Internasional Studies*, No. 3 Tahun XXX/2001, hal 326-341.
- Maw, Mathias., 2001, *Politik Etnis Dan Kudeta Di Fiji*, dalam *Jurnal Centre For Strategic And Internasional Studies*, No. 3 Tahun XXX/2001, hal. 350-362.

- Merret, C., 2001, *Understanding Local Responses to Globalisation: The Production of Geographical Scale and Political Identity*, USA: National Identities, V 3, no 1.
- Morrel, Elizabeth., 2000, *Etnicity, Art, and Politics: Away from the Indonesian Centre*, Sojourn, Journal of Social Issue in Southeast Asia, Vol. 15 no 2, hal 255
- , 2002, *Desentralisasi atau Separatisme? Suatu Tinjauan dari Sulawesi Selatan*, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology, Th.XXVI, No. 68 Mei-Agustus 2002
- McCarthy, J.D., 1997, “*Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory.*” American Journal of Sociology 82: 121-124.
- Neil, Wieloch., 2002, *Collective Mobilizations and Identity from the Underground; The Deployment of “Oppositional Capital” in the Harm Reduction Movement*, dalam The Sociological Quarterly, Vol 43 No 1 hal 45-72.
- Oka, Natsuko, Chebotarev, Anrei and Masanov, N., 2003, *The Nationalities Question in Post-Soviet Kazakhstan*, Central Eurasian Studies Review, V.2, No.1, hal 2
- Owen, John., 1972, *The Emergence of Bangladesh*, Current History Journal, hal 206, dan Cynthia E, 1973; *Ethnic Conflict and Political Development*, Boston: Little,Brown, hal 109.
- Pulleyblank, Edwin., 2003, *Central Asia and Non-Chinese People of Ancient China*, Central Eurasian Studies Review, V 2, No.1, hal 18
- Ramses, A.M., 2000, *Format Baru Pemerintahan Daerah (Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000) Pemikiran Awal Perlunya Revisi*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan ed. 12

- Rudolf, 1986, *Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia*, Central Eurasian Studies Review, V 2, No.1, hal 19
- Rex, Jhon, *The Place og Languange in the Theory of Ethnicity and Nationalism and Migration*, dalam [http;www.Sollors al Theories of Etnicity.html](http://www.Sollors al Theories of Etnicity.html).
- Rotthchild, Donald, 1981, *Etnicity and Conflict Resolution*, World Politics, No. 2, Maret.
- Suddury, Julia., 2001, *(Re) constructing multiracial blackness: women's activism, difference and collective identity in Britain*, Ethnic and Racial Studies V 24 no , hal 29-49
- Suny, Ronald. And Martin., Terry (eds), 2003, *A Sate of Nations: Empire and Nation-Making in Age of Lenin and Stalin*, Central Eurasian Studies Review, V. 2 No 1, hal 16
- Schwedler., 2002, *The Social Movement Society*, dalam The American Political Science Review V 96 no 2, hal 446
- Shils, Edward., 1957, *Primordial, Personal, Sacred, and Civil Ties*, The British Journal of Sociology, 8, hal 130.
- Tirtosudarmo, Riwanto., 2002. Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dalam Jurnal Centre For Strategic And Internasional Studies, No. 3 Tahun XXX/2002, hal 340-351.
- Tsuyoshi, Kato., 1997, *The Localization of kuantan in Indonesia: From Minangkabau Frontier to a Riau Administrative Distriet*, dalam jurnal of the Royal Institute, No 153, hal 728-763.
- Vincenzo., 2002, "*Attac*": A Global Social Movement? dalam Social Justice V 29 no 1-2, hal 48.
- Wade, Peter., 2002, *Music and the Formation of Black Identity in*

- Colombia*, dalam NACLA Report on the Americas, Vol 3 No 6 hal 21-7.
- Weiss, Meredith., 1999, *What will become of Reformasi? Ethnicity and Changing Political Norms in Malaysia*, dalam Contemporary Southeast Asia, Vo.21, No.3, hal 424-449
- Wriggins, Hovey., 2003, *Xuanzang: A Buddhist Pilgrim on the Silk Road*, Central Eurasian Studies Review, V.2, No.1, hal 21
- Yalcin, Resul, 2003., *The Rebirth of Uzbekistan: Politics, Economy and Society in the Post-Soviet Era*, Central Eurasian Studies Review, V.2, No.1, hal 24
- Zhenglai, Deng. and Yuejin., 1992, *Constructing Civil Society in China*, dalam Chinese Social Science Journal, Nov.
- Nyoman, I Gusti., *Identitas Kultural dan Identitas Politik Nasional*, dalam www.geocities.com/apii-berlin/utama.
- Meyer, Thomas., *Politik Identitas Tantangan Terhadap Fundamentalis Modern*, dalam www.fes.or.id/art.002.pol.
- File://C:\ My Music\My Documents\Framing Marginality.htm, "2 Marginal Positions: Constructing Cultural Differences on Various 'Post'



Dr. Gustiana Kambo, S.IP, M.Si. adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia. Lahir di Polmas, 13 Agustus 1973. Lulus dan menerima gelar sarjana Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin tahun 1997, Magister Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu Politik) pada Universitas Airlangga tahun 2002 dan Doktor bidang Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu Politik) pada Universitas Airlangga tahun 2007. Pernah diberi amanah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik Unhas sebanyak dua periode (Pertama 2008-2012 dan Kedua 2012-2014), juga sebagai Wakil Dekan II FISIP Unhas Periode (Oktober 2014-Agustus 2016) dan Wakil Dekan I FISIP Unhas Periode (Agustus 2016-5 November 2018). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik (2021). Sebagai Tim Pemeriksa Daerah Sulawesi Selatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (TPD DKPP RI) periode (2020-2021 dan 2021-2022). Telah melahirkan banyak tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk Artikel, Jurnal dan Prosiding antara lain: *Komparatif Hubungan Sipil Militer di Indonsia (Tinjauan Historis Era Transisi)* (2003), *Eksistensi Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial* (2009), *Memahami Peran Partai Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Era Orde Baru* (2010), *Multikulturalisme dalam Membangun Kesatuan Bangsa* (2012), *Social Movement of Mandar People as a Struggle in Process of Forming West Sulawesi Province* (2014), *Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong Makassar* (2016), *Women and Politic Case Study On Women's Political Choise in Makassar city, Maros and Gowa Districs* (2018), *The Violation of Bereucracy at Local Election In Gowa South Sulawesi: Based on Weberian and Marxism Concept* (2020). Buku yang telah diterbitkan adalah *Politik Identitas: Agama, Etnisiotas, dan Ruang/Space dalam dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara* (2009), *The Institution Of Political Parties (Study Of the Golkar Party)* (2019).



Gedung UPT Unhas Press
Kampus Unhas Tamalanrea
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Email: unhaspress@gmail.com
Makassar

